



LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025



SPM 2025



**LAPORAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

SPM

TAHUN 2025

Sarilamak, Februari 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan **Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025** dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Penerapan SPM Tahun 2025 merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yang antara lain memuat latar belakang, kebijakan umum dan arah kebijakan, penerapan SPM, capaian SPM, serta program dan kegiatan pendukung pencapaian SPM di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran perangkat daerah, khususnya Perangkat Daerah pemangku urusan wajib pelayanan dasar, serta para pemangku kepentingan terkait yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi dalam rangka perbaikan kebijakan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, baik dari aspek penyajian maupun kelengkapan data. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap saran dan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan laporan ini.

Demikian laporan ini disampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Atas perhatian, bantuan, dan kerja sama semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Sarilamak, Februari 2026
BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFNI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Kebijakan Umum.....	3
1.4. Arah Kebijakan	5
BAB II PENERAPAN SPM	7
2.1 Urusan Pendidikan	7
2.2 Urusan Kesehatan	50
2.3 Urusan Pekerjaan Umum	109
2.4 Urusan Perumahan Rakyat	138
2.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	157
2.6. Urusan Sosial.....	218
BAB III PENCAPAIAN SPM	256
3.1 Urusan Pendidikan	258
3.2 Urusan Kesehatan	274
3.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	281
3.4 Urusan Perumahan Rakyat	286
3.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	290
3.6 Urusan Sosial.....	300
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	314
4.1. Urusan Pendidikan	314
4.2. Urusan Kesehatan	316
4.3. Urusan Pekerjaan Umum.....	317
4.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman	318

4.5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat-----	318
4.6.	Urusan Sosial-----	321
BAB V PENUTUP -----		322
5.1	Kesimpulan -----	322
5.2	Saran-----	325

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	4
Tabel 2.1	Form 1.A.2 Rekapitulasi Kebutuhan Data untuk Angka Partisipasi	10
Tabel 2.2	Form 1.A.4. Rekapitulasi Kebutuhan Data untuk Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga	11
Tabel 2.3	Form 1.A.7. Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar	11
Tabel 2.4	Form 1.A.9. Rekapitulasi Kebutuhan Data Pemerataan Kualitas Hasil Belajar: Literasi dan Numerasi.	12
Tabel 2.5	Form 1.A.11. Rekapitulasi Kebutuhan Data untuk Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12
Tabel 2.6	Form 1.A.12. Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Lingkungan Belajar	13
Tabel 2.7	Form 1.B.2. Penghitungan Kebutuhan Mutu Minimal Layanan Pendidikan	14
Tabel 2.8	Form 1.C.2. Rencana Pemenuhan SPM Pendidikan dan Kerangka Pendanaan	21
Tabel 2.9	Form 1.D.2 Realisasi Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan	35
Tabel 2.10	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	51
Tabel 2.11	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	53
Tabel 2.12	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	55
Tabel 2.13	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Kesehatan Balita	58
Tabel 2.14	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Pada Usia Pendidikan Dasar	61
Tabel 2.15	Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK Pelayanan Pada Usia Pendidikan Dasar	62
Tabel 2.16	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Pada Usia Produktif	65
Tabel 2.17	Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK Pada Pelayanan Usia Produktif	66
Tabel 2.18	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Pada Usia Lanjut	69
Tabel 2.19	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Penderita Hipertensi	71
Tabel 2.20	Standar Jumlah dan Kualitas Personil /SDMK Pada Penderita Hipertensi	72
Tabel 2.21	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Penderita Diabetes Melitus	73
Tabel 2.22	Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK Pelayanan Penderita Diabetes Melitus	74
Tabel 2.23	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	75
Tabel 2.24	Jenis Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan yang Dibutuhkan Pada Pelayanan Penderita Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	76
Tabel 2.25	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan /atau Jasa Pada Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	78
Tabel 2.26	Jenis Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan yang Dibutuhkan Pada Pelayanan Penderita Orang Terduga Tuberkulosis	79
Tabel 2.27	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency</i>	80

	<i>Virus = HIV</i>)	
Tabel 2.28	Form 2.A.2 Rekapitulasi Penduduk Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah	84
Tabel 2.29	Form 2.A.3 Rekapitulasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Daerah	85
Tabel 2.30	Form 2.B.4 Penghitungan Kebutuhan Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, Obat, Vaksin, dan Perlengkapan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan	90
Tabel 2.31	Form 2.B.5 Penghitungan Kebutuhan SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Dasar	95
Tabel 2.32	Form 2.C.3 Penyusunan Rencana Pemenuhan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	100
Tabel 2.33	Form 2.C.4 Penyusunan Rencana Pemenuhan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah	104
Tabel 2.34	Form 2.D.2 Capaian Pelaksanaan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	108
Tabel 2.35	Form 3.A.3 Kondisi SPAM Jaringan Perpipaan Kabupaten Lima Puluh Kota	110
Tabel 2.36	Form 3.A.4 Kondisi SPALD Kabupaten Lima Puluh Kota	111
Tabel 2.37	Form 3.B.3 Rumah Terlayani SPAM	120
Tabel 2.38	Form 3.B.4 Rumah Terlayani SPALD	126
Tabel 2.39	Form 3.C.3 Rencana Pemenuhan Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota	134
Tabel 2.40	Form 3.C.4 Rencana Pemenuhan Air Limbah Domestik Kabupaten Lima Puluh Kota	134
Tabel 2.41	Form 3.D.3 Capaian Layanan Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota	136
Tabel 2.42	Form 3.D.4 Capaian Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten Lima Puluh Kota	137
Tabel 2.43	Form 4.A.4 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	141
Tabel 2.44	Form 4.A.10 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Menimbulkan Bahaya Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	150
Tabel 2.45	Form 4.A.12 Identifikasi Perumahan di Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota (<10 Ha)	151
Tabel 2.46	Form 4.B.3 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	152
Tabel 2.47	Form 4.B.4 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Terkena Bencana	152
Tabel 2.48	Form 4.C.2 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Bencana	156
Tabel 2.49	Form 2.C.4 Penyusunan Rencana Pemenuhan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah	156
Tabel 2.50	Form 5.A.1 Perkiraan Rekapitulasi Jumlah Warga Negara yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter Di Lokasi Penegakan Perda dan Perkada	157
Tabel 2.51	Form 5.A.2 Perkiraan Rekapitulasi Daftar Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Serta Aset Warga Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter dari Lokasi Penegakan Perda dan Perkada	159
Tabel 2.52	Form 5.A.3 Rekapitulasi SOP Kegiatan Penegakan perda/Perkada	160
Tabel 2.53	Form 5.A.4 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana yang Dimiliki oleh OPD Satpol PP	160

Tabel 2.54	Form 5.A.5 Rekapitulasi Sumberdaya Manusia yang Dimiliki oleh OPD Satpol PP (Satpol PP, PPNS, Satlinmas)	162
Tabel 2.55	Form 5.A.6 Rekapitulasi Perda Perkada yang Akan Ditegakkan	162
Tabel 2.56	Form 5.A.7 Rekapitulasi Warga Negara yang Terdampak Akibat Penegakan Perda dan Perkada Dalam Radius 0-50 Meter	162
Tabel 2.57	Form 5.A.8 Rekapitulasi Aset yang Dimiliki Oleh Warga Negara yang Rusak Akibat Penegakan Perda dan Perkada Dalam Radius 0-50 Meter	162
Tabel 2.58	Form.5.B.1 Penghitungan Kebutuhan Penerima Layanan SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	163
Tabel 2.59	Form.5.B.2 Penghitungan Kebutuhan Penyusunan SOP Provinsi dan Kabupaten/Kota	163
Tabel 2.60	Form.5.B.3 Penghitungan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP, PPNS, Satlinmas	164
Tabel 2.61	Form.5.B.4 Penghitungan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota	164
Tabel 2.62	Form.5.B.5 Penghitungan Perkiraan Kebutuhan Pelayanan Dasar Warga Negara yang Terkena Dampak	164
Tabel 2.63	Form.5.C.2 Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum dan Kerangka Pendanaan ..	165
Tabel 2.64	Form.5.C.4 Rencana Pemenuhan Personil Satpol PP	165
Tabel 2.65	Form.5.C.6 Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana	166
Tabel 2.66	Form.5.D.2 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Warga Negara, Fasum, Fasos dan Aset Warga Negara	166
Tabel 2.67	Form.5.D.4 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Personil Satpol PP	166
Tabel 2.68	Form.5.D.6 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Sarana Prasarana	166
Tabel 2.69	Form 5.A.2 Daftar Kerawanan Tempat Tinggal Individu Warga Negara	168
Tabel 2.70	Form 5 a.4. Rekapitulasi Aparat dan Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana	170
Tabel 2.71	Form 5.B.1 Penghitungan Kebutuhan Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	172
Tabel 2.72	Form 5.A.1 Format Data Dukung Pelaksanaan SPM	177
Tabel 2.73	Form 5.A.2 Daftar Relawan Kabupaten/Kota	177
Tabel 2.74	Form 5.A.3 Daftar Warga Negara Yang Menjadi Korban Kebakaran Kabupaten/Kota	187
Tabel 2.75	Form 5.B.2 Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	212
Tabel 2.76	Form 5.B.3 Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi	214
Tabel 2.77	Form 5.B.5 Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran	215
Tabel 2.78	Form 5.C.1 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	217
Tabel 2.79	Form 5.D.1 Rekapitulasi Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar (Pemadaman dan Evakuasi)	217
Tabel 2.80	Form 6.A.1 Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis	219
Tabel 2.81	Form 6.A.3 Rekapitulasi Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Memerlukan Pelayanan Di Luar Panti dan/atau Lembaga (Berbasis Keluarga/Masyarakat/Komunitas)	240
Tabel 2.82	Form 6.A.5 Rekapitulasi Estimasi Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota	241
Tabel 2.83	Form 6.A.8 Data dan Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial	242
Tabel 2.84	Form 6.B.6 Penghitungan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	244
Tabel 2.85	Form 6.C.1 Rencana Pemenuhan Penyandang Disabilitas Terlantar	247

	Luar Panti	
Tabel 2.86	Form 6.C.2 Rencana Pemenuhan Penyandang Anak Terlantar Luar Panti	248
Tabel 2.87	Form 6.C.3 Rencana Pemenuhan Lansia Terlantar Luar Panti	250
Tabel 2.88	Form 6.C.4 Rencana Pemenuhan Gelandangan dan Pengemis Lansia Luar Panti	251
Tabel 2.89	Form 6.C.5 Rencana Pemenuhan Korban Bencana Alam dan Sosial Diwilayah Kabupaten	253
Tabel 2.90	Form 6.D.5 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng Diluar Panti	255
Tabel 3.1	Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan	259
Tabel 3.2	Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan	260
Tabel 3.3	Dukungan Personil SPM Urusan Pendidikan	268
Tabel 3.4	Hasil Capaian SPM Urusan Pendidikan	270
Tabel 3.5	Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan	274
Tabel 3.6	Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan	275
Tabel 3.7	Data Personil pada Puskesmas dan RSUD dr. Achmad Darwis	277
Tabel 3.8	Hasil Capaian SPM Urusan Kesehatan	278
Tabel 3.9	Permasalahan SPM Urusan Kesehatan	279
Tabel 3.10	Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	281
Tabel 3.11	Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum	282
Tabel 3.12	Personil Pendukung SPM Urusan Pekerjaan Umum	283
Tabel 3.13	Hasil Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	283
Tabel 3.14	Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	284
Tabel 3.15	Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	287
Tabel 3.16	Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat	288
Tabel 3.17	Dukungan Personil Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	288
Tabel 3.18	Hasil Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	288
Tabel 3.19	Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas	291
Tabel 3.20	Alokasi Anggaran SPM Urusan Trantibumlinmas	292
Tabel 3.21	Dukungan Personil pada Satpol PP dalam Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas	295
Tabel 3.22	Dukungan Personil BPBD dalam Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas	295
Tabel 3.23	Dukungan Personil Dinas Pemadam Kabakaran dalam Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas	295
Tabel 3.24	Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Trantibumlinmas	296
Tabel 3.25	Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas	297
Tabel 3.26	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	300
Tabel 3.27	Target SPM Urusan Sosial	301
Tabel 3.28	Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial	306
Tabel 3.29	Jumlah Pegawai Dinas Sosial tahun 2025 Menurut Golongan	307
Tabel 3.30	Jumlah Pegawai Dinas Sosial tahun 2025 Menurut Tingkat Pendidikan	307
Tabel 3.31	Hasil Capaian SPM Urusan Sosial	308
Tabel 3.32	Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Sosial	313
Tabel 4.1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan	314
Tabel 4.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan	316
Tabel 4.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum	317
Tabel 4.4	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Serta Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat	318
Tabel 4.5	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Alokasi Anggaran SPM Urusan Trantibumlinmas	319
Tabel 4.6	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial	321

Tabel 5.1	Capaian Terhadap Target SPM Urusan Pendidikan	322
Tabel 5.2	Capaian Terhadap Target SPM Urusan Kesehatan	323
Tabel 5.3	Capaian Terhadap Target SPM Urusan Pekerjaan Umum	324
Tabel 5.4	Capaian Terhadap Target SPM Urusan Perumahan Rakyat	324
Tabel 5.5	Capaian Terhadap Target SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	324
Tabel 5.6	Capaian Terhadap Target SPM Urusan Sosial	325

1.1 LATAR BELAKANG

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang bermutu, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks dinamika pembangunan dan tantangan globalisasi, upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan secara terarah dengan mengedepankan prinsip pemerataan dan keadilan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM sebagai tolok ukur minimal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak serta mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar. Dengan demikian, penerapan SPM pada hakikatnya merupakan jaminan atas terpenuhinya hak konstitusional masyarakat, bukan semata-mata sebagai ukuran kinerja Pemerintah Daerah atau kementerian/lembaga. Fokus utama SPM adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara secara adil dan merata.

SPM mencakup urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan bidang sosial.

1.2 DASAR HUKUM

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Suburusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Suburusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Suburusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2).

1.3 KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum Daerah pada dasarnya merupakan arah dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan untuk mendorong proses pembangunan daerah secara menyeluruh, selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kebijakan umum pembangunan daerah menjadi landasan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan, termasuk dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan tema pembangunan Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan

Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Didukung Sumber Daya Manusia, Pelayanan Publik, dan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas.” Tema pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1.1. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Pembinaan Agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama	Indek ABS-SBK	2.1
2.	Reformasi Birokrasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	-
		Persentase PAD terhadap Pendapatan	10.35
3.	Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8.35
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	13.64
		Usia Harapan Hidup	73.59
		Indeks Pembangunan Keluarga	6.3
		Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8.35
4.	Peningkatan Produktivitas tenaga kerja dan perlindungan Sosial	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	1.03
5.	Penguatan Koperasi dan Usaha Mikro	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	0.862
6.	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0.91
7.	Penguatan Kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	1.611
8.	Pengembangan kemandirian Nagari berbasis potensi	Persentase Desa Mandiri (%)	7.85

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah tersebut, kebijakan umum pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 pada prinsipnya mendukung pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 adalah:

“LIMA PULUH KOTA MADANI, MAJU, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN.”

Visi tersebut mengandung empat kata kunci, yaitu Madani, Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan. *Madani* menggambarkan kondisi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang beradab, dengan tegaknya nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan bermasyarakat, menjunjung tinggi etika, moralitas, toleransi, keharmonisan, demokrasi, serta kemajuan dan modernitas dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Maju* dimaknai sebagai perekonomian yang produktif dan berdaya saing melalui penguasaan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Berbudaya* mencerminkan masyarakat yang memahami dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya serta mampu mempertahankan kearifan lokal dalam seluruh aspek kehidupan sosial, adat, dan budaya. Sementara itu, *Berkelanjutan* bermakna terwujudnya pembangunan yang ramah lingkungan dengan pendekatan ekonomi sirkular, ketangguhan infrastruktur, serta ketahanan terhadap bencana dan krisis iklim.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui delapan misi pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. **Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.**

Transformasi sosial diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang bermutu di seluruh jenjang, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), serta peningkatan derajat kesehatan yang merata. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga mencakup penguatan disiplin, etos kerja, produktivitas tenaga kerja, dan kesetaraan gender.

2. **Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil, dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.**

Transformasi ekonomi dilakukan melalui peningkatan inovasi dan

pengembangan ekonomi produktif pada sektor industri agro, ekonomi biru, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta penguatan kewirausahaan daerah pada industri kecil dan menengah, dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau, transformasi digital, serta integrasi ekonomi domestik dan global.

3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif.

Transformasi tata kelola diarahkan untuk mempercepat dan pemeratakan pembangunan daerah, mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

4. Memantapkan keamanan daerah yang tangguh, masyarakat yang damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah.

Misi ini bertujuan mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, taat hukum, transparan, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dengan dukungan partisipasi aktif masyarakat.

5. Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” serta pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan.

Ketahanan sosial budaya berlandaskan nilai *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)* sebagai fondasi kehidupan masyarakat, disertai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui perlindungan lingkungan, konservasi alam, dan rehabilitasi kawasan hutan.

6. Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan.

Pembangunan wilayah dilaksanakan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Pembangunan infrastruktur diarahkan sebagai pilar pendukung utama transformasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah.

Kesinambungan pembangunan diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan yang efektif, penerapan manajemen risiko, serta pembiayaan pembangunan yang terintegrasi.

BAB II

PENERAPAN SPM

2.1. URUSAN PENDIDIKAN

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan pada tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

A. Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data SPM urusan pendidikan menggunakan data Dapodik, berupa data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pengumpulan data mencakup jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Kemudian data yang juga perlu dikumpulkan pada tahapan pertama ini adalah terkait dengan jumlah barang dan atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Langkah awal penerapan SPM adalah pengumpulan data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan, meliputi:

1. Kebutuhan data untuk angka partisipasi
2. Kebutuhan data untuk jumlah dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan
3. Kebutuhan data kualitas hasil belajar
4. Kebutuhan data pemerataan kualitas hasil belajar literasi dan numerasi
5. Kebutuhan data untuk layanan pendidikan anak usia dini
6. Kebutuhan data kualitas lingkungan belajar

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Penghitungan kebutuhan untuk pembiayaan SPM urusan pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Rinciannya sebagai berikut:

1. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan perhitungan terhadap:
 - a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa
 - b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Pendidikan
 - c. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
 - d. Mekanisme Pelayanan
2. Pelayanan Pendidikan Dasar dengan perhitungan terhadap:
 - a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
 - b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Pendidikan untuk Pendidik Sekolah Dasar, Pendidik Sekolah Menengah Pertama, Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama serta Siswa Sekolah Dasar dan Menengah Pertama.
 - c. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
 - d. Mekanisme Pelayanan
3. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan dengan perhitungan terhadap:
 - a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa
 - b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Pendidikan untuk Pendidik Kesetaraan dan Peserta Didik Kesetaraan.
 - c. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
 - d. Mekanisme Pelayanan

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan ke dalam rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen renja Perangkat Daerah dilakukan pada saat perumusan meliputi: hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan

dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan renja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Bappeda memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, renstra Perangkat Daerah, RKPD dan renja Perangkat Daerah. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, renstra Perangkat Daerah, RKPD dan renja Perangkat Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar tercantum dalam APBD. Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan, didasarkan pada rencana pemenuhan pelayanan dasar.

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, berikut Form 4 (empat) Tahapan Penerapan SPM Urusan Pendidikan.

A. Pengumpulan Data

Langkah awal penerapan SPM adalah Pengumpulan Data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan, meliputi:

1. Kebutuhan data untuk angka partisipasi

Tabel 2.1. Form1.A.2 Rekapitulasi Kebutuhan Data untuk Angka Partisipasi

No	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/RA/ SEDERAJAT		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/PAKET A		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS/PAKET B.		ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH ANAK USIA 7 SAMPAI DENGAN 15 TAHUN		PERBANDINGAN APS ANAK USIA 5- 6 TAHUN KUINTIL TERENDAH DENGAN APS ANAK USIA 5-6 TAHUN KUINTIL TERTINGGI	
		JUMLAH PESERTA DIDIK USIA 5-6 TAHUN YANG MENGIKUTI PAUD FORMAL DAN NON FORMAL	JUMLAH POPULASI ANAK USIA 5-6 TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SD/MI/PAKET A	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SMP/MTS/PAKET B	JUMLAH ANAK USIA 13 (TIGA BELAS) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN YANG BERSEKOLAH	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	PROPORSI ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI PADA PAUD FORMAL DAN NONFORMAL DARI KUINTIL TERENDAH	PROPORSI ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI PADA PAUD FORMAL DAN NONFORMAL DARI KUINTIL TERTINGGI PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/BA/K B/SPS/TPA)	7.549	12.282							32,59	32,59
2	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)			37.531	38.505	20.365	21.480	52.310	59.985		

2. Kebutuhan data untuk jumlah dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan

Tabel 2.2. Form 1.A.4. Rekapitulasi Kebutuhan Data untuk Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KECUKUPAN FORMASI GURU ASN UNTUK SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMDA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN INDEKS DISTRIBUSI GURU (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN)		PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS/PENILIK (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN).		INDEKS DISTRIBUSI GURU (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN)	
		JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIAJUKAN	JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIBUTUHKAN BERDASARKAN DATA DARI KEMENDIKBUDRISTEK	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI KAB/KOTA YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI KAB/KOTA TERSEBUT	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N-1
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini	-	-	38,79	38,79	0,5	0,84
2	Pendidikan Dasar (SD/SMP/Kesetaraan)	0,88	0,88	19,6	19,6	0,64	0,39

3. Kebutuhan data kualitas hasil belajar

Tabel 2.3. Form 1.A.7. Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEMAMPUAN LITERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	-1,89	68,30	2,94	60,74

4. Kebutuhan data pemerataan kualitas hasil belajar: literasi dan numerasi

Tabel 2.4. Form 1.A.9. Rekapitulasi Kebutuhan Data Pemerataan Kualitas Hasil Belajar: Literasi dan Numerasi.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK LAKI LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK LAKI LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	5,55	5,55	0,35	0,35	2,26	2,26	0,40	0,40

5. Kebutuhan data untuk layanan pendidikan anak usia dini

Tabel 2.5. Form 1.A.11. Rekapitulasi Kebutuhan Data untuk Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN PROPORSI JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN MINIMAL AKREDITASI B		PERTUMBUHAN PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV		RASIO PENGAWAS SEKOLAH UNTUK PAUD	
		JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN AKREDITASI MINIMAL B	JUMLAH KESELURUHAN SATUAN PAUD YANG TELAH DIAKREDITASI DI KAB/KOTA TERSEBUT	PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N	PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N-1	JUMLAH PENGAWAS SEKOLAH UNTUK TK DITAMBAH JUMLAH PENILIK PAUD NONFORMAL	JUMLAH SATUAN PAUD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini	192	264	73,15	82,37	19	303

6. Kebutuhan data kualitas lingkungan belajar

Tabel 2.6. Form 1.A.12. Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Lingkungan Belajar.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDEKS IKLIM KEAMANAN DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/Kesetaraan)		INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA- RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	67,42	68,08	59,23	60,69

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Langkah kedua dalam penerapan SPM adalah Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar. Berikut hasil Penghitungan Kebutuhan Mutu Layanan Pendidikan Tahun 2025:

Tabel 2.7. Form 1.B.2. Penghitungan Kebutuhan Mutu Minimal Layanan Pendidikan.

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12			
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	4	0	4	27.412.500	109.650.000	
				2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta Didik						
				3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang						
				4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	90	0	90	1.453.433	130.809.000	
				5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	90	0	90	615.911	55.432.000	
				6	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	6	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	2	0	2	4.945.000	9.890.000	
				7	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	7	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang		0	0			
				8	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	0	1	21.724.500	21.724.500	
				9	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	9	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1	0	1	10.000.000	10.000.000	
				10	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas		0	0			
				11	Pembangunan Ruang Kelas Baru	11	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	4	0	4	150.450.000	601.800.000	
				12	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	12	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Orang						

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12		
					Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan								
				13	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	13	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit					
				14	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	14	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1	0	1	121.228.500	121.228.500
				15	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					
				16	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit					
				17	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	17	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	2	0	2	794.232.800	1.588.465.600
				18	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	6	0	6	77.500.000	465.000.000
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	19	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	19	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit					
				20	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	39	0	39	91.542.769	3.570.168.000
				21	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	21	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					
				22	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	22	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	373	0	373	902.155	336.504.000
				23	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	23	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1	0	1	221.706.600	221.706.600
				24	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	24	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	450	0	450	1.685.745	758.585.200
				25	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	25	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	373	0	373	1.056.158	393.947.000
				26	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	26	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk	Orang	373	0	373	147.185	54.900.000

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12		
					Pendidikan								
				27	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	27	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	2	0	2	5.000.000	10.000.000
				28	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	28	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang					
				29	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	29	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	0	1	263.540.000	263.540.000
				30	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	30	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1	0	1	10.000.000	10.000.000
				31	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	31	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas		0	0		
				32	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	32	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	3	0	3	18.330.000	54.990.000
				33	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku					
				34	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	34	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1	0	1	98.400.000	98.400.000
				35	Pembangunan Ruang Kelas Baru	35	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	8	0	8	291.455.425	2.331.643.400
				36	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					
				37	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	37	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang					
				38	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	38	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan					
				39	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	35	0	35	162.155.857	5.675.455.000

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12		
				40	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	40	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik	100	0	100	123.550	12.355.000
				41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	25	0	25	82.737.640	2.068.441.000
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	42	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	42	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit					
				43	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	43	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	14	0	14	58.106.250	813.487.500
				44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	14	0	14	102.135.964	1.429.903.500
				45	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	7	0	7	124.131.971	868.923.800
				46	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	46	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					
				47	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	47	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik	500	0	500	120.000	60.000.000
				48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	100	0	100	4.533.169	453.316.900
				49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	10	0	10	2.523.700	25.237.000
				50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	250	0	250	930.892	232.723.000
				51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	61	0	61	3.284.843	200.375.400
			52	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk	52	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	Orang	51	0	51	705.520	35.981.500	

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12
				Pendidikan	untuk Pendidikan						
				53 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	53 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	2	0	2	5.000.000	10.000.000
				54 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	54 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang					
				55 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	55 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	0	1	179.921.000	179.921.000
				56 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	56 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen					
				57 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	57 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas					
				58 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	58 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	3	0	3	12.000.000	36.000.000
				59 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	59 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan					
				60 Pembangunan Ruang Kelas Baru	60 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang					
				61 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	61 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang					
				62 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	62 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku					
				63 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	63 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket					
				64 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	64 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Paket					
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	65 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	65 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta Didik	900	0	900	17.000	15.300.000
				66 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	66 Penyediaan Pendidik dan Tenaga	Orang					

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12		
					bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
				67	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	67	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	38	0	38	4.351.663	165.363.200
				68	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	68	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital					
				69	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	69	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang					
				70	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	70	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	0	1	41.850.000	41.850.000
				71	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	71	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1	0	1	10.000.000	10.000.000
				72	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	72	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas					
				73	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	73	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan					
				74	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	74	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket					
				75	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	75	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku					
				76	Pembangunan Ruang Kelas Baru	76	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang					
				77	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	77	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					
				78	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	78	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	120	0	120	935.000	112.200.000
				79	Pembangunan Unit	79	Pembangunan Unit	Unit					

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12		
					Sekolah Baru (USB)		Sekolah Baru (USB)						
				80	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	80	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan					
				81	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	81	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					
				82	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	82	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					
				83	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	83	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Paket	2	0	2	120.750.000	241.500.000
				84	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	84	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang					
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	85	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	85	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	1	0	1	29.782.000	29.782.000
				86	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	86	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan					

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Langkah ketiga dalam penerapan SPM adalah Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar. Berikut hasil Rencana Pemenuhan SPM Pendidikan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025:

Tabel 2.8. Form 1.C.2. Rencana Pemenuhan SPM Pendidikan dan Kerangka Pendanaan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target kinerja program pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kerangka pendanaan															
										2025			2026			2027			2028			2029			
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN - REGULER - PAUD	4	27.412.500	109.650.000	4	27.427.500	109.710.000	4	755.823.173	3.023.292.691	4	958.113.405	3.832.453.620	4	1.339.385.262	5.357.541.046	
				2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta Didik	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN									500	798.575	399.287.529	500	1.038.575	519.287.529	500	
				3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN									3	106.848.064	320.544.193	3	140.181.398	420.544.193	3	
				4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	90	1.453.433	130.809.000	90	1.637.757	147.398.138	90	1.741.841	156.765.656	90	10.081.640	907.347.612	90	12.429.050	1.118.614.538	
				5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	90	615.911	55.432.000	90	546.556	49.190.000	298	233.704	69.643.856	299	2.517.016	752.587.673	300	2.962.241	888.672.354	300

No.	Program	Outcome	Kegiatan	Sub kegiatan	Keluaran (output)	Satuan	Volume sasaran pemenuhan	Alokasi anggaran (2024)	Sumber dana	Target kinerja program pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kerangka pendanaan															Kondisi Akhir	
										2025			2026			2027			2028			2029				
										r	g	S	R	D	S	R	D	S	R	D	S	R	D	S		R
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
				6	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	6			DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	2	4.945.000	9.890.000	2	19.012.500	38.025.000	2	44.664.135	89.328.270	2	213.581.483	427.162.965	2	235.258.856	470.517.712	2	
				7	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	7																				
				8	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8			DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	1	21.724.500	21.724.500	1	44.662.000	44.662.000	1	54.160.924	54.160.924	1	574.928.568	574.928.568	1	760.143.957	760.143.957	1	
				9	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	9			DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	1	10.000.000	10.000.000	1	55.125.000	55.125.000	1	67.905.489	67.905.489	1	339.336.288	339.336.288	1	567.942.224	567.942.224	1	
				10	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10																				
				11	Pembangunan Ruang Kelas Baru	11	1	147.127.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PAUD	4	150.450.000	601.800.000	4	148.437.500	593.750.000	4	1.519.813.680	6.079.254.721	4	1.667.508.289	6.670.033.154	4	1.836.751.427	7.347.005.707	4	
				12	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	12																				

No.	Program	Outcome	Kegiatan	Sub kegiatan	Keluaran (output)	Satuan	Volume sasaran pemenuhan	Alokasi anggaran (2024)	Sumber dana	Target kinerja program pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kerangka pendanaan																	
										2025			2026			2027			2028		2029						
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
				13	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	13	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit																			
				14	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	14	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.500	64.826.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	1	121.228.500	121.228.500	1	109.590.000	109.590.000	50	2.602.479	130.123.947	50	13.492.196	674.609.775	50	16.581.692	829.084.597	
				15	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit																			
				16	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit																			
				17	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	17	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	4	472.510.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN - REGULER - PAUD	2	794.232.800	1.588.465.600	2	757.005.000	1.514.010.000	2	1.394.172.684	2.788.345.367	2	1.629.360.656	3.258.721.312	2	2.184.868.541	4.369.737.081	
				18	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	4	194.321.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	6	77.500.000	465.000.000	6	32.506.667	195.040.000	6	243.436.583	1.460.619.497	6	275.436.583	1.652.619.497	6	334.909.906	2.009.459.438	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	19	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	19	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit																			
				20	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit			DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	39	91.542.760	3.570.168.000	39	87.446.154	3.410.400.000	39	321.884.953	12.553.513.165	39	335.987.517	13.103.513.165	39	357.884.928	13.957.484.901	
				21	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	21	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target kinerja program pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kerangka pendanaan																
										2025			2026			2027			2028			2029				
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
				22	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	22	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	373	902.155	336.504.000	373	1.131.019.000	421.870.000	377	1.119.019.000	421.870.000	378	3.431.033	1.296.930.615	379	6.455.000	2.446.445.104	379
				23	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	23	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	90	135.764.681	1	221.706.600	221.706.600	1	246.131.600	246.131.600	13	19.164.549	249.139.140	13	55.009.780	715.127.142	13	64.295.871	835.846.322	13
				24	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	24	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1.050	569.513.657	450	1.685.745	758.585.200	450	1.558.381	701.271.281	450	1.561.168	702.525.590	450	1.815.240	816.857.940	450	2.183.347	982.506.252	450
				25	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	25	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	373	1.056.158	393.947.000	373	1.217.091	453.975.000	377	1.232.907	464.805.868	378	6.677.240	2.523.996.714	379	7.335.538	2.780.168.829	379
				26	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	26	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	373	147.185	54.900.000	373	134.048	50.000.000	377	1.623.176	611.937.239	378	2.015.045	761.687.002	379	2.160.146	818.695.217	379
				27	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	27	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	2	5.000.000	10.000.000	2	15.750.000	31.500.000	2	286.260.242	572.520.483	2	326.931.406	653.862.811	2	394.888.994	789.777.987	2
				28	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	28	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	377	1.464.025	551.937.239	378	1.750.495	661.687.002	377	1.750.495	661.687.002	378	1.750.495	661.687.002	379	1.896.293	718.695.217	379

No.	Program	Outcome	Kegiatan	Sub kegiatan	Keluaran (output)	Satuan	sasaran pemenuhan	Alokasi anggaran (2024)	Sumber dana	Target kinerja program pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kerangka pendanaan																				
										2025			2026			2027			2028			2029								
										r	g	S	R	D	P	r	g	S	R	D	P	r	g	S	R	D	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
				29	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	29	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	360	717.227.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	1	1	263.540.000	263.540.000	1	1	341.305.000	341.305.000	1	1	342.412.664	342.412.664	1.280.991.783	1.280.991.783	1	1	2.416.399.474	2.416.399.474	
				30	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	30	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen			DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	1	10.000.000	10.000.000	1	1	50.000.000	50.000.000	1	1	67.788.017	67.788.017	407.788.017	407.788.017	1	1	615.140.340	615.140.340		
				31	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	31	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas			DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN								2	2	175.272.097	350.544.193	2	2	244.772.097	489.544.193				
				32	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	32	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan			DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	3	18.330.000	54.990.000	3	3	16.666.667	50.000.000	3	3	22.601.811	67.805.432	3	3	102.596.006	307.788.017	3	3	138.380.113	415.140.340
				33	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku																						
				34	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	34	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket			DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	1	98.400.000	98.400.000	1	1	7.500.000	7.500.000	1	1	107.788.017	107.788.017	827.788.017	827.788.017	1	1	989.778.801	989.778.801		
				35	Pembangunan Ruang Kelas Baru	35	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	7	356.540.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	8	291.455.425	2.331.643.400	8	8	303.333.750	2.426.670.000	8	8	1.484.705.721	11.877.645.770	8	8	1.614.059.073	12.912.472.583	8	8	1.639.108.720	13.112.869.759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target kinerja program pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kerangka pendanaan																		
										2025			2026			2027			2028			2029						
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
				36	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit			DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN - REGULER - SD									10	1.033.967.498	10.339.674.977	10	1.122.504.268	11.225.042.684	10	1.205.417.479	12.054.174.786		
				37	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang																						
				38	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	360	5.250.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN						377	2.098.554	791.154803	378	2.637.956	997.147556	379	3.324.996	1.260.173.570	379				
				39	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	15	10.945.533.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN - REGULER - SD	35	162.155.857	5.675.455.000	35	157.176.000	5.501.160.000	35	474.606.647	16.611.232.655	35	489.688.312	17.139.090.916	35	504.172.514	17.646.037.974	35			
				40	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik			DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	100	123.550	12.355.000	100	390.000	39.000.000	500	606.972	303.485777	500	1.746.972	873.485777	500	1.994.972	997.485777	500			
				41	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Paket	3	4.934.637.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN - REGULER - SD	25	82.737.640	2.068.441.000	25	76.647.640	1.916.191.000	25	183.311.897	4.582.797.430	25	250.830.046	6.270.751.162	25	309.560.709	7.739.017.727	25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target kinerja program pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kerangka pendanaan															26			
										2025			2026			2027			2028			2029						
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	42	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	42	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit																				
				43	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	43	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit				14	58.106.250	813.487.500	14	54.685.714	765.600.000	14	488.484.501	6.838.783.014	14	514.325.099	7.200.513.381	14	590.961.512	8.273.461.170	14	
				44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SekolahRehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SekolahRehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	20	2.543.175.405		14	102.135.964	1.429.903.500	14	102.225.000	1.431.150.000	20	221.647.062	4.432.941.246	20	247.846.435	4.956.928.705	20	259.433.742	5.188.674.843	20	
				45	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit			7	124.131.971	868.923.800	7	124.285.714	870.000.000	7	1.286.815.424	9.007.707.971	7	1.396.193.406	9.773.353.842	7	1.509.328.112	10.565.296.784	7		
				46	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	46	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit																				
				47	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	47	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik				500	120.000	60.000.000	500	15.000	7.500.000	100	2.023.727	202.372.741	100	6.461.682	646.168.202	100	8.377.271	837.727.105	100	
				48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik				100	4.533.160	453.316.900	100	3.832.600	383.260.000	63	6.978.638	439.654.203	64	21.238.386	1.359.256.708	65	43.825.442	2.848.653.734	65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target kinerja program pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kerangka pendanaan														
										2025			2026			2027			2028			2029		
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	60	10.440.008	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	10	2.523.700	25.237.000	10	2.803.700	28.037.000	10	3.505.419	35.054.193	10	52.054.419	520.544.193	10	67.054.419	670.544.193
				50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	220	402.177.299	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	250	930.892	232.723.000	250	984.892	246.223.000	250	1.037.491	259.372.741	250	3.262.759	815.689.778	250	3.747.152	936.787.998
				51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan			DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	61	3.284.843	200.375.400	61	3.683.279	224.680.000	63	4.120.244	259.575.400	64	15.998.371	1.023.895.769	65	19.255.949	1.251.636.663
				52	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang			DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	51	705.520	35.981.500	51	588.235	30.000.000	63	11.224.799	707.162.343	64	11.515.816	737.012.201	65	13.403.340	871.217.130
				53	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital			DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	2	5.000.000	10.000.000	2	17.500.000	35.000.000	2	24.178.034	48.356.067	2	196.590.451	393.180.901	2	216.543.326	433.086.652
				54	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang			DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	63	9.476.610	597.026.446	64	10.083.237	645.327.186	65	11.905.598	773.863.901	65	11.905.598	773.863.901	65	11.905.598	773.863.901

No.	Program	Outcome	Kegiatan	Sub kegiatan	Keluaran (output)	Satuan	sasaran pemenuhan	Alokasi anggaran (2024)	Sumber dana	Target kinerja program pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kerangka pendanaan																							
										2025			2026			2027			2028			2029											
										r	g	S	R	D	S	R	D	S	R	D	S	R	D	S	R	D	S						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Akhir																		
				55	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	55	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	59	269.699.100	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	1		179.921.000	179.921.000	1		225.000.000	225.000.000	1		235.124.447	235.124.447	1		1.085.046.076	1.085.046.076	1		2.018.131.530	2.018.131.530	1	
				56	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	56	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen			DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN									1		497.026.446	497.026.446	1		545.327.187	545.327.187	1					
				57	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	57	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas			DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN									2		140.272.097	280.544.193	2		150.272.097	300.544.193	2					
				58	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	58	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan			DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	3		12.000.000	36.000.000	3				3		14.947.074	44.841.221	3		103.354.070	310.062.211	3		154.947.074	464.841.221	3	
				59	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	59	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	59	8.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN					61		603.508	36.814.000	63		13.769.920	867.504.959	64		15.429.765	987.504.959	65		18.884.692	1.227.504.959	65	
				60	Pembangunan Ruang Kelas Baru	60	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	5	885.705.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN - REGULER - SMP						5			5		1.220.088.236	6.100.441.180	5		1.358.088.236	6.790.441.180	5		1.440.088.236	7.200.441.180	5	

No.	Program	Outcome	Kegiatan	Sub kegiatan	Keluaran (output)	Satuan	sasaran pemenuhan	Alokasi anggaran (2024)	Sumber dana	Target kinerja program pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kerangka pendanaan																	
										2025			2026			2027			2028			2029					
										r	g	S	r	g	S	r	g	S	r	g	S	r	g	S			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																		
				61	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	61	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang																			
				62	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	62	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku																			
				63	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	63	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket							3	19.262.672	57.788.017		3	285.929.339	857.788.017		3	329.262.672	987.788.017		3
				64	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	64	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	5	355.595.000				25	193.215.598	4.830.389.938		25	204.430.835	5.110.770.865		25	252.598.024	6.314.950.610		25	
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	65	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Ke setaraan	65	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kes etaraan	Peserta Didik	1.550			900	17.000	15.300.000	900	16.821	15.138.600	500	43.400	21.700.159	500	1.103.400	551.700.159	500	1.403.400	701.700.159	500
				66	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	66	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal/Kes etaraan	Orang											13	35.515.397	461.700.159	13	37.053.858	481.700.159	13		

No.	Program	Outcome	Kegiatan	Sub kegiatan	Keluaran (output)	Satuan	sasaran pemenuhan	Alokasi anggaran (2024)	Sumber dana	Target kinerja program pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kerangka pendanaan															
										2025			2026			2027			2028			2029			
										r	g	s	r	g	s	r	g	s	r	g	s	r	g	s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				67	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	67	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	32	126.147.100	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN														
				68	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	68	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital			DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN														
				69	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	69	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang																	
				70	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	70	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen			DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN														
				71	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	71	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen			DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN														
				72	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	72	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas																	
				73	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	73	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan			DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target kinerja program pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kerangka pendanaan															Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
										2025			2026			2027			2028			2029					
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
				74	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	74	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN										5	129.270.160	646.350.799	5	174.109.595	870.547.975	5	
				75	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	75	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku																			
				76	Pembangunan Ruang Kelas Baru	76	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN - REGULER - Kesetaraan					2	2.440.621.664	4.881.243.328	2	2	2.862.287.228	5.724.574.455	2	3.508.853.456	7.017.706.912	2		
				77	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	77	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN - REGULER - Kesetaraan					3	898.864.949	2.696.594.848	3	3	1.032.198.283	3.096.594.848	3	1.398.864.949	4.196.594.848	3		
				78	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	78	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	32	168.361.600	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	120	935.000	112.200.000	120	778.875	93.465.000	120	1.324.222	158.906.695	120	6.461.235	775.348.140	120	8.024.599	962.951.837	120
				79	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	79	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit																			

No.	Program	Outcome	Kegiatan	Sub kegiatan	Keluaran (output)	Satuan	Target sasaran pemenuhan	Alokasi anggaran (2024)	Sumber dana	Target kinerja program pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kerangka pendanaan																								
										2025					2026					2027					2028					2029				
										r	g	s	R	D	r	g	s	R	D	r	g	s	R	D	r	g	s	R	D	r	g	s	R	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
				80	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	80	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN					38	1.657.968	63.002.800	39	21.052.359	821.042.002	40	22.195.753	887.830.137	41	22.417.212	919.105.676								
				81	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	81	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit																										
				82	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	82	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN - REGULER - Kesetaraan										3	483.035.225	1.449.105.676	3	583.035.225	1.749.105.676									
				83	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	83	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Paket	1	197.489.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	2	120.750.000	241.500.000	2	114.100.000	228.200.000	2	1.402.372.255	2.804.744.510	2	1.782.372.255	3.564.744.510	2	2.325.550.256	4.651.100.511								
				84	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	84	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	4	79.533.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN - REGULER - Kesetaraan						2	2.398.297.424	4.796.594.848	2	2.566.297.425	5.132.594.849	2	2.900.657.946	5.801.315.891									

No.	Program	Outcome	Kegiatan	Sub kegiatan	Keluaran (output)	Satuan	Sasaran pemenuhan	Alokasi anggaran (2024)	Sumber dana	Target kinerja program pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kerangka pendanaan															Kondisi Akhir		
										2025			2026			2027			2028			2029					
										r	g	S	R	D	P	r	g	S	R	D	P	r	g	S		R	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	85	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	85	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	560	11.600.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	1	29.782.000	29.782.000	1	29.782.000	29.782.000	1	52.774.957	52.774.957	1	127.095.534	127.095.534	1	212.717.951	212.717.951	1
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	86	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	86	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan			DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	1				22.617.840	22.617.840	1	54.469.514	54.469.514	1	91.164.836	91.164.836	1			1

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Langkah keempat dalam penerapan SPM adalah Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar. Berikut Realisasi Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Tahun 2025:

Tabel 2.9. Form 1.D.2 Realisasi Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan.

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	4	109.650.000	4	102.920.879	100,00%	93,86%	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- PAUD; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	adanya perjalanan dinas yang tidak terlaksana	Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain melakukan perencanaan kegiatan perjalanan dinas secara lebih matang dan terjadwal sejak awal tahun anggaran,
2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta Didik								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	90	130.809.000	90	124.803.339	100,00%	95,41%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Adanya perjalanan dinas yang tidak terlaksana	Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain melakukan perencanaan kegiatan perjalanan dinas secara lebih matang dan terjadwal sejak awal tahun anggaran, termasuk memastikan kesiapan narasumber, peserta, dan lokasi kegiatan. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait agar potensi pembatalan kegiatan dapat diminimalkan. Apabila terdapat indikasi kegiatan tidak dapat

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											dilaksanakan, maka anggaran perjalanan dinas dapat segera dialihkan untuk mendukung kegiatan pengembangan karir lainnya yang masih relevan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penyerapan anggaran dapat lebih optimal dan tujuan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD tetap tercapai.
5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	90	55.432.000	90	52.778.939	100,00%	95,21%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		
6	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	2	9.890.000	2	9.785.000	100,00%	98,94%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		
7	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
8	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	21.724.500	1	21.102.705	100,00%	97,14%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		
9	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1	10.000.000	1	9.765.000	100,00%	97,65%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		
10	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	4	601.800.000	4	381.576.515	100,00%	63,41%	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Salah satu pembangunan tidak terlaksana karena tidak cukup waktu.	Pelaksanaan pembangunan ruang kelas dipindahkan ke tahun anggaran 2026.
12	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
13	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
14	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1	121.228.500	1	116.184.934	100,00%	95,84%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		
15	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
17	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	2	1.588.465.600	2	1.567.020.140	100,00%	98,65%	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- PAUD; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	adanya perjalanan dinas yang tidak terlaksana	Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain melakukan perencanaan kegiatan perjalanan dinas secara lebih matang dan terjadwal sejak awal tahun anggaran,
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	6	465.000.000	6	464.133.311	100,00%	99,81%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Terdapat kelebihan karena harga setelah negosiasi lebih rendah daripada	

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										pagu	
19	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
20	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	39	3.570.168.000	39	3.558.607.400	100,00%	99,68%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sisa kontrak	
21	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
22	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	373	336.504.000	373	243.689.949	100,00%	72,42%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sisa Kegiatan dan adanya Perjalanan Dinas yang tidak terlaksana	Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain melakukan perencanaan kegiatan perjalanan dinas secara lebih matang dan terjadwal sejak awal tahun anggaran, termasuk memastikan kesiapan narasumber, peserta, dan lokasi kegiatan. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait agar potensi pembatalan kegiatan dapat diminimalkan. Apabila terdapat indikasi kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka anggaran perjalanan dinas dapat segera dialihkan untuk mendukung kegiatan pengembangan karir lainnya yang masih relevan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penyerapan

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											anggaran dapat lebih optimal dan tujuan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dapat tercapai
23	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1	221.706.600	1	180.003.403	100,00%	81,19%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Makan dan Minum Aktifitas Lapangan tidak terlaksana	Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain melakukan perencanaan kegiatan perjalanan dinas secara lebih matang dan terjadwal sejak awal tahun anggaran, termasuk memastikan kesiapan narasumber, peserta, dan lokasi kegiatan. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait agar potensi pembatalan kegiatan dapat diminimalkan. Apabila terdapat indikasi kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka anggaran perjalanan dinas dapat segera dialihkan untuk mendukung kegiatan pengembangan karir lainnya yang masih relevan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penyerapan anggaran dapat lebih optimal dan tujuan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD tetap tercapai.
24	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Orang	450	758.585.200	450	721.694.910	100,00%	95,14%	DAU yang Ditentukan	Adanya Perjalanan dinas yang tidak	Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar								Penggunaannya Bidang Pendidikan	terlaksana	lain melakukan perencanaan kegiatan perjalanan dinas secara lebih matang dan terjadwal sejak awal tahun anggaran, termasuk memastikan kesiapan narasumber, peserta, dan lokasi kegiatan. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait agar potensi pembatalan kegiatan dapat diminimalkan. Apabila terdapat indikasi kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka anggaran perjalanan dinas dapat segera dialihkan untuk mendukung kegiatan pengembangan karir lainnya yang masih relevan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penyerapan anggaran dapat lebih optimal dan tujuan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD tetap tercapai.
25	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	373	393.947.000	373	355.840.200	100,00%	90,33%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Adanya Perjalanan dinas lembur yang tidak terlaksana	Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain melakukan perencanaan kegiatan perjalanan dinas secara lebih matang dan terjadwal sejak awal tahun anggaran, termasuk memastikan kesiapan narasumber,

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											peserta, dan lokasi kegiatan. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait agar potensi pembatalan kegiatan dapat diminimalkan. Apabila terdapat indikasi kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka anggaran perjalanan dinas dapat segera dialihkan untuk mendukung kegiatan pengembangan karir lainnya yang masih relevan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penyerapan anggaran dapat lebih optimal dan tujuan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD tetap tercapai.
26	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	373	54.900.000	373	53.485.000	100,00%	97,42%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	sisa kegiatan bintek	Kegiatan telah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya
27	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	2	10.000.000	2	9.836.000	100,00%	98,36%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	sisa dari kegiatan	
28	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
29	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	263.540.000	1	213.930.800	100,00%	81,18%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang	Adanya Perjalanan dinas yang tidak terlaksana	Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain melakukan perencanaan kegiatan

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Pendidikan		perjalanan dinas secara lebih matang dan terjadwal sejak awal tahun anggaran, termasuk memastikan kesiapan narasumber, peserta, dan lokasi kegiatan. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait agar potensi pembatalan kegiatan dapat diminimalkan. Apabila terdapat indikasi kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka anggaran perjalanan dinas dapat segera dialihkan untuk mendukung kegiatan pengembangan karir lainnya yang masih relevan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penyerapan anggaran dapat lebih optimal dan tujuan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD tetap tercapai.
30	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1	10.000.000	1	8.178.000	100,00%	81,78%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	sisa kegiatan bintek	Kegiatan telah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya
31	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
32	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan	Kegiatan	3	54.990.000	3	47.356.000	100,00%	86,12%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	sisa kegiatan bintek	Kegiatan telah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								Bidang Pendidikan		
33	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
34	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1	98.400.000	1	61.982.400	100,00%	62,99%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		
35	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	8	2.331.643.400	8	2.208.632.995	100,00%	94,72%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Adanya Perjalanan dinas yang tidak terlaksana	Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain melakukan perencanaan kegiatan perjalanan dinas secara lebih matang dan terjadwal sejak awal tahun anggaran
36	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
37	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
38	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
39	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	35	5.675.455.000	35	5.295.247.741	100,00%	93,30%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sisa kontrakt	
40	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik	100	12.355.000	100	9.325.000	100,00%	75,48%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	sisa kegiatan bintek	Kegiatan telah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	25	2.068.441.000	25	1.991.704.817	100,00%	96,29%	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		
42	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
43	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	14	813.487.500	14	809.941.948	100,00%	99,56%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		
44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	14	1.429.903.500	14	1.386.440.122	100,00%	96,96%	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sisa kontrtrak	
45	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	7	868.923.800	7	866.886.360	100,00%	99,77%	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sisa kontrtrak	
46	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
47	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik	500	60.000.000	500	43.145.000	100,00%	71,91%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	sisa kegiatan bintek	Kegiatan telah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	100	453.316.900	100	347.163.813	100,00%	76,58%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	sisa kegiatan bintek	Kegiatan telah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya
49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	10	25.237.000	10	9.900.000	100,00%	39,23%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Perjalanan Dinas Luar Provinsi tidak dapat dilaksanakan karena adanya Tanggap darurat	Agar dapat dilaksanakan, anggaran kegiatan untuk dapat dianggarkan pada anggaran Awal
50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	250	232.723.000	250	222.259.480	100,00%	95,50%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Perjalanan Dinas Luar Provinsi tidak dapat dilaksanakan karena adanya Tanggap darurat, Makan dan Minum Rapat	Agar dapat dilaksanakan, anggaran kegiatan untuk dapat dianggarkan pada anggaran Awal
51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	61	200.375.400	61	128.878.000	100,00%	64,32%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	sisa kegiatan bintek	Kegiatan telah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya
52	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	51	35.981.500	51	21.342.000	100,00%	59,31%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	sisa kegiatan bintek, dan belanja bintek	Kegiatan telah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya
53	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	2	10.000.000	2	9.916.000	100,00%	99,16%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	sisa kegiatan bintek	Kegiatan telah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya
54	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
55	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	179.921.000	1	118.468.932	100,00%	65,84%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	sisa kegiatan bntek, perjalanan dinas dan pengadaan lektop yang tidak sesuai dengan harga sekarang	Agar dapat dilaksanakan, anggaran kegiatan untuk dapat dianggarkan pada anggaran Awal

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGA N			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
57	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
58	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	3	36.000.000	3	26.615.000	100,00%	73,93%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sisa Kegiatan Bimtek	Kegiatan telah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya
59	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
60	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
61	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
62	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
63	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
64	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
65	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta Didik	900	15.300.000	900	15.300.000	100,00%	100,00%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
67	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	38	165.363.200	38	115.233.757	100,00%	69,69%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Adanya beberapa belanja operasional yang sudah terpenuhi (ATK, Bahan Catak, dan Pemeliharaan Kendaraan). Pada Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Kebersihan sudah tidak bisa di bayarkan karena sudah diangkat PPPK Paruh Waktu	Sudah terpenuhi pada belanja operasional lainnya.
68	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
69	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
70	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	41.850.000	1	40.369.000	100,00%	96,46%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Adanya perjalanan dinas dan lembur yang tidak terlaksana	Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain melakukan perencanaan kegiatan perjalanan dinas secara lebih matang dan terjadwal sejak awal tahun anggaran,
71	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1	10.000.000	1	9.330.000	100,00%	93,30%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	siswa kegiatan bintek, dan belanja bintek	melakukan perencanaan kegiatan secara lebih matang dan terjadwal sejak awal tahun anggaran, termasuk memastikan kesiapan narasumber, peserta,

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											dan lokasi kegiatan
72	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
73	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
74	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
75	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
76	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
77	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
78	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	120	112.200.000	120	107.201.000	100,00%	95,54%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	sisa kegiatan bintek, dan belanja bintek	melakukan perencanaan kegiatan secara lebih matang dan terjadwal sejak awal tahun anggaran, termasuk memastikan kesiapan narasumber, peserta, dan lokasi kegiatan
79	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
80	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGA N			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
82	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
83	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Paket	2	241.500.000	2	237.984.000	100,00%	98,54%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	harga setelah negosiasi lebih rendah dari pagu anggaran	
84	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	
85	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	1	29.782.000	1	18.097.000	100,00%	60,76%	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Perjalanan Dinas Luar Provinsi tidak dapat dilaksanakan karena adanya Tanggap darurat, Makan dan Minum Rapat	Agar dapat dilaksanakan, anggaran kegiatan untuk dapat dianggarkan pada anggaran Awal
86	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan								Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Pada Tahun 2025	

2.2. URUSAN KESEHATAN

Penerapan SPM oleh pemerintah daerah dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

A. Pengumpulan Data

Pengumpulan data, yang mencakup jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan secara minimal dan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia. Untuk pengumpulan data SPM BK menggunakan data pemantauan wilayah setempat untuk indikator pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan pelayanan kesehatan balita. Pusdatin dari Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan sekali lima tahunan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07-5675-2021 tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan 2021-2025.

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar SPM Kesehatan, dilakukan dengan cara:

1. Menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar kesehatan dengan jumlah barang dan/atau jasa kesehatan yang tersedia.
2. Menghitung selisih antara sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar kesehatan dengan jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia.
3. Menghitung kebutuhan biaya pemenuhan Pelayanan Dasar kesehatan menggunakan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menetapkan kebutuhan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Kesehatan berupa menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Dalam pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM kesehatan Pemerintah Daerah dapat membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau memberikan bantuan pemenuhan barang dan/jasa kebutuhan dasar minimal dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan kebutuhan untuk pembiayaan SPM BK untuk 12 indikator mengaju pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Rinciannya sebagai berikut:

a) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel 2.10. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	sejumlah sasaran ibu hamil x 80%	Pencegahan tetanus pada ibu dan tetanus pada bayi saat persalinan
2	Tablet tambah darah	180 tablet x jumlah ibu hamil	Pencegahan anemia defisiensi besi dan defisiensi asam folat
3	Alat deteksi risiko ibu hamil		
	a. Tes kehamilan	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui hamil atau tidak
	b. Pemeriksaan Hb	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui anemia atau tidak
	c. Pemeriksaan golongan darah	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui golongan darah ibu hamil sebagai persiapan mencari pendonor darah bila terjadi komplikasi
	d. Pemeriksaan glukoprotein urin	Sejumlah ibu hamil x 15%	Mengetahui diabetes dan risiko pre eklamsi dan eklamsi
	e. Skrining triple eliminasi dengan tes cepat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hepatitis B ▪ HIV ▪ Sifilis 	Sejumlah ibu hamil	Deteksi dini hepatitis B, HIV, sifilis pada ibu hamil untuk tatalaksana pencegahan penularan dari ibu ke bayi
4	Kartu ibu/rekam medis ibu	Sejumlah ibu hamil	Form rekam medis bagi ibu
5	Buku KIA	Sesuai kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun • Media KIE bagi ibu dan keluarganya
6	Media KIE	Sesuai kebutuhan	Informasi kesehatan KIA untuk ibu, anak dan keluarga
7	Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG)	Sesuai kebutuhan (umumnya gel USG ukuran 250 ml untuk 15-20 pasien) 1/15 x sasaran ibu hamil	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu mendeteksi gelombang suara yang bergerak • Mencegah terjadinya gesekan antara kulit dan transducer

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK terdiri atas:

- a. Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;
- b. Bidan;
- c. Perawat;
- d. Tenaga kefarmasian;
- e. Tenaga gizi.

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan antenatal sesuai standar yang diberikan pada ibu hamil yang meliputi: Standar kuantitas dan Standar kualitas.

c. Mekanisme Pelaksanaan

- 1) Penetapan sasaran ibu hamil dan ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Standar kuantitas adalah kunjungan 6 kali selama periode kehamilan (K6) dengan ketentuan:
 - a) Satu kali pada trimester pertama.
 - b) Dua kali pada trimester kedua.
 - c) Tiga kali pada trimester ketiga. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan paling sedikit 2 (dua) kali oleh dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi pada trimester pertama dan ketiga. Pelayanan kesehatan masa hamil yang dilakukan dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi termasuk pelayanan ultrasonografi (USG) oleh Puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah. Puskesmas yang belum dapat melaksanakan pelayanan kesehatan masa hamil sesuai standar, termasuk pelayanan ultrasonografi maka Puskesmas dapat melakukan rujukan horizontal kepada fasyankes lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T dan pelayanan ultrasonografi. Adapun 10 T meliputi:
 - a) pengukuran berat badan dan tinggi badan;
 - b) pengukuran tekanan darah;
 - c) pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA);
 - d) pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);
 - e) penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
 - f) skrining status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan;
 - g) pemberian tablet tambah darah setiap hari selama masa kehamilan;
 - h) tes laboratorium;
 - i) tatalaksana/penanganan kasus; dan
 - j) temu wicara (konseling).

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase ibu Hamil mendapatkan pelayanan} = \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100 \%$$

Catatan:

- a) Nominator yang dihitung adalah Ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan
- b) Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai nominator akan tetapi dihitung sebagai nominator dan denominator pada tahun berikutnya.

b) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel 2.11. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1.	Formulir partograf	Sejumlah sasaran ibu bersalin	Instrumen pemantauan persalinan
2	Kartu ibu (rekam medis)	Terintegrasi dengan ibu hamil	Form rekam medis bagi ibu

3	Buku KIA	Terintegrasi dengan ibu hamil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun ▪ Media KIE bagi ibu dan keluarganya
4	Media KIE	Sesuaikan media dan sasaran	Pesan informasi kepada ibu, anak dan keluarga

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK meliputi:

- a. Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;
- b. Bidan;
- c. Perawat;
- d. Tenaga kefarmasian;
- e. Tenaga gizi.

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi:

- 1) Persalinan normal.
- 2) Persalinan komplikasi.

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar.
 - a) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b) Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari:
 - (1) Dokter dan bidan, atau
 - (2) 2 orang bidan, atau
 - (3) Bidan dan perawat.
 - c) Dalam hal terdapat keterbatasan akses persalinan di fasyankes sebagaimana dimaksud di atas, persalinan tanpa komplikasi dapat dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan, yang terdiri atas bidan dan perawat atau 2 (dua) orang bidan.

d) Keterbatasan akses sebagaimana dimaksud meliputi:

- (1) Kesulitan dalam menjangkau fasyankes karena jarak dan/atau kondisi geografis; dan
- (2) Tidak ada Tenaga Medis.

3) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan} = \frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100 \%$$

c) **Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel 2.12. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe).	Sejumlah sasaran bayi baru lahir.	Pencegahan infeksi hepatitis B.
2	Vitamin K1 injeksi.	Sejumlah sasaran bayi baru lahir.	Pencegahan perdarahan.
3	Salep/tetes mata antibiotic.	Sejumlah sasaran bayi baru lahir.	Pencegahan infeksi mata.
4	Formulir bayi baru lahir.	Sejumlah sasaran bayi baru lahir.	Pencatatan hasil pemeriksaan fisik bayi baru lahir.
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)..	Sejumlah 3 x sasaran bayi baru lahir.	Pencatatan hasil pemeriksaan bayi baru lahir dengan menggunakan pendekatan MTBM untuk bayi sehat dan sakit
6	Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA).	Terintegrasi dengan ibu hamil.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun. ▪ Media KIE bagi ibu dan keluarganya
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).	Pesan kesehatan: bayi baru lahir.	KIE bagi ibu dan keluarganya.

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK meliputi:
 - a. Dokter/Dokter Spesialis Anak;
 - b. Bidan;
 - c. Perawat;
 - d. Tenaga Kefarmasian;
 - e. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
 - f. Tenaga Gizi;
 - g. Kader Kesehatan.
2. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
 - a. Pernyataan Standar

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
 - b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada bayi baru lahir sesuai standar, yang mencakup:
 - 1) Standar kuantitas.
 - 2) Standar kualitas.
- c. Mekanisme Pelayanan
 - 1) Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - 2) Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:
 - a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam.
 - b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari.
 - c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.
 - 3) Standar kualitas:
 - a) Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam).

Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:

 - (1) Pemotongan dan perawatan tali pusat.
 - (2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
 - (3) Injeksi vitamin K1.

- (4) Pemberian salep/tetes mata antibiotik.
 - (5) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin hepatitis B0).
- b) Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).

Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:

- (1) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
- (2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
- (3) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasyankes atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
- (4) Imunisasi hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong Tenaga Kesehatan.
- (5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

- a) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).

Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:

- (1) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
- (2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
- (3) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
- (4) Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
- (5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

d. Penghitungan Pencapaian SPM

1) Definisi Operasional Capaian Kerja Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM a) Penghitungan persentase penerima layanan dasar

$$\text{Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir} = \frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

d) Pelayanan Kesehatan Balita

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel 2.13. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Kesehatan Balita

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Sesuai kebutuhan	Pemeriksaan perkembangan balita
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Sesuai kebutuhan	Pencatatan hasil pelayanan
3	Buku KIA	Sejumlah sasaran ibu hamil + jumlah balita yang tidak mempunyai buku KIA	Media informasi dan pencatatan KIA sampai dengan umur 6 tahun
4	Vitamin A biru	Sesuai standar 6-11 bulan	Fungsi Vitamin A: Meningkatkan daya tahan tubuh (mencegah kesakitan berulang) dan mencapai perkembangan optimal, Baik Untuk Kesehatan mata, mencegah rabun senja, xeroftalmia, kerusakan kornea dan kebutaan.
5	Vitamin A merah	12-59 bulan	
6	Vaksin imunisasi dasar: <ul style="list-style-type: none"> • BCG • Polio tetes • IPV (Polio suntik) • DPT-HB-Hib • Campak Rubela *) Untuk pemberian vaksin pada Bayi, Baduta dan Balita sesuai dengan jadwal Imunisasi pada buku KIA	12 – 59 bulan	Sesuai standar Fungsi Vaksinasi imunisasi: Meningkatkan kekebalan tubuh.
7	Vaksin imunisasi Lanjutan: anak Bawah Dua Tahun (Baduta) DPT-HB-Hib, Campak Rubela *) Untuk pemberian vaksin pada Bayi, Baduta dan Balita sesuai dengan jadwal Imunisasi pada buku KIA		
8	Jarum suntik dan BHP		Mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan Kesehatan Balita.
9	Peralatan anafilaktik		Pengobatan bila terjadi syok anafilaktik akibat penyuntikan.
10	Formula terapi gizi buruk		Pengobatan bila terjadi kasus gizi buruk pada balita.

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK

a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan:

- 1) Dokter;
- 2) Bidan;
- 3) Perawat;
- 4) Tenaga Gizi.

b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:

- 1) Guru PAUD
- 2) Kader kesehatan

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan standar

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi:

- 1) Pelayanan kesehatan balita sehat.
- 2) Pelayanan kesehatan balita sakit.

c. Mekanisme Pelaksanaan

1) Penetapan sasaran balita di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2) Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang menggunakan alat antropometri dan alat deteksi dini perkembangan anak, meliputi:

a) Pelayanan kesehatan balita usia 0-11 bulan:

- (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun.
- (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
- (3) Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun.
- (4) Pemantauan perkembangan minimal 4 kali/tahun.
- (5) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
- (6) Pemberian imunisasi dasar lengkap.

b) Pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan:

- (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
- (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
- (3) Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun. (4) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun. (5) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun. (6) Pemberian imunisasi lanjutan anak Baduta.

c) Pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan:

- (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
- (2) Pengukuran tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
- (3) Pengukuran lingkar kepala minimal 1 kali/tahun.
- (4) Pemantauan perkembangan minimal 1 kali/ tahun.
- (5) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.

d) Edukasi dan informasi.

3) Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

d. Penghitungan Pencapaian SPM

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM (IPSPM):

$$\text{Indeks Pencapaian SPM (IPSPM)} = \frac{\% \text{ IP Mutu Minimal Layanan Dasar} \times \text{Bobot Mutu Minimal Layanan Dasar (20)} + \% \text{ IP Penerima Layanan Dasar} \times \text{Bobot Penerima layanan Dasar (80)}}{100}$$

a) Penghitungan Persentase Penerima Layanan Dasar

$$\text{Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1} + \text{jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2} + \text{balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan Cakupan sesuai standar 3}}{\text{Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

Catatan:

- (1) Balita yang belum mencapai usia 1 tahun di akhir tahun berjalan, tidak di hitung sebagai cakupan. Perhitungan balita usia 0-11 bulan dilakukan setelah balita berulang tahun yang pertama (balita genap berusia 1 tahun/12 bulan).
- (2) Balita yang belum mencapai usia 24 bulan di akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai cakupan balita usia 24-35 bulan. Perhitungan dilakukan setelah berulang tahun yang kedua (balita genap berusia 2 tahun/24 bulan).
- (3) Balita yang belum mencapai usia 36 bulan, di akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai cakupan balita usia 36-59 bulan. Perhitungan dilakukan setelah berulang tahun yang ketiga (balita genap berusia 3 tahun/36 bulan)

e) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel 2.14. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Pada Usia Pendidikan Dasar

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Form pencatatan/ buku rapor kesehatanku	Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/ pesantren	- Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan; dan - Media KIE
2	Form Pencatatan/ buku pemantauan kesehatan	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja	- Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan - Media KIE
3	Kuesioner skrining kesehatan	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/ madrasah/ pesantren	- Umpan balik hasil skrining/penjaringan kesehatan ke sekolah/ madrasah/ pesantren - pencatatan dan pelaporan
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas	- Umpan balik hasil skrining/penjaringan kesehatan di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja - Pencatatan dan pelaporan
6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota	- Pencegahan anemia pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12- 17 tahun diluar sekolah
7	<ul style="list-style-type: none"> • Alat pemeriksaan Hb • Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 	Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat	- Untuk mengetahui status anemia pada remaja putri kelas 7, dilakukan pada saat penjangkaran - Bila ditemukan anemia, dilakukan rujukan ke fasyankes untuk intervensi sesuai dengan tata laksana.
8	Media promosi kesehatan	Media khusus remaja sehat	- Pesan: kesehatan remaja

No	Barang	Jumlah	Fungsi
9	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara.	- Memberikan kekebalan tubuh dari penyakit Campak, Rubela, Difteri dan Tetanus

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK

a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan:

- 1) Dokter/dokter gigi;
- 2) Bidan;
- 3) Perawat;
- 5) Tenaga kefarmasian;
- 6) Tenaga kesehatan masyarakat.

b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:

- 1) Guru
- 2) Kader kesehatan/dokter kecil/*peer counselor*

Tabel 2.15. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK Pelayanan Pada Usia Pendidikan Dasar

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1	Skrining kesehatan	
	a. Penilaian status gizi	- Guru - Tenaga pendamping di lapas/LPKA - Tenaga pendamping/pekerja sosial di panti/LKSA - Dokter kecil, kader kesehatan remaja termasuk kader Posyandu remaja
	b. Penilaian tanda tanda vital	- Dokter/dokter gigi/bidan/perawat/ perawat gigi - kader Posyandu remaja
	c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut	- Dokter/dokter gigi/bidan/perawat/perawat gigi - Guru BK, Guru UKS - Tenaga pendamping di lapas/LPKA - Tenaga pendamping/pekerja sosial di panti/LKSA - Dokter kecil, kader kesehatan remaja termasuk kader Posyandu remaja
	d. Penilaian ketajaman indera	Dokter/dokter gigi/bidan/perawat/perawat gigi
	e. Penilaian status anemia pada remaja putri kelas 7	Dokter/bidan/perawat/petugas laboratorium/tenaga gizi
	f. Penyuluhan kesehatan bagi anak usia sekolah	- Dokter/dokter gigi/bidan/perawat/ perawat gigi/ tenaga gizi/Promkes/Guru BK, Guru UKS - Tenaga pendamping di lapas/LPKA - Tenaga pendamping/pekerja sosial di panti/LKSA - Dokter kecil, kader kesehatan remaja termasuk kader Posyandu remaja
	g. Pemberian imunisasi Campak Rubela, DT, dan Td sesuai jadwal dan tingkat pendidikan siswa atau usia yang setara	SDMK: dokter, bidan, dan atau perawat

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran (contoh yang dilaporkan di tahun 2024 adalah skrining kesehatan yang dilakukan pada bulan Juni 2023 hingga Mei 2024).

b. Pengertian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi pelayanan:

- 1) Skrining kesehatan.
- 2) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan.

Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.

- 3) Pemberian imunisasi Campak Rubela, DT, Td pada BIAS sesuai jadwal dan tingkat pendidikan siswa atau usia yang setara.

c. Mekanisme Pelaksanaan

- 1) Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan SD/MI, SMP/MTS dan pondok pesantren atau kelas 1-9 (7 sampai dengan 15 tahun) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA, Posyandu remaja dan lainnya di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Skrining kesehatan Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan SD/MI, SMP/MTS, dan pondok pesantren atau kelas 1-9 (7 sampai dengan 15 tahun) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:
 - a) Penilaian status gizi.
 - b) Penilaian tanda vital.
 - c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
 - d) Penilaian ketajaman indera.
 - e) Penilaian status anemia pada remaja putri kelas 7.

- 3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
 - a) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan.
 - b) Melakukan rujukan jika diperlukan.
 - c) Memberikan penyuluhan kesehatan.
- 4) Pemberian imunisasi pada pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) meliputi:
 - a) Pemberian imunisasi Campak Rubela (anak kelas 1 SD atau usia yang setara).
 - b) Pemberian imunisasi DT (anak kelas 1 SD atau usia yang setara).
 - c) Pemberian imunisasi Td (anak kelas 2 SD atau usia yang setara).
 - d) Pemberian imunisasi Td (anak kelas 5 SD atau usia yang setara).

d. Penghitungan Pencapaian SPM

- 1) Definisi Operasional Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran (contoh yang dilaporkan di tahun 2024 adalah skrining kesehatan yang dilakukan pada bulan Juni 2023 hingga Mei 2024).

Penghitungan pencapaian SPM Kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai dengan standar dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:

- a) pencapaian mutu layanan dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia); dan
- b) pencapaian penerima layanan dasar.

Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

- 2) Rumus penghitungan Indeks Pencapaian SPM (IPSPM)

$$\text{Indeks Pencapaian SPM (IPSPM)} = \text{\% IP Mutu Minimal Layanan Dasar} \times \text{Bobot Mutu Minimal Layanan Dasar (20)} + \text{\% IP Penerima Layanan Dasar} \times \text{Bobot Penerima layanan Dasar (80)}$$

f) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel 2.16. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Pada Usia Produktif

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Pedoman dan media KIE	Minimal 5 jenis di setiap fasyankes dan UKBM dan minimal terdiri dari: a. 1 (satu) pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular. b. 1 (satu) media KIE tentang penyakit menular. c. 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular. d. 1 (satu) media KIE tentang pelayanan kesehatan catin/Pasangan Usia Subur (PUS) dan Keluarga Berencana (KB) e. 1 (satu) Pedoman Pelayanan kesehatan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Panduan dalam melakukan skrining kesehatan sesuai standar dan sebagai media untuk memberikan edukasi tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk pelayanan KB
2	a. Alat dalam melakukan skrining: - alat ukur berat badan; - alat ukur tinggi badan; - alat ukur lingkar perut; - tensimeter; - glukometer; - alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA); - alat pemeriksaan Hb; - kit ophthalmologi komunitas; - kuesioner PUMA (Deteksi Dini PPOK); - alat IVA tes terdiri dari • spekulum cocor bebek; • korentang/ tampon tang dalam tempat; • pinset anatomis; • lampu sorot; b. Alat Pelayanan KB: - set pemasangan dan pencabutan AKDR; - set pemasangan dan pencabutan implan; - vasektomi set.	Sesuai dengan jumlah tempat pelaksanaan kegiatan skrining dan atau sesuai dengan kebutuhan	Melakukan skrining kesehatan, pelayanan KB
	c. Bahan medis habis pakai 1) dalam melakukan skrining: - tes strip gula darah, - lancet, - kapas alkohol - strip Hb dan reagen Hb 2) untuk pemeriksaan IVA: - lidi kapas dalam wadah, - desinfektan (alkohol 70%), - larutan asam cuka (asam asetat) dengan kepekatan 3-5%. 3) untuk Pelayanan KB: alat kontrasepsi (kondom, pil,	Sesuai jumlah sasaran	Melakukan skrining kesehatan

No	Barang	Jumlah	Fungsi
	suntik, alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), implan)		
3	Formulir pencatatan dan pelaporan/matrik laporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK), E Kohort Kesehatan Usia Produktif	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
4	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1 vial x sejumlah sasaran Wanita Usia Subur (WUS) 15-39 tahun/8 x 80% status imunisasi T WUS / 8	Pencegahan Tetanus pada WUS

a. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK

a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan:

- 1) Dokter;
- 2) Bidan;
- 3) Perawat;
- 4) Tenaga gizi;
- 5) Tenaga kesehatan masyarakat.

b. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu

Tabel 2.17. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK Pada Pelayanan Usia Produktif

No	Kegiatan	SDMK
1	Pengukuran TB, BB, lingkar perut, tekanan darah, pemeriksaan tajam penglihatan, tajam pendengaran dan skrining Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)	Perawat/Kader Kesehatan Pelaksana Posyandu/Posbindu /UKBM lainnya
2	Perawat/Kader Kesehatan Pelaksana Posyandu/Posbindu /UKBM lainnya	Dokter/perawat/bidan/kader kesehatan Posyandu/Posbindu/UKBM lainnya
3	Pemeriksaan SADANIS dan IVA (bagi sasaran wanita usia 30-50 tahun) yang sudah kontak seksual	Dokter/bidan terlatih dalam melakukan pemeriksaan SADANIS dan IVA
4	Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin	Dokter/bidan/perawat/ petugas gizi
5	Pelayanan KB (bagi sasaran PUS dengan 4T • 4T adalah usia 35 tahun, anak >3 orang, jarak kelahiran	Dokter/bidan terlatih
6	Deteksi dini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Dokter/bidan/perawat terlatih
7	Melakukan rujukan jika diperlukan	Dokter/perawat/bidan/kader kesehatan Posyandu/ Posbindu/UKBM lainnya
8	Memberikan penyuluhan kesehatan: a. memberikan penyuluhan/ konseling kesehatan b. memberikan penyuluhan sederhana	Dokter/perawat/bidan/ tenaga gizi/kader kesehatan

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining serta pelayanan kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun, di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia produktif sesuai standar yang meliputi:

- 1) edukasi kesehatan tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 2) skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular dan calon pengantin;
- 3) skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td (bila diperlukan) berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus; dan
- 4) pelayanan KB.

c. Mekanisme Pelaksanaan

- 1) Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di fasyankes, UKBM, dan/atau KUA/lembaga agama/rumah ibadah.
- 3) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan calon pengantin meliputi:
 - a) Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut.
 - b) Skrining PPOK untuk usia ≥ 40 tahun.
 - c) Pengukuran tekanan darah.
 - d) Pemeriksaan gula darah untuk:

- usia 40 tahun ke atas;
 - usia 15 tahun sampai <40 tahun dengan masalah obesitas dan/atau tekanan darah tinggi dan/atau dengan riwayat keluarga DM;
 - calon pengantin, jika berdasarkan hasil skrining memerlukan pemeriksaan lebih lanjut
- e) Pengukuran LILA (tambahan bagi calon pengantin).
- f) Pemeriksaan Hb (tambahan bagi calon pengantin).
- g) Pemeriksaan HIV dan Sifilis bagi calon pengantin jika berdasarkan hasil skrining memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
- h) Anamnesa perilaku berisiko.
- i) Pemeriksaan tajam penglihatan dan tajam pendengaran.
- j) Pemeriksaan SADANIS dan IVA (bagi sasaran perempuan usia 30-50 tahun yang sudah kontak seksual dilakukan 3 tahun sekali atau kurang dari 3 tahun bila dirasakan ataupun ditemukan keluhan dan kelainan).
- k) Pemeriksaan skrining kesehatan jiwa.
- l) Status imunisasi TT bagi calon pengantin.
- m) Skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil skrining. Status imunisasi Tetanus adalah kegiatan skrining yang ditujukan pada WUS minimal 1 kali dalam setahun untuk menentukan status T dan memberikan imunisasi Td (bila diperlukan) kepada WUS tersebut berdasarkan hasil skrining status imunisasi T nya.
- n) Pelayanan KB pada usia produktif adalah pelayanan KB yang dilakukan untuk PUS dengan 4T.
- o) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
- (1) Melakukan rujukan jika diperlukan.
 - (2) Memberikan penyuluhan/konseling kesehatan.

Keterangan:

- Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA.
- PUS 4T adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah yang istrinya berusia antara 15- 49 tahun dan mempunyai

kondisi 4T (usia 35 tahun, anak >3 orang, jarak kelahiran <2 tahun).

4) Definisi operasional

Penghitungan pencapaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai dengan standar dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu pencapaian mutu layanan dasar (barang dan/atau jasa) dan sumber daya manusia (SDM).

a) Pencapaian penerima layanan dasar. Indeks pencapaian SPM (IPSPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan dengan persentase indeks layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima. Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

$$\frac{\text{Persentase usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun di kab/kota}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}} \times 100\%$$

g) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel 2.18. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Pada Usia Lanjut

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Alat pemeriksaan dini: a. alat ukur berat badan b. alat ukur tinggi badan c. alat ukur lingkar perut dan lingkar lengan atas d. tensimeter e. alat pemeriksaan gula darah f. alat pemeriksaan kolesterol	Sesuai jumlah tempat pelaksanaan atau sesuai kebutuhan	Melakukan skrining kesehatan usia lanjut
2	Bahan medis habis pakai		
3	a. Strip uji pemeriksaan: • Gula darah • Kolesterol b. Lancet c. Kapas alkohol	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun)	Melakukan skrining kesehatan usia lanjut

No	Barang	Jumlah	Fungsi
4	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumen Skrining Lansia Sederhana • Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/ Activity Daily Living (ADL) Barthel 	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun)	Pemeriksaan kesehatan usia lanjut (≥ 60 tahun) meliputi pemeriksaan status mental, status kognitif, tingkat kemandirian, nutrisi, mobilitas, gangguan pendengaran, dan penglihatan pada usia lanjut
5	Buku Kesehatan Lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya (ASIK, ekohort)	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun) yang belum mendapatkan Buku Kesehatan Lansia	Media informasi dan Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan usia lanjut (≥ 60 tahun)
6	Media KIE	Sesuai media dan sasaran	Informasi kesehatan usia lanjut

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK

1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan:

- a) Dokter;
- b) Bidan;
- c) Perawat;
- d) Tenaga gizi;
- e) Tenaga kesehatan masyarakat.

2) Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu.

c. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

1) Pernyataan Standar

Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Pengertian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut adalah pelayanan kesehatan untuk warga usia 60 tahun ke atas sesuai standar yang meliputi:

- a) edukasi perilaku hidup bersih dan sehat; dan
- b) skrining faktor risiko pada usia lanjut.

3) Mekanisme Pelaksanaan

- a) Penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- b) Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah edukasi yang dilaksanakan di fasyankes dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.

c) Pelayanan skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun meliputi:

- (1) pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan lingkar lengan atas;
- (2) pengukuran tekanan darah;
- (3) pemeriksaan gula darah;
- (4) pemeriksaan kolesterol;
- (5) pemeriksaan Skrining Lansia Sederhana;
- (6) pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut; dan
- (7) anamnesis perilaku berisiko.

d) Tindaklanjut hasil skrining faktor risiko pada usia lanjut meliputi:

- (1) melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai hasil pemeriksaan asuhan terpadu lansia;
- (2) melakukan rujukan jika diperlukan; dan
- (3) memberikan penyuluhan kesehatan.

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja:

$$\text{Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$$

h) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel 2.19. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Penderita Hipertensi

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE	Minimal 2	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar
2	Tensimeter	Sesuai kebutuhan	Mengukur tekanan darah

No	Barang	Jumlah	Fungsi
3	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
4	Media promosi kesehatan	Sesuai kebutuhan	Peningkatan pengetahuan masyarakat

a. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK

- 1) Dokter;
- 2) Bidan;
- 3) Perawat;
- 4) Tenaga gizi;
- 5) Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
- 6) Tenaga kefarmasian;
- 7) Tenaga kesehatan masyarakat.

Tabel 2.20. Standar Jumlah dan Kualitas Personil /SDMK Pada Penderita Hipertensi

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1	Pengukuran tekanan darah	Dokter atau Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan terlatih
2	Pelayanan non farmakologi	Dokter atau Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan terlatih
4	Pelayanan farmakologi	Dokter
5	Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi	Dokter dan/ atau tenaga gizi/ tenaga kefarmasian dan Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan terlatih

b. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

1) Pernyataan Standar

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Pengertian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada warga penderita hipertensi sesuai standar yang meliputi:

- a) Pengukuran tekanan darah
- b) Pelayanan edukasi non farmakologi
- c) Pelayanan farmakologi
- d) Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi

3) Mekanisme Pelaksanaan

- a) Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- b) Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:
 - (1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes.
 - (2) Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi.
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan

4. Penghitungan Pencapaian SPM

a. Capaian Kinerja

- 1) Definisi Operasional Capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Penghitungan Kinerja Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan} = \frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

i) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel 2.21. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Penderita Diabetes Melitus

No	Barang	Jumlah	Fungsi
	a. Alat pemantau kadar gula dalam darah <ul style="list-style-type: none"> • Fotometer; atau • Glukometer b. BMHP gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah <ul style="list-style-type: none"> • Reagen glukosa; atau • Strip tes gula darah • Kapas alkohol • Lancet 	Minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan Sesuai jumlah sasaran	Melakukan pemeriksaan gula darah

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM, ASIK, Simpus	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
	Pedoman dan media KIE	Minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: a. 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; b. 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan c. 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK

- a. Dokter;
- b. Bidan;
- c. Perawat;
- d. Tenaga kefarmasian;
- e. Tenaga kesehatan masyarakat;
- f. Tenaga gizi;
- g. Teknis medis (ATLM).

Tabel 2.22. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK Pelayanan Penderita Diabetes Melitus

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1	Pemeriksaan klinis	Dokter
2	Pemeriksaan penunjang	Teknis medis (ATLM)/Tenaga kesehatan yang berkompeten
3	Terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat)	Dokter/Tenaga kesehatan yang berkompeten
4	Terapi farmakologi	Dokter dan tenaga kefarmasian

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga penderita diabetes melitus sesuai standar yang meliputi:

- 1) Pemeriksaan klinis;
- 2) Pemeriksaan penunjang;

- 3) Terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat);
- 4) Terapi farmakologi.

c. Mekanisme Pelaksanaan

- 1) Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- 2) Pelayanan kesehatan diabetes melitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:
 - a) Pemeriksaan klinis yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes.
 - b) Mendapatkan pemeriksaan penunjang minimal satu kali sebulan di fasyankes.
 - c) Terapi non farmakologi (edukasi perubahan gaya hidup sehat).
 - d) Terapi farmakologi sesuai kondisi pasien.
 - e) Melakukan rujukan jika diperlukan.

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

j) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel 2.23. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik	Pedoman penggolongan gejala klinis untuk menentukan diagnosis gangguan jiwa berat (psikotik akut dan skizofrenia)

No	Barang	Jumlah	Fungsi
2	Penyediaan psikofarmaka	sesuai kebutuhan	pengobatan/ medikasi
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau melalui aplikasi	sesuai kebutuhan	Instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada <i>caregive</i>
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
5	Media KIE	Sesuai kebutuhan	Media komunikasi, informasi dan edukasi sebagai alat penyuluhan

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK Pelayanan kesehatan

Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dilakukan oleh:

- a. Tenaga Medis;
- b. Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih);
- c. Tenaga profesional lainnya;
- d. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.

Jenis pelayanan dan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

Tabel 2.24. Jenis Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan Yang Dibutuhkan Pada Pelayanan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

No	Kegiatan	SDMK
1	Skrining	Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa, tenaga profesional lainnya, dan tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa
2	Pemeriksaan kesehatan jiwa	Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa
	a. Wawancara	Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa
	b. Pemeriksaan status mental	Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa
	c. Diagnosis klinis	Tenaga Medis dan/atau psikolog klinis
3	Edukasi	Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa, tenaga profesional lainnya, dan tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa
4	Tata laksana	Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang Kesehatan jiwa

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pengobatan penyakit dan pencegahan timbulnya dampak sekunder akibat gangguan jiwanya

(contoh: pemasangan) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

- b. Pengertian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia, yang meliputi:
 - 1) Pemeriksaan kesehatan jiwa;
 - 2) Edukasi; dan
 - 3) Tata laksana.
- c. Mekanisme Pelaksanaan
 - 1) Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Jika pada 2 (dua) tahun berturut-turut telah dilakukan upaya maksimal dan tidak ditemukan ODGJ berat sejumlah sasaran berdasarkan data RISKESDAS 2018 maka dengan justifikasi yang kuat dan didukung dengan data epidemiologis yang sah kepala daerah dapat menetapkan target capaian melalui surat ketetapan. Contoh: Data Riskesdas terkait ODGJ pada RISKESDAS 2018 adalah 0,21%. Dengan memperhitungkan jumlah penduduk pada tahun 2022 menurut Pusat Data dan Informasi berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2015- 2045 adalah 5.529.773 sehingga sasaran ODGJ berat provinsi A pada tahun 2022 adalah:
$$5.529.773 \times 0,0021 = 11.613 \text{ orang.}$$
 - 2) Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
 - a) Pemeriksaan status mental
 - b) Wawancara
 - 3) Edukasi kepatuhan minum obat kepada pasien dan keluarga *caregiver*.
 - 4) Melakukan penatalaksanaan awal dan melakukan rujukan sesuai indikasi.
 - 5) Tindak lanjut rujuk balik dan pemantauan minum obat
- d. Penghitungan Pencapaian SPM
 - 1) Definisi Operasional Capaian kinerja Pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ

berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM

a) Penghitungan Persentase Penerima Layanan Dasar

$$\text{Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$$

k) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel 2.25. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan /atau Jasa Pada Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang Tuberkulosis (TBC)
2	Reagen Ziehl Neelsen (ZN) TB	Sesuai jumlah sasaran terduga TBC	Bahan pemeriksaan terduga TBC
3	Masker bedah dan masker N95	Sesuai kebutuhan sasaran terduga TBC dan jumlah SDM	Pencegahan penularan TBC
4	Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil Emersi, Ether Alkohol)	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan terduga TBC
5	Bahan pemeriksaan terduga TBC	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan terduga TBC
6	Kartrid tes cepat molekuler	Sesuai jumlah sasaran terduga TBC	Bahan pemeriksaan terduga TBC
7	Formulir pencatatan dan pelaporan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan Pelaporan
8	Pedoman/standar operasional prosedur	Sesuai kebutuhan	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar
9	Tuberkulin	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan terduga TBC

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK

a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan:

- 1) Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru;
- 2) Perawat
- 3) Tenaga kefarmasian;
- 4) Tenaga kesehatan masyarakat;
- 5) Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM);
- 6) Radiografer.

b. Kader kesehatan

Jenis pelayanan dan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

Tabel 2.26. Jenis Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan Yang Dibutuhkan Pada Pelayanan Penderita Orang Terduga Tuberkulosis

No	Kegiatan	SDMK
1	Pemeriksaan klinis	perawat/ dokter
2	Pemeriksaan Laboratorium (bakteriologis)	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) Radiografer
3	Edukasi/promosi kesehatan	Tenaga kesehatan masyarakat/ bidan/perawat/dokter/tenaga kefarmasian
4	Melakukan rujukan	Dokter

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

- a. Pernyataan Standar Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
- b. Pengertian Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada orang terduga TBC sesuai standar, yang meliputi:
 - 1) pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda;
 - 2) pemeriksaan penunjang; dan
 - 3) edukasi.
- c. Mekanisme Pelaksanaan
 - 1) Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang dengan gejala TBC yang datang ke fasyankes dan kontak erat maupun kontak serumah dengan penderita TBC yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan target (perkiraan) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
 - 2) Pelayanan orang terduga TBC melalui pemeriksaan orang dengan gejala TBC yang datang ke fasyankes dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya serta penemuan secara aktif melalui pelacakan dan pemeriksaan kontak skrining secara masal terutama pada kelompok rentan dan berisiko dan skrining pada kondisi situasi khusus.
 - 3) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, yaitu dengan pemeriksaan gejala dan tanda.
 - 4) Pemeriksaan penunjang terduga TBC diantaranya menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM), mikroskopis, atau radiologis sesuai pedoman atau standar operasional prosedur yang berlaku.
 - 5) Pemeriksaan penunjang diutamakan menggunakan pemeriksaan TCM

- 6) Bagi fasyankes yang belum atau tidak memiliki alat TCM, harus merujuk terduga TBC atau dahak dari terduga TBC ke fasyankes yang mempunyai alat TCM melalui transportasi spesimen sesuai dengan pengaturan jejaring laboratorium TCM oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.
- 7) Jika terdapat kesulitan mengakses layanan TCM, pemeriksaan terduga TBC dapat dilakukan menggunakan pemeriksaan mikroskopis.
- 8) Pemeriksaan radiologis dapat dilakukan sebagai pemeriksaan lanjutan jika hasil pemeriksaan TCM negatif.
- 9) Biaya transportasi spesimen dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah atau bersumber dari anggaran lain yang sah.
- 10) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
- 11) Melakukan rujukan jika diperlukan.

d. Penghitungan Pencapaian SPM

- 1) Definisi Operasional Capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
- 2) Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM a) Penghitungan Persentase Penerima Layanan Dasar

$$\text{Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100 \%$$

1) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus = HIV*)

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel 2.27. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus = HIV*)

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang HIV/AIDS
2	Tes Cepat HIV (RDT) pertama	Sesuai kebutuhan	Deteksi dini (Skrining) HIV
3	Bahan medis habis pakai: - Handschoen - Alkohol swab	Sesuai kebutuhan	Pengambilan darah perifer dan atau vena

No	Barang	Jumlah	Fungsi
	- Plester - Lancet/jarum steril - Jarum+sprit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai.		
4	- Alat tulis - Rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasyankes pelaksana, nomor KTP/NIK	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK

a. Tenaga kesehatan:

- 1) Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin;
- 2) Perawat;
- 3) Bidan;
- 4) Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM);
- 5) Tenaga kesehatan masyarakat.

b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:

- 1) Pendamping
- 2) penjangkauan

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan standar Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. b. Pengertian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar, yang meliputi:

- 1) edukasi perilaku berisiko
- 2) skrining orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu:
 - (1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
 - (2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC.
 - (3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS.
 - (4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa.

- (5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual).
- (6) Transgender/waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.
- (7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.
- (8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

c. Mekanisme Pelaksanaan

- 1) Penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penaja seks, LSL, transgender, penasun, WBP, dan ibu hamil).
- 2) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
- 3) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
- 4) Melakukan rujukan jika diperlukan.

d. Penghitungan Pencapaian SPM

- 1) Definisi Operasional Capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM

e. Penghitungan Persentase Penerima Layanan Dasar

$$\text{Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan} = \frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota deteksi dini HIV dalam kurun waktu satu tahun sesuai standar yang sama}} \times 100\%$$

Catatan: Nominator: Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, Penasun, WBP dan ibu hamil) yang mendapatkan pelayanan (pemeriksaan rapid test R1) sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

Denominator: Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama yang ditetapkan kepala daerah.

Contoh Perhitungan:

Contoh kasus penyelesaian Pelayanan Dasar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kabupaten “L”, pada tahun 2019.

Jumlah penduduk 220.412 jiwa dengan proyeksi estimasi sasaran jumlah ibu hamil 4.939 orang, estimasi penderita TBC 634, estimasi penderita IMS 5.681 orang.

Estimasi populasi berperilaku risiko tinggi terinfeksi HIV berturut-turut: WPS 146, LSL 451, transgender 17, penasun 0, WBP 0 (tidak mempunyai lapas).

Catatan dan laporan orang yang datang ke pelayanan kesehatan dan penjangkauan dalam satu tahun dari seluruh fasyankes dan telah ditelusur berdasarkan kelompok target orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Kepala daerah menetapkan hasil pemetaan /penemuan sebagai berikut: ibu hamil 4.954, penderita TBC 324, penderita IMS 2.618, WPS 164, LSL 201, transgender 29 dan penasun dilaporkan 1 orang.

Semua orang berisiko di dalam wilayah saat pelayanan tetap dilayani sekalipun berasal dari daerah lain.

Laporan jumlah orang yang datang ke fasyankes atau yang secara aktif dikunjungi, yang dilakukan pelayanan kesehatan berupa pemberian informasi dan edukasi dan pemeriksaan skrining (deteksi dini) HIV dengan reagen pertama, berturut-turut: perempuan hamil 4.954, penderita TBC 324, penderita IMS 2.618, WPS 164, LSL 201, seluruh transgender sudah diperiksa yaitu sebanyak 29 orang dan seorang mantan penasun. Berikut 4 (empat) Tahapan penerapan SPM Urusan Kesehatan:

D. Pendataan

Tabel 2.28. FORM 2.A.2 REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	DESA /KELURAHAN	TARGET PENERIMA PELAYANAN											
			PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Payakumbuh	Koto Baru Simalanggang	73	73	70	327	921	2513	226	378	51	8	137	87
2	Akabiluru	Batu Hampar	26	25	24	112	348	821	86	130	17	3	48	30
3	Akabiluru	Piladang	7	7	6	30	109	213	21	35	5	1	13	8
4	Luak	Mungo	21	21	20	93	389	1067	134	108	14	2	40	25
5	Lareh Sago Halaban	Halaban	28	28	26	121	343	886	80	140	19	3	51	33
6	Lareh Sago Halaban	Pakan Rabaa	50	50	47	222	624	1703	164	257	34	5	95	60
7	Situjuah Limo Nagari	Situjuah	35	35	32	152	434	1102	169	176	24	4	65	41
8	Harau	Taram	17	17	16	74	242	540	36	86	11	2	32	20
9	Harau	Tanjung Pati	42	42	39	183	589	1361	93	212	28	5	78	50
10	Guguak	Dangung-dangung	44	44	41	194	606	1479	124	225	30	5	83	53
11	Guguak	Padang Kandis	15	15	14	65	177	509	50	75	10	2	28	18
12	Mungka	Mungka	51	51	49	227	632	1777	198	264	35	5	97	62
13	Suliki	Suliki	22	22	20	94	262	730	81	109	15	2	40	26
14	Bukit Barisan	Maek	4	4	4	19	44	143	33	22	3	1	8	5
15	Bukit Barisan	Baruah Gunuang	9	9	8	39	94	314	27	45	6	1	17	11
16	Bukit Barisan	Banja Laweh	19	19	17	81	221	600	100	94	13	2	35	22
17	Gunuang Omeh	Koto Tinggi	21	20	19	90	290	675	53	104	14	2	38	24
18	Kapur IX	Muaro Paiti	19	18	17	81	208	653	40	94	13	2	35	22

19	Kapur IX	Sialang	49	49	45	213	555	1721	129	247	33	5	91	58
20	Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	41	41	38	178	498	1419	111	206	28	5	76	48
21	Pangkalan Koto Baru	Rimbo Data	6	6	6	28	92	212	12	32	4	1	12	8
22	Pangkalan Koto Baru	Gunung Malintang	16	16	15	71	205	540	49	82	11	2	30	19
JUMLAH			615	612	573	2694	7883	20978	2016	3121	418	68	1149	730

Tabel 2.29. FORM 2.A.3 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6
1	Payakumbuh	Puskesmas	1	Dokter	5
				Dokter gigi	2
				Perawat	6
				Bidan	25
				Kesehatan Lingkungan	2
				Petugas Gizi	2
				Tenaga Labor	2
				Kesehatan Masyarakat	2
				Tenaga Farmasi	2
2	Akabiluru	Puskesmas	2	Dokter	4
				Dokter gigi	2
				Perawat	12
				Bidan	27
				Kesehatan Lingkungan	2
				Petugas Gizi	3
				Tenaga Labor	2
				Kesehatan Masyarakat	6

				Tenaga Farmasi	3
3	Luak	Puskesmas	1	Dokter	4
				Dokter gigi	3
				Perawat	7
				Bidan	23
				Kesehatan Lingkungan	1
				Petugas Gizi	1
				Tenaga Labor	2
				Kesehatan Masyarakat	1
				Tenaga Farmasi	3
4	Lareh Sago Halaban	Puskesmas	2	Dokter	5
				Dokter gigi	3
				Perawat	16
				Bidan	35
				Kesehatan Lingkungan	1
				Petugas Gizi	4
				Tenaga Labor	2
				Kesehatan Masyarakat	4
				Tenaga Farmasi	5
5	Situjuah Limo Nagari	Puskesmas	1	Dokter	3
				Dokter gigi	2
				Perawat	7
				Bidan	24
				Kesehatan Lingkungan	1
				Petugas Gizi	5
				Tenaga Labor	1
				Kesehatan Masyarakat	2
				Tenaga Farmasi	1

6	Harau	Puskesmas	2	Dokter	5
				Dokter gigi	4
				Perawat	19
				Bidan	47
				Kesehatan Lingkungan	3
				Petugas Gizi	2
				Tenaga Labor	3
				Kesehatan Masyarakat	3
				Tenaga Farmasi	4
7	Guguak	Puskesmas	2	Dokter	7
				Dokter gigi	3
				Perawat	9
				Bidan	33
				Kesehatan Lingkungan	3
				Petugas Gizi	3
				Tenaga Labor	4
				Kesehatan Masyarakat	6
				Tenaga Farmasi	6
8	Mungka	Puskesmas	1	Dokter	3
				Dokter gigi	2
				Perawat	6
				Bidan	24
				Kesehatan Lingkungan	1
				Petugas Gizi	1
				Tenaga Labor	4
				Kesehatan Masyarakat	3
				Tenaga Farmasi	3

9	Suliki	Puskesmas	1	Dokter	1
				Dokter gigi	1
				Perawat	6
				Bidan	15
				Kesehatan Lingkungan	2
				Petugas Gizi	1
				Tenaga Labor	1
				Kesehatan Masyarakat	2
				Tenaga Farmasi	2
	RSUD	1	Dokter spesialis	19	
			Dokter	14	
			Dokter gigi	1	
			Perawat	129	
			Bidan	26	
			Kesehatan Lingkungan	3	
			Petugas Gizi	3	
			Tenaga Labor	10	
			Kesehatan Masyarakat	5	
Tenaga Farmasi			32		
10	Bukit Barisan	Puskesmas	3	Dokter	5
				Dokter gigi	4
				Perawat	36
				Bidan	40
				Kesehatan Lingkungan	2
				Petugas Gizi	5
				Tenaga Labor	3
				Kesehatan Masyarakat	4
				Tenaga Farmasi	7

11	Gunuang Omeh	Puskesmas	1	Dokter	1
				Dokter gigi	2
				Perawat	2
				Bidan	22
				Kesehatan Lingkungan	1
				Petugas Gizi	2
				Tenaga Labor	1
				Kesehatan Masyarakat	0
				Tenaga Farmasi	4
12	Kapur IX	Puskesmas	2	Dokter	3
				Dokter gigi	2
				Perawat	14
				Bidan	36
				Kesehatan Lingkungan	2
				Petugas Gizi	3
				Tenaga Labor	3
				Kesehatan Masyarakat	1
				Tenaga Farmasi	5
13	Pangkalan Koto Baru	Puskesmas	3	Dokter	8
				Dokter gigi	3
				Perawat	20
				Bidan	25
				Kesehatan Lingkungan	3
				Petugas Gizi	3
				Tenaga Labor	4
				Kesehatan Masyarakat	2
				Tenaga Farmasi	6

E. Penghitungan

Tabel 2.30. FORM 2.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025

NO	JENIS LAYANAN DASAR	BARANG	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	62	62	0			Pengadaan Kemenkes
		Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	110700	110700	0			
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	615	615	0			
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	615	615	0			
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	615	615	0			
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	93	93	0			
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	615	615	0			
		Kartu ibu/rekam medis ibu	615	615	0			
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	615	615	0			
		Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	44	44	0			
		Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG(proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	41	41	0			
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Formulir partograf	612	612	0			
		Kartu ibu/rekam medis ibu	612	612	0			
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)(terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	612	612	0			
		Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	44	44	0			
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	573	573	0			Pengadaan Kemenkes
		Vitamin K1 Injeksi	573	573	0			
		Salep/tetes mata antibiotik	573	573	0			
		Formulir bayi baru lahir	573	573	0			
		Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	6876	6876	0			
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	573	573	0			
		Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	44	44	0			
4	Pelayanan Kesehatan	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen	2694	2694	0			

	Balita	standar lain yang berlaku						
		Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	2694	2694	0			
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2694	2694	0			
		Vitamin A Biru(sesuai standar 6-11 bulan)	1146	1146	0			
		Vitamin A Merah(sesuai standar 12-59 bulan)	4242	4242	0			
		Vaksin imunisasi dasar: BCG	269	269	0			Pengadaan Kemenkes
		Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	269	269	0			Pengadaan Kemenkes
		Vaksin imunisasi dasar: IPV	539	539	0			Pengadaan Kemenkes
		Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	539	539	0			Pengadaan Kemenkes
		Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	269	269	0			Pengadaan Kemenkes
		Vaksin imunisasi lanjutan: DPT - HB - Hib	539	539	0			Pengadaan Kemenkes
		Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	269	269	0			Pengadaan Kemenkes
		Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	32400	32400	0			
		Peralatan Anafilaktik	563	563	0			
		Formula terapi gizi buruk	22	22	0			
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/ pesantren)	7883	7883	0			
		Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	7883	7883	0			
		Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	7883	7883	0			
		Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/ pesantren)	22	22	0			
		Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	22	22	0			
		Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-	199629	199629	0			

		17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)						
		Alat pemeriksaan Hb(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	248	248	0			
		Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	3839	3839	0			
		Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	22	22	0			
		Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	300	300	0			
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	361	361	0			
		Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkaran perut, Alat ukur Lingkaran Lengan Atas (LILA)	361	361	0			
		Alat: Tensimeter	361	361	0			
		Alat: Glukometer	361	361	0			
		Alat: Alat pemeriksa Hb	361	361	0			
		Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	20978	20978	0			
		Alat: KIT IVA Tes	22	22	0			
		Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	361	361	0			
		Kit Ophthalmologi komunitas	22	22	0			
		Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	22	22	0			
		Alat Pelayanan KB	45	45	0			
		a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	22	22	0			
		b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	22	22	0			
		c. Vasektomi set	1	1	0			
		Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	22	22	0			
		Vaksin Tetanus Difteri (Td)	100	100	0			Pengadaan Kemenkes
7	Pelayanan Kesehatan	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat	361	361	0			

	Pada Usia Lanjut	ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter						
		Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	361	361	0			
		Alat pemeriksaan kolesterol	361	361	0			
		Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	2016	2016	0			
		Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	2016	2016	0			
		Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	2016	2016	0			
		Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	361	361	0			
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	361	361	0			
		Obat Hipertensi	22	22	0			
		Tensimeter (mengukur tekanan darah)	361	361	0			
		Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	22	22	0			
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	22	22	0			
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Obat Diabetes Melitus	22	22	0			
		Fotometer atau Glukometer(melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	361	361	0			
		BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	418	418	0			
		Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	22	22	0			
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	22	22	0			
10	Persentase ODGJ berat	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa	22	22	0			

	yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	(PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)(minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)						
		Penyediaan Psikofarmaka(pengobatan/ medikasi)	22	22	0			
		Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	68	68	0			
		Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	22	22	0			
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	22	22	0			
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	22	22	0			
		Reagen Zn TB	22	22	0			
		Masker bedah dan Masker N95	22	22	0			
		Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	22	22	0			
		Katrid tes cepat molekuler	1149	1149	0			
		Formulir pencatatan dan pelaporan	22	22	0			
		Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	22	22	0			
		Tuberkulin	115	115	0			
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	22	22	0			
		Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	730	730	0			
		Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputum yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	730	730	0			
		Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	730	730	0			

Tabel 2.31. FORM 2.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dokter spesialis	19	19	0	
		Dokter	68	68	0	
		Dokter gigi	34	34	0	
		Perawat	289	289	0	
		Bidan	402	402	0	
		Kesehatan Lingkungan	27	27	0	
		Petugas Gizi	38	38	0	
		Tenaga Labor	42	42	0	
		Kesehatan Masyarakat	41	41	0	
		Tenaga Farmasi	83	83	0	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dokter spesialis	19	19	0	
		Dokter	68	68	0	
		Dokter gigi	34	34	0	
		Perawat	289	289	0	
		Bidan	402	402	0	
		Kesehatan Lingkungan	27	27	0	
		Petugas Gizi	38	38	0	
		Tenaga Labor	42	42	0	
		Kesehatan Masyarakat	41	41	0	
		Tenaga Farmasi	83	83	0	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dokter spesialis	19	19	0	
		Dokter	68	68	0	

		Dokter gigi	34	34	0	
		Perawat	289	289	0	
		Bidan	402	402	0	
		Kesehatan Lingkungan	27	27	0	
		Petugas Gizi	38	38	0	
		Tenaga Labor	42	42	0	
		Kesehatan Masyarakat	41	41	0	
		Tenaga Farmasi	83	83	0	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Dokter spesialis	19	19	0	
		Dokter	68	68	0	
		Dokter gigi	34	34	0	
		Perawat	289	289	0	
		Bidan	402	402	0	
		Kesehatan Lingkungan	27	27	0	
		Petugas Gizi	38	38	0	
		Tenaga Labor	42	42	0	
		Kesehatan Masyarakat	41	41	0	
		Tenaga Farmasi	83	83	0	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dokter spesialis	19	19	0	
		Dokter	68	68	0	
		Dokter gigi	34	34	0	
		Perawat	289	289	0	
		Bidan	402	402	0	
		Kesehatan Lingkungan	27	27	0	
		Petugas Gizi	38	38	0	

		Tenaga Labor	42	42	0	
		Kesehatan Masyarakat	41	41	0	
		Tenaga Farmasi	83	83	0	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dokter spesialis	19	19	0	
		Dokter	68	68	0	
		Dokter gigi	34	34	0	
		Perawat	289	289	0	
		Bidan	402	402	0	
		Kesehatan Lingkungan	27	27	0	
		Petugas Gizi	38	38	0	
		Tenaga Labor	42	42	0	
		Kesehatan Masyarakat	41	41	0	
		Tenaga Farmasi	83	83	0	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dokter spesialis	19	19	0	
		Dokter	68	68	0	
		Dokter gigi	34	34	0	
		Perawat	289	289	0	
		Bidan	402	402	0	
		Kesehatan Lingkungan	27	27	0	
		Petugas Gizi	38	38	0	
		Tenaga Labor	42	42	0	
		Kesehatan Masyarakat	41	41	0	
		Tenaga Farmasi	83	83	0	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dokter spesialis	19	19	0	
		Dokter	68	68	0	

		Dokter gigi	34	34	0	
		Perawat	289	289	0	
		Bidan	402	402	0	
		Kesehatan Lingkungan	27	27	0	
		Petugas Gizi	38	38	0	
		Tenaga Labor	42	42	0	
		Kesehatan Masyarakat	41	41	0	
		Tenaga Farmasi	83	83	0	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dokter spesialis	19	19	0	
		Dokter	68	68	0	
		Dokter gigi	34	34	0	
		Perawat	289	289	0	
		Bidan	402	402	0	
		Kesehatan Lingkungan	27	27	0	
		Petugas Gizi	38	38	0	
		Tenaga Labor	42	42	0	
		Kesehatan Masyarakat	41	41	0	
		Tenaga Farmasi	83	83	0	
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dokter spesialis	19	19	0	
		Dokter	68	68	0	
		Dokter gigi	34	34	0	
		Perawat	289	289	0	
		Bidan	402	402	0	
		Kesehatan Lingkungan	27	27	0	
		Petugas Gizi	38	38	0	

		Tenaga Labor	42	42	0	
		Kesehatan Masyarakat	41	41	0	
		Tenaga Farmasi	83	83	0	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Dokter spesialis	19	19	0	
		Dokter	68	68	0	
		Dokter gigi	34	34	0	
		Perawat	289	289	0	
		Bidan	402	402	0	
		Kesehatan Lingkungan	27	27	0	
		Petugas Gizi	38	38	0	
		Tenaga Labor	42	42	0	
		Kesehatan Masyarakat	41	41	0	
		Tenaga Farmasi	83	83	0	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dokter spesialis	19	19	0	
		Dokter	68	68	0	
		Dokter gigi	34	34	0	
		Perawat	289	289	0	
		Bidan	402	402	0	
		Kesehatan Lingkungan	27	27	0	
		Petugas Gizi	38	38	0	
		Tenaga Labor	42	42	0	
		Kesehatan Masyarakat	41	41	0	
		Tenaga Farmasi	83	83	0	

Tabel 2.32. FORM 2.C.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

N O.	KODE *)				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
								TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5		K	Rp				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp	
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			
1	1				Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar																		
	1	0	1		KESEHATAN																		
	1	0	0	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya angka harapan hidup	73.42	73.59	73.93	74.27	74.61	74.95	74.95										
	1	0	0	2.0	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100										
	1	0	0	2.0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4703	615	1,236,231,000	618	945,445,000	620	1,107,500,000	623	1,543,000,000	626	1,665,500,000	626	1,665,500,000				Bidang Kesmas

					Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terduga Menderita Tuberkulos is yang Mendapatk an Pelayanan Sesuai Standar															
	1	0	0	2.0	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatk an Pelayanan Sesuai Standar	5639	730	104,971,25 0	730	150,000,0 00	731	200,000,00 0	731	250,000,00 0	731	250,000,00 0	731	250,000,00 0	Bidang P2P

Tabel 2.33. FORM 2.C.4 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

N O.	KODE *)				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5		K	Rp			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
1	1				Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																	
1	0	2			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																	
1	0	0	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya angka harapan hidup	73.42	73.59	73.93	74.27	74.61	74.95	74.95									
1	0	0	2	2	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rata-rata tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100								
1	0	0	2	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4703	615	1,236,231,000	618	945,445,000	620	1,107,500,000	623	1,543,000,000	626	1,665,500,000	626	1,665,500,000	Bidang Kesmas
1	0	0	2	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin	4832	612	79,574,000	615	100,000,000	617	200,000,000	620	200,000,000	623	200,000,000	623	200,000,000	Bidang Kesmas

						yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar														
1	0	0	2.0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4536	573	30,150,00	592	105,000,000	613	105,000,000	633	225,000,000	655	255,000,000	655	255,000,000	Bidang Kesmas
1	0	0	2.0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24907	2694	112,175,900	2767	95,000,000	2841	195,000,000	2918	225,000,000	2997	250,000,000	2997	250,000,000	Bidang Kesmas
1	0	0	2.0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15107	7883	1,076,441,000	7765	753,900,000	7648	904,000,000	7534	947,200,000	7421	1,504,500,000	7421	1,504,500,000	Bidang Kesmas
1	0	0	2.0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	110852	20978	174,802,000	21188	300,000,000	21400	350,000,000	21614	500,000,000	21830	550,000,000	21830	550,000,000	Bidang P2P
1	0	0	2.0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Jumlah Penduduk	4419	2016	60,260,000	2072	65,000,000	2130	150,000,000	2190	150,000,000	2251	165,000,000	2251	165,000,000	Bidang Kesmas

					Lanjut	Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar														
1	0	0	2.0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15949	3121	36,275,000	3152	150,000,000	3184	250,000,000	3216	300,000,000	3248	350,000,000	3248	350,000,000	Bidang P2P
1	0	0	2.0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3518	418	122,658,000	418	350,000,000	418	350,000,000	418	350,000,000	419	450,000,000	419	450,000,000	Bidang P2P
1	0	0	2.0	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	844	68	311,315,000	68	332,150,000	68	440,900,000	68	1,022,200,000	68	1,036,900,000	68	1,036,900,000	Bidang P2P
1	0	0	2.0	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita	5080	1149	481,670,000	1147	835,239,000	1146	1,920,109,800	1144	2,904,464,200	1143	3,089,064,200	1143	3,089,064,200	Bidang P2P

						Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar														
1	0	0	2.0	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5639	730	104,971,250	730	150,000,000	731	200,000,000	731	250,000,000	731	250,000,000	731	250,000,000	Bidang P2P

D. Pelaksanaan

Tabel 2.34. FORM 2.D.2 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)				PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	615	615	100	1,264,431,000	1,184,771,850	93.7	DAK NF dan DAU ditentukan		
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	612	612	100	79,574,000	73,267,000	92.1	DAK NF dan DAU ditentukan		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	573	573	100	30,150,000	12,335,000	40.9	DAK NF dan DAU ditentukan		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	2694	2694	100	112,175,900	81,215,300	72.4	DAK NF dan DAU ditentukan		
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	7883	7883	100	1,075,841,000	924,100,730	85.9	DAK NF dan DAU ditentukan		
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	20978	20978	100	174,802,000	123,913,200	70.9	DAK NF dan DAU ditentukan		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	2016	2016	100	60,260,000	50,360,000	83.6	DAK NF dan DAU ditentukan		
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3121	3121	100	36,275,000	35,900,000	99.0	DAK NF dan DAU ditentukan		
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	418	418	100	122,658,000	120,653,818	98.4	DAK NF dan DAU ditentukan		
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	68	68	100	280,265,000	231,505,000	82.6	DAK NF dan DAU ditentukan		
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	1149	1149	100	485,420,000	412,406,000	85.0	DAK NF dan DAU ditentukan		
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	730	730	100	104,971,250	84,034,000	80.1	DAK NF dan DAU ditentukan		
					3,826,823,150	3,334,461,898	87.1			

2.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

A. Pengumpulan Data

Pemerintah membutuhkan data akurat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengumpulan data yang akurat dan terkini sangat penting untuk menjadi dasar untuk perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur air minum dan akses sanitasi yang efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Metode pengumpulan data dalam penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Survei langsung ke rumah tangga.
2. Wawancara dengan masyarakat dan petugas.
3. Pengamatan lapangan.
4. Analisis dokumen dan laporan.

Pengumpulan data yang dilakukan oleh perangkat daerah meliputi data-data antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
2. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Tabel 2.35. FORM 3.A.3 KONDISI SPAM JARINGAN PERPIPAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI			UNIT PELAYANAN	KONDISI		
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)	PDAM/UPTD/BADAN USAHA/KP SPAM	BEROPERASI	KUANTITAS	KUALITAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Harau	Sarilamak	Air Permukaan	Sarasah Air Hulu Harau	Tanjung Pati	150	60		PDAM dan KP SPAM	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI	
2	Mungka	Mungka	Air Permukaan	Batang Burai	Danguang – Danguang	50	5		PDAM dan KP SPAM	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI	
3	Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	Air Permukaan	Batang Kawek	Batang Kawek	150	15	5	PDAM dan KP SPAM	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI	
4	Situjuh Limo Nagari	Batang Bonjo	Air Permukaan	Batang Bonjo	Situjuh Gadang	50	10	5	PDAM dan KP SPAM	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI	
5	Akabiluru	Koto Tengah Batu Hampa	Air Permukaan	Bendungan PLTA Batang Agam	Batu Hampa	1500	12.5	2.5	PDAM dan KP SPAM	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI	
6	Akabiluru	Pauh Sangik	Air Permukaan	Sungai Balai Kudo	Batu Kudo	1500	10		PDAM dan KP SPAM	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI	
7	Kapur IX	Muaro Paiti	Air Permukaan	Batang Simonok	Batang Simonok	500	10		PDAM dan KP SPAM	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI	
8	Kapur IX	Sialang	Air Permukaan	Lubuak Sati	Sialang	500	20	10	PDAM dan KP SPAM	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI	
9	Payakumbuh	Simalanggang	PDAM	Air Curah PDAM Payakumbuh	Simalanggang				PDAM dan KP SPAM	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI	
10	Suliki	Suliki	Air Permukaan	Batang Gosan	Batang Gosan	1500	5		PDAM dan KP SPAM	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI	
11	Bukik Barisan	Banja Loweh	Air Permukaan	Embung Simon Guntung	Guntung	500	10		PDAM dan KP SPAM	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI	
12	Gunuang Omeh	Koto Tinggi	Air Permukaan	Sungai Dadok	Koto Tinggi	250	20	15	PDAM dan KP SPAM	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI	

Tabel 2.36. FORM 3.A.4 KONDISI SPALD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MCK Plus ⁺⁺	Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Guguak	Kubang		20		
2	MCK Plus ⁺⁺	Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Guguak	Guguak VIII Koto		20		
3	MCK Plus ⁺⁺	Nagari Tungkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Situjuah Limo Nagari	Tungkar		20		
4	MCK Plus ⁺⁺	Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Harau	Sarilamak		20		
5	MCK Plus ⁺⁺	Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Lareh Sago Halaban	Bukik Sikumpa		20		
6	MCK Plus ⁺⁺	Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Guguak	VII Koto Talago		20		
7	MCK Plus ⁺⁺	Nagari Koto Tengah Bt. Ampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Akabiluru	Koto Tengah Bt. Ampa		20		
8	MCK Plus ⁺⁺	Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Luak	Mungo		20		
9	MCK Plus ⁺⁺	Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Payakumbuh	Taeh Baruah		20		
10	MCK Plus ⁺⁺	Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Guguak	Guguak VIII Koto		20		
11	MCK Plus ⁺⁺	Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Suliki	Limbanang		20		
12	MCK Plus ⁺⁺	Nagari Banja Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Bukit Barisan	Banja Laweh		20		
13	MCK Plus ⁺⁺	Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Gunuang Omeh	Koto Tinggi		20		
14	MCK Plus ⁺⁺	Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Lareh Sago Halaban	Batu Payuang		20		
15	IPAL MIX MCK	Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Harau	Taram		10		
16	IPAL MIX MCK	Nagari Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Mungka	Sungai Antuan		10		
17	MCK Plus ⁺⁺	Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Akabiluru	Suayan		20		
18	MCK Plus ⁺⁺	Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Suliki	Sungai Rimbang		20		
19	MCK Plus ⁺⁺	Nagari Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima	Beroperasi	Suliki	Suliki		20		

		<i>Puluh Kota</i>							
20	MCK Plus ⁺⁺	<i>Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Suliki	Limbanang		20		
21	MCK Plus ⁺⁺	<i>Nagari Tungkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Situjuah Limo Nagari	Tungkar		20		
22	MCK Plus ⁺⁺	<i>Nagari Koto Tengah Bt. Ampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Akabiluru	Koto Tengah Bt. Ampa		20		
23	MCK Plus ⁺⁺	<i>Nagari Durian Gadang Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Akabiluru	Durian Gadang		20		
24	MCK Plus ⁺⁺	<i>Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Gunuang Omeh	Koto Tinggi		20		
25	MCK Plus ⁺⁺	<i>Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Gunuang Omeh	Pandam Gadang		20		
26	MCK Plus ⁺⁺	<i>Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Gunuang Omeh	Koto Tinggi		20		
27	MCK Plus ⁺⁺	<i>Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Gunuang Omeh	Pandam Gadang		20		
28	Toilet Umum	<i>Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Mungka	Mungka		10		
29	IPAL	<i>Nagari Koto Tengah Bt. Ampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Akabiluru	Koto Tengah Bt. Ampa		20		
30	IPAL	<i>Nagari Koto Tengah Bt. Ampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Akabiluru	Koto Tengah Bt. Ampa		20		
31	Toilet Umum	<i>Nagari Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Lareh Sago Halaban	Tanjung Gadang		75		
32	Toilet Umum	<i>Nagari Situjuh Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Situjuah Limo Nagari	Situjuh Batua		75		
33	Toilet Umum	<i>Nagari Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Payakumbuh	Sungai Beringin		75		
34	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	<i>Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Payakumbuh	Taeh Baruah		81		
35	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	<i>Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Payakumbuh	Taeh Baruah		75		
36	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	<i>Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Payakumbuh	Taeh Baruah		78		
37	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	<i>Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Payakumbuh	Taeh Baruah		43		
38	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	<i>Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Payakumbuh	Taeh Baruah		70		
39	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	<i>Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Akabiluru	Sariak Laweh		74		
40	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	<i>Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Payakumbuh	Taeh Baruah		76		
41	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	<i>Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Payakumbuh	Taeh Bukik		80		

42	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Payakumbuh	Taeh Bukik		88		
43	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Payakumbuh	Taeh Bukik		73		
44	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	Nagari Piobang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Payakumbuh	Piobang		70		
45	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	Nagari Piobang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Payakumbuh	Piobang		69		
46	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	Nagari Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Payakumbuh	Sungai Beringin		66		
47	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	Nagari Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Payakumbuh	Sungai Beringin		67		
48	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	Nagari Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Payakumbuh	Sungai Beringin		82		
49	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	Nagari Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Payakumbuh	Sungai Beringin		79		
50	Tangki Septik Komunal	Nagari Tungkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Situjuah Limo Nagari	Tungkar	22.5	35		
51	Tangki Septik Komunal	Nagari Situjuh Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Situjuah Limo Nagari	Situjuh Batua	22.5	35		
52	Tangki Septik Komunal	Nagari Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Situjuah Limo Nagari	Ladang Laweh	22.5	35		
53	Tangki Septik Komunal	Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Banda Dalam	22.5	35		
54	Tangki Septik Komunal	Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Gadang	22.5	35		
55	Tangki Septik Komunal	Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Harau	Taram	22.5	35		
56	Tangki Septik Komunal	Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Harau	Harau	22.5	35		
57	Tangki Septik Komunal	Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Harau	Solok Bio-Bio	22.5	35		
58	Tangki Septik Komunal	Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Harau	Sarilamak	22.5	35		
59	Tangki Septik Komunal	Nagari Pilubang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Harau	Pilubang	22.5	35		
60	Tangki Septik Komunal	Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Harau	Batu Balang	22.5	35		
61	Tangki Septik Komunal	Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Harau	Koto Tuo	22.5	35		
62	Tangki Septik Komunal	Nagari Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Harau	Tarantang	22.5	35		
63	Tangki Septik Komunal	Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Harau	Gurun	22.5	35		
64	Tangki Septik Komunal	Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Luak	Mungo	22.5	35		

65	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Luak	Andaleh	22.5	35		
66	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Luak	Sungai Kamuyang	22.5	35		
67	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Sikabu-kabu Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Luak	Sikabu-kabu	22.5	35		
68	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Guguak	Kubang	22.5	35		
69	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Guguak	Guguak VIII Koto	22.5	35		
70	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Guguak	VII Koto Talago	22.5	35		
71	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Guguak	Sungai Talang	22.5	35		
72	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Simpang Sugiran Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Guguak	Simpang Sugiran	22.5	35		
73	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	<i>Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Payakumbuh	Taeh Bukik		84		
74	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	<i>Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Payakumbuh	Taeh Bukik		77		
75	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	<i>Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Payakumbuh	Taeh Bukik		79		
76	MCK Plus ⁺⁺ + Jaringan Perpipaan	<i>Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Lareh Sago Halaban	Balai Panjang				
77	MCK Plus ⁺⁺ + Jaringan Perpipaan	<i>Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Lareh Sago Halaban	Halaban				
78	MCK Plus ⁺⁺ + Jaringan Perpipaan	<i>Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Suliki	Sungai Rimbang				
79	MCK Plus ⁺⁺ + Jaringan Perpipaan	<i>Nagari Kurai Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Suliki	Kurai				
80	MCK Plus ⁺⁺ + Jaringan Perpipaan	<i>Nagari Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Mungka	Jopang Manganti				
81	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	<i>Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Payakumbuh	Taeh Bukik		75		
82	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	<i>Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Payakumbuh	Taeh Bukik		74		
83	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	<i>Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Payakumbuh	Taeh Bukik		80		
84	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	<i>Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Payakumbuh	Simalanggang		71		
85	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	<i>Nagari Koto Tengah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Akabiluru	Koto Tengah Batu Ampa		70		
86	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	<i>Nagari Koto Tengah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Akabiluru	Koto Tengah Batu Ampa		68		
87	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	<i>Nagari Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Akabiluru	Batu Hampar		82		

88	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	Nagari Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Akabiluru	Batu Hampar		77		
89	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	Nagari Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Akabiluru	Batu Hampar		69		
90	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	Nagari Sungai Balantiak Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Akabiluru	Sungai Balantiak		78		
91	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	Nagari Sungai Balantiak Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Akabiluru	Sungai Balantiak		86		
92	Tangki Septik Komunal dan Bilik Jamban	Nagari Sungai Balantiak Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Akabiluru	Sungai Balantiak		70		
93	Tangki Septik Komunal	Nagari Baruah Gunung Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Bukit Barisan	Baruah Gunung	22.5	35		
94	Tangki Septik Komunal	Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Bukit Barisan	Sungai Naniang	22.5	35		
95	Tangki Septik Komunal	Nagari Koto Tengah Bukit Barisan Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Bukit Barisan	Koto Tengah Bukit Barisan	22.5	35		
96	Tangki Septik Komunal	Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Suliki	Tanjung Bungo	22.5	35		
97	Tangki Septik Komunal	Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Suliki	Limbanang	22.5	35		
98	Tangki Septik Komunal	Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Mungka	Mungka	22.5	35		
99	Tangki Septik Komunal	Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Mungka	Simpang Kapuak	22.5	35		
100	Tangki Septik Komunal	Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Mungka	Talang Maur	22.5	35		
101	Tangki Septik Komunal	Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Akabiluru	Suayan	22.5	35		
102	Tangki Septik Komunal	Nagari Pauh Sangik Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Akabiluru	Pauh Sangik	22.5	35		
103	Tangki Septik Komunal	Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Akabiluru	Sariak Laweh	22.5	35		
104	Tangki Septik Komunal	Nagari Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Akabiluru	Batu Hampar	22.5	35		
105	Tangki Septik Komunal	Nagari Koto Tengah Bt. Ampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Akabiluru	Koto Tengah Bt. Ampa	22.5	35		
106	Tangki Septik Komunal	Nagari Piobang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Payakumbuh	Piobang	22.5	35		
107	Tangki Septik Komunal	Nagari Sitanang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Lareh Sago Halaban	Sitanang	22.5	35		
108	Tangki Septik Komunal	Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Lareh Sago Halaban	Ampalu	22.5	35		
109	Tangki Septik Komunal	Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Lareh Sago Halaban	Tanjung Gadang	22.5	35		
110	Tangki Septik Komunal	Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Harau	Taram	22.5	35		

111	Tangki Septik Komunal	Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Lareh Sago Halaban	Balai Panjang	22.5	35		
112	Tangki Septik Komunal	Nagari Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Suliki	Andiang	22.5	35		
113	Tangki Septik Komunal	Nagari KOTO TANGAH SIMALANGGANG Kecamatan PAYAKUMBUH Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	PAYAKUMBUH	KOTO TANGAH SIMALANGGANG	22.5	56		
114	Tangki Septik Komunal	Nagari TAEH BARUAH Kecamatan PAYAKUMBUH Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	PAYAKUMBUH	TAEH BARUAH	22.5	50		
115	Tangki Septik Komunal	Nagari MUNGO Kecamatan LUAK Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	LUAK	MUNGO	22.5	54		
116	Tangki Septik Komunal	Nagari SUNGAI KAMUYANG Kecamatan LUAK Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	LUAK	SUNGAI KAMUYANG	22.5	57		
117	Tangki Septik Komunal	Nagari HALABAN Kecamatan LAREH SAGO HALABAN Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	LAREH SAGO HALABAN	HALABAN	22.5	63		
118	Tangki Septik Komunal	Nagari BATU PAYUANG Kecamatan LAREH SAGO HALABAN Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	LAREH SAGO HALABAN	BATU PAYUANG	22.5	53		
119	Tangki Septik Komunal	Nagari BALAI PANJANG Kecamatan LAREH SAGO HALABAN Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	LAREH SAGO HALABAN	BALAI PANJANG	22.5	32		
120	Tangki Septik Komunal	Nagari SITUJUAH BANDA DALAM Kecamatan SITUJUAH LIMO NAGARI Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	SITUJUAH LIMO NAGARI	SITUJUAH BANDA DALAM	22.5	26		
121	Tangki Septik Komunal	Nagari SITUJUAH BATUA Kecamatan SITUJUAH LIMO NAGARI Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	SITUJUAH LIMO NAGARI	SITUJUAH BATUA	22.5	50		
122	Tangki Septik Komunal	Nagari PILUBANG Kecamatan HARAU Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	HARAU	PILUBANG	22.5	60		
123	Tangki Septik Komunal	Nagari SOLOK BIO-BIO Kecamatan HARAU Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	HARAU	SOLOK BIO-BIO	22.5	57		
124	Tangki Septik Komunal	Nagari PANDAM GADANG Kecamatan GUNUANG OMEH Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	GUNUANG OMEH	PANDAM GADANG	22.5	56		
125	Tangki Septik Komunal	Nagari TALANG ANAU Kecamatan GUNUANG OMEH Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	GUNUANG OMEH	TALANG ANAU	22.5	64		
126	Tangki Septik Komunal	Nagari MANGGILANG Kecamatan PANGKALAN KOTO BARU Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	PANGKALAN KOTO BARU	MANGGILANG	22.5	51		
127	Tangki Septik Komunal	Nagari GUNUANG MALINTANG Kecamatan PANGKALAN KOTO BARU Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	PANGKALAN KOTO BARU	GUNUANG MALINTANG	22.5	50		
128	Tangki Septik Individual dan Bilik Jamban	Nagari BARUAH GUNUANG Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Bukik Barisan	BARUAH GUNUANG		64		
129	Tangki Septik Individual dan Bilik Jamban	Nagari BARUAH GUNUANG Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Bukik Barisan	BARUAH GUNUANG		62		
130	Tangki Septik Individual dan Bilik Jamban	Nagari Durian Gadang Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Akabiluru	Durian Gadang		83		
131	Tangki Septik Individual dan Bilik Jamban	Nagari Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Lareh Sago Halaban	Labuah Gunuang		75		
132	Tangki Septik Individual dan Bilik Jamban	Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota	Beroperasi	Bukik Barisan	Maek		73		

133	Tangki Septik Individual dan Bilik Jamban	<i>Nagari Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Akabiluru	Nagari Suayan		73		
134	Tangki Septik Individual dan Bilik Jamban	<i>Nagari Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Akabiluru	Nagari Suayan		79		
135	Tangki Septik Individual dan Bilik Jamban	<i>Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Payakumbuh	Taeh Bukik		65		
136	Tangki Septik Individual dan Bilik Jamban	<i>Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Payakumbuh	Taeh Bukik		68		
137	Tangki Septik Individual dan Bilik Jamban	<i>Nagari Tanjung gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Lareh Sago Halaban	Tanjung gadang		79		
138	Tangki Septik Individual dan Bilik Jamban	<i>Nagari Tanjung Pauh Kecamatan PANGKALAN KOTO BARU Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	PANGKALAN KOTO BARU	Tanjung Pauh		77		
139	Tangki Septik Individual dan Bilik Jamban	<i>Nagari Tarantang Kecamatan HARAU Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	HARAU	Tarantang		67		
140	Tangki Septik Individual dan Bilik Jamban	<i>Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Guguak	VII Koto Talago		71		
141	Tangki Septik Individual dan Bilik Jamban	<i>Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Guguak	VII Koto Talago		69		
142	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Luak	Andaleh	22.5	33		
143	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Lareh Sago Halaban	Bukik Sikumpa	22.5	51		
144	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Kapur IX	Galugua	22.5	25		
145	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Lareh Sago Halaban	Halaban	22.5	55		
146	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Harau	Harau	22.5	26		
147	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Pangkalan Koto Baru	Koto Alam	22.5	28		
148	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Kapur IX	Koto Lamo	22.5	25		
149	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Koto Tangah Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Bukit Barisan	Koto Tangah	22.5	25		
150	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Gunuang Omeh	Koto Tinggi	22.5	32		
151	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Akabiluru	Sariak Laweh	22.5	25		
152	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Payakumbuh	Simalanggang	22.5	30		
153	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Sitanang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Lareh Sago Halaban	Sitanang	22.5	50		
154	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Bukit Barisan	Sungai Naniang	22.5	25		
155	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Suliki	Sungai Rimbang	22.5	26		

156	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Pangkalan Koto Baru	Tanjuang Balik	22.5	29		
157	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Bukik Barisan	Baruah Gunuang	22.5	25		
158	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Lareh Sago Halaban	Bukik Sikumpa	22.5	15		
159	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Lareh Sago Halaban	Halaban	22.5	17		
160	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Payakumbuh	Koto Baru Simalanggang	22.5	28		
161	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Gunuang Omeh	Koto Tinggi	22.5	20		
162	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Mungka	Simpang Kapuak	22.5	25		
163	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Sitanang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Lareh Sago Halaban	Sitanang	22.5	17		
164	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Payakumbuh	Taeh Baruah	22.5	23		
165	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Gunuang Omeh	Talang Anau	22.5	21		
166	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Harau	Tarantang	22.5	30		
167	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Guguak	Guguak VIII Koto	22.5	5		
168	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Mungka	Jopang Manganti	22.5	4		
169	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Guguak	Guguak VIII Koto	22.5	1		
170	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Guguak	Kubang	22.5	5		
171	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari VIII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Guguak	VIII Koto Talago	22.5	2		
172	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Harau	Batu Balang	22.5	1		
173	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Luak	Kampung Tengah	22.5	6		
174	Tangki Septik Komunal	<i>Nagari Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	<i>Beroperasi</i>	Luak	Tarok	22.5	6		

B. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar yang memadai, terutama akses sanitasi dan air minum. Perhitungan kebutuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam tahapan perhitungan kebutuhan pelayanan dasar kebutuhan masyarakat akan akses sanitasi dan air minum memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan akses sanitasi dan air minum.
2. Menghitung kebutuhan infrastruktur sanitasi dan air minum.
3. Mengalokasikan anggaran secara efektif.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan sanitasi dan air minum.
5. Memantau kemajuan dan evaluasi program.

Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:

1. Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri.
3. Kondisi bencana.
4. Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Tabel 2.37. FORM 3.B.3 RUMAH TERLAYANI SPAM

No.	KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA	JORONG	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLAYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH	
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Harau	Harau	Tanjung Pati		Edwarti		4	1					1	
2	Harau	Harau	Tanjung Pati		PAM Tirta Luak Nan Bungsu		4						1	
3	Harau	Harau	Tanjung Pati		PAM TLNB Teknik		4						1	
4	Harau	Harau	Tanjung Pati		PAM TLNB Tangki		4						1	
5	Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	Pangkalan		M Afandi		4	1					1	
6	Kapur XI	Muaro Paiti	Kampung Baru		Jasni Juita		4	1					1	
7	Kapur XI	Muaro Paiti	Dekat Surau Blok L MP		Dika Rajestra		4	1					1	
8	Suliki	Suliki	Pinago		Asril		4	1					1	
9	Suliki	Suliki	Pinago		Riko Chandra		4	1					1	
10	Suliki	Suliki	Limbanang		Rasmi		4	1					1	
11	Suliki	Suliki	Limbanang		Gusrina Suzenti		4	1					1	
12	Suliki	Suliki	Ekor Parit		Maidarlis		4	1					1	
13	Suliki	Suliki	Suliki Barat		TPA Masjid Muslimin		4						1	
14	Suliki	Suliki	Sungai Rimbang		Kantor Jorong		4						1	
15	Suliki	Suliki	Sungai Rimbang		Abel II		4	1					1	
16	Suliki	Suliki	Limbanang		Mesjid Taqwa		4						1	
17	Suliki	Suliki	Limbanang		Isnel		4	1					1	
18	Suliki	Suliki	Suliki Barat		Hanafi		4	1					1	
19	Suliki	Suliki	Pinago Dalam		Arnen		4	1					1	
20	Suliki	Suliki	Suliki Barua		Hendra		4	1					1	
21	Suliki	Suliki	Damar Tinggi		Mesjid Nurul Iman		4						1	
22	Suliki	Suliki	Suliki Pasar		Yoga Mayhatta		4	1					1	
23	Suliki	Suliki	Suliki Pasar		Alena Wati		4	1					1	
24	Suliki	Suliki	Batu Bauk		Zainal Arif		4	1					1	

25	Suliki	Suliki	Sebelum RS Suliki	Yuliati		4	1					1	
26	Suliki	Suliki	Limbanang	Bima		4	1					1	
27	Suliki	Suliki	Pinago	KSU Tani Murni		4	1					1	
28	Suliki	Suliki	Sebelum RS Suliki	Yenni		4	1					1	
29	Suliki	Suliki	Limabanang Baruah	Medi Marsony		4	1					1	
30	Suliki	Suliki	Sungai Rimbang	Kantor Wali Nagari		4						1	
31	Suliki	Suliki	Depan Kantor Wali	Mesjid		4						1	
32	Suliki	Suliki	Limabnang	Kantor Wali Nagari		4						1	
33	Suliki	Suliki	Kampung Duri	Sandrio Ifanur		4	1					1	
34	Suliki	Suliki	Jln Lamsuri	Mayus		4	1					1	
35	Suliki	Suliki	Belakang Puskesmas	M.Nasir		4	1					1	
36	Suliki	Suliki	Cinta Maju	Ijum		4	1					1	
37	Suliki	Suliki	Koto Tinggi MP	Afriwal		4	1					1	
38	Harau	Harau	Tanjung Pati	Isra Ramadani		4	1					1	
39	Akabiluru	Pauh Sangik	Pauh Sangik	Masnawati		4	1					1	
40	Harau	Tanjung Pati	Pulutan Center 2 F 21	Yulimal		4	1					1	
41	Harau	Tanjung Pati	Padang Rajo Land A 1	Rusanto		4	1					1	
42	Harau	Tanjung Pati	Pulutan Center 2 A 19	Sari Rukmana Okta		4	1					1	
43	Akabiluru	Batu Hampa	Piladang	Welni		4	1					1	
44	Akabiluru	Batu Hampa	Simp Batu Hampa	Mursyida		4	1					1	
45	Harau	Sarilamak	Sarilamak	Tumulus Marbun		4	1					1	
46	Harau	Tanjung Pati	Pulutan Center II	Bedeng		4	1					1	
47	Harau	Tanjung Pati	Pulutan Center II A 15	Salsabila		4	1					1	
48	Harau	Tanjung Pati	Pulutan Center II A 17	Rio Mandala Putra		4	1					1	
49	Harau	Tanjung Pati	Villa Garden View	Sri Handani		4	1					1	
50	Harau	Tanjung Pati	Padang Rajo	Windi Medya Sari		4	1					1	
51	Harau	Tanjung Pati	Villa Garden View	Chico Aditya Putra		4	1					1	
52	Harau	Tanjung Pati	Villa Garden View	Maisyita Rahmi		4	1					1	
53	Kapur XI	Sialang	Rona Pembangunan	Witra Fernanda		4	1					1	
54	Akabiluru	Batu Hampa	Piladang	Sumardi		4	1					1	

55	Akabiluru	Batu Hampa	Tengah Padang	Piki Pebrian		4	1					1	
56	Harau	Tanjung Pati	Perm Padang Rajo 2 C 2	Bima Prahagia		4	1					1	
57	Harau	Tanjung Pati	Pulutan Center II F 16	Pratiwi Handayani		4	1					1	
58	Harau	Tanjung Pati	Villa Garden View D 6	Ivanni Kurniawan		4	1					1	
59	Harau	Tanjung Pati	Tanjung Pati	Mardiati Said		4	1					1	
60	Harau	Tanjung Pati	Samping Koramil	Budiarto		4	1					1	
61	Kapur XI	Pauh Sangik	Pauh Sangik	Misnar		4	1					1	
62	Kapur XI	Pauh Sangik	Pauh Sangik	Yasni		4	1					1	
63	Kapur XI	Pauh Sangik	Pauh Sangik	Syahrial		4	1					1	
64	Harau	Tanjung Pati	Simp gg Perdagangan	Bahni Weldi		4	1					1	
65	Harau	Tanjung Pati	Tarantang	Muhannad Asbi Sihotang		4	1					1	
66	Harau	Tanjung Pati	Tanjung Pati	Eka Ibrahim		4	1					1	
67	Harau	Tanjung Pati	Perm Sarilamak Residence 2 C 4	Siska Anggraini		4	1					1	
68	Harau	Tanjung Pati	Per Sarilamak Residence C 5	Emalis		4	1					1	
69	Harau	Tanjung Pati	Villa Garden View C 5	Helmawati		4	1					1	
70	Harau	Tanjung Pati	Perm Pulutan Center II J 22	M Alfarel Seikh		4	1					1	
71	Harau	Tanjung Pati	Villa Garden C 4	Abdi Saad Farezi		4	1					1	
72	Harau	Tanjung Pati	Perm Arash	Roni Putra Chaniago		4	1					1	
73	Harau	Tanjung Pati	Perm Sarilamak Residence 2 B 13	Frian Utama Putra		4	1					1	
74	Harau	Tanjung Pati	Purwajaya	Indria Ukhrita		4	1					1	
75	Harau	Tanjung Pati	Lubuak Limpato	Wilson Fitriadi II		4	1					1	
76	Suliki	Guntuang	Siboka Andiang	Susy Anna		4	1					1	
77	Suliki	Guntuang	Siboka Andiang	Wina Ade Sari		4	1					1	
78	Gunuang Omeh	Koto Tinggi	Sungai Dadok	Doni		4	1					1	
79	Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	Kapas Panji	Alreski		4	1					1	
80	Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	Pasar baru	Nur Afni		4	1					1	
81	Suliki	Suliki	Suliki	Ruang Sidang Suliki		4	1					1	
82	Akabiluru	Pauh Sangik	Seberang Parit	Asnimar		4	1					1	

83	Akabiluru	Pauh Sangik	Tambun Ijuk	Safrawati		4	1					1	
84	Akabiluru	Pauh Sangik	Suayan Tinggi	Vesti		4	1					1	
85	Harau	Tanjung Pati	Cluster Agus Salim A 2	Eliwarti		4	1					1	
86	Harau	Tanjung Pati	Padang Rajo	Monika Aprillia		4	1					1	
87	Harau	Tanjung Pati	Perm Padang Rajo C 7	Agus Dani		4	1					1	
88	Harau	Tanjung Pati	Perm Padang Rajo B 5	Rivaldo Areihan		4	1					1	
89	Harau	Tanjung Pati	Sarilamak Residence II E 3	Herni Lesdewi		4	1					1	
90	Harau	Tanjung Pati	Villa Garden B 13	Azhari Cahyadi		4	1					1	
91	Harau	Tanjung Pati	Villa Garden C 11	Misbahul Firdaus		4	1					1	
92	Kapur XI	Muaro Paiti	SPI	Bisri Anovia		4	1					1	
93	Kapur XI	Muaro Paiti	Durian Tinggi	Samsia		4	1					1	
94	Akabiluru	Pauh Sangik	Seberang Parit	Widya Leli Novia		4	1					1	
95	Suliki	Suliki	Sungai Rimbang	Nengsi Fitria		4	1					1	
96	Suliki	Guntuang	Simp Limo Andiang	Indra Edrita		4	1					1	
97	Suliki	Guntuang	Simp Limo Andiang	Fitria Novaliza		4	1					1	
98	Akabiluru	Batu Hampa	Seberang Parit	SD Islam Baitunaim		4						1	
99	Akabiluru	Batu Hampa	Seberang Parit	Zul Aini		4	1					1	
100	Akabiluru	Batu Hampa	Piladang	Hidrwati		4	1					1	
101	Akabiluru	Batu Hampa	Piladang	Zuraida		4	1					1	
102	Akabiluru	Batu Hampa	Seberang Parit	Fitri Yeni		4	1					1	
103	Akabiluru	Batu Hampa	Seberang Parit	Rahmah Syafitri		4	1					1	
104	Akabiluru	Batu Hampa	Tambun Ijuk	Darwati		4	1					1	
105	Akabiluru	Batu Hampa	Piladang	Maisir		4	1					1	
106	Akabiluru	Batu Hampa	Piladang	Saribal Derila		4	1					1	
107	Akabiluru	Batu Hampa	Tambun Ijuk	Hermansyah		4	1					1	
108	Harau	Tanjung Pati	Perm Pulutan Center II B 6	Agustian		4	1					1	
109	Harau	Tanjung Pati	Perm Pulutan Center II B 7	Agustian II		4	1					1	
110	Akabiluru	Batu Hampa	Ambacang Kunyit	Dedet Gusriandi		4	1					1	
111	Kapur XI	Muaro Paiti	Talawi	Arneng Dawati		4	1					1	

112	Kapur XI	Muaro Paiti	Pasar MP	Asnani Arief		4	1					1	
113	Kapur XI	Muaro Paiti	Kampung Dalam	Santi		4	1					1	
114	Suliki	Guntuang	Simp Limo Andiang	Ernita Azwar		4	1					1	
115	Kapur XI	Sialang	Ujung Lobu	Darmases		4	1					1	
116	Kapur XI	Muaro Paiti	Koto Bangun	Syafrudin		4	1					1	
117	Kapur XI	Muaro Paiti	Kampung Baru	Ernizam		4	1					1	
118	Kapur XI	Muaro Paiti	Koto Bangun	Syamsurizon		4	1					1	
119	Kapur XI	Muaro Paiti	Kampung Dalam	Pipi Harianti		4	1					1	
120	Kapur XI	Muaro Paiti	Kampung Talawi	Syahrial Afrialdi		4	1					1	
121	Kapur XI	Muaro Paiti	Kampung Dalam	Hamsarudin		4	1					1	
122	Kapur XI	Muaro Paiti	Muaro Paiti	Kasilubis II		4	1					1	
123	Akabiluru	Batu Hampa	Seberang Parit	Herawati		4	1					1	
124	Akabiluru	Batu Hampa	Piladang	Susi Haslini		4	1					1	
125	Akabiluru	Batu Hampa	Piladang	Winda Nofita Sari		4	1					1	
126	Akabiluru	Batu Hampa	Tanjung Bayur	Rira Yulita		4	1					1	
127	Akabiluru	Batu Hampa	Seberang Parit	Hondri Yusman		4	1					1	
128	Akabiluru	Batu Hampa	Seberang Parit	Yogi Amiryandi		4	1					1	
129	Harau	Tanjung Pati	Sarilamak Residence II E 2	Raudati Muliani		4	1					1	
130	Harau	Tanjung Pati	Sarilamak Residence II E 4	Lisa Susanti		4	1					1	
131	Kapur XI	Muaro Paiti	SPI Muaro Paiti	Syamsul Mikar		4	1					1	
132	Kapur XI	Sialang	Durti	Helky Sandra		4	1					1	
133	Suliki	Guntuang	Andiang	Ronal Reymartin		4	1					1	
134	Suliki	Suliki	Koto Kociak	Zaharni		4	1					1	
135	Gunuang Omeh	Koto Tinggi	Kampung Melayu	Upik		4	1					1	
136	Suliki	Suliki	Sungai Rimbang	SMKN 1 Suliki		4						1	
137	Suliki	Suliki	Sungai Rimbang	Rini Elia		4	1					1	
138	Akabiluru	Batu Hampa	Seberang Parit	Lailatul Fitrya		4	1					1	
139	Akabiluru	Batu Hampa	Seberang Parit	Zul Amri		4	1					1	
140	Akabiluru	Pauh Sangik	Suayan Tinggi	Kasmawati		4	1					1	

141	Harau	Tanjung Pati	Andara Jaya B 3	Zulkifli Muhammad Ali		4	1					1	
142	Harau	Tanjung Pati	Andara Jaya B 2	Fuadi Arif		4	1					1	
143	Harau	Tanjung Pati	Andara Jaya B 1	Rinny Syamsuir		4	1					1	
144	Harau	Tanjung Pati	Andara Jaya B 4	Beni Oktavianda		4	1					1	
145	Harau	Tanjung Pati	Pulutan Center 2 C 17	Lili Susanti		4	1					1	
146	Harau	Tanjung Pati	Pulutan Center 2 C 17	Aulia Rahmi		4	1					1	
147	Harau	Tanjung Pati	Villa Garden View D 2	Yance Robinson		4	1					1	
148	Harau	Tanjung Pati	Villa Garden View A 2	Rahmad Azhari		4	1					1	
149	Harau	Tanjung Pati	Villa Garden View A 3	Yeniati		4	1					1	
150	Harau	Tanjung Pati	Perm Sarilamak Residence II C 14	Rahmanila		4	1					1	
151	Harau	Tanjung Pati	Perm Sarilamak Residence II C 16	Ardy Syah Putra		4	1					1	
152	Harau	Tanjung Pati	Batu Balang	Endrijon Dt Rajo		4	1					1	
153	Harau	Tanjung Pati	Ketinggian	Ratih Dwi Putri		4	1					1	
154	Harau	Tanjung Pati	Pulutan	Atief Saputra		4	1					1	
155	Harau	Tanjung Pati	Perm Pulutan Permai	Imelfina Musthofa		4	1					1	
156	Harau	Tanjung Pati	Tanjung Pati	Khris Gajahera		4	1					1	
157	Harau	Tanjung Pati	Purwajaya	Mastiro Simanjuntak III		4	1					1	
158	Harau	Tanjung Pati	Purwajaya	Mastiro Simanjuntak IV		4	1					1	
	Total						640						

TAHAPAN PERHITUNGAN

Tabel 2.38. FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPALD

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JORONG	RT	KEDADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN/PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA	TANPA AKSES			AKSES DASAR / AKSES LAYAK PERDESAAN	AKSES LAYAK			AKSES AMAN SPALD-S		AKSES AMAN SPALD-T		
												NON	BAB	CUBLUK (PERKOTAAN)		CUBLUK	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL	TANGKI SEPTIK KOMUNAL	MCK	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL	TANGKI SEPTIK KOMUNAL	IPALD PERMUKIMAN	IPALD KAWASAN TERENTU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Luak	Mungo	Indo Baleh Timur		34.19	Perdesaan	Sedang	DASNI	1307044707660003	1	1		1										
2	Luak	Mungo	Indo Baleh Timur		34.19	Perdesaan	Sedang	YULIANA HERSIH	1307046311980001	2	1		1										
3	Luak	Mungo	Indo Baleh Timur		34.19	Perdesaan	Sedang	AURIMEN EFENDI	1307090410910001	4	1		1										
4	Luak	Mungo	Indo Baleh Timur		34.19	Perdesaan	Sedang	EFRIZAL	1307040808810003	5	1				1								
5	Luak	Mungo	Indo Baleh Timur		34.19	Perdesaan	Sedang	ASNIMAR	1307047112610002	1	1				1								
6	Luak	Mungo	Indo Baleh Timur		34.19	Perdesaan	Sedang	RINTO APRIANTO	1376030106990003	3	1		1										
7	Luak	Mungo	Indo Baleh Timur		34.19	Perdesaan	Sedang	RIYO SUPRIADI	1307040711850002	5	1				1								
8	Luak	Mungo	Indo Baleh Timur		34.19	Perdesaan	Sedang	RAJAB	1307041104620001	5	1		1										
9	Luak	Mungo	Indo Baleh Timur		34.19	Perdesaan	Sedang	DEVI ZULHERI	1307041601820001	5	1		1										
10	Luak	Mungo	Indo Baleh Timur		34.19	Perdesaan	Sedang	ERIAN TO	1376022402800001	4	1		1										
11	Luak	Mungo	Indo Baleh Timur		34.19	Perdesaan	Sedang	MENTAHRIL	1376031201540004	4	1		1										
12	Luak	Mungo	Indo Baleh Timur		34.19	Perdesaan	Sedang	SYARBAINI PILIANG	1308041502760002	1	1		1										
13	Luak	Mungo	Indo Baleh Timur		34.19	Perdesaan	Sedang	EPI SUSANTI	1307044806770001	3	1		1										
14	Luak	Mungo	Indo Baleh Timur		34.19	Perdesaan	Sedang	ERNIS	1307045206670001	2	1		1										

15	Luak	Mungo	Indo Baleh Timur	34.19	Perdesaan	Sedang	WARDI	130704270770002	3	1	1									
16	Luak	Mungo	Indo Baleh Timur	34.19	Perdesaan	Sedang	YUDHA PRATAMA	1307042209940001	3	1	1									
17	Luak	Mungo	Indo Baleh Timur	34.19	Perdesaan	Sedang	ACIN NOVITA	1307044806820001	2	1	1									
18	Gunuang Omeh	Panda m Gadang	Kampung Gaduang	86	Perdesaan	Sedang	SAMSIMAR	130708171220005	1	1	1									
19	Gunuang Omeh	Panda m Gadang	Kampung Gaduang	86	Perdesaan	Sedang	MISNAR	130708190620004	1	1	1									
20	Gunuang Omeh	Panda m Gadang	Kampung Gaduang	86	Perdesaan	Sedang	HENDRA ADIAL PUTRA	1307080909220001	1	1	1									
21	Gunuang Omeh	Panda m Gadang	Kampung Gaduang	86	Perdesaan	Sedang	EMARIATI	1307081207220003	2	1	1									
22	Gunuang Omeh	Panda m Gadang	Kampung Gaduang	86	Perdesaan	Sedang	ALZAM PEDRI	1307082312070066	3	1	1									
23	Gunuang Omeh	Panda m Gadang	Kampung Gaduang	86	Perdesaan	Sedang	ARIF RAHMAN HAKIM	1307081107230002	2	1	1									
24	Gunuang Omeh	Panda m Gadang	Kampung Gaduang	86	Perdesaan	Sedang	MILA SARTIKA	1307080211150001	3	1	1									
25	Gunuang Omeh	Panda m Gadang	Sungai Mangkirai	86	Perdesaan	Sedang	NOFRIZAL	1471122911970001	4	1	1									
26	Gunuang Omeh	Panda m Gadang	Sungai Mangkirai	86	Perdesaan	Sedang	BAIRI HENDRI	1307081110760001	6	1	1									
27	Gunuang Omeh	Panda m Gadang	Sungai Mangkirai	86	Perdesaan	Sedang	ZAMRI	130708200860001	3	1	1									
28	Gunuang Omeh	Panda m Gadang	Sungai Mangkirai	86	Perdesaan	Sedang	RIZALDI	1307081011990001	2	1	1									
29	Gunuang Omeh	Panda m Gadang	Sungai Mangkirai	86	Perdesaan	Sedang	OH	1307080210750001	3	1	1									
30	Gunuang Omeh	Panda m Gadang	Sungai Mangkirai	86	Perdesaan	Sedang	ARDIDOS	1.30708E+15	1	1	1									
31	Gunuang Omeh	Panda m Gadang	Sungai Mangkirai	86	Perdesaan	Sedang	NASRUL	1.30708E+15	5	1	1									
32	Gunuang Omeh	Panda m	Sungai Mangkirai	86	Perdesaan	Sedang	NURHAYATI	1.30708E+15	1	1	1									

82	MUNGKA	MUNGKA	MUNGKA TANGAH	901	PERDESAA N	Rendah	YONI INDRA	1307111006 850002	4	1				1						
83	MUNGKA	MUNGKA	PADANG HARAPAN	901	PERDESAA N	Rendah	ROZI PUTRA	1307110204 800001	4	1				1						
84	MUNGKA	MUNGKA	PADANG HARAPAN	901	PERDESAA N	Rendah	EDITIAWARMAN	1307112411 570002	4	1				1						
85	MUNGKA	MUNGKA	PADANG HARAPAN	901	PERDESAA N	Rendah	YUSNETI	1307114107 850011	4	1				1						
86	MUNGKA	MUNGKA	PADANG BARU	901	PERDESAA N	Rendah	GANTI OKTAVIANDA	1307112708 930001	4	1				1						
87	MUNGKA	MUNGKA	PADANG BARU	901	PERDESAA N	Rendah	WALHAMDI	1307111308 800001	4	1				1						
88	MUNGKA	MUNGKA	PADANG BARU	901	PERDESAA N	Rendah	ADE YUSRIZAL	1306032330 860002	4	1				1						
89	MUNGKA	MUNGKA	PADANG BARU	901	PERDESAA N	Rendah	ROSMIMI	1307114310 730001	4	1				1						
90	LAREH SAGO HALABAN	LABUAH GUNUANG	KAYU TANAM	431.26	PERDESAA N	Sangat Tinggi	YANI INDRIANI	1307096003 950001	4	1				1						
91	LAREH SAGO HALABAN	LABUAH GUNUANG	SIMPANG EMPAT BALAI JARIANG	431.26	PERDESAA N	Sangat Tinggi	M. NASIR	1.30709E+15	4	1				1						
92	LAREH SAGO HALABAN	LABUAH GUNUANG	SIMPANG EMPAT BALAI JARIANG	431.26	PERDESAA N	Sangat Tinggi	LOLA ADILA	1307094303 860001	4	1				1						
93	LAREH SAGO HALABAN	LABUAH GUNUANG	SIMPANG EMPAT BALAI JARIANG	431.26	PERDESAA N	Sangat Tinggi	AYU RESTI FAUZI		4	1				1						
94	LAREH SAGO HALABAN	LABUAH GUNUANG	JORONG TALAWEH	431.26	PERDESAA N	Sangat Tinggi	RATNA WILIS	1307094107 560075	4	1				1						
95	LAREH SAGO HALABAN	LABUAH GUNUANG	JORONG TALAWEH	431.26	PERDESAA N	Sangat Tinggi	NURMAYULITA	1307095102 830002	4	1				1						
96	LAREH SAGO HALABAN	LABUAH GUNUANG	JORONG TALAWEH	431.26	PERDESAA N	Sangat Tinggi	BELLA SAFIRA	1307096210 980002	4	1				1						
97	LAREH SAGO HALABAN	LABUAH GUNUANG	SIMPANG EMPAT KABINDU	431.26	PERDESAA N	Sangat Tinggi	ARIF SUDIANTO		4	1				1						
98	LAREH SAGO	LABUAH	SIMPANG EMPAT	431.26	PERDESAA N	Sangat Tinggi	ROZA ADRIA	1307094302 9110002	4	1				1						

	HALABAN	GUNUANG	KABINDU																		
99	LAREH SAGO HALABAN	LABUAH GUNUANG	SIMPANG EMPAT KABINDU	431.26	PERDESAAN	Sangat Tinggi	FEBRINA		4	1				1							
100	LAREH SAGO HALABAN	LABUAH GUNUANG	BANJAR SARI	431.26	PERDESAAN	Sangat Tinggi	SEFRIZON		4	1				1							
101	LAREH SAGO HALABAN	LABUAH GUNUANG	LAREH NAN PANJANG	431.26	PERDESAAN	Sangat Tinggi	SYAFRIANTO		4	1				1							
102	LAREH SAGO HALABAN	LABUAH GUNUANG	LAREH NAN PANJANG	431.26	PERDESAAN	Sangat Tinggi	ERLIN ERWENSIH		4	1				1							
103	LAREH SAGO HALABAN	LABUAH GUNUANG	DUSUN NAN ONAM	431.26	PERDESAAN	Sangat Tinggi	ADISON		4	1				1							
104	LAREH SAGO HALABAN	LABUAH GUNUANG	DUSUN NAN ONAM	431.26	PERDESAAN	Sangat Tinggi	ELVIANA		4	1				1							

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan ke dalam rencana strategis (renstra) Perangkat Daerah dan rencana kerja (renja) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengumpulan dan pendataan harus sesuai dengan standar teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun. Hasil pendataan yang dilakukan oleh PD diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Dalam tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar kebutuhan masyarakat akan akses sanitasi dan air minum memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan akses sanitasi dan air minum.
2. Mengurangi risiko penyakit terkait sanitasi dan air minum.
3. Meningkatkan efisiensi biaya operasional.
4. Memperbaiki lingkungan hidup.
5. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat.

TAHAPAN PERENCANAAN

Tabel 2.39. FORM 3.C.3 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
						LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	50	SR	Pembangunan SPAM Nagari Sungai Kamunyang	1.539.000.000	DPUPR
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rumah tangga yang memperoleh akses air minum					
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun					
2	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Pemasangan Sambungan Baru PDAM	Pemasangan Sambungan Baru PDAM	110	SR	Tersebar di beberapa Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota	208,000,000	PDAM

TAHAPAN PERENCANAAN

Tabel 2.40. FORM 3.C.4 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
						LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	85.05	%	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Gunuang Malintang Kec. Pangkalan Koto Baru	225,000,000	DPUPR
		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	22.5	M3/Jari	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Mungo Kec. Luak	150,000,000	DPUPR
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	40	Rumah	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Pandam Gadang Kec. Gunuang Omeh	225,000,000	DPUPR
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Intervensi Kesehatan Lingkungan		45	Rumah	Intervensi Kualitas Kesehatan Lingkungan Pada Lokasi Nagari Gelugur.	100,000,000	DINKES
		Intervensi Kualitas Kesehatan Lingkungan				Intervensi Kualitas Kesehatan Lingkungan Pada Lokasi Nagari Mungka.	100,000,000	DINKES
		Padat Karya Tunai Desa (PKTD)				Intervensi Kualitas Kesehatan Lingkungan Pada Lokasi Nagari Labuah Gunuang.	100,000,000	DINKES

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dibutuhkan dan atau melakukan kerjasama daerah.

Dalam melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara, pemerintah daerah dapat: membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu; dan atau memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan atau jasa, kupon, subsidi atau bentuk bantuan lainnya. Penyediaan barang dan atau jasa yang dibutuhkan diterapkan sesuai dengan standar teknis SPM. Kemudian selanjutnya, kerjasama daerah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Dalam tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar kebutuhan masyarakat akan akses sanitasi dan air minum dilaksanakan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan: Menyusun rencana pelaksanaan SPM.
2. Pengadaan: Mengadakan peralatan dan bahan.
3. Konstruksi: Membangun infrastruktur sanitasi dan air minum.
4. Pemeliharaan: Melakukan pemeliharaan rutin.
5. Pengawasan: Mengawasi kualitas pelayanan.
6. Evaluasi: Mengevaluasi kinerja pelayanan dasar.

Tabel 2.41. FORM 3.D.3 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET	REALISASI		
			TOTAL	TERLAYANI JP	TERLAYA NI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
1	Harau		14,641	9,620	4,597	424
2	Payakumbuh		9,776	946	5,210	3,620
3	Mungka		6,942	2,184	4,523	235
4	Suliki		3,787	2,449	1,297	41
5	Bukik Barisan		5,818	3,522	1,515	781
6	Gunuang Omeh		3,640	3,138	671	
7	Akabiluru		7,421	3,829	3,441	151
8	Situjuah Limo Nagari		6,083	1,960	2,209	1,914
9	Pangkalan Koto Baru		7,464	3,525	2,284	1,655
10	Kapur IX		7,133	4,954	2,284	
11	Guguak		9,157	1,422	5,423	2,312
12	Luak		7,276	1,465	3,344	2,467
13	Lareh Sago Halaban		9,970	4,644	4,374	952
TOTAL			99,108	43,658	41,172	14,278

TAHAPAN PELAKSANAAN

Tabel 2.42. FORM 3.D.4 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	KECAMATAN	DESA	TARGET				REALISASI					
			TOTAL	AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAAN	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T	TANPA AKSES	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Payakumbuh		14,641	14,641	1464	293	10,264	3,974	771	403		
2	Akabiluru		9,776	9,776	978	196	5,369	4,132	417	275		
3	Luak		6,942	6,942	694	139	2,429	4,449	312	64		
4	Lareh Sago Halaban		3,787	3,787	379	76	-354	3,770	2,066	371		
5	Situjuah Limo Nagari		5,818	5,818	582	116	1,956	3,702	352	160		
6	Harau		3,640	3,640	364	73	-4,299	7,507	2,364	432		
7	Guguak		7,421	7,421	742	148	3,590	3,653	1,570	178		
8	Mungka		6,083	6,083	608	122	4,085	1,928	1,240	70		
9	Suliki		7,464	7,464	746	149	5,913	1,337	618	214		
10	Bukik Barisan		7,133	7,133	713	143	5,301	1,657	1,781	175		
11	Kapur IX		9,157	9,157	916	183	6,312	2,666	2,335	179		
12	Pangkalan Koto Baru		7,276	7,276	728	146	4,912	2,032	3,257	332		
13	Gunuang Omeh		9,970	9,970	997	199	6,672	3,003	1,248	295		
Total *)			99,108	99,108	99,108	9911	1982	52,150	43,810	18,331	3148	0

2.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Penerapan SPM urusan perumahan rakyat pada tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman.

A. Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data mencakup jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu layanan dasarnya. Kemudian data yang dikumpulkan pada tahapan pertama ini adalah terkait dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Pengumpulan dan pendataan harus sesuai dengan standar teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% dari target dan Indikator penerima layanan setiap tahun. Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Untuk pengumpulan Data SPM Bidang Perumahan Rakyat dilakukan melalui survey lapangan terhadap masyarakat terdampak bencana alam perkejadian yang telah ditetapkan sebagai bencana Kabupaten dalam Suatu Surat Keputusan Bupati.

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan atau/jasa dan sarana dan atau prasarana berdasarkan jumlah warga negara penerima dan mutu pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis SPM.

Perangkat Daerah menghitung warga negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan atau jasa yang telah tersedia. Warga negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu dikarenakan: miskin atau tidak mampu; sifat barang dan atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri; kondisi bencana; dan atau kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Penghitungan kebutuhan untuk pembiayaan SPM bidang Perumahan Rakyat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan ke dalam rencana strategis (renstra) Perangkat Daerah dan rencana kerja (renja) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen renja Perangkat Daerah dilakukan pada saat perumusan meliputi: hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan renja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Bappelitbang memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, renstra Perangkat Daerah, RKPD dan renja Perangkat Daerah. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, renstra Perangkat Daerah, RKPD dan renja Perangkat Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar tercantum dalam APBD. Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan, didasarkan pada rencana pemenuhan pelayanan dasar.

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dibutuhkan dan atau melakukan kerjasama daerah.

Dalam melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara, pemerintah daerah dapat: membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu; dan atau memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan atau jasa, kupon, subsidi atau bentuk bantuan lainnya. Penyediaan barang dan atau jasa yang dibutuhkan diterapkan sesuai dengan standar teknis SPM. Kemudian selanjutnya, kerjasama daerah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

A. PENDATAAN

Tabel 2.43. FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
											RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	BANJIR	SEDANG	HARAU	TARAM	2	-	0	223	223	562	-	-	-	-
2	BANJIR	SEDANG	HARAU	BATU BALANG	1	-	0	3	3	13	-	-	-	-
3	BANJIR	SEDANG	HARAU	TARANTANG	2	-	0	49	49	121	-	-	-	-
4	BANJIR	SEDANG	HARAU	SARILAMAK	4	-	0	203	203	762	-	-	-	-
5	BANJIR	SEDANG	GUNUANG OMEH	PANDAM GADANG	2	-	0	36	36	124	-	-	-	-
6	BANJIR	SEDANG	GUNUANG OMEH	KOTO TINGGI	1	-	0	18	18	54	-	-	-	-
7	BANJIR	RENDAH	GUNUANG OMEH	TALANG ANAU	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
8	BANJIR	RENDAH	BUKIK BARISAN	BANJA LAWEH	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
9	BANJIR	SEDANG	BUKIK BARISAN	BARUAH GUNUANG	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
10	BANJIR	RENDAH	BUKIK BARISAN	KOTO TANGAH	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
11	BANJIR	RENDAH	BUKIK BARISAN	MAEK	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
12	BANJIR	RENDAH	HARAU	BUKIK LIMBUKU	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
13	BANJIR	RENDAH	HARAU	SOLOK BIO-BIO	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
14	BANJIR	RENDAH	HARAU	GURUN	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
15	BANJIR	RENDAH	HARAU	LUBUAK BATINGKOK	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
16	BANJIR	RENDAH	HARAU	BUKIK LIMBUKU	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
17	BANJIR	RENDAH	HARAU	PILUBANG	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
18	BANJIR	SEDANG	LUAK	MUNGO	1	-	0	4	4	7	-	-	-	-
19	BANJIR	SEDANG	LUAK	SUNGAI KAMUYANG	3	-	0	7	7	29	-	-	-	-
20	BANJIR	RENDAH	LUAK	ANDALEH	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
21	BANJIR	RENDAH	LUAK	TANJUANG ARO SIKABU-KABU PD. PANJANG	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
22	BANJIR	SEDANG	LAREH SAGO HALABAN	HALABAN	1	-	0	3	3	6	-	-	-	-

23	BANJIR	SEDANG	LAREH SAGO HALABAN	BUKIK SIKUMPA	1	-	0	15	15	40	-	-	-	-
24	BANJIR	SEDANG	LAREH SAGO HALABAN	BALAI PANJANG	1	-	0	19	19	82	-	-	-	-
25	BANJIR	RENDAH	LAREH SAGO HALABAN	TANJUANG GADANG	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
26	BANJIR	SEDANG	LAREH SAGO HALABAN	BATU PAYUANG	1	-	0	8	8	21	-	-	-	-
27	BANJIR	SEDANG	LAREH SAGO HALABAN	SITANANG	3	-	0	14	14	38	-	-	-	-
28	BANJIR	SEDANG	LAREH SAGO HALABAN	LABUAH GUNUANG	2	-	0	3	3	7	-	-	-	-
29	BANJIR	RENDAH	LAREH SAGO HALABAN	AMPALU	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
30	BANJIR	SEDANG	SULIKI	LIMBANANG										
31	BANJIR	SEDANG		KURAI				0	0	83				-
32	BANJIR	SEDANG		SUNGAI RIMBANG				5	5	17				-
33	BANJIR	SEDANG						2	2	6				-
34	BANJIR	SEDANG						1	1	5				-
35	BANJIR	RENDAH		TANJUANG BUNGO				0	0	0				-
36	BANJIR	SEDANG		SULIKI				6	0	22				-
37	BANJIR	SEDANG						3	0	11				-
38	BANJIR	RENDAH		ANDIANG				0	0	0				-
39	BANJIR	RENDAH	GUGUAK	GUGUAK VIII KOTO		-		0	0	0				-
40	BANJIR	RENDAH		VII KOTO TALAGO		-		0	0	0				-
41	BANJIR	RENDAH		SUNGAI TALANG		-		0	0	0				-
42	BANJIR	RENDAH		KUBANG		-		0	0	0				-
43	BANJIR	SEDANG		SIMPANG SUGIRAN		-		8	8	23				-
44	BANJIR	SEDANG						2	2	7				-
45	BANJIR	RENDAH	PAYAKUMBUH	KT.BARU SIMALANGGANG		-		0	0	0				-
46	BANJIR	RENDAH		TAEH BUKIK		-		0	0	0				-
47	BANJIR	RENDAH		SIMALANGGANG		-		0	0	0				-
48	BANJIR	RENDAH		SUNGAI BERINGIN		-		0	0	0				-
49	BANJIR	RENDAH		PIOBANG		-		0	0	0				-
50	BANJIR	RENDAH		TAEH BARUAH		-		0	0	0				-

51	BANJIR	RENDAH		KT. TANGAH SIMALANGGANG		-	0	0	0					-
52	BANJIR	RENDAH	MUNGKA	JOPANG MANGANTI		-	0	0	0					-
53	BANJIR	RENDAH		SIPANG KAPUAK		-	0	0	0					-
54	BANJIR	RENDAH		MUNGKA		-	0	0	0					-
55	BANJIR	SEDANG		TALANG MAUR		KAMPUANG TANGAH	141	141	532					-
56	BANJIR	SEDANG				TOLANG	74	74	258					-
57	BANJIR	SEDANG		SUNGAI ANTUAN		PADANG BATANG	6	6	18					-
58	BANJIR	SEDANG				LOBUAH LINTANG	10	10	39					-
59	BANJIR	SEDANG				PINCURAN TUJUAH	6	6	17					-
60	BANJIR	SEDANG				LUBUAK SIMATO	46	46	110					-
61	BANJIR	SEDANG	SITUJUAH BATUA	SITUJUAH BATUA		LAKUNG	1	1	4					-
62	BANJIR	SEDANG				BUMBUNG	2	2	10					-
63	BANJIR	SEDANG				TENGAH	6	6	25					-
64	BANJIR	SEDANG				PAYAKUMBUH	1	1	2					-
65	BANJIR	SEDANG				KOTO	4	4	17					-
66	BANJIR	SEDANG				KUBANG BUNGKUK	2	2	12					-
67	BANJIR	RENDAH		SITUJUAH LADANG LAWEH										-
68	BANJIR	SEDANG		TUNGKA		SAWAH LAWEH	2	2	5					-
69	BANJIR	SEDANG				SUNGAI LANSEK	3	3	11					-
70	BANJIR	SEDANG				SIALANG	4	4	32					-
71	BANJIR	RENDAH		SITUJUAH BANDA DALAM		-	0	0	0					-
72	BANJIR	RENDAH		SITUJUAH GADANG		-	0	0	0					-
73	LONGSOR	SEDANG	GUNUANG OMEH	KOTO TINGGI	2	-	0	14	14	58	-	-	-	-
74	LONGSOR	SEDANG	GUNUANG OMEH	PANDAM GADANG	5	-	0	72	72	251	-	-	-	-
75	LONGSOR	RENDAH	GUNUANG OMEH	TALANG ANAU	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
76	LONGSOR	SEDANG	BUKIK BARISAN	SUNGAI NANIANG	4	-	0	11	11	39	-	-	-	-
77	LONGSOR	SEDANG	BUKIK BARISAN	BANJA LAWEH	1	-	0	25	25	80	-	-	-	-
78	LONGSOR	RENDAH	BUKIK BARISAN	BARUAH GUNUANG	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-

79	LONGSOR	RENDAH	BUKIK BARISAN	KOTO TANGAH	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
80	LONGSOR	RENDAH	BUKIK BARISAN	MAEK	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
81	LONGSOR	RENDAH	BUKIK BARISAN	NAGARI PERSIAPAN KOTO TINGGI MAEK	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
82	LONGSOR	SEDANG	HARAU	BATU BALANG	1	-	0	5	5	18	-	-	-	-
83	LONGSOR	SEDANG	HARAU	PILUBANG	3	-	0	70	70	280	-	-	-	-
84	LONGSOR	SEDANG	HARAU	HARAU	3	-	0	3	3	8	-	-	-	-
85	LONGSOR	RENDAH	HARAU	BUKIK LIMBUKU	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
86	LONGSOR	RENDAH	HARAU	GURUN	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
87	LONGSOR	RENDAH	HARAU	KOTO TUO	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
88	LONGSOR	RENDAH	HARAU	KOTO TUO	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
89	LONGSOR	RENDAH	HARAU	LUBUAK BATINGKOK	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
90	LONGSOR	RENDAH	HARAU	SARILAMAK	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
91	LONGSOR	RENDAH	HARAU	SARILAMAK	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
92	LONGSOR	RENDAH	HARAU	SOLOK BIO-BIO	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
93	LONGSOR	RENDAH	HARAU	TARAM	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
94	LONGSOR	RENDAH	HARAU	NAGARI PERSIAPAN HULU AIA	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
95	LONGSOR	SEDANG	LUAK	MUNGO	2	-	0	19	19	49	-	-	-	-
96	LONGSOR	SEDANG	LUAK	SUNGAI KAMUYANG	1	-	0	12	12	44	-	-	-	-
97	LONGSOR	RENDAH	LUAK	ANDALEH	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
98	LONGSOR	RENDAH	LUAK	TANJUANG ARO SIKABU-KABU PD. PANJANG	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
99	LONGSOR	RENDAH	LUAK	TANJUANG ARO SIKABU-KABU PD. PANJANG	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
100	LONGSOR	RENDAH	LUAK	TANJUANG ARO SIKABU-KABU PD. PANJANG	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
101	LONGSOR	SEDANG	LAREH SAGO HALABAN	BALAI PANJANG	1	-	0	9	9	-	-	-	-	-
102	LONGSOR	SEDANG	LAREH SAGO HALABAN	SITANANG	3	-	0	42	42	-	-	-	-	-
103	LONGSOR	RENDAH	LAREH SAGO HALABAN	BUKIK SIKUMPA	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
104	LONGSOR	RENDAH	LAREH SAGO HALABAN	BATU PAYUANG	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-

105	LONGSOR	RENDAH	LAREH SAGO HALABAN	LABUAH GUNUANG	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
106	LONGSOR	RENDAH	LAREH SAGO HALABAN	TANJUANG GADANG	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
107	LONGSOR	RENDAH	LAREH SAGO HALABAN	HALABAN	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
108	LONGSOR	RENDAH	LAREH SAGO HALABAN	AMPALU	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
109	LONGSOR	RINGAN	SULIKI	KURAI		0		0	0					
110	LONGSOR	SEDANG		SUNGAI RIMBANG		SIALANG		2	2	9				
111	LONGSOR	SEDANG		TANJUANG BUNGO		BATANG LINJUANG		11	11	32				
112	LONGSOR	SEDANG				LANCARAN		2	2	7				
113	LONGSOR	SEDANG		SULIKI		TARATAK		8	8	0				
114	LONGSOR	SEDANG				SULIKI PASA		4	4	13				
115	LONGSOR	SEDANG				SORIAK		15	15	35				
116	LONGSOR	RINGAN		LIMBANANG		0		0	0	0				
117	LONGSOR	SEDANG		ANDIANG		KAMPUANG BARU		1	1	4				
118	LONGSOR	SEDANG				PADANG BUNGO		1	1	4				
119	LONGSOR	SEDANG				SIBOKA		1	1	7				
120	LONGSOR	SEDANG	GUGUAK	SIMPANG SUGIRAN		LOKUANG		27	27	78				
121	LONGSOR	RINGAN		GUGUAK VIII KOTO		0		0	0	0				
122	LONGSOR	RINGAN		VII KOTO TALAGO		-		0	0	0				
123	LONGSOR	RINGAN		SUNGAI TALANG		-		0	0	0				
124	LONGSOR	SEDANG		KUBANG		SIAMANG BUNYI		12	0	41				
125	LONGSOR	RINGAN	PAYAKUMBUH	KT.BARU SIMALANGGANG		-		0	0	0				
126	LONGSOR	RINGAN		TAEH BUKIK		-		0	0	0				
127	LONGSOR	RINGAN		SIMALANGGANG		-		0	0	0				
128	LONGSOR	RINGAN		SUNGAI BERINGIN		-		0	0	0				
129	LONGSOR	RINGAN		PIOBANG		-		0	0	0				
130	LONGSOR	RINGAN		TAEH BARUAH		-		0	0	0				
131	LONGSOR	RINGAN		KT. TANGAH SIMALANGGANG				0	0	0				
132	LONGSOR	RINGAN	MUNGKA	JOPANG MANGANTI		-		0	0	0				

133	LONGSOR	RINGAN		SIMPANG KAPUAK		-	0	0	0					
134	LONGSOR	RINGAN		MUNGKA		-	0	0	0					
135	LONGSOR	SEDANG		TALANG MAUR		KAMPUNG TANGAH	105	105	410					
136	LONGSOR	SEDANG		TALANG MAUR		TOLANG	22	22	73					
137	LONGSOR	SEDANG				MAUR	26	26	92					
138	LONGSOR	RINGAN		SUNGAI ANTUAN		-	0	0	0					
139	LONGSOR	SEDANG	SITUJUAH LIMO NAGARI	SITUJUAH BATUA		LOKUANG	5	5	19					
140	LONGSOR	SEDANG				BUMBUNG	11	11	43					
141	LONGSOR	SEDANG				TENGAH	4	4	9					
142	LONGSOR	SEDANG				KOTO	8	8	26					
143	LONGSOR	SEDANG				KUBANG BUNGKUAQ	2	2	8					
144	LONGSOR	RINGAN		SITUJUAH LADANG LAWEH		-	0	0	0					
145	LONGSOR	SEDANG		TUNGKA		SUNGAI LANSEK	9	9	28					
146	LONGSOR	SEDANG				SIALANG	11	11	37					
147	LONGSOR	SEDANG				DALAM NAGARI	6	6	21					
148	LONGSOR	RINGAN		SITUJUAH BANDA DALAM		BALAI MALINTANG	0	0	0					
149	LONGSOR	RINGAN		SITUJUAH GADANG		BARU KABAU	0	0	0					
150	TANAH BERGERAK	SEDANG	GUNUANG OMEH	PANDAM GADANG	2	-	0	0	30	-	-	-	-	-
151	TANAH BERGERAK	SEDANG	GUNUANG OMEH	KOTO TINGGI	2	-	0	25	25	-	-	-	-	-
152	TANAH BERGERAK	SEDANG	GUNUANG OMEH	TALANG ANAU	3	-	0	13	13	-	-	-	-	-
153	TANAH BERGERAK	SEDANG	BUKIK BARISAN	BARUAH GUNUANG	3	-	0	16	16	-	-	-	-	-
154	TANAH BERGERAK	SEDANG	BUKIK BARISAN	KOTO TANGAH	2	-	0	23	23	-	-	-	-	-
155	TANAH BERGERAK	SEDANG	BUKIK BARISAN	SUNGAI NANIANG	2	-	0	19	19	-	-	-	-	-
156	TANAH BERGERAK	SEDANG	BUKIK BARISAN	BANJA LAWEH	3	-	0	103	103	-	-	-	-	-
157	TANAH BERGERAK	SEDANG	BUKIK BARISAN	MAEK	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
158	TANAH BERGERAK	RENDAH	HARAU	BATU BALANG	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-

159	TANAH BERGERAK	RENDAH	HARAU	BUKIK LIMBUKU	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
160	TANAH BERGERAK	RENDAH	HARAU	GURUN	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
161	TANAH BERGERAK	RENDAH	HARAU	HARAU	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
162	TANAH BERGERAK	RENDAH	HARAU	HARAU	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
163	TANAH BERGERAK	RENDAH	HARAU	KOTO TUO	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
164	TANAH BERGERAK	RENDAH	HARAU	LUBUAK BATINGKOK	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
165	TANAH BERGERAK	RENDAH	HARAU	PILUBANG	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
166	TANAH BERGERAK	RENDAH	HARAU	SARILAMAK	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
167	TANAH BERGERAK	RENDAH	HARAU	SARILAMAK	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
168	TANAH BERGERAK	RENDAH	HARAU	SOLOK BIO-BIO	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
169	TANAH BERGERAK	RENDAH	HARAU	TARAM	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
170	TANAH BERGERAK	RENDAH	LUAK	ANDALEH	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
171	TANAH BERGERAK	RENDAH	LUAK	MUNGO	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
172	TANAH BERGERAK	SEDANG	LUAK	SUNGAI KAMUYANG	1	-	0	7	7	-	-	-	-	-
173	TANAH BERGERAK	RENDAH	LUAK	TANJUANG ARO SIKABU-KABU PD. PANJANG	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
174	TANAH BERGERAK	SEDANG	LAREH SAGO HALABAN	AMPALU	6	-	0	113	113	-	-	-	-	-
175	TANAH BERGERAK	RENDAH	LAREH SAGO HALABAN	BALAI PANJANG	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
176	TANAH BERGERAK	RENDAH	LAREH SAGO HALABAN	BATU PAYUANG	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
177	TANAH BERGERAK	RENDAH	LAREH SAGO HALABAN	BUKIK SIKUMPA	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
178	TANAH BERGERAK	RENDAH	LAREH SAGO HALABAN	HALABAN	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
179	TANAH BERGERAK	RENDAH	LAREH SAGO HALABAN	LABUAH GUNUANG	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
180	TANAH BERGERAK	SEDANG	LAREH SAGO HALABAN	SITANANG	1	-	0	5	5	-	-	-	-	-
181	TANAH BERGERAK	RENDAH	LAREH SAGO HALABAN	TANJUANG GADANG	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-

182	TANAH BERGERAK	RINGAN	SULIKI	LIMBANANG		0		0	0	0				
183	TANAH BERGERAK	RINGAN		KURAI		0		0	0	0				
184	TANAH BERGERAK	RINGAN		SUNGAI RIMBANG		0		0	0	0				
185	TANAH BERGERAK	RINGAN		TANJUANG BUNGO		0		0	0	0				
186	TANAH BERGERAK	SEDANG		SULIKI	PADANG LOWEH			4	4	16				
187	TANAH BERGERAK	SEDANG			SORIAK			25	25	33				
188	TANAH BERGERAK	RINGAN		ANDIANG		0		0	0	0				
189	TANAH BERGERAK	RINGAN	GUGUAK	GUGUAK VIII KOTO		0		0	0	0				
190	TANAH BERGERAK	RINGAN		VII KOTO TALAGO		0		0	0	0				
191	TANAH BERGERAK	RINGAN		SUNGAI TALANG		0		0	0	0				
192	TANAH BERGERAK	RINGAN		KUBANG		0		0	0	0				
193	TANAH BERGERAK	SEDANG		SIMPANG SUGIRAN	JR.LOKUANG			13	13	42				
194	TANAH BERGERAK	RINGAN	PAYAKUMBUH	KT.BARU SIMALANGGANG		0		0	0	0				
195	TANAH BERGERAK	SEDANG		TAEH BUKIK	BUKIT TAPUANG			26	0	88				
196	TANAH BERGERAK	SEDANG			PEBATUNGAN			61	0	206				
197	TANAH BERGERAK	RINGAN		SIMALANGGANG		0		0	0	0				
198	TANAH BERGERAK	RINGAN		SUNGAI BERINGIN		0		0	0	0				
199	TANAH BERGERAK	RINGAN		PIOBANG		0		0	0	0				
200	TANAH BERGERAK	RINGAN		TAEH BARUAH		0		0	0	0				
201	TANAH BERGERAK	RINGAN		KT. TANGAH SIMALANGGANG		0		0	0	0				
202	TANAH BERGERAK	RINGAN	MUNGKA	JOPANG MANGANTI		-		0	0	0				
203	TANAH BERGERAK	RINGAN		SIMPANG KAPUAK		-		0	0	0				
204	TANAH BERGERAK	RINGAN		MUNGKA		-		0	0	0				

205	TANAH BERGERAK	RINGAN		TALANG MAUR		-		0	0	0				
206	TANAH BERGERAK	RINGAN		SUNGAI ANTUAN		-		0	0	0				
207	TANAH BERGERAK	SEDANG	SITUJUAH LIMO NAGARI	SITUJUAH BATUA		BUMBUNG		1	1	2				
208	TANAH BERGERAK	SEDANG				TENGAH		1	0	2				
209	TANAH BERGERAK	SEDANG				KOTO		1	0	6				
210	TANAH BERGERAK	SEDANG				TEPI		4	0	16				
211	TANAH BERGERAK	RINGAN		SITUJUAH LADANG LAWEH		0		0	0	0				
212	TANAH BERGERAK	RINGAN		TUNGKA		0		0	0	0				
213	TANAH BERGERAK	RINGAN		SITUJUAH BANDA DALAM		0		0	0	0				
214	TANAH BERGERAK	RINGAN		SITUJUAH GADANG		0		0	0	0				
Total *)														

Tabel 2.44. FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

NO.	JENIS LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA	LOKASI		LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA				MBR	Non MBR	Legal	Ilegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sempadan Rel KA									
2	Daerah Sempadan Sungai									
3	Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)									
4	Kolong Jembatan									
5	Permukiman Kumuh/Ilegal	Bukik Barisan	Baruah Gunuang	5.99	299	299				
		Bukik Barisan	Koto Tengah	2.72	152	152				
		Bukit Barisan	Maek	7.65	289	289				
		Guguak	Guguak VIII Koto	7.7	164	164				
		Gunuang Omeh	Koto Tinggi	5.71	154	154				
		Gunuang Omeh	Koto Tinggi	1.98	106	106				
		Gunuang Omeh	Koto Tinggi	3.65	105	105				
		Harau	Batu Balang	9.67	280	280				
		Harau	Gurun	9.29	377	377				
		Kapur IX	Galugua	2.24	147	147				
		Kapur IX	Lubuak Alai	5.29	105	105				
		Lareh Sago Halaban	Ampalu	2.01	52	52				
		Lareh Sago Halaban	Batu Payuang	8.06	119	119				
		Lareh Sago Halaban	Sitanang	3.31	131	131				
		Pangkalan	Gunuang Malintang	9.01	274	274				
		Pangkalan	Koto Alam	5.65	195	195				
		Pangkalan	Manggilang	8.38	339	339				

		Pangkalan	Manggilang	8.89	322	322				
		Payakumbuh	Koto Baru Simalanggang	5,04	239	239				
		Payakumbuh	Taeh Bukik	9.79	421	421				
		Situjuah Limo Nagari	Tungkar	7.23	313	313				
		Suliki	Suliki	7.54	103	103				
6	Daerah Rawan Bencana									
Total *)				131.76	4686	4686	0	0	0	0

Tabel 2.45. FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)

NO.	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	TINGKAT KEKUMUHAN (ringan/sedang/berat)	KETERANGAN
	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bukik Barisan	Baruah Gunuang	5,99	299	299	Ringan	Kawasan Kumuh Baruah Gunuang 1 & 2
2	Bukik Barisan	Koto Tengah	2,72	152	152	Ringan	Kawasan Kumuh Data
3	Bukit Barisan	Maek	7,65	289	289	Sedang	Kawasan Kumuh Ranah
4	Guguak	Guguak VIII Koto	7,70	164	164	Sedang	Kawasan Kumuh Kubang Tungkek
5	Gunuang Omeh	Koto Tinggi	5,71	154	154	Sedang	Kawasan Kumuh Kampung Muaro
6	Gunuang Omeh	Koto Tinggi	1,98	106	106	Ringan	Kawasan Kumuh Sungai Dadok
7	Gunuang Omeh	Koto Tinggi	3,65	105	105	Ringan	Kawasan Kumuh Lakuang
8	Harau	Batu Balang	9,67	280	280	Ringan	Kawasan Kumuh Balai
9	Harau	Gurun	9,29	377	377	Ringan	Kawasan Kumuh Gurun
10	Kapur IX	Galugua	2,24	147	147	Ringan	Kawasan Kumuh Jorong Tengah
11	Kapur IX	Lubuak Alai	5,29	105	105	Ringan	Kawasan Kumuh Lubuak Alai
12	Lareh Sago Halaban	Ampalu	2,01	52	52	Ringan	Kawasan Kumuh Ampalu
13	Lareh Sago Halaban	Batu Payuang	8,06	119	119	Ringan	Kawasan Kumuh Batu Payung
14	Lareh Sago Halaban	Sitanang	3,31	131	131	Ringan	Kawasan Kumuh Coran
15	Pangkalan	Gunuang Malintang	9,01	274	274	Ringan	Kawasan Kumuh Batu Balah
16	Pangkalan	Koto Alam	5,65	195	195	Sedang	Kawasan Kumuh Koto Ranah
17	Pangkalan	Manggilang	8,38	339	339	Sedang	Kawasan Kumuh Mudiak Pasa

18	Pangkalan	Manggilang	8,98	322	322	Sedang	Kawasan Kumuh Subarang Pasa
19	Payakumbuh	Koto Baru Simalanggang	5,04	239	239	Sedang	Kawasan Kumuh Tabek Panjang
20	Payakumbuh	Taeh Bukik	9,79	421	421	Berat	Kawasan Kumuh Pogang
21	Situjuah Limo Nagari	Tungkar	7,23	313	313	Ringan	Kawasan Kumuh Dalam Nagari
22	Suliki	Suliki	7,54	103	103	Sedang	Kawasan Kumuh Pasar & Jorong Baruah

B. PERHITUNGAN

Tabel 2.46. FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	JALAN DAN NO. RUMAH	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA			TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN				BELUM TERLAYANI	RENCANA TAHUN PEMENUHAN SPM
											MBR	NMBR	NO	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINYA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	SUBSIDI UANG SEWA	RELOKASI/PEMBANGUNAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Tanah Bergerak	2023	Gunuang Omeh	Koto Tinggi			Jr.Aia Angek	WIDIA ELFINA	1307084808790001	4	1				1	1				1				2025	
2	Tanah Bergerak	2023	Gunuang Omeh	Koto Tinggi			Jr.Aia Angek	NOVIA RIZA	1307086211690001	3	1				1	1				1				2025	
Total *)																									

Tabel 2.47. FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
A.	Pengumpulan Data		Rp -
	1. Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	Survei Sekunder	Rp -
		1. Data Wilayah Administrasi Penanganan	Rp -
		2. Identifikasi melalui citra satelit	Rp -
		Survei Primer	Rp -

		1. Pemetaan	Rp -
	2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Survei Sekunder	Rp -
		1. Data aset lahan pemda	Rp -
		2. Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Rp -
		Survei Primer	Rp -
		1. Pemetaan	Rp -
	3. Data Rumah Korban Bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Rp -
	4. Pendataan rumah sewa	Survei Primer	Rp -
B.	Sosialisasi		Rp -
	1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana	Transportasi	Rp -
		Konsumsi Rapat	Rp -
		Penggandaan Materi Pelatihan	Rp -
		ATK	Rp -
		Narasumber	Rp -
C.	Pembentukan Tim Satgas		Rp -
	1. Pelatihan Tim Satgas	Diklat	Rp -
		Transportasi	Rp -
		Konsumsi Rapat	Rp -
		Penggandaan Materi Pelatihan	Rp -
		ATK	Rp -
		Pelatih/Praktisi	Rp -
D.	Pendataan Cepat		Rp -
	1. Pengisian Form A dan B	Surveyor	Rp -
		Penggandaan Form	Rp -
		Pengolahan Data	Rp -
E.	Verifikasi penerima layanan SPM		Rp -
	1. Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM	Konsumsi Rapat	Rp -
		Transportasi	Rp -
		Penggandaan Materi	Rp -
F.	Penyusunan Rencana Aksi		Rp -

	1. Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati	Konsumsi Rapat	Rp -
	Penerima dan jenis pelayanan	Transportasi	Rp -
		Penggandaan Materi	Rp -
		ATK	Rp -
G.	Rehabilitasi Rumah		Rp -
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur	Rp -
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Rp -
		Pelatih/Praktisi	Rp -
		Transportasi	Rp -
		Penggandaan Materi	Rp -
	3. Pelaksanaan rehabilitasi rumah	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
H.	Pembangunan Kembali		Rp 185,690,700.00
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur	Rp -
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Rp -
		Pelatih/Praktisi	Rp -
		Transportasi	Rp -
		Penggandaan Materi	Rp -
	3. Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah Layak Huni Dengan Spesifikasi Ramah Bencana	Rembug Desa	Rp -
		1. Media diskusi	Rp -
		2. Transportasi	Rp -
		3. Konsumsi Rapat	Rp -
	4. Pembangunan Rumah	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp 185,690,700.00
I.	Pembangunan Baru/ Relokasi Korban Bencana		Rp -
	1. Pengadaan Lahan	Pembebasan Lahan	Rp -
	2. Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama Penerima Pelayanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	Rembug Warga	Rp -
		1. Media diskusi	Rp -
		2. Transportasi	Rp -
		3. Konsumsi Rapat	Rp -
		Tenaga Ahli	
		1. Tenaga Ahli Perencana	Rp -

		2. Tenaga Ahli Arsitektur	Rp -
		3. Tenaga Ahli Teknik Sipil	Rp -
		4. Tenaga Ahli ME	Rp -
		5. Tenaga Ahli Plumbing	Rp -
	3. Pembangunan Rumah Khusus + PSU	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
J.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM		Rp -
	1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM	Pembahasan (paket meeting)	Rp -
		Transportasi	Rp -
		Praktisi/Narasumber	Rp -
		Penggandaan dokumen laporan	Rp -
K.	Pembinaan Penerapan SPM		Rp -
1.	1. Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM kabupaten/kota.	Pembahasan (paket meeting)	Rp -
		Transportasi	Rp -
		Praktisi/Narasumber	Rp -
		Penggandaan dokumen laporan	Rp -
L.	Pemantauan Penerapan SPM		Rp -
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp -
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator Pelaksana Update Data Kinerja	Rp -
		Survei lapangan	Rp -
M.	Evaluasi Penerapan SPM		Rp -
	1. Rapat evaluasi penerapan	Pembahasan (paket meeting)	Rp -
		Transportasi	Rp -
		Praktisi/Narasumber	Rp -
		Penggandaan dokumen laporan	Rp -

C. PERENCANAAN

Tabel 2.48. FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN									
				TAHUN KE-1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3			
				APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Rehabilitasi												
2	Pembangunan kembali	9	540,000,000	180,000,000			180,000,000			180,000,000			
3	Penyediaan rumah relokasi												
	a. Pengadaan lahan												
	b. Pembangunan baru												
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana												
Jumlah *)													

D. PELAKSANAAN

Tabel 2.49. FORM 2.C.4 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

NO	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH				TARGET				REALISASI				
					TOTAL	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSI DI UANG SEWA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSI DI UANG SEWA	BELUM TERLAYANI
					(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Tanah Bergerak	2022	Gunuang Omeh	Koto Tinggi	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Total *)					2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Persentase layanan **)													0	100.000	0	0	
Capaian SPM Total ***)													100.00				

2.5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penerapan SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Kantor Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran.

2.5.1. Sub Urusan Trantibum

A. Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibumlinmas urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum mengacu kepada data yang ada dalam spm.bangda.kemendagri.go.id yang mana data yang dibutuhkan adalah:

Tabel 2.50. FORM 5.A.1 Perkiraan Rekapitulasi Jumlah Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter Di Lokasi Penegakan Perda Dan Perkada.

NO.	NAMA	NIK	NO. KK	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7
1	Yeni Susanti	13705470980002				Jorong Purwajaya, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau
2	Nada Fadila Haya	137056606060001				Jorong Purwajaya, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau
3	Nayla Sahira Tsaqif	1307055003150001				Jorong Purwajaya, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau
4	Khaka Joshantyano	1370523008180001				Jorong Purwajaya, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau
5	Drs. Akmal					Nagari Sarilamak, Harau
6	Wirada Rivata	1306125409040002				Nagari Sarilamak, Harau
7	Darmaita	1307065404730001				Koto Panjang, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru
8	Erpalis	1307060408700003				Koto Panjang, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru
9	Nuraliman	1307061706610001				Koto Panjang, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru
10	Jamhir	1307061709710001				Koto Panjang, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru
11	Niman	1307065905470001				Koto Panjang, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru
12	Intan Permata Sari	1307054311820001				Nagari Taram
13	Marni	1307055607650001				Nagari Taram

14	Emil Wahdi	1307051475900002				Nagari Taram
15	Armis	1307090912580001				Nagari Labuah Gunuang
16	Kamra Raka	1307090707790005				Nagari Labuah Gunuang
17	Yasmi	1307095707600001				Nagari Labuah Gunuang
18	Suci Pranola	1307095907880002				Jorong Simpang Ompek, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau
19	Desmita Wati	1307055108770003				Jorong Simpang Ompek, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau
20	Audi Syahfitri	1307054208040003				Jorong Simpang Ompek, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau
21	M. Fajar	1307031709000001				Jorong Simpang Ompek, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau
22	Atrizal	1307051608810002				Jorong Simpang Ompek, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau
23	Atika	1307054307680004				Jorong Tobek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang
24	Teo Perdana Putra	1307031002980001				Jorong Tobek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang
25	RN. Michael Mikola	1406012208000002				Jorong Tobek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang
26	Yozi Andrean	1307031205920001				Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh
27	Mimi Safitri	1307035708800001				Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh
28	Sofia	1307034107850016				Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh
29	Yenita Fitri	1307035910750001				Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh
30	Isman	1307031608500001				Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh
31	Dedet Arianto	1307110705970003				Jorong Padang Mungka, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka
32	Fitrawati	1307115001750001				Jorong Padang Mungka, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka
33	Firdaus	1307112210930001				Jorong Padang Mungka, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka
34	Haria Pari Pratama	1307110807990002				Jorong Padang Mungka, Nagari Mungka,

						Kecamatan Mungka
35	Wahdini Dwi Rahmadani	1307116810050001				Jorong Padang Mungka, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka
36	M. Latif	1307110403980001				Jorong Padang Mungka, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka
37	Erdi Muziar Efendi	1307111009720001				Jorong Padang Mungka, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka
38	Dadang Sutisna	1307132702600001				Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru
39	Salmah	1307134201700001				Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru
40	Arya Sundara	1307130303050002				Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru
41	Wulan RAHMA Dewi	1304124104000001				Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru
42	Feri Yoda Asmara	1307110402750001				Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru
43	Nelly Irawati	13071165509800001				Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru
44	Muhammad Al Khaffi	1307112903060001				Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru
45	Muhammad Alfayed	1307111210070001				Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru

Tabel 2.51. FORM 5.A.2 Perkiraan Perkiraan Rekapitulasi Daftar Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Serta Aset Warga Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter dari Lokasi Penegakan Perda dan Perkada.

NO.	JENIS FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	KONDISI FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA
1	2	3	4
1	Rumah Ibadah	9	BAIK
2	Sekolah	14	BAIK
3	Jembatan	4	BAIK
4	Puskesmas	2	BAIK
5	Pasar Rakyat	1	BAIK
6	Rumah Warga	20	BAIK

Tabel 2.52. FORM 5.A.3 Rekapitulasi SOP Kegiatan Penegakan perda/Perkada

NO	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS	KENDALA	KET
1	2	3	4	5
1	Penegakan Peraturan Daerah/Perkada	1. Penindakan Yustisial		<i>Belum tersusun Dokumen SOP per-kegiatan</i>
		2. Penindakan Non – Yustisial		
		3. Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam Penegakan Peraturan Daerah		
		4. Sosialisasi dalam Penegakan Peraturan Daerah		
		5. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati		
2	Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	1. Penertiban		
		2. Penertiban SK-4		
		3. Pemberian Rekomendasi Izin Keramaian		
3	Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa			
4	Deteksi Dini dan Cegah Dini			
5	Patroli			
6	SOP Lainnya (Sebutkan)	1. Petugas Tindak Internal		Telah tersusun
		2. Kesamaptaan Jasmani		<i>Belum tersusun Dokumen SOP per-kegiatan</i>
		3. Prosedur Pengiriman PPNS		
		4. Bina Potensi		
		5. Data dan Informasi		
		6. Pelayanan Pengaduan Masyarakat		

Tabel 2.53. FORM 5.A.4 Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki Oleh OPD Satpol PP

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	2	3	4	5
1	Tanah Bangunan	1	1	-
2	Komputer PC	12	11	1
3	Laptop	13	11	2
4	Notebook	2	2	-
5	Printer	19	14	1
6	Scanner	1	-	1
7	Hard Disk	4	2	2
8	Speaker	1	-	1
9	Tenda	1	1	-
10	Sleeping Bad	12	12	-
11	Raincoat	12	12	-
12	Meja Pimpong	1	1	-
13	Kendaraan Roda 4	6	6	-
14	Sepeda Motor	10	10	-
15	Gerobak Dorong	4	1	3

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
16	Lemari Arsip	4	4	-
17	Filling Kabinet	8	7	1
18	Berangkas	1	1	-
19	Mesin Tik	1	-	1
20	Lemari	3	3	-
21	Televisi dan Digital	2	2	-
22	Plang Kantor	1	1	-
23	Air Conditioner (AC)	3	3	-
24	Karpet	1	1	-
25	Absen Sidik Jari	1	1	-
26	Tong Sampah	1	1	-
27	Camera Digital	5	2	3
28	Proyektor	1	-	1
29	Gorden	1	1	-
30	Kasur	9	9	-
31	Kulkas	1	1	-
32	Dispenser	1	1	-
33	Meja Kerja Eselon III	1	1	-
34	Meja Kerja Eselon IV	4	4	-
35	Kursi Kerja Eselon IV	1	1	-
36	Meja Biro	2	2	-
37	Meja Kerja	17	13	4
38	Kursi Kerja Eselon III	1	1	-
39	Kursi Putar Besar	1	1	-
40	Kursi Hadap	3	3	-
41	Kursi Tamu	1	1	-
42	Kursi Pimpinan	1	-	1
43	Kursi Kerja Non Struktural	12	12	-
44	Kursi	26	26	-
45	Sofa Minimalis	1	1	-
46	Handy Cam	1	-	1
47	Handy Talki	30	17	13
48	CCTV	1	1	-
49	Microphone	1	1	-
50	Wire Less	1	1	-
51	Genset	1	1	-
52	TOA	5	5	-
53	Termometer	2	-	2
54	Tameng Dalmas	17	-	17
55	Pentungan	20	-	20
56	Helm Dalmas	20	-	20
57	Jaringan internet	1	1	
58	Jaringan SIPKD	1	1	

Tabel 2.54. FORM 5.A.5 Rekapitulasi Sumberdaya Manusia Yang Dimiliki Oleh OPD Satpol PP (Satpol PP, PPNS, Satlinmas)

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL SATPOL PP			JUMLAH PERSONIL PPNS DAN SATLINMAS	
		PNS		NON PNS	PPNS	SATLINMAS
		BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT			
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum	47 Orang	8 Orang	74 Orang	1 Orang Aktif	1544 Orang

Tabel 2.55 FORM 5.A.6 Rekapitulasi Perda Perkada Yang Akan Ditegakkan

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERDA DAN PERKADA	JUMLAH PERDA DAN PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN		KET
			PERDA	PERKADA	
1	2	3	4	5	6
1	Standar Pelayanan Yang Terkena Dampak gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada.	11	1	0	

Tabel 2.56. FORM 5.A.7 Rekapitulasi Warga Negara Yang Terdampak Akibat Penegakan Perda Dan Perkada Dalam Radius 0-50 Meter

NO.	JENIS PENERIMA LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA		JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PENGOBATAN
			CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

Tabel 2.57 FORM 5.A.8 Rekapitulasi Aset Yang Dimiliki Oleh Warga Negara Yang Rusak Akibat Penegakan Perda Dan Perkada Dalam Radius 0-50 Meter

NO.	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG MENGALAMI KERUSAKAN			JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PERBAIKAN ASET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

B. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Dalam perhitungan kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar yang ada dalam quisioner SPM yakni:

Tabel 2.58. FORM.5.B.1 Penghitungan Kebutuhan Penerima Layanan SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM	DAMPAK KEGIATAN	PERHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN TRANTIBUM	KET
1	2	3	4	5	6
1	Layanan Trantibum	Kebutuhan Penyusunan SOP	Tersedianya SOP Trantibum yang dimutakhirkan	1 dokumen	
2		Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM (Satpol PP, PPNS dan Satlinmas)	Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol PP	20 orang	
3		Kebutuhan Pemenuhan Sarana & Prasarana Satpol PP	Terpenuhinya Sarana Prasarana Satpol PP	2	

Tabel 2.59. FORM.5.B.2 Penghitungan Kebutuhan Penyusunan SOP Provinsi Dan Kabupaten/Kota

NO.	JENIS SOP	KEBUTUHAN SOP		HARGA SATUAN KEGIATAN PENYUSUNAN	BESARAN BIAYA
		SOP BARU	PEMBAHARUAN SOP		
1	2	3	4	6	7
1	Petunjukan teknis SOP penegakan peraturan daerah		5	Rp3.000.000	Rp15.000.000
2	Petunjukan teknis SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		3	Rp3.000.000	Rp9.000.000
3	Petunjuk teknis SOP pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa		1	Rp3.000.000	Rp3.000.000
4	Petunjuk Teknis SOP pelaksanaan operasional patroli		1	Rp3.000.000	Rp3.000.000
5	SOP pelaksanaan pengawalan pejabat / orang – orang penting	1		Rp3.000.000	Rp3.000.000
6	SOP pelaksanaan tempat – tempat penting	1		Rp3.000.000	Rp3.000.000
7	Petunjuk Teknis pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah dalam penegakan peraturan daerah	2	1	Rp3.000.000	Rp9.000.000
8	Petunjuk Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	1	Rp3.000.000	Rp9.000.000
9	Petunjuk Teknis Perlindungan Masyarakat		3	Rp3.000.000	Rp9.000.000

Tabel 2.60. FORM.5.B.3 Penghitungan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP, PPNS, Satlinmas

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH KEBUTUHAN PNS DAN NON PNS SATPOL PP				JUMLAH KEBUTUHAN PPNS				JUMLAH SATLINMAS		
		DIKLAT DASAR	DIKLAT TEKNIK LAIN	HARGA SATUAN PERJENIS DIKLAT	BESARAN BIAYA	EKSISTING	KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA	BIOTEK	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	74		Rp 10.000.000	Rp 740.000.000	1	3	Rp 50.000.000	Rp 150.000.000			

Tabel 2.61. FORM.5.B.4 Penghitungan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Satpol PP Provinsi Dan Kabupaten/Kota

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA			HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
		EKSISTING	KEBUTUHAN	KEKURANGAN		
1	2	3	4	5	6	7
1	MINIBUS PATROLI	0	1	1	500.000.000	500.000.000
2	TRUK DALMAS	0	1	1	800.000.000	800.000.000
3	SEPEDA MOTOR OPERASIONAL	0	1	1	60.000.000	60.000.000
4	RADIO KOMUNIKASI	4	14	10	2.000.000	20.000.000

Tabel 2.62 FORM.5.B.5 Penghitungan Perkiraan Kebutuhan Pelayanan Dasar Warga Negara Yang Terkena Dampak

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERKIRAAN JUMLAH WARGA NEGARA TERKENA DAMPAK						PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN LAIN-LAIN	PERKIRAAN KEBUTUHAN TOTAL ANGGARAN
		CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PENGORBATAN	ASET RUSAK RINGAN	ASET RUSAK SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PERBAIKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NIHIL

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Tabel 2.63 FORM.5.C.2 Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Dan Kerangka Pendanaan

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, 165dala, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan 165dalam165165n) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Dokumen	13.985 .100	DAU	

Tabel 2.64 FORM.5.C.4 Rencana Pemenuhan Personil Satpol PP

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol Pngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Orang	Rp. 195.000.000	DAU	

Tabel 2.65 FORM.5.C.6 Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	Rp. 15.000.000	DAU	

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Tabel 2.66 FORM.5.D.2 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar Spm Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Warga Negara, Fasum, Fasos Dan Aset Warga Negara

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah warga negara yang mendapat layanan akibat dari penegakan perda dan perkada	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak adanya Penegakan Perda dan Perkada yang mengakibatkan timbulnya 166dala rugi 166dala warga	-

Tabel 2.67. FORM.5.D.4 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Personil Satpol PP

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah anggota Satpol-PP yang mendapatkan pelatihan dan Binjas	Orang	20	195.000.000	20	185.328.400	100	95,04	DAU		

Tabel 2.68. FORM.5.D.6 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Sarana Prasarana

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Unit	2	15.000.000	2	15.000.000	100	100	APBD		

2.5.2 Sub Urusan Kebencanaan

A. Pengumpulan Data

Tahapan Pengumpulan Data, untuk menentukan Baseline data terkait warga negara yang harus dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bidang urusan SPM sub urusan bencana digunakan data yang bersumber dari Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan jumlah warga negara pada daerah rawan bencana adalah 180.403 jiwa yang tersebar pada 36 Nagari dengan potensi ancaman bahaya banjir dan longsor.

Tabel 2.69. FORM 5.A.2 DAFTAR KERAWANAN TEMPAT TINGGAL INDIVIDU WARGA NEGARA

DATA DASAR WARGA NEGARA								JENIS KERAWANAN TEMPAT TINGGAL										PERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA			
NO	NAMA LENGKAP		NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	GEMPA BUMI	TSUNAMI	BANJIR	TANAH LONGSOR	LETUSAN GUNUNG API	GELOMBANG LAUT EKSTREM	ANGINTOPAN	KEKERINGAN	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	EPIDEMIDAN WABAH	NOMOR VARIASI KELOMPOK KERAWANAN	WARGA NEGERA RAWAN BENCANA	APARATUR YANG MENANGANI SUBURUSAN BENCANA	PETUGAS OPERASITANGGAP DARURAT
	NAMA KEPALA KELUARGA	NAMA ANGGOTA KELUARGA																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	USMAWATI	INDRI OKTAVIA	1307055010970001	1307053112070053	P	TARANTANG	HARAU			1											
2	JERIBUANA	YUSMAR YULIAN TI	1307040209200004	1307040209200004	P	TARANTANG	HARAU			1											
3	JERIBUANA	GENTA FEBRIAN	1307050602090004	1307040209200004	L	TARANTANG	HARAU			1											
4	PETRI MEKI	AULIZA OKTARI	1307056510840001	1307050205130002	P	TARANTANG	HARAU			1											
5	MARIADI	MARIADI			L	GUNUANG MALINTANG	PANGKALAN			1											
6	M NUR	M NUR			L	GUNUANG MALINTANG	PANGKALAN			1											
7	UJANG SIDI	UJANG SIDI			L	GUNUANG MALINTANG	PANGKALAN			1											
8	ZULKIFLI	ZULKIFLI			L	GUNUANG MALINTANG	PANGKALAN			1											
9	LASMA		1307114312		P	SUNGAI	MUNGK			1											

	WETRA		960001			ANTUAN	A														
10	ZULKIFLI		1307113112540001		L	SUNGAIANTUAN	MUNGKA			1											
11	PURNAWATI		1307114610650001		P	SUNGAIANTUAN	MUNGKA			1											
12	NOVIARISNAR		1307115011590004		P	SUNGAIANTUAN	MUNGKA			1											
13	TOMIFANJENSON		1301071001810002		L	SUNGAIANTUAN	MUNGKA			1											
14	MISRAWATI				P	SIMPANGKAPUAK	MUNGKA			1											
15	RUDIYUDHAPRATAMA				L	SIMPANGKAPUAK	MUNGKA			1											
16	DAHTIARMAN				L	SIMPANGKAPUAK	MUNGKA			1											
17	YESIEKAPUTRI				P	SIMPANGKAPUAK	MUNGKA			1											
18	ARIFMAN				L	SIMPANGKAPUAK	MUNGKA			1											
19	NILMAWATI				P	SIMPANGKAPUAK	MUNGKA			1											
20	YORADESMAWATI				P	SIMPANGKAPUAK	MUNGKA			1											
14	DARNIIS				P	KUBANG	GUGUAK														1
1	ERMAN				L	KUBAN	GUGUA														1

5	TRISNO				G	K														
16	REFNIZAL			L	KUBANG	GUGUAK			1											
17	YOSPEL			L	KUBANG	GUGUAK			1											
18	DEWIS PARMEN			P	KUBANG	GUGUAK			1											
19	ERMAWATI			P	KUBANG	GUGUAK			1											
20	YEN APRIDA			P	KUBANG	GUGUAK			1											

Tabel 2.70. Form 5 A.4. REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN BENCANA

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH APARATUR DI KAWASAN RAWAN BENCANA (ORANG)					JUMLAH WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN					KETERANGAN
			PNS	TNI	POLRI	SATLINMAS	TENAGA KONTRAK	WARGA NEGARA		KERENTANAN			
								JIWA	KK	KONDISI EKONOMI MISKIN (KK)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (ORANG)	KELOMPOK RENTAN (ORANG)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Payakumbuh	Koto Baru Simalanggang						7.938	1.985				Potensi banjir (tinggi)
		Simalanggang						5.135	1.284				Potensi banjir (sedang)
2	Harau	Batu Balang						6.412	1.603				Potensi banjir (tinggi)
		Sarilamak						15.168	3.792				Potensi banjir (sedang)
		Bukit Limbuku						1.583	396				Potensi banjir (sedang)
		Koto Tuo						8.339	2.085				Potensi banjir (sedang)
		Taram						8.516	2.129				Potensi banjir (sedang)
3	Guguak	Simpang Sugiran						2.233	558				Potensi banjir (tinggi) dan longsor (sedang)
		Guguak VIII Koto						14.022	3.506				Potensi banjir (sedang)
4	Kapur IX	Koto Lamo						3.032	758				Potensi banjir dan longsor(tinggi)

		Muaro Paiti						5.844	1.461				Potensi banjir (sedang)
		Lubuak Alai						3.401	850				Potensi banjir (sedang)
5	Lareh Sago Halaban	Balai Panjang						6.241	1.560				Potensi banjir (tinggi)
		Tanjung Gadang						4.989	1.247				Potensi banjir (sedang) dan longsor (sedang)
		Batu Payuang						5.711	1.428				Potensi banjir (sedang) dan longsor (sedang)
		Bukik Sikumpa						2.732	683				Potensi banjir (sedang) dan longsor (sedang)
		Sitanang						3.748	937				Potensi banjir (sedang) dan longsor (sedang)
		Mungo						9.731	2.433				Potensi banjir (tinggi)
6	Luak	Tanjung Haro Sikabukabu Padang Panjang						5.637	1.409				Potensi longsor (sedang)
		Sungai Antuan						5.835	1.459				Potensi banjir (tinggi)
7	Mungka	Talang Maur						5.604	1.401				Potensi banjir (sedang)
		Manggilang						4.894	1.224				Potensi banjir (tinggi) dan longsor (sedang)
8	Pangkalan Koto Baru	Koto Alam						2.947	737				Potensi longsor (sedang)
		Andiang						2.625	656				Potensi banjir (tinggi) dan longsor (sedang)
9	Suliki	Kurai						1.418	355				Potensi banjir (tinggi) dan longsor (sedang)
		Limbanang						4.793	1.198				Potensi banjir (sedang) dan longsor (sedang)
		Suliki						2.771	693				Potensi longsor (sedang)
		Sungai Rimbang						2.473	618				Potensi longsor (sedang)
		Durian Gadang						1.345	336				Potensi banjir (sedang)
10	Akabiluru	Pauh Sangik						1.260	315				Potensi banjir (sedang)
		Suayan						5.008	1.252				Potensi longsor (sedang)
		Koto Tinggi						4.040	1.010				Potensi banjir (sedang) dan longsor (sedang)
11	Gunuang Omeh	Talang Anau											Potensi longsor (sedang)

								1.983	496				
12	Bukik Barisan	Baruah Gunuang						4.152	1.038				Potensi longsor (sedang)
		Koto Tengah						2.920	730				Potensi longsor (sedang)
13	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Gadang						5.923	1.481				Potensi longsor (sedang)
TOTAL								180.403	45.101				

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Tabel 2.71. FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	PENERIMA LAYANAN DASAR				KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN (x Rp.1000)	KEBUTUHAN BIAYA (x Rp.1000)
							WARGA NEGARA	KK	APARAT / PETUGAS	DESA/ NAGARI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 12-13	15	16 = 14 x 15
I	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen KRB	180.403	7	dokumen	180.403	45.101		36	7	0	7	250.000	1.750.000
			Diskusi publik terhadap dokumen KRB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal												
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan	Sosialisasi melalui tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana	180.403	1	tahun	180.403	45.101		36	1	1	1	50.000	200.000

		Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia													
			Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik	50	50	buah	180.403	45.101		36	50	50	0	5.000	250.000	
II	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen RPB	7	7	Orang	180.403	45.101		36	1	0	1	350.000	350.000	
			Diskusi publik terhadap dokumen RPB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal													
		Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon)													
			Diskusi publik terhadap dokumen Rencana Kontinjensi yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal													
		Pelatihan pencegahan dan mitigasi		Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur	1	1	pelatihan	180.403		40		1	1	0	75.000	75.000
				Pelatihan penanggulangan bencana bagi Warga Negara	40	1	pelatihan					1	1	0	75.000	300.000
		Gladi kesiapsiagaan		Simulasi dalam ruang (table top	60	1	gladi			60		60	60	0	100.000	100.000

		terhadap bencana	exercise)													
			Gladi lapang	200	1	gladi			200		200	200	0	100.000	-	
		Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana	180.403	12	Pertemuan					12	12	0	50.000	50.000	
			Penyediaan sarana prasana operasional dan kesiapsiagaan bencana	5	5	jenis peralatan	180.403					5	5	0	100.000	600.000
			Penyediaan layanan pesan singkat secara broadcast	1	1	sms gateway	180.403			36		1	1	0	100.000	100.000
			Penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat	2	2	EWS	180.403			36		2	2	0	100.000	200.000
			Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyediaan peralatan penyelamatan diri	1	1	jenis peralatan	180.403					2	2	0	100.000

C. Sub Urusan Pemadam Kebakaran

A. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui pendataan dan verifikasi factual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak.

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang meliputi:

- a. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/ laporan sampai tiba di lokasi
- b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran
- c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi
- d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran
- e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran

Teknik penghitungan capaian SPM urusan kebakaran di lihat dari dua indikator, yaitu indikator utama layanan SPM dan indikator penunjang layanan capaian SPM, secara kuantitatif teknis penghitungan dituliskan:

1. Layanan Pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rumus Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun } x \text{ dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada tahun } X} \times 100\%$$

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan ke dalam rencana strategis (renstra) Perangkat Daerah dan rencana kerja (renja) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen renja Perangkat Daerah dilakukan pada saat perumusan meliputi: hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan renja dan pendanaan

Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Bapelitbang memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, RKPD dan RENJA Perangkat Daerah. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, renstra Perangkat Daerah, RKPD dan renja Perangkat Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar tercantum dalam APBD. Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan, didasarkan pada rencana pemenuhan pelayanan dasar.

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pelayanan Dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran. ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar untuk jenis pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/kota yang diperoleh Warga Negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Berikut Form 4 (empat) Tahapan dari Sub Urusan Kebakaran:

Tabel 2.72. FORM 5.A.1 FORMAT DATA DUKUNG PELAKSANAAN SPM

N O.	PROVINSI KABUPATEN /KOTA	BENTUK KELEMBAGAAN				JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	BESARAN APBD	ALOKASI APBD UNTUK SUB URUSAN KEBAKARAN	JUMLAH SARANA PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN						JUMLAH PETUGAS					JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN			
		DINAS	SATPOL PP	BPBD	TPIE					MOBIL DAMKAR	MOBIL TANGKI	MOBIL TANGGA	MOBIL RESCUE	MOBIL LAINNYA	TANDON AIR/GROUNDTANK	PN S	JABATAN/ KUALIFIKASI	NON PNS	JABATAN/ KUALIFIKASI	RELAWAN KEBAKARAN	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Pemadam Kebakaran			B	400,8rb jiwa	3.354,30 km2	8.273.529.226	2.106.001.878 (sudah termasuk gaji pasukan)	9	-	-	-	3	-	68 orang		86 org		296 org				

Tabel 2.73. FORM 5.A.2 DAFTAR RELAWAN KABUPATEN/KOTA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERAMPILAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	5
1	JEKY KHARDONAL	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Sungai Antuan
2	RADIUS PRAWIRO	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Sungai Antuan
3	DODI HARIANTO	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Sungai Antuan
4	IMRAWATI	Perempuan		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Sungai Antuan
5	NULFA IDRA	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Sungai Antuan
6	USMAN	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Sungai Antuan
7	MIRA DEWITA	Perempuan		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Sungai Antuan
8	ZAIFINAL	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Sungai Antuan
9	SYAFRIL EDISON	Perempuan		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Sungai Antuan
10	ANITA	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Sungai Antuan
11	ROMIANTO	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Sungai Antuan
12	ANDRI WELKI	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Sungai Antuan
13	ADE LAILA RAHMI	Perempuan		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Sungai Antuan

14	REFNIZEL	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Sungai Antuan</i>
15	HENDRI	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Sungai Antuan</i>
16	ZULHENDRA	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Mungka</i>
17	ILHAM	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Mungka</i>
18	RAMLI	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Mungka</i>
19	ALEX CHANDRA	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Mungka</i>
20	II SIMIRAT	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Mungka</i>
21	ILHAM ADE SAPUTRA	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Mungka</i>
22	JERI HANDIKA	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Mungka</i>
23	RIVO MULIA	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Mungka</i>
24	LALU MUHAMMAD SYAFRUDDIN	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Mungka</i>
25	WARDI	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Mungka</i>
26	RIO PRATAMA	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Mungka</i>
27	JHON HENDRI	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Mungka</i>
28	YOGI ALDI RASANDI	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Mungka</i>
29	RAHMAD FITO	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Mungka</i>
30	HENDRI SOFIANTO	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Mungka</i>
31	YONDRI FEBRIANTO	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Mungka</i>
32	RIFKI, S,Sos	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Batu Hampar</i>
33	ANDRI WELKI	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Batu Hampar</i>
34	ZUL NOFRIDAL	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Batu Hampar</i>
35	PERI MADONNA	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Batu Hampar</i>
36	FAKHRINO PUTRA	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Batu Hampar</i>
37	DEDI RAMDANI, SH	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Batu Hampar</i>
38	RIDWAN USMAN	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Batu Hampar</i>
39	BENZULFRIADI	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Talang Maur</i>
40	GAMAL ISMEDI	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Talang Maur</i>
41	PRATAMA ZAREFRI	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Talang Maur</i>
42	MASMEN	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Talang Maur</i>
43	RASMI	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Talang Maur</i>

44	IRWAN	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Talang Maur</i>
45	IRFANDI	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Talang Maur</i>
46	ABDI	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Talang Maur</i>
47	AFDAL	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Talang Maur</i>
48	DAVID	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Talang Maur</i>
49	ROMIANTO	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Talang Maur</i>
50	DEZI YULIANDA	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Talang Maur</i>
51	LILI MORATA	Perempuan		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Talang Maur</i>
52	HAYATUN NISA	Perempuan		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Talang Maur</i>
53	MIMA RAHMI	Perempuan		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Talang Maur</i>
54	HARMEN PARDIONO	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Lubuak Batingkok</i>
55	M. ELHASNI	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Lubuak Batingkok</i>
56	FAZILA AGUSTI	Perempuan		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Lubuak Batingkok</i>
57	FEBI FADLI	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Lubuak Batingkok</i>
58	YONAL	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Lubuak Batingkok</i>
59	NOFAN ARI SANDI	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Lubuak Batingkok</i>
60	JONI	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Lubuak Batingkok</i>
61	HENDRA HAMIDI	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Lubuak Batingkok</i>
62	NESI NELLYANI	Perempuan		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Lubuak Batingkok</i>
63	YASRI PITO	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Lubuak Batingkok</i>
64	BOBI IRFANDI	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Simpang Kapuak</i>
65	NANDI	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Simpang Kapuak</i>
66	NOVENDRI	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Simpang Kapuak</i>
67	IDON LISMAN	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Simpang Kapuak</i>
68	YOKI SUPRIYALDI	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Simpang Kapuak</i>
69	OSMARDILA	Perempuan		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Simpang Kapuak</i>
70	PERI IRIAWAN	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Simpang Kapuak</i>
71	HARYOKI	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Simpang Kapuak</i>
72	ARIFMAN	laki-laki		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Simpang Kapuak</i>
73	SUCI HAMDANI	Perempuan		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Simpang Kapuak</i>

74	WINA SUSANTI	Perempuan		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Simpang Kapuak
75	ROSITA AULIA	Perempuan		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Simpang Kapuak
76	YORI ANGGARA	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Simpang Kapuak
77	OYONG PICES IRFAN	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Simpang Kapuak
78	TOTO ISWANTO	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Simpang Kapuak
79	RANDA FERNANDO	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Simpang Kapuak
80	NOPEN ADRIAN	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Simpang Kapuak
81	OKTAVIANDA	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Jopang Manganti
82	MHD FADIL CHUAZARI	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Jopang Manganti
83	DASMIZAR	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Jopang Manganti
84	DARMON	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Jopang Manganti
85	AFRION	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Jopang Manganti
86	HENDRA USNEDI	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Jopang Manganti
87	FITRAL	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Jopang Manganti
88	M. ZAKI YULIARDI	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Jopang Manganti
89	AFDAL	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Jopang Manganti
90	ARIF GUSDianto	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Jopang Manganti
91	AFDAL YUSRA	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Jopang Manganti
92	GINA LAURENZA	Perempuan		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Jopang Manganti
93	WILA BEN YULITA	Perempuan		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Jopang Manganti
94	NORA EFRIYANI	Perempuan		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Jopang Manganti
95	BEMA	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Jopang Manganti
96	RIKI RIKARDO	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Limbanang
97	RIFALDI YUSRA	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Limbanang
98	HERDI PUTRA	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Limbanang
99	YENDRIZAL	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Limbanang
100	ZULMAHDIN PASARIBU	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Taeh Baruah
101	JONDRI	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Taeh Baruah
102	AFRIYANTO	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Taeh Baruah
103	WENNEDI MUSTIKA PUTRA	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Taeh Baruah

104	MUHAMMAD ARPI	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Taeh Baruah
105	MENDRA SATRIA	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Taeh Baruah
106	EKI SEPTIA PUTRA	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Taeh Baruah
107	KASRI	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Taeh Baruah
108	ERISON	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Taeh Baruah
109	MASWIR ERIANTO	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Taeh Baruah
110	ERIANTO	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Taeh Baruah
111	ENTRI EKA PUTRA	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Taeh Baruah
112	M. HAZIM	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Taeh Baruah
113	RUMAIDON	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Taeh Baruah
114	ZULFAHMI	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Taeh Baruah
115	ALIAS CANDRA	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Lubuak Alai
116	FAZIRA NURHADI	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Lubuak Alai
117	ALIKF TIRTA YASA	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Lubuak Alai
118	DITO PERDANA PUTRA	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Lubuak Alai
119	YUSRIZAL DATUAK PADO	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Tungkar
120	YON SWANDI	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Tungkar
121	ARWIN DT LELO BATUAH	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Tungkar
122	YUSNITA	Perempuan		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Tungkar
123	MASHYUDA PUTRA	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Tungkar
124	EFENDI	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Tungkar
125	YOGI EFENDI PRATAMA	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Tungkar
126	DEBBY KRISTOPER	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Tungkar
127	IRWANDI DATUAK PENGAHULU BOSA	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Tungkar
128	ZULMAN HASMI	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Tungkar
129	SYOFIARLEDI	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Situjuh Gadang
130	ALBER FRANANDA	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Situjuh Gadang
131	SYAF DYNUL MURSYID	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Situjuh Gadang
132	ZIQRI DEDET AQBAR	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Situjuh Gadang
133	M. RIZKI J	laki-laki		Pemadam Dini Kebakaran	Nagari Situjuh Gadang

134	RAHUL ARIANTO	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Situjuh Gadang</i>
135	ALFIAN	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Situjuh Gadang</i>
136	MENDRIZAL	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Situjuh Gadang</i>
137	IRWAN HAMDI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Situjuh Gadang</i>
138	NANDA S	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Durian Gadang</i>
139	MARJOHAN	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Durian Gadang</i>
140	DARUL AKHYAR	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Durian Gadang</i>
141	IRFAN MAULANA	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Durian Gadang</i>
142	REFFI REFFIRMAN	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Durian Gadang</i>
143	AHSANI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Durian Gadang</i>
144	MIMI YOLANDA	<i>Perempuan</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Durian Gadang</i>
145	NURUL PUTRA	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Durian Gadang</i>
146	FAUZIAH	<i>Perempuan</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Durian Gadang</i>
147	DIKI KURNIAWAN	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Durian Gadang</i>
148	RENALDO	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Pauh Sangik</i>
149	AGUSLIM	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Pauh Sangik</i>
150	YEZI AFRIALDI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Pauh Sangik</i>
151	YORI EFRIKO	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Pauh Sangik</i>
152	DESMAN	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Pauh Sangik</i>
153	DON PUTRA	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Pauh Sangik</i>
154	SYAHRINAS	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Pauh Sangik</i>
155	ARDI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Pauh Sangik</i>
156	MUSLIM	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Koto Tuo Harau</i>
157	PENDRI YANTO	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Koto Tuo Harau</i>
158	ADITIA WARMAN	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Koto Tuo Harau</i>
159	RUDI HARTONO	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Koto Tuo Harau</i>
160	RIKO EFENDI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Koto Tuo Harau</i>
161	JANUARDI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Koto Tuo Harau</i>
162	MUSNI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Koto Tuo Harau</i>
163	JEFRI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Koto Tuo Harau</i>

164	AGUS WIRMAN	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Koto Tuo Harau</i>
165	GERHANTO	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Koto Tuo Harau</i>
166	HENDRI GUSMAR	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Koto Tuo Harau</i>
167	NOVAN DERISKI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Koto Tuo Harau</i>
168	SYAIFUL EFENDI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Koto Tuo Harau</i>
169	NANDA YULIANDA	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Koto Tuo Harau</i>
170	HUSNI EFENDI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Harau</i>
171	DESHENDRI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Harau</i>
172	SYAIFUL HADI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Harau</i>
173	HENDRA	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Harau</i>
174	AFRIZAL	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Harau</i>
175	M IDRIS	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Harau</i>
176	WAHYUDI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Harau</i>
177	INDRA SAPUTRA	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Harau</i>
178	PEKORNADI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Harau</i>
179	YENDRA MUDH NEDI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Harau</i>
180	YERMAN SYAIFUL FADEL	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Harau</i>
181	ISKARMON BASIR	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Harau</i>
182	ZULFEBRI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Harau</i>
183	BENDRI PUTRA	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Harau</i>
184	HARDI YUDA	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Harau</i>
185	MUHAMMAD ZAIN	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Harau</i>
186	NAFRIZAL	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Harau</i>
187	EDRI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Gurun Harau</i>
188	M. ERIZAL	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Gurun Harau</i>
189	ONDRIZAL	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Gurun Harau</i>
190	ARIFIN NASUTION	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Gurun Harau</i>
191	DEDI DESWANDI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Gurun Harau</i>
192	RIKI ZULHENDRA	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Gurun Harau</i>
193	AFRIZAL	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Gurun Harau</i>

194	SUDARNO	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Gurun Harau</i>
195	ERIANTONI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Gurun Harau</i>
196	YASRI JONI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Gurun Harau</i>
197	INDRA GUNAWAN	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Gurun Harau</i>
198	YANDRI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Gurun Harau</i>
199	AFRIZAL	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Gurun Harau</i>
200	RAHMA DONAL	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Gurun Harau</i>
201	DESMAN	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Gurun Harau</i>
202	YANDA RIZAL	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Solok Bi0-bio</i>
203	ANDRIZAL	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Solok Bi0-bio</i>
204	M. WIRMON MULYA	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Solok Bi0-bio</i>
205	YONI SOFIANTO	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Solok Bi0-bio</i>
206	ANDRA KUSNIATI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Solok Bi0-bio</i>
207	HENDRIZAL	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Solok Bi0-bio</i>
208	ASMIWARDI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Solok Bi0-bio</i>
209	USMAN	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Solok Bi0-bio</i>
210	EDISON	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Solok Bi0-bio</i>
211	YASMAN	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Solok Bi0-bio</i>
212	DANIL AMRISWAL	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Solok Bi0-bio</i>
213	ZENI RAHMAT FAUZI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Solok Bi0-bio</i>
214	YUSRIZAL	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Solok Bi0-bio</i>
215	GUSWENDI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Solok Bi0-bio</i>
216	RENO FEBRIANTO	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Solok Bi0-bio</i>
217	OLLY WIJAYA , ST, DT, KALI NAN PUTIAH	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Solok Bi0-bio</i>
218	ADRI SETIADI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Sarilamak</i>
219	RAMLI HIDAYAT	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Sarilamak</i>
220	AFRI DONA ERIZAL	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Sarilamak</i>
221	GITO SUHANDA	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Sarilamak</i>
222	SANDI TARUNA	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Sarilamak</i>
223	DARISMEN	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Sarilamak</i>

224	YUSMADEWIN, Amd	<i>Perempuan</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Sarilamak</i>
225	DAMRIL	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Sarilamak</i>
226	MUHAMMAD RIAN	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Sarilamak</i>
227	RONI ANDIKO	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Sarilamak</i>
228	TAUFIK	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Sarilamak</i>
229	HENGKY	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Sarilamak</i>
230	EVA NASRUL	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Sarilamak</i>
231	FRANS FERNANDO	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Sarilamak</i>
232	MUSLIM	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Batu Balang</i>
233	LUSMAN	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Batu Balang</i>
234	NURHADI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Batu Balang</i>
235	UMAR	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Batu Balang</i>
236	ZAMBASRI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Batu Balang</i>
237	ABDI FAUZAN	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Batu Balang</i>
238	RIZKI ARDIANSYAH	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Batu Balang</i>
239	STEVANUS NOFRI TUSTEVEN	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Batu Balang</i>
240	MEDYA ULTARI	<i>Perempuan</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Batu Balang</i>
241	DEFRINDO YOGA UTAMA	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Batu Balang</i>
242	ADI PUTRA	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Tarantang</i>
243	IDRAL ZULFADLY	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Tarantang</i>
244	AZIMAR	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Tarantang</i>
245	YONDRI EKA PUTRA	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Tarantang</i>
246	SABRI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Tarantang</i>
247	ERIZAL	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Tarantang</i>
248	HENDRAYENI	<i>Perempuan</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Tarantang</i>
249	BIMA AMELA GAFAR	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Tarantang</i>
250	M. HAMDI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Tarantang</i>
251	ZULKIFLI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Tarantang</i>
252	REZA KURNIAWATI	<i>Perempuan</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Tarantang</i>
253	RIO PRAMANA PUTRA	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Tarantang</i>

254	ALI UMAR	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Tarantang</i>
255	M. FAJAR	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Tarantang</i>
256	YOVA RISANTI	<i>Perempuan</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Tarantang</i>
257	NANANG ANWAR, SE	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Taram</i>
258	EDISON	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Taram</i>
259	M RICKY	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Taram</i>
260	DUDI RASYIDI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Taram</i>
261	SYAFRIL	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Taram</i>
262	ZULHADI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Taram</i>
263	HENDRIK	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Taram</i>
264	GUSNEDY	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Taram</i>
265	MUKHLIS	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Taram</i>
266	ROZA YULIANI	<i>Perempuan</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Taram</i>
267	SUHADA IRFAN	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Taram</i>
268	ELVI YASNI	<i>Perempuan</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Taram</i>
269	RONAL WARDANA	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Taram</i>
270	HERI IRIANA	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Taram</i>
271	FAHRIAL	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Taram</i>
272	WAWAN RIZAL	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Taram</i>
273	DASWIN	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Bukik Limbuku</i>
274	USMAN SAHIB	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Bukik Limbuku</i>
275	AMRIL	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Bukik Limbuku</i>
276	MAIDARNIS	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Bukik Limbuku</i>
277	NANDA	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Bukik Limbuku</i>
278	INDRA	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Bukik Limbuku</i>
279	YANDRA KARTIKA	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Bukik Limbuku</i>
280	HAPIS	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Bukik Limbuku</i>
281	ANDA	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Bukik Limbuku</i>
282	MEJI	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Bukik Limbuku</i>
283	BUJANG	<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Bukik Limbuku</i>

284	PUTRA		<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Bukik Limbuku</i>
285	YULIADI		<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Bukik Limbuku</i>
286	SAFRIDON		<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Bukik Limbuku</i>
287	SAFRIADI DT BARO		<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Pilubang</i>
288	SUSMARDI		<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Pilubang</i>
289	M. ALIAS		<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Pilubang</i>
290	AHMAD ZAKI		<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Pilubang</i>
291	NOVIARDI		<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Pilubang</i>
292	BUDI KASMAN		<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Pilubang</i>
293	WAHYU SEPTA RIANGGI		<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Pilubang</i>
294	DARISMAN		<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Pilubang</i>
295	UUL SRIYADI		<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Pilubang</i>
296	APRIL		<i>laki-laki</i>		<i>Pemadam Dini Kebakaran</i>	<i>Nagari Pilubang</i>

Tabel 2.74. FORM 5.A.3 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN		USIA					KONDISI FISIK		NIK	NO. KK	TEMPAT LAHIR	TGL. LAHIR	ALAMAT
		L	P	0 - 5 tahun	6 - 18 tahun	19 - 30 tahun	31 - 60 tahun	>60 tahun	Sehat	Berkebutuhan Khusus					
1	2	3		4					5		6	7	8	9	10
1	LAHAN														JORONG TARANTANG NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU
2	TIANG LISTRIK														JORONG KOTO BARU NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA
3	RUMAH/ARMEN	L						77			130711141 1480001			17851	JORONG MUNGKA TENGAH NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA
4	RUMAH/SAFRIDON SYAIFUL	L					47							28270	JORONG KUBANG RASAU NAGARI BALAI PANJANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
5	RUMAH/SAFRI DT.	L													JORONG BALAI TALANG

	GODANG															NAGARI GUGUAK VIII KOTO KECAMATAN GUGUAK
6	RUMAH/WIRDA		P													JORONG BATU BALAH NAGARI GUNUANG MALINTANG KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7	RUMAH															KELURAHAN BALAI PANJANG KOTA PAYAKUMBUH
8	SEPEDA MOTOR/M.DEDI RAHMANSYA	L				41							30952			JORONG PAKAN RABAA NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
9	RUMAH/SUCI WAHYUNI		P			31				130713561 2950004			34684			JORONG SIMPANG PARIK NAGARI KOTO TANGAH BATU HAMPA KECAMATAN AKABILURU
10	4 UNIT RUMAH/EZIF MARINI		P			40				130407660 3850002			31132			JORONG SIMPANG PARIK NAGARI KOTO TANGAH BATU HAMPA KECAMATAN AKABILURU
11	3 UNIT RUMAH/DAFRI	L				43				130707030 4870001			30138			JORONG RONAH BENGKEK NAGARI SIALANG KECAMATAN KAPUR IX
12	RUMAH/USNIPAL		P				64									JORONG KOTO TANGAH BATU HAMPA NAGARI KOTO TANGAH BATU HAMPA KECAMATAN AKABILURU
13	RUKO/NOVA NOVI RITA NINGSIH		P			37				130802551 1880002			32462			NAGARI SITUJUJAH BATUA KECAMATAN SITUJUJAH LIMO NAGARI
14	DAPUR RUMAH/SUWANDI	L					64									JORONG TARATAK PADANG RAJO NAGARI KOTO TUO KECAMATAN HARAU
15	RUMAH															JORONG KOTO BARU NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA
16	RUMAH															JORONG MUNGKA TENGAH NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA
17	RUMAH DAN GUDANG/JONI SAPUTRA	L				44				130703250 6810002			29792			JORONG KOTO NAGARI SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH
18	WARUNG/DOLITA NOVIA		P			42										SITUJUJAH LADANG LAWEH KECAMATAN SITUJUJAH LIMO NAGARI
19	LAHAN/RUMPUN BAMBU															JORONG PAKAN SINAYAN NAGARI BUKIK SIKUMPA

															KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
20	GUDANG PINANG/FEBRI ANDIKA	L				29									JORONG PAKAN SINAYAN NAGARI BUKIK SIKUMPA KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
21	RUMAH/AFRI NOVRIADI	L				34				130704291 1910001			33571	JORONG BUKIK GOMBAK SITUAK NAGARI MUNGO KECAMATAN LUAK	
22	RUMAH/YULIA FITRINA		P			42								JORONG MUNGKA TENGAH NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA	
23	RUMAH/KAMIT	L					62							JORONG SEBARANG PASAR MANGGILANG KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
24	LAHAN													JORONG KAMPUNG BARU NAGARI PANGKALAN KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
25	SDN 02 KETINGGIAN													JORONG KETINGGIAN NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU	
26	LAHAN													JORONG PADANG LOWEH NAGARI SULIKI KECAMATAN SULIKI	
27	RUMAH/NOVA SAFITRI		P			30								KANDANG LAMO NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU	
28	LAHAN													JORONG KOTO BARU NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA	
29	LAHAN													JORONG KETINGGIAN NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU	
30	KABEL TIANG LISTRIK													JORONG BALAI CUBADAK NAGARI TARAM KECAMATAN HARAU	
31	DAPUR RUMAH/AGUSTRI	L				55								JORONG PAKAN RABAA NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
32	LAHAN/RUMPUN BAMBU													NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH	
33	LAHAN/RUMPUN BAMBU													JORONG TOBIANG NAGARI SUNGAI KAMUNYANG KECAMATAN LUAK	

34	LAHAN												JORONG BALIAK BUKIK NAGARI GUNUANG MALINTANG KECMATAN PANGKALANG KOTO BARU
35	LAHAN												JORONG KAMPUANG DALAMNAGARI LIMBANANG KECAMATAN SULIKI
36	LAHAN												JORONG TARANTANG NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU
37	3 UNIT RUMAH/AGUNG	L				27							JORONG KOTO TINGGI NAGARI LUBUK ALAI KECAMATAN KAPUR IX
38	LAHAN												JORONG SUBARANG NAGARI TARAM KECAMATAN HARAU
39	LAHAN												ANDALEH BALIAK BUKIK KECAMATAN LUAK
40	RUMAH												TANJUANG ARO SIKABU KABU KECAMATAN LUAK
41	LAHAN												JORONG PADANG LOWEH NAGARI SULIKI KECAMATAN SULIKI
42	LAHAN												JORONG SULIKI PASAR NAGARI SULIKI
43	LAHAN												JORONG KUBANG BUNGUAK NAGARI SITUJUAH BATUA KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
44	MOBIL/JEFRI ANDONI	L				44						29757	DEPAN SPBU TABEL PANJANG NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH
45	LAHAN												BATU BAUK NAGARI SULIKI KECAMATAN SULIKI
46	LAHAN												SARASAH TANGGO NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU
47	RUMAH/HASNA		P			55						25917	JORONG BALAI MANSIRI NAGARI GUGUAK VIII KOTO KECAMATAN GUGUAK
48	LAHAN/RUMPUN BAMBU												JORONG LUBUAK SIMATO NAGARI SUNGAI ANTUAN KECAMATAN MUNGKA
49	LAHAN												JORONG SULIKI NAGARI SULIKI KECAMATAN SULIKI
50	LAHAN												JORONG DURIAN GADANG KECAMATAN AKABILURU

51	LAHAN													JORONG KAMPUANG GODUANG NAGARI PANDAM GADANG KECAMATAN GUNUANG OMEH
52	LAHAN													JORONG BULUH KASOK KECAMATAN HARAU
53	LAHAN													JORONG SIPATAI NAGARI TARAM KECAMATAN HARAU
54	LAHAN													SARASAH TANGGO NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU
55	LAHAN													JORONG PADANG KANDI NAGARI VII KOTO TALAGO KECAMATAN GUGUAK
56	LAHAN													SARASAH TANGGO NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU
57	LAHAN/RUMPUN BAMBU													JORONG MANGANTI NAGARI JOPANG MANGANTI KECAMATAN MUNGKA
58	LAHAN													JORONG SUNGAI RIMBANG KECAMATAN SULIKI
59	LAHAN/RUMPUN BAMBU													JORONG TAMPUANG KODOK NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
60	LAHAN													SITUJUAH LADANG LAWEH KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
61	LAHAN													JORONG SIMPANG MANGANTI KECAMATAN AKABILURU
62	LAHAN													JORONG SULIKI PASAR NAGARI SULIKI KECAMATAN SULIKI
63	LAHAN													JORONG TANJUNG JATI NAGARI VII KOTO TALAGO KECAMATAN GUGUAK
64	LAHAN													NAGARI SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH
65	LAHAN													JORONG AIA PUTIAH KECAMATAN HARAU
66	LAHAN/RUMPUN BAMBU													NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
67	LAHAN													JORONG LAREH NAN PANJANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

68	MOBIL/WEN		P				38									NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
69	LAHAN															ANDALEH BALIAK BUKIK KECAMATAN LUAK
70	LAHAN															JORONG ATEH KOTO NAGARI SULIKI KECAMATAN SULIKI
71	LAHAN															JORONG TARATAK NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU
72	LAHAN															JORONG SUBARANG NAGARI TARAM KECAMATAN HARAU
73	LAHAN															JORONG BALIAK BUKIK NAGARI ANDALEH KECAMATAN LUAK
74	LAHAN															JORONG GURUN NAGARI GURUN KECAMATAN HARAU
75	LAHAN															JORONG TANJUANG ATEH NAGARI TARAM KECAMATAN HARAU
76	LAHAN/RUMPUN BAMBU															JORONG KAMPAI NAGARI LABUAH GUNUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
77	LAHAN															JORONG LAREH NAN PANJANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
78	RUMAH/SRI WELNA		P				35									JORONG GANDO NAGARI PIOBANG KECAMATAN PAYAKUMBUH
79	LAHAN															ANDALEH BALIAK BUKIK KECAMATAN LUAK
80	LAHAN/RUMPUN BAMBU															JORONG KUBU GADANG NAGARI TAEH BARUAH KECAMATAN PAYAKUMBUH
81	PONDOK BATU															JORONG LAREH NAN PANJANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
82	LAHAN															JORONG BUKIT TALAU NAGARI GUNUANG MALINTANG KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
83	LAHAN															JORONG TANJUNG ATEH NAGARI TARAM KECAMATAN HARAU
84	LAHAN															JORONG BONCAH NAGARI BATU BALANG KECAMATAN

														HARAU
85	LAHAN													JORONG BALAI MALINTANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
86	RUMAH/GILANG ANANDA	L			24					130704041 1010001			37199	JORONG TANJUANG BARUAH NAGARI BUKIK SIKUMPA KECAMATAN LUAK
87	LAHAN													BUKIK BARIGI KECAMATAN LUAK
88	RUMAH													JORONG PADANG HARAPAN MUNGKA NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA
89	4 UNIT RUMAH/SYAMSUR IZAL	L				63				130706121 0620002			22818	JORONG KOTO TANGAH NAGARI KOTO ALAMKECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
90	LAHAN													JORONG TANJUNG ATEH NAGARI TARAM KECAMATAN HARAU
91	RUMAH/RISWAND I	L				53								JORONG KAYU TANAM NAGARI LABUAH GUNUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
92	LAHAN													JORONG KAMPUNG BARU NAGARI PANGKALAN KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
93	LAHAN													JORONG LOMPATAN NAGARI BARULAK
94	LAHAN													JORONG BANJA RANAH KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
95	LAHAN													JORONG TANAH TINGKAH NAGARI SUNGAI RIMBANG KECAMATAN SULIKI
96	LAHAN/RUMPUN BAMBU													JORONG BALAI TALANG NAGARI GUGUAK VIII KOTO KECAMATAN GUGUAK
97	RUMAH													JORONG KETINGGIAN NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU
98	LAHAN													JORONG TARANTANG NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU
99	LAHAN													PADANG MANGATEH KECAMATAN LUAK

100	LAHAN													JORONG PILADANG NAGARI KOTO TANGAH BATU AMPA KECAMATAN AKABILURU
101	LAHAN													JORONG KOTO TUO NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA
102	LAHAN													SITUJUAH GADANG KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
103	LAHAN													BATU HAMPA KECAMTAN AKABILURU
104	LAHAN/RUMPUN BAMBU													JORONG SIBOKA NAGARI ANDIANG KECAMATAN SULIKI
105	LAHAN													JORONG SUBARANG NAGARI TARAM KECAMATAN HARAU
106	LAHAN													JORONG SUBARANG NAGARI TARAM KECAMATAN HARAU
107	LAHAN/RUMPUN BAMBU													NAGARI PAUH SANGIK KECAMATAN AKABILURU
108	LAHAN													KELOK TALAGO KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
109	LAHAN/RUMPUN BAMBU													NAGARI MANGANTI KECAMATAN MUNGKA
110	RUMAH													JORONG KAMPUNG DALAM NAGARI MUARO PAITI KECAMATAN KAPUR IX
111	LAHAN													JORONG KOTO GADANG NAGARI MAEK KECAMATAN BUKIT BARISAN
112	LAHAN/RUMPUN BAMBU													JORONG PADANG KOTO TUO NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA
113	LAHAN													KAMPUANG PATAI NAGARI PANDAM GADANG KECAMATAN GUNUANG OMEH
114	LAHAN													KAMPUANG PATAI NAGARI PANDAM GADANG KECAMATAN GUNUANG OMEH
115	LAHAN													NAGARI KOTO TANGAH BATU HAMPA KECAMATAN AKABILURU
116	LAHAN													TAEH BARUAH KECAMATAN PAYAKUMBUH
117	LAHAN/RUMPUN BAMBU													JOROG MUNGKA TENGAH NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA

118	LAHAN													JORONG KOTO MARAPAK NAGARI PANDAM GADANG KECAMATAN GUNUANG OMEH
119	LAHAN													ATEH KOTO SULIKI KECAMATAN SULIKI
120	LAHAN/RUMPUN BAMBU													JORONG PADANG JAPANG NAGARI VII KOTO TALAGO KECAMATAN GUGUAK
121	LAHAN													JORONG ANDIANG MUDIAK NAGARI ANDIANG KECAMATAN SULIKI
122	LAHAN													JORONG PAKAN SINAYAN NAGARI BUKIK SIKUMPA KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
123	LAHAN													JORONG SULIKI BARUAH NAGARI SULIKI KECAMATAN SULIKI
124	LAHAN													JORONG KUBANG RASAU NAGARI BALAI PANJANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
125	LAHAN													JORONG BATU PAYUANG NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
126	LAHAN													DURIAN GADANG KECAMATAN AKABILURU
127	RUMAH													NAGARI TANJUANG PAUAH KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
128	1 RUMAH, 1 RUKO, 4 KOS/PENDI SUKARDI	L				48								JORONG KOTO TUO NAGARI KOTO LAMO KECAMATAN KAPUR IX
129	LAHAN/RUMPUN BAMBU													JORONG BUMBUANG NAGARI SITUJUUAH BATUA KECAMATAN SITUJUUAH LIMO NAGARI
130	LAHAN/RUMPUN BAMBU													JORONG KOTO BARU NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA
131	LAHAN													SUNGAI RIMBANG KECAMATAN SULIKI
132	LAHAN													JORONG TARANTANG NAGARI TARANTANG KECAMATAN HARAU

133	LAHAN													JORONG PADANG JAPANG NAGARI VII KOTO TALAGO KECAMATAN GUGUAK
134	LAHAN													JORONG PABATUNGAN NAGARI TAEH BUKIK KECAMATAN PAYAKUMBUH
135	LAHAN													JORONG KAMPUNG TARONDAM NAGARI ANDIANG KECAMATAN SULIKI
136	LAHAN													JORONG BATU BAUK NAGAI SULIKI KECAMATAN SULIKI
137	LAHAN													JORONG SARIAK LAWEH KECAMATAN AKABILURU
138	LAHAN													JORONG INDO BALEH BARAT KECAMATAN LUAK
139	LAHAN													JORONG PANINJAUAN NAGARI KOTO TANGAH KECAMATAN BUKIT BARISAN
140	LAHAN													JORONG TARATAK NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU
141	LAHAN													JORONG GURUN NAGARI GURUN KECAMATAN HARAU
142	GUDANG GETAH PINUS													JORONG ATEH NAGARI SUNGAI BALANTIAK KECAMATAN AKABILURU
143	RUMAH/ANITA		P				38							JORONG PADANG JAPANG NAGARI VII KOTO TALAGO KECAMATAN GUGUAK
144	RUMAH/HENDALI SA		P				60							JORONG KURANJI NAGARI GUGUAK VIII KOTO KECAMATAN GUGUAK
145	LAHAN													JORONG TARANTANG NAGARI TARANTANG KECAMATAN HARAU
146	LAHAN													JORONG TARANTANG NAGARI TARANTANG KECAMATAN HARAU
147	LAHAN													JORONG BARUAH LIMBANANG NAGARI LIMBANANG KECAMATAN SULIKI
148	LAHAN													NAGARI SUNGAI NANIANG KECAMATAN BUKIT BARISAN
149	LAHAN													JORONG GODUANG NAGARI PANDAM GADANG KECAMATAN GUNUANG OMEH

150	LAHAN												JORONG TARATAK NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU
151	LAHAN												HULU AIA KECAMATAN HARAU
152	LAHAN												JORONG PADANG PARIK PANJANG NAGARI TAEH BARUAH KECAMATAN PAYAKUMBUH
153	LAHAN												JORONG TARATAK NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU
154	LAHAN												JORONG MUNGKA TENGAH NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA
155	LAHAN												JORONG ANDALEH BALIAK BUKIK KECAMATAN LUAK
156	LAHAN												NAGARI SITUJUAH TUNGKA KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
157	LAHAN												NAGARI SITUJUAH BANDA DALAM KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
158	RUMAH/MESRA NILDA		P				53						JORONG BATU LABI NAGARI MUNGO KECAMATAN LUAK
159	LAHAN												KOTO TANGAH KECAMATAN BUKIT BARISAN
160	LAHAN												GOR SINGA HARAU KECAMATAN HARAU
161	LAHAN												SARIAK LAWEH KECAMATAN AKABILURU
162	LAHAN												JORONG KETINGGIAN NAGARI GUGUAK VIII KOTO KECAMATAN GUGUAK
163	RUMAH												JORONG KANDANG LAMO NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU
164	LAHAN												NAGARI SITANANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
165	LAHAN												JORONG PABATUNGAN NAGARI TAEH BUKIK KECAMATAN PAYAKUMBUH
166	LAHAN												JORONG NAGORI GODANG NAGARI SARIAK LAWEH KECAMATAN AKABILURU
167	LAHAN												ANDALEH BALIAK BUKIK

																	KOTO BARU
184	LAHAN																SITUJUAH TUNGKA KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
185	LAHAN																JORONG LUBUAK JANTAN NAGARI GURUN KECAMATAN HARAU
186	LAHAN																SITAPA KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
187	LAHAN																NAGARI BATU PAYUNG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
188	LAHAN																NAGARI LIMBANANG KECAMATAN SULIKI
189	LAHAN																NAGARI SIKABU KABU TANJUANG HARO PADANG PANJANG KECAMATAN LUAK
190	LAHAN																NAGARI TARANTANG KECAMATAN HARAU
191	LAHAN																JORONG RAMBEK NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA
192	LAHAN																JORONG ATEH KOTO NAGARI SULIKI KECAMATAN SULIKI
193	LAHAN																PUNCAK BARIGI KECAMATAN LUAK
194	LAHAN																JORONG BATU BAUK NAGARI SULIKI KECAMATAN SULIKI
195	LAHAN																JORONG GUNTUANG KECAMATAN BUKIT BARISAN
196	LAHAN																KAPALO BANDA KECAMATAN HARAU
197	LAHAN																JORONG PAKAN SALASA NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA
198	LAHAN																NAGARI PANGKALAN KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
199	LAHAN																BALUBUIH KECAMATAN GUGUAK
200	LAHAN																NAGARI TANJUNG BALIK KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
201	LAHAN																SIMPANG SUGIRAN KECAMATAN GUGUAK
202	LAHAN																NAGARI SUNGAI BALANTIAK

225	LAHAN													JORONG BUKIK LIMAU NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU
226	LAHAN													NAGARI TANJUANG PAUAH KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
227	LAHAN													MUNGKA
228	LAHAN													JORONG GUGUAK NAGARI TARANTANG KECAMATAN HARAU
229	LAHAN													BULUH KASOK KECAMATAN HARAU
230	LAHAN													LUBUAK ALAI KECAMATAN KAPUR IX
231	LAHAN													SUNGAI ANTUAN KECAMATAN MUNGKA
232	LAHAN													NAGARI SUNGAI BALANTIAK KECAMATAN AKABILURU
233	LAHAN													TAMBUN IUJAK KECAMATAN PAYAKUMBUH
234	LAHAN													TARATAK, HARAU
235	LAHAN													SIMPANG ANDIANG KECAMATAN SULIKI
236	LAHAN													BANJA LAWEH KECAMATAN BUKIT BARISAN
237	LAHAN													TANJUANG BALIK, PANGKALAN
238	LAHAN													GURUN KECAMATAN HARAU
239	LAHAN													LUBUAK SIMATO KECAMATAN MUNGKA
240	LAHAN													SITANANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
241	LAHAN													SUNGAI CUBADAK KECAMATAN AKABILURU
242	LAHAN													LABUAH GUNUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
243	LAHAN													TARANTANG KECAMATAN HARAU
244	LAHAN													TARANTANG KECAMATAN HARAU
245	LAHAN													LUBUAK SIMATO KECAMATAN MUNGKA
246	LAHAN													ATEH KOTO SULIKI KECAMATAN SULIKI

247	LAHAN															KOTO TANGAH PANINJAUAN
248	LAHAN															SUBARANG AIA KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
249	LAHAN															KETINGGIAN SARILAMAK KECAMATAN HARAU
250	LAHAN															TANJUANG BALIK, PANGKALAN
251	LAHAN															EKOR PARIT, LIMBANANG KECAMATAN SULIKI
252	LAHAN															SIPINGAI GUGUAK
253	LAHAN															LABUAH GUNUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
254	LAHAN															JORONG PAKA SINAYAN, BUKIK SIKUMPA
255	LAHAN															PILADANG KECAMATAN AKABILURU
256	LAHAN															PASAR BARU, PANGKALAN
257	LAHAN															JORONG LUBUAK LIMPATO NAGARI TARANTANG KECAMATAN HARAU
258	LAHAN															TANJUANG BALIK, PANGKALAN
259	LAHAN															JORONG KOTO MALINTANG NAGARI BUKIK LIMBUKU KECAMATAN HARAU
260	RUMAH (FITRAWATI)		P			48		SEHAT		130707420 4770002			MUARO PAITI	28217		JORONG KAMPUANG BARU NAGARI MUARO PAITI KECAMATAN KAPUR IX
261	LAHAN															PABOTUNGAN TAEH BUKIK KECAMATAN PAYAKUMBUH
262	LAHAN															TANJUANG PAUAH PANGKALAN
263	LAHAN															TALANG MAUR KECAMATAN MUNGKA
264	LAHAN															GELUGUR KECAMATAN KAPUR IX
265	LAHAN															JORONG KAMPUNG DALAM NAGARI LIMBANANG KECAMATAN SULIKI
266	LAHAN															NAGARI MUARO PAITI KECAMATAN KAPUR IX
267	LAHAN															JORONG SONTUANG NAGARI SIALANG KECAMATAN KAPUR IX
268	LAHAN															GUNUANG MALINTANG

															KECAMATAN PANGKALAN
269	LAHAN														JORONG PADANG BARU NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA
270	LAHAN/POHON KELAPA														JORONG PAUAH ANOK NAGARI PANGKALAN KECAMATAN PANGKALAN
271	LAHAN														JORONG BALIAK BUKIT NAGARI ANDALEH KECAMATAN LUAK
272	LAHAN														JORONG TARATAK NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU
273	LAHAN														JORONG PABATUNGAN NAGARI TAEH BUKIK KECAMATAN PAYAKUMBUH
274	LAHAN														JORONG DAMA TINGGI NAGARI SUNGAI RIMBANG KECAMATAN SULIKI
275	LAHAN														NAGARI SUAYAN KECAMATAN AKABILURU
276	LAHAN														NAGARI MUNGO KECAMATAN LUAK
277	LAHAN														JORONG KAMPUNG DALAM NAGARI LIMBANANG KECAMATAN SULIKI
278	LAHAN														NAGARI SARIAK LAWEH KECAMATAN AKABILURU
279	LAHAN														JORONG KOTO BARU NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA
280	LAHAN														JORONG NIUR KAPALO KOTO NAGARI SARIAK LAWEH KECAMATAN AKABILURU
281	LAHAN														JORONG EKOR PARIT NAGARI LIMBANANG KECAMATAN SULIKI
282	LAHAN/RUMPUN BAMBU														KAPALO BUKIK ANDALEH KECAMATAN LUAK
283	LAHAN														JORONG SULIKI BARUAH NAGARI SULIKI KECAMATAN SULIKI
284	RUMAH (RATNA JUWITA)		P			44		SEHAT		130713670 8810001		SUAYAN	29825		JORONG SUAYAN RANDAH NAGARI SUAYAN KECAMATAN AKABILURU
285	LAHAN														NAGARI TALANG ANAU

																		KECAMATAN GUNUANG OMEH
286	LAHAN																	DEKAT PLTA BATANG AGAM
287	LAHAN																	JORONG PABATUNGAN NAGARI TAEH BUKIK KECAMATAN PAYAKUMBUH
288	TABUNG GAS (RATNA)		P			28		SEHAT		330611461 0970003			PURWOREJO	35709				JORONG MUNGKA TENGAH NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA
289	LAHAN																	JORONG LAREH NAN PANJANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
290	LAHAN																	JORONG LUBUAK BANGKU NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU
291	LAHAN																	JORONG SUBARANG TABEK NAGARI SITUJUAH BANDA DALAM KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
292	LAHAN																	BATU BARIGI NAGARI SIKABU KABU TANJUANG HARO PADANG PANJANG KECAMATAN LUAK
293	GEDUNG ATAU KANTOR (KANTOR CAMAT PAYAKUMBUH)																	KANTOR CAMAT PAYAKUMBUH NAGARI SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH
294	LAHAN																	JORONG KAPALO KOTO HALABAN
295	LAHAN																	JORONG TOLANG NAGARI TALANG MAUR KECAMATAN MUNGKA
296	LAHAN																	JORONG BATU TANYUA NAGARI KOTO TANGAH BATU AMPAR KECAMATAN AKABILURU
297	LAHAN																	JORONG SARILAMAK NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU
298	LAHAN																	BELAKANG MTSN LIMBANANG
299	RUMAH (ON)		L					63	SEHAT									TANJUANG ARO JORONG KAMPUANG MUARO NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN GUNUANG OMEH
300	RUMAH (RINI)		P			50		SEHAT		130704630 5760001	13070408120 70027		SIKABU- KABU	27537				TANJUANG HARO SIKABU KABU PADANG PANJANG

																	SITUJUUAH LIMO NAGARI
316	LAHAN																JORONG SILAOK NAGARI SUNGAI ANTUAN KECAMATAN MUNGKA
317	LAHAN																JORONG PADANG KANDI NAGARI VII KOTO TALAGO KECAMATAN GUGUAK
318	LAHAN																JORONG CORAN NAGARI SITANANG
319	LAHAN																JORONG PADANG JARIANG NAGARI SITUJUUAH GADANG
320	LAHAN																NAGARI BATU AMPAR KECAMATAN AKABILURU
321	LAHAN																JORONG SPI NAGARI MUARO PAITI KECAMATAN KAPUR IX
322	LAHAN																JORONG PILADANG NAGARI KOTO TANGAH BATU AMPA KECAMATAN AKABILURU
323	LAHAN/RUMPUN SEMAK BELUKAR																BELAKANG SDN 01 TAEH BARUAH NAGARI TAEH KECAMATAN PAYAKUMBUH
324	LAHAN																JORONG PADANG KANDI NAGARI VII KOTO TALAGO KECAMATAN GUGUAK
325	LAHAN/RUMPUN BAMBU																JORONG KAMPUANG DALAM NAGARI LIMBANANG KECAMATAN SULIKI
326	RUMAH (MARDIUS)	L					60		SEHAT								NAGARI MANGGILANG KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
327	LAHAN																JORONG PASAR BARU NAGARI PANGKALAN KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
328	LAHAN																JORONG KAMPUANG TANGAH NAGARI TALANG MAUR KECAMATAN MUNGKA
329	WARUNG (YULFA HELM)	L					38		SEHAT		130711240 1870001		SIMALANGGAN G	24/01198 7			SIMPANG TIGA JORONG MUNGKA TANGAH
330	RUMAH BIBIT																BELUBUS KECAMATAN GUGUAK
331	RUMAH/HARY ALIS SUSANTO	L					43				130707080 4820001		PULAU SIALANG	30049			JORONG 1 KOTO BANGUN KECAMATAN KAPUR IX
332	4 UNIT RUKO/ARIYON	L					53										JORONG LIMBANANG BARUAH NAGARI LIMBANANG KECAMATAN SULIKI
333	MOBIL/ROZI	L					26										JORONG PASAR BUYUH

																		NAGARI TANJUANG PAUAH KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
334	GUDANG BENGKEL/NANDA	L					46											JORONG KOTO BARU NAGARI KOTO BARU SIAMALANGGANG
335	RUMAH/SISKA		P				44											JORONG KOTO KOZIAK NAGARIBATU BALANG KECAMATAN HARAU
336	MUSHOLLA																	JORONG BALAI CUBADAK NAGARI TARAM KECAMATAN HARAU
337	LAHAN/RUMPUN BAMBU																	JORONG PADANG MUNGKA NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA
338	RUMAH																	JORONG TALAWI NAGARI MUARO PAITI KECAMATAN KAPUR IX
339	GUDANG GAMBIR																	JORONG PADANG MUNGKA NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA
340	GUDANG PUPUK																	JORONG SUNGAI PANJANG INDAH NAGARI MUARO PAITI KECAMATAN KAPUR IX
341	LAHAN																	JALAN LINTAS SUMATERA-RIAU NAGARI TANJUNG BALIK KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
342	LAHAN																	JORONG PANANG NAGARI TANJUNG BALIK KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
343	MOTOR																	JORONG KANDANG LAMO NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU
344	RUMAH																	JORONG PASA BARU NAGARI PANGKALAN KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
345	RUMAH																	JORONG GANDO NAGARI PILUBANG KECAMATAN PAYAKUMBUH
346	RUMAH																	JORONG SUNGAI CUBADAK NAGARI KOTO TANGAH BATU HAMPA KECAMATAN AKABILURU
347	LAHAN																	JORONG RUMBAI NAGARI LABUAH ALAI KECAMATAN KAPUR IX

348	RUMAH DAN MOBIL												JORONG PARONTIAN NAGARI BARUAH GUNUANG KECAMATAN BUKIT BARISAN
349	LAHAN												JORONG SUKA KARYA NAGARI LABUAH ALAI KECAMATAN KAPUR IX
350	LAHAN												GUNUANG MALINTANG KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
351	LAHAN												GUNUANG MALINTANG KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
352	LAHAN												TANJUANG BALIK KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
353	LAHAN												NAGARI MANGGILANG KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
354	LAHAN												LUBUAK JANTAN NAGARI TANJUANG HARO KECAMATAN LUAK
355	RUMAH												JORONG SIKABU NAGARI TANJUANG HARO KECAMATAN LUAK
356	LAHAN												LUBUAK ALAI KECAMATAN KAPUR IX
357	LAHAN												JORONG KOTO LAMO NAGARI TANJUANG BALIK KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
358	LAHAN												JORONG LUAK SIMATO NAGARI SUNGAI ANTUAN
359	LAHAN												JORONG BANJARANAH NAGARI PANGKALAN KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
360	RUMAH												JORONG KETINGGIAN NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU
361	LAHAN												JORONG SEBERANG PASAR NAGARI MANGGILANG KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
362	LAHAN												JORONG SEBERANG PASAR NAGARI MANGGILANG KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
363	LAHAN/RUMPUN BAMBU												JORONG BALAI MANSIRO NAGARI GUGUAK VIII KOTO KECAMATAN GUGUAK

364	LAHAN													JORONG AIA PUTIAH KECAMATAN HARAU
365	RUMAH													BALIK BUKIK GUNUANG MALINTANG PANGKALAN KOTO BARU
366	LAHAN													KUBANG RASAU NAGARI BALAI PANJANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
367	LAHAN / ABDUL MUIZ	L				50								JORONG SUNGAI PANJANG INDAH NAGARI MUARO PAITI KECAMATAN KAPUR IX
368	LAHAN / SARI LESTARI		P			41		SEHAT		130704411 2840001		BUKITTINGGI	31017	JORONG SILARAK NAGARI TANJUANG BARU SIKABU KECAMATAN LUAK
369	LAHAN / NURBAIDAH		P				65	SEHAT						NAGARI TARANTANG KECAMATAN HARAU
370	LAHAN							SEHAT						JORONG SEBERANG PASAR NAGARI MANGGILANG KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
371	LAHAN / ZERI WANDRA	L				45		SEHAT						JORONG KOTO TANGAH NGARI BATU HAMPA KECAMATAN AKABILURU
372	LAHAN													JORONG INDOBALEH TIMUR NAGARI MUNGO KECAMATAN LUAK
373	LAHAN / SALMI		P			46		SEHAT		130709090 5790003		HALABAN	28984	JORONG PADANG TANGAH NAGARI HALABAN KECAMATAN LASAHAN
374	LAHAN / DIAN RESA		P			33		SEHAT						JORONG PARUMPUANG NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH
375	LAHAN	L				40		SEHAT		130704070 7850004		PADANG PANJANG	31235	JORONG PADANG PANJANG NAGARI TANJUANG HARO SIKABU KABU KECAMATAN LUAK
376	TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH / TARYANA	L				47		SEHAT		130704100 1780001		BANDUNG	28500	JORONG PAKAN RABAANAGARI KOTO TANGAH SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH
377	BUS / DENNY	L				41		SEHAT		130610050 7840005		SEI BELUKAR	30868	NAGARI BATU HAMPA KECAMATAN AKABILURU
378	LAHAN													JORONG KOTO TANGAH NAGARI TALANG MAUR KECAMATAN MUNGKA

379	LAHAN												JORONG KAMPUANG TANGAH NAGARI TALANG MAUR KECAMATAN MUNGKA	
380	LAHAN / RUDI KURNIAWAN	L				45		SEHAT					SUBARANG AIA NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
381	LAHAN												NAGARI SIMPANG SUGIRAN KECAMATAN AKABILURU	
382	LAHAN												JORONG BALAI CUBADAK NAGARI TARAM KECAMATAN HARAU	
383	LAHAN/LADANG												JORONG SUKA KARYA NAGARI LUBUAK ALAI KECAMATAN KAPUR IX	
384	2 UNIT RUMAH, 4 UNIT SEPEDA MOTOR (YAFI DARTI, AFRIZAL)	L	P			50.4 4		SEHAT					SPINGAI VII KOTO KECAMATAN GUGUAK	
385	LAHAN												JORONG SUNGAI PANJANG INDAH NAGARI MUARO PAITI KECAMATAN KAPUR IX	
386	LAHAN/RUMAH BAMBU												JORONG SAWAH LAWEH NAGARI SITUJUAH TUNGKA KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
387	RUMAH												JORONG KAMPUNG DALAM NAGARI MUARO PAITI KECAMATAN KAPUR IX	
388	LAHAN/RUMPUN BAMBU (HARMEN ZEKI PUTRA)	L				50		SEHAT		130709050 2750001		27430	JORONG AIA RANDAH NAGARI BALAI PANJANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
389	RUMAH / RINI MARLIZA		P			48		SEHAT		130709500 3770002		KAPALO BUKIK	28194	JORONG KAPALO BUKIK NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
390	LAHAN / PIKA		P			34		SEHAT					JORONG LUBUAK AMEH (PTPN VI PKL) NAGARI GUNUANG MALINTANG KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
391	LAHAN/RUMPUN BAMBU (ASMINAR)												JORONG KAMPUANG TONGAH NAGARI TALANG MAUR KECAMATAN MUNGKA	
392	LAHAN/RUMPUN BAMBU												JORONG KETINGGIAN NAGARI GUGUAK VIII KOTO KECAMATAN GUGUAK	
393	LAHAN												JORONG BALAI CUBADAK NAGARI TARAM KECAMATAN	

															HARAU
394	LAHAN														SIMPANG SUGIRAN KECAMATAN GUGUAK
395	RUMAH / AMALIA YULANDA		P			41		SEHAT							JORONG MUNGKA TENGAH NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA
396	KANDANG AYAM / MELLA ZULFIANITA		P			30		SEHAT		130703471 0950002		BALAI RUPIH	34979	JORONG BALAI RUPI NAGARI SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH	
397	LAHAN														JORONG BONCAH NAGARI BATU BALANG KECAMATAN HARAU
398	LAHAN/RUMPUN BAMBU (AFRIZAL)	L				45		SEHAT		147108150 7800063		SUBARANG TABEK	29417	JORONG SUBARANG TABEK NAGARI SITUJUAH BANDA DALAM KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
399	RUMAH / IRWAN	L				51		SEHAT		082474030 00030		SUMUR BATU	27100	JORONG KOTO KOCAK NAGARI BATU BALANG KECAMATAN HARAU	
400	LAHAN														JORONG PANANG NAGARI TANJUNG BALIK KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
401	RUMAH / MUHAMMAD ABDUL GHANI	L				35		SEHAT							JORONG BUKIT TALAU NAGARI GUNUANG MALINTANG KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
402	KANDANG AYAM / DELFI EKA PUTRI		P			55		SEHAT		130709631 2700001		PAKAN RABAA	25925	PAKAN RABAA NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
403	RUMAH / TARMIZI	L				50		SEHAT							JORONG RONAH PEMBANGUNAN NAGARI DURIAN TINGGI KECAMATAN KAPUR IX
404	1 RUMAH, 4 MOTOR / DADANG FEBRIADI	L				37		SEHAT		130709230 2880002		KEPALA BUKIT	32196	JORONG KAPALO BUKIK NAGAEI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
405	KEBAKARAN MOBIL														JORONG SOPANG NAGARI PANGKALAN KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

Tabel 2.75. FORM 5.B.2 LAYANAN PELAKSANAAN PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Mobil Damkar/Kapal Damkar/unit operasional damkar lainnya	1. Penyediaan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah sektor/pos	8	A*B*C	
			B. Jumlah unit mobil per pos sektor/pos damkar	0		
			C. Harga satu unit	1.100.000.000		
		2. Pemeliharaan Rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya	9	A*B*C	
			B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	1		
			C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	5.000.000		
		3. Pembelian bahan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya	16	(A*B)*C	
			B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	1.000.000		
			C. Harga per liter bahan bakar	7850		
		4. Pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran	A. Jumlah petugas	-	(A*B)*C	
			B. Jumlah pelatihan	-		

			C. Biaya per pelatihan	-		
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	A. Jumlah/jenis/set/paket/unit Peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	0	A*B	
			A. Harga per Jumlah/jenis/set/paket/unit	-		
		2. Penyediaan alat perlindungan diri petugas	A. Jumlah/jenis/set/paket/unit alat Perlindungan diri petugas	-	A*B	
			A. Harga per Jumlah/jenis/set/paket/unit	-		
3	Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman	1. Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman	A. Jumlah/volume tandon Air/air/foam untuk pemadaman	-	A*B	
			B. Harga per jumlah/volume	-		
		2. Pemeliharaan rutin tandon air untuk pemadaman	A. Jumlah unit tandon air	-	(A*B)*C	
			B. Jumlah pemeliharaan rutin tandon air dalam satu tahun	-		
			C. Harga biaya pemeliharaan tandon air per unit	-		
		4	Kesiapan petugas pemadam kebakaran	1. Kesiapsiagaan petugas damkar	A. jumlah petugas pemadam kebakaran	-
B. honorarium piket jaga	-					
2. Pelaksanaan pemadaman kebakaran	A. jumlah petugas pemadam kebakaran			-	A*B	
	A. honorarium per kejadian kebakaran			-		

Tabel 2.76. FORM 5.B.3 LAYANAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	1. Penyediaan mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah pos sektor/pos damkar	8	A*B*C	
			B. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	-		
			C. Harga satu unit	-		
		2. Pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	-	(A*B)*C	
			B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	-		
			C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	-		
		3. Pembelian bahan bakar mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	-	(A*B)*C	
			B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	-		
			C. Harga per liter bahan bakar	7850		
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	A. Jumlah /jenis/set/paket/unit peralatan dan perlengkapan penyelamatan (<i>rescue</i>)	-	A*B	
			B. Harga per jumlah/jenis/set/paket/unit	-		
3	Kesiapan petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	1. Kesiapsiagaan petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	-	A*B	
			B. Honorarium piket jaga	-		
		2. Pelaksanaan penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	-	A*B	
			B. Honorarium per kegiatan penyelamatan	-		
		3. Pendidikan dan pelatihan petugas penyelamatan	A. Jumlah petugas	-	(A*B)*C	
			B. Jumlah pelatihan	-		
			C. Biaya per pelatihan	-		

Tabel 2.77. FORM 5.B.5 LAYANAN PENDATAAN, INSPEKSI DAN INVESTIGASI PASCA KEBAKARAN

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendataan	1. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan kajian potensi risiko bahaya kebakaran	A. Jenis tenaga ahli	-	$((A*B*C*D)+(E*F))$	
			B. Jenis potensi risiko	-		
			C. Jumlah orang	-		
			D. Jumlah bulan kerja	-		
			E. Jumlah pertemuan	-		
			F. Atk dan penggandaan laporan	-		
		2. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran	A. Jenis tenaga ahli	-	$((A*B*C)+(D*E))$	
			B. Jumlah orang	-		
			C. Jumlah bulan kerja	-		
			D. Jumlah pertemuan	-		
			E. Atk dan penggandaan laporan	-		
		3. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	A. Jenis tenaga ahli	-	$((A*B*C)+(D*E))$	
			B. Jumlah orang	-		
			C. Jumlah bulan kerja	-		
			D. Jumlah pertemuan	-		
			E. Atk dan penggandaan laporan	-		
		4. Diskusi publik terhadap dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	A. Penyediaan tempat dan meja, kursi serta <i>sound system</i>	-	$((A+B+C)+((D+E)*F+((D+G)*H)+1)$	
			B. Penyediaan peralatan pendukung (<i>infocus, layar, computer set</i>)	-		
			C. Penggandaan materi/atk/dokumentasi	-		
			D. Akomodasi dan konsumsi	-		
			E. Transport peserta	-		
			F. Jumlah peserta	-		
			G. Honor tenaga ahli	-		
			H. Jumlah tenaga ahli laporan	-		

			I. Laporan	-		
		5. Pelaporan kejadian kebakaran	A. Frekuensi pendataan kejadian kebakaran	5	(A*B*C)+D	
			B. Jumlah petugas pendataan	5		
			C. Honorarium petugas pendataan	1,000,000		
			D. Biaya belanja bahan/atk penyusunan laporan	1,000,000		
2	Inspeksi	1. Inventarisasi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	A. Jumlah bangunan gedung	-	(A*B)*C	
			B. Jumlah petugas	-		
			C. Biaya per kegiatan	-		
		2. Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	A. Jumlah bangunan gedung	-	(A*B)*C	
			B. Jumlah petugas	-		
			C. Biaya per kegiatan	-		
		3. Pendidikan dan pelatihan petugas Inspeksi	A. Jumlah petugas	-	(A*B)*C	
			B. Jumlah pelatihan	-		
			C. Biaya per pelatihan	-		
3	Investigasi pasca kebakaran	4. Inventarisasi kejadian kebakaran	A. Jumlah petugas	186	(A*B)*C	
			B. Jumlah sarana dan prasarana pendukung	1		
			C. Biaya kegiatan	1,000,000		
		5. Investigasi penyebab kebakaran	A. Jumlah petugas	186	A*B*C*D	
			B. Frekuensi investigasi	10		
			C. Jumlah sarana pendukung	1		
			D. Biaya per kegiatan investigasi	10,000,000		

Tabel 2.78. FORM 5.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH POS DAMKAR EKSISTING	JUMLAH RELAWAN DAMKAR EKSISTING	RENCANA JUMLAH PENAMBAHAN POS DAMKAR	RENCANA PEMBENTUKAN RELAWAN
1	2	3	4	5	6	7
1	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	13	8 posko	390 orang	13 posko	390

Tabel 2.79. FORM 5.D.1 REKAPITULASI PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR (PEMADAMAN DAN EVAKUASI)

NO.	KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN SPM OLEH PETUGAS DAMKAR (%)	CAPAIAN SPM OLEH RELAWAN DAMKAR (%)	TOTAL CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5
	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	TW I: 92.05%	92,21%	92,13%
		TW II: 98.72%	99,43%	99,08%
		TW III: 95.29 %	95,42%	95,36%
		TW IV: 91.67%	91,69%	91,68%

2.6. URUSAN SOSIAL

Penerapan SPM urusan sosial pada tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

A. Pengumpulan Data

- 1) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pengumpulan dan pengelolaan data melalui pendataan PPKS dan verifikasi dan validasi DTKS;
Data tersebut meliputi data penerima Pelayanan Dasar yang terdiri dari: Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, dan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten.
- 2) Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial adalah yang melaksanakan verifikasi dan validasi data PPKS di lapangan terdiri dari ; Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 13 orang, Pekeja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 80 orang, 4 Orang Pendamping Rehabilitasi Sosial, dan 20 orang TAGANA. Sumber daya pada Dinas Sosial yaitu 36 orang ASN dan 19 PPPK Paruh Waktu.
- 3) Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar meliputi: Kantor Dinas Sosial yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta no 87 Payakumbuh dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) milik masyarakat sebagai sistem sumber dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di tingkat paling bawah yang bersentuhan langsung dengan penerima pelayanan.

Pengumpulan Data Sosial:

1. Form 6.A.1 Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan dan Pengemis.
2. Form 6.A.3 Rekapitulasi Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan dan Pengemis yang memerlukan Pelayanan di Luar Panti dan/ atau Lembaga berbasis keluarga/ Masyarakat/komunitas.
3. Form 6.A.5 Rekapitulasi Estimasi Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
4. Form 6.A.8 Data dan Rekapitulasi Sarana dan Prasarana untuk pemenuhan pelayanan dasar.

Tabel 2.80 FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL	ALAMAT	TINGGAL DI DALAM KELUARGA	HUB DGN KRT DAN KEPALA KELUARGA	NOKK	TINGGAL DI LUAR KELUARGA (PANTI, TERMINAL, PASAR, JALANAN DLL)	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN /SEKOLAH	JENIS DISABILITAS	KONDISI KETELANTARAN			KET
													KELUARGA/MASYARAKAT/SESEORANG TIDAK MENURUS	RENTAN MENGALAMI TINDAK KEKERASAN DARI LINGKUNGAN	MASIH MEMILIKI KELUARGA, TETAPI MENGALAMI TINDAK KEKERASAN, PERLAKUKAN SALAH EKSPLOITASI, DAN PENELANTARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyandang Disabilitas																
1	HENDRIZAL	1307080411650002	Laki-laki		Koto Tinggi	√						Dengar	√			
2	ISSEL MAZEINI	1307085401660001	Perempuan		Koto Tinggi	√						Dengar	√			
3	MUSNAR	1307084703660001	Perempuan		Koto Tinggi	√						Dengar	√			
4	ADISMAN	1307081304920001	Laki-laki		Koto Tinggi	√						Gerak	√			
5	RIA SUSANTI	1307085707000001	Perempuan		Koto Tinggi	√						Gerak	√			
6	FITRI	1307086008940001	Perempuan		Koto Tinggi	√						Gerak	√			
7	ANDRI USMAN	1307081006630001	Laki-laki		Koto Tinggi	√						Gerak	√			
8	ANDRI	1307081308940001	Laki-laki		Koto Tinggi	√						Gerak	√			
9	YENTI	1303035511700001	Perempuan		Koto Tinggi	√						Gerak	√			
10	RESFA YENSI	1307086312770001	Perempuan		Koto Tinggi	√						Gerak	√			
11	IRWANDI		Laki-laki		Durian Gadang	√						Fisik	√			
12	UWIN		Laki-laki		Pandam Gadang	√						Fisik	√			
13	BOBY FATUR RAHMAN	1307010911110001	L		SUNGGAI RIMBANG	√						Fisik	√			
14	IDON	1307012107830001	L		KURAI	√						Fisik	√			
15	ADRIZON		Laki-laki		Koto tinggi											
16	ISAL		Laki-laki		Koto Tinggi											
17	METRA PEPIRA		Perempuan		Pandam Gadang											

13	DIRIN	1307081110430001	Laki-laki	Koto Tinggi		√					Lansia	√				
14	NUMA	1307085607500001	Perempuan	Koto Tinggi		√					Lansia	√				
15	KARTINI	1307085311450001	Perempuan	Koto Tinggi	√						Lansia	√				
16	SAMSINAR	1307086802460001	Perempuan	Koto Tinggi	√						Lansia	√				
17	RISMAN	1307080911580001	Laki-laki	Koto Tinggi	√						Lansia	√				
18	YELITA	1307084107610008	Perempuan	Koto Tinggi	√						Lansia	√				
19	TASMAN	1307081209570001	Laki-laki	Koto Tinggi		√					Lansia	√				
20	YURNALIS	1307080101510001	Laki-laki	Koto Tinggi	√						Lansia	√				
21	JAWARNI	1307085212500002	Perempuan	Koto Tinggi	√						Lansia	√				
22	ON	1307084107620010	Perempuan	Koto Tinggi	√						Lansia	√				
23	GUSTATI MURNI	1307085308520001	Perempuan	Koto Tinggi	√						Lansia	√				
24	ROS	1307084107470016	Perempuan	Koto Tinggi		√					Lansia	√				
25	ROSNA	1307087012410002	Perempuan	Koto Tinggi		√					Lansia	√				
26	YUNIFAR	1307080706420001	Laki-laki	Koto Tinggi		√					Lansia	√				
27	WARLIS	1307080504510001	Laki-laki	Koto Tinggi		√					Lansia	√				
28	SIAR	1307084107370012	Perempuan	Koto Tinggi	√						Lansia	√				
29	SALMA	1307084609590001	Perempuan	Koto Tinggi		√					Lansia	√				
30	USNIDAR	1307084107530009	Perempuan	Koto Tinggi		√					Lansia	√				
31	MASRIA		Perempuan	Koto Alam												
32	SIJUK		Perempuan	Pangkalan												
33	HELDI SAPRA	1307070203730001		Pangkalan												
34	AZWEL ZANORA	1307075702720003		Pangkalan												
35	FAHRIAL	1307071011730001		Pangkalan												
36	ASNIMAR	1307076004480001		Pangkalan												
37	ZAINAL	1307071001650001		Pangkalan												
38	RESMAWATI	1307071104610002		Pangkalan												
39	MUHAMMAD SYARIF	1307072712640001		Pangkalan												
40	WIRYOHANDOKO			Pangkalan												
41	ERLAN			Pangkalan												

42	TARIMIS			Pangkalan															
43	JON NEDI			Pangkalan															
44	SIRAT			Pangkalan															
45	ARNIS			Pangkalan															
46	SULI			Pangkalan															
47	SIHAR			Pangkalan															
48	IDAT			Pangkalan															
49	BAHTIAR	1307071203560001		Pangkalan															
50	SITI FATIMAH	1307075209660001		Pangkalan															
51	ILIS	1307074304660001		Pangkalan															
52	MARIANIS	1307074107400001		Pangkalan															
53	SUNA	1307075001530001		Pangkalan															
54	YUSRIZAL	1307070107520001		Pangkalan															
55	TINAT	1307074107550002		Pangkalan															
56	NURSIA	1307074701520001		Pangkalan															
57	SITI NURBAYA	1307077112480001		Pangkalan															
58	NURHAYATI	1307076307620001		Pangkalan															
59	INUR	1307074112540001		Pangkalan															
60	INAM	1307074704270001		Pangkalan															
61	KAMIAMIN	1307075504680001		Pangkalan															
62	ANI	1307076704620001		Pangkalan															
63	ASRIL	1307070107560029		Pangkalan															
64	RISMIWITA	1307075010570001		Pangkalan															
65	ANIMAR	1307075207530001		Pangkalan															
66	ABDUL MUTHALIB	1307070103530001		Pangkalan															
67	ISMADIANTO	1307060101760001		Koto Alam															
68	METRIONO	1307062008650001		Koto Alam															
69	JON HENDRI	1307061607650002		Koto Alam															
70	HARTATI	1307064706550002		Koto Alam															
71	SUBUR ELISEF			Durian Tinggi															

72	RATNA JUWITA			Taram													
73	NETIS	1307054107590090		Sarilamak													
74	ERNITA	1307054103520003		Sarilamak													
75	PARIDA	1307054107580068		Sarilamak													
76	NURINI	1307054107510027		Sarilamak													
77	ERMAWATI	1307054107620046		Sarilamak													
78	YUSNIMAR	1307055408630003		Sarilamak													
79	YUSLINAR	1307054302550001		Sarilamak													
80	ASRI	1307050107620097		Sarilamak													
81	NURBAYA	1307054202600001		Sarilamak													
82	HARIADI	1307051009550001		Sarilamak													
83	USNI	1307050107530062		Sarilamak													
84	ZAINAL	1307052104490001		Sarilamak													
85	SAMSIWAR	1307054505550003		Sarilamak													
86	BUYUNG ADIK	1307050301600001		Sarilamak													
87	ROSNIDA	1307054107570122		Sarilamak													
88	YUSNIMAR	1307054509610001		Sarilamak													
89	ROSNIMAR	1307054303510002		Sarilamak													
90	ROSNIATI	1307055506520003		Sarilamak													
91	DARISMAN	1307050107570087		Sarilamak													
92	RAMIAN	1307054707440002		Sarilamak													
93	SUHAIMI	1307050107420046		Sarilamak													
94	DARLIS	1307050107460012		Sarilamak													
95	SARTINI	1307055212580004		Sarilamak													
96	HARJO BAGONG	1307053112510002		Sarilamak													
97	SARONO	1307051303530001		Sarilamak													
98	RIBUT KARIADI	1307050711580001		Sarilamak													
99	SYAMSUARDI	1307050107560026		Sarilamak													
100	KASMIATI	1307055511580002		Sarilamak													
101	MAULIDA HUSNI	1307054904600001		Harau													

102	HAYATUN NUFUS	1307054106540001		Harau															
103	WARNIDA	1307054606560001		Harau															
104	EMRI YUSNI	1307054605560002		Harau															
105	BUSTAMI	1307061704420001		Gunuang Malintang															
106	YUMARLIS	1307066804570001		Gunuang Malintang															
107	SYAIDIL HUDRI	1307060904600002		Gunuang Malintang															
108	SIWARNI	1307064107620034		Gunuang Malintang															
109	TUMPUK	1307065305450001		Gunuang Malintang															
110	SIMU	1307065303450001		Gunuang Malintang															
111	YUNANDA	1307064505620001		Gunuang Malintang															
112	ELIARTI	1307065607600001		Gunuang Malintang															
113	SAROMAI	1307064107490011		Gunuang Malintang															
114	RAFDINAL	1307061205630001		Pangkalan															
115	LISMAR	1307065011530002		Pangkalan															
116	ASMAH	1307066003450002		Pangkalan															
117	ERNATI	1307064208530001		Pangkalan															
118	BURDASMI	1307062211540001		Pangkalan															
119	NURZALIA	1307065012510001		Pangkalan															
120	HAITISMAR	1307064603640003		Pangkalan															
121	MISBAR	1307060702630001		Pangkalan															
122	MISBAR	1307060702630001		Pangkalan															
123	SIMUR	1307066801610001		Pangkalan															
124	ERLISMAWATI			Pangkalan															
125	RINALDI			Pangkalan															
126	ROJUMA			Pangkalan															
127	YUSTINAR			Pangkalan															
128	MASRI			Pangkalan															
129	YARNIATI			Pangkalan															
130	NIAN			Pangkalan															
131	MIMI. R			Pangkalan															

132	NURDIAS			Pangkalan															
133	LASMINAR			Pangkalan															
134	FATONAH			Pangkalan															
135	JONEDI			Pangkalan															
136	ERWANIS			Pangkalan															
137	NURHINDUN			Pangkalan															
138	MASNI			Pangkalan															
139	JANIMAR	1307037112450003		Koto Tengah Simalanggang															
140	EMLITA	1307037007550001		Koto Tengah Simalanggang															
141	ZAMIDAR	1307030505590002		Koto Baru Simalanggang															
142	NURNIS	1307034103480002		Koto Baru Simalanggang															
143	JAS AMIDAR	1307036005390001		Koto Baru Simalanggang															
144	YULIANIS	1307034107420014		Koto Baru Simalanggang															
145	ASTAR	1307031003520001		Koto Baru Simalanggang															
146	ALI UNIR	1307031010560001		Koto Baru Simalanggang															
147	FATIMAH	1307035210460001		Koto Baru Simalanggang															
148	NURTINI	1307036710430001		Koto Baru Simalanggang															
149	MUSNI	1307034107450041		Koto Baru Simalanggang															
150	ZULFAHMI	1307033112550008		Koto Baru Simalanggang															
151	AMRIL	1307030604570001		Koto Baru Simalanggang															
152	KASMIR LAILI	1307035010560002		Koto Baru Simalanggang															
153	RUSDI	1307030101570005		Koto Baru Simalanggang															
154	NURLIANIS	1307034105560001		Koto Baru Simalanggang															
155	ERMAYATI	1307034404530001		Koto Baru Simalanggang															
156	MURNIATI	1307034704530001		Koto Baru Simalanggang															
157	MARIANIS	1307034909580003		Koto Baru Simalanggang															
158	SAMSUAR	1307030107420037		Koto Baru Simalanggang															
159	NURLISNA	1307034107500024		Koto Baru Simalanggang															
160	NASRI	1307031508580002		Koto Baru Simalanggang															
161	YURNITA	1307034107590027		Koto Baru Simalanggang															

162	ELMIDATIS	130703411260001			Koto Baru Simalanggang																	
163	WIZAR BILAL	1307030303510001			Koto Baru Simalanggang																	
164	JASNI	1307034107500034			Koto Baru Simalanggang																	
165	MARDIATI	1307036404540001			Koto Baru Simalanggang																	
166	ELIWARTI	1307034108570001			Koto Baru Simalanggang																	
167	MAWARNI	1307034705570001			Koto Baru Simalanggang																	
168	ERNIATI	1307035012530001			Koto Baru Simalanggang																	
169	ETI	1307035102630001			Koto Baru Simalanggang																	
170	ERNI WATI	1307034912530001			Koto Baru Simalanggang																	
171	ARNIATI	1307035203590003			Koto Baru Simalanggang																	
172	ERNA	1307036502540001			Koto Baru Simalanggang																	
173	DAFRI	1307032106610001			Koto Baru Simalanggang																	
174	YUSMANIAR	1307034810650001			Koto Baru Simalanggang																	
175	YUSRIZAL	1307031306570001			Koto Baru Simalanggang																	
176	ERNAWATI	1307034408540001			Koto Baru Simalanggang																	
177	MISNAR	1307035808380001			Koto Baru Simalanggang																	
178	MUHAMMAD NUR	1307030301600001			Koto Baru Simalanggang																	
179	YASNI	1307034604640003			Koto Baru Simalanggang																	
180	EMSESWATI	1307035511600001			Koto Baru Simalanggang																	
181	ERNAWATI	1307034910600002			Koto Baru Simalanggang																	
182	SELMA JUITA	1307034302580001			Koto Baru Simalanggang																	
183	SAMSIARNIS	1307035812550003			Koto Baru Simalanggang																	
184	NURNIATI	1307035010600004			Koto Baru Simalanggang																	
185	TETI MURNI	1307034107570054			Koto Baru Simalanggang																	
186	FATMI NURIA	1307035909580001			Koto Baru Simalanggang																	
187	SAFNI	1307035907570002			Koto Baru Simalanggang																	
188	JUSNAINI	1307034107530025			Koto Baru Simalanggang																	
189	MISMAR	1307020108450001			VII Koto Talago																	
190	SAFRIYON	1307023112630002			VII Koto Talago																	
191	ISMAWIDEL	1307115111620001			Talang Maur																	

192	LADA TISMEN	1307114912630001			Talang Maur														
193	NURSAL	1307111306530001			Talang Maur														
194	NELWATI	1307115908620001			Talang Maur														
195	EDISON	1307110202590001			Sungai Antuan														
196	ARNI	1307117112590003			Sungai Antuan														
197	AR	1307117112520009			Sungai Antuan														
198	AZIZ	1307110105450001			Sungai Antuan														
199	AHMAD JAZAIR	1307111002570001			Sungai Antuan														
200	DASRIL	1307113112520009			Sungai Antuan														
201	DERMAHATI	1307115512530001			Sungai Antuan														
202	DARNIS	1307114107510015			Sungai Antuan														
203	DAHLIARNIS	1307114808580001			Sungai Antuan														
204	ASFI	1307112111600001			Sungai Antuan														
205	AMRIZAL	1307110108530001			Sungai Antuan														
206	ENENG	1307114707660004			Sungai Antuan														
207	EMISDARWAT I	1307116912620003			Sungai Antuan														
208	ELMIDARWAT I	1307114107620018			Sungai Antuan														
209	ERNAWILIS	1307114608550002			Sungai Antuan														
210	ELFA TINIZON	1307111402640001			Sungai Antuan														
211	ERLIATI	1307115603500001			Sungai Antuan														
212	EFIDA	1307115112620003			Sungai Antuan														
213	EMI	1307114208600003			Sungai Antuan														
214	EMMIZAL	1307110811510001			Sungai Antuan														
215	ETI	1307117112570001			Sungai Antuan														
216	HATI WARNI	1307117112550001			Sungai Antuan														
217	DARWATISNI	1307114311620002			Sungai Antuan														
218	IDA	1307117112690002			Sungai Antuan														
219	ISMIATI	1307115708510001			Sungai Antuan														
220	PARIAWARMA N	3201090910640001			Sungai Antuan														
221	PANIS	1307110506540002			Sungai Antuan														

222	ROSNATI	1307114106470003		Sungai Antuan															
223	ROSMAINA	1307117112580014		Sungai Antuan															
224	RUSTAM	1307113012590003		Sungai Antuan															
225	ROSNANI	1307114101550004		Sungai Antuan															
226	BETWARMAN	1307110506610002		Sungai Antuan															
227	ROSTINA	1307115103470001		Sungai Antuan															
228	RUNZI	1307110706620002		Sungai Antuan															
229	REFNI WATI	1307116409580001		Sungai Antuan															
230	MASRI	1307111912590001		Sungai Antuan															
231	MARTIMIS	1307117103510001		Sungai Antuan															
232	MISARNI	1401134101450003		Sungai Antuan															
233	MULIA	1307114703410001		Sungai Antuan															
234	MASRI	1307111107510003		Sungai Antuan															
235	NELWITA	1307114803610001		Sungai Antuan															
236	NURHAYATI	1307117112510003		Sungai Antuan															
237	NADIAR YASNI	1307117112410001		Sungai Antuan															
238	NEN	1307114405560001		Sungai Antuan															
239	NEN	1307115605570001		Sungai Antuan															
240	NEMWAR NETI	1307114409580001		Sungai Antuan															
241	SYAFNI	1307111004640001		Sungai Antuan															
242	SAFRILON	1406013110640003		Sungai Antuan															
243	AFNIR	1307112008530001		Sungai Antuan															
244	YUSMA	1307117004450001		Sungai Antuan															
245	YULITA HELMY	1307117012630001		Sungai Antuan															
246	YONA TATI	1307114709630001		Sungai Antuan															
247	YELNISMAI	1307114505570002		Sungai Antuan															
248	YASNIMAR	1307114802500001		Sungai Antuan															
249	YASNI	1307114308550001		Sungai Antuan															
250	ISDARMIS	1307116209530002		Sungai Antuan															
251	YURNIZEL	1307115010570003		Sungai Antuan															

252	YUNIMAS	1307115008480002		Sungai Antuan															
253	YULINAR	1307115707520002		Sungai Antuan															
254	EDISON	1307111708620002		Simpang Kapuak															
255	SYAMSUAR	1307031704490001		Simalanggang															
256	DARTI WARLIS	1307115208540001		Mungka															
257	AFRIZAL	1307111709570002		Mungka															
258	MARNIS	1307112502560001		Mungka															
259	YURNALIS	1307114107590031		Mungka															
260	IYAN	1307114107420030		Mungka															
261	KARTINIS	1307117112400006		Mungka															
262	YURNALIS	1307116108590001		Mungka															
263	SAHANA	1307117112420001		Mungka															
264	JASRIAL	1307110107630022		Mungka															
265	DASWIR	1307110107500044		Mungka															
266	UJANG. D	1307113112590011		Mungka															
267	IMAN	1307112006590002		Mungka															
268	AWIS KARNI	1307110107550002		Mungka															
269	ROSNIATI	1307114711420001		Mungka															
270	JA HAR	1307110107430014		Mungka															
271	PARIDAN	1307110107570007		Mungka															
272	WARNALIS	1307114107620023		Mungka															
273	JASRI	1307110301540001		Mungka															
274	BAKHTAR SUWARDI	1307111212530001		Mungka															
275	NURIALIS	1307114107530002		Mungka															
276	YUSNITA	1307114107540026		Mungka															
277	JHONNI	1307110107610011		Mungka															
278	ROSLINAR	1307114107470007		Mungka															
279	SUDIRMAN	1307030107540013		Mungka															
280	TAHIRMAN	1307111005420001		Mungka															
281	LINDA	1307114709570001		Mungka															

282	KUNDUA	1307116403510001		Mungka																
283	LEL LAINUR	1307115011540002		Mungka																
284	MISNA	1307115011450001		Mungka																
285	TINIK	1307110107540001		Mungka																
286	ASNA	1307115605500001		Mungka																
287	SOFIAN	1307110107540024		Mungka																
288	YUFERSON	1307111909540001		Mungka																
289	DISMA	1307114107540023		Mungka																
290	SIAH	1307115310320001		Mungka																
291	ARNIDAWATI	1307114107620002		Mungka																
292	JAPANIS	1307110506440002		Mungka																
293	AFRIZAL	1307111709590001		Mungka																
294	TOMIK	1307111011610001		Mungka																
295	SAFRI	1307110107630027		Mungka																
296	UJANG	1307111001560001		Mungka																
297	SUAR	1307110107400023		Mungka																
298	DARNIS	1307114809470001		Mungka																
299	MAISIR	1307110306410001		Mungka																
300	ALIMIR	1307110707340001		Mungka																
301	NUR ASNIMIR	1307114206570002		Mungka																
302	DARNIATI	1307114508500001		Mungka																
303	ROSLANI	1307114107270022		Mungka																
304	ROSLAINIR	1307116512540001		Mungka																
305	MISWARNI	1307112709530001		Mungka																
306	HASAN BASRI	1307111212630002		Mungka																
307	MASRI	1307110107570027		Mungka																
308	DJASRI	1307110107550039		Jopang Manganti																
309	SAMSUAR	1307020107420047		Guguak VIII Koto																
310	SARI YUSMAINAR	1307025208550001		Guguak VIII Koto																
311	ALIRMAN	1307022009540002		Guguak VIII Koto																

312	YASRI	1307020506570004		Guguak VIII Koto															
313	AMRIL	1307020107490037		Guguak VIII Koto															
314	ELI MARNITA	1307025510620002		Guguak VIII Koto															
315	YUSNINI	1307024305630001		Guguak VIII Koto															
316	ARMIZUL	1307021603630001		Guguak VIII Koto															
317	ARMI. C	1307020609620002		Guguak VIII Koto															
318	M. JUFRI	1307020209580001		Guguak VIII Koto															
319	ASNI	1307024808640001		Guguak VIII Koto															
320	HERMAN	1307020611500004		Guguak VIII Koto															
321	IYUN	1307020107620036		Guguak VIII Koto															
322	HERMAN	1307020202560001		Guguak VIII Koto															
323	YETI ADIAR	1307024505640001		Guguak VIII Koto															
324	ASNITA	1307026405550001		Guguak VIII Koto															
325	INUR	1307024107560030		Guguak VIII Koto															
326	NINI	1307025708540001		Guguak VIII Koto															
327	JANIUR	1307021601620001		Guguak VIII Koto															
328	JAFRI	1307021111580001		Guguak VIII Koto															
329	EVA MUSTIKA	1307026611620001		Guguak VIII Koto															
330	INDRA YETTI	1307026501600001		Guguak VIII Koto															
331	RAMADANIS	1307021212520003		Guguak VIII Koto															
332	MARNI ADIUS	1307020302630001		Guguak VIII Koto															
333	EMARNIWATI	1307026503620001		Guguak VIII Koto															
334	JASMI	1307027112500005		Guguak VIII Koto															
335	YUNIMAR	1307021207490002		Guguak VIII Koto															
336	SAINIMAR	1307020107450014		Guguak VIII Koto															
337	YULNATRI	1307024101510007		Guguak VIII Koto															
338	RAMANILAS	1307025204430001		Guguak VIII Koto															
339	SAMSIMAR	1307024112450003		Guguak VIII Koto															
340	KASMI	1307020105440001		Guguak VIII Koto															
341	MULIA DENI	1307025604540002		Guguak VIII Koto															

342	HASNIMAR	1307026003510001		Guguak VIII Koto															
343	MURTINI	1307026212580001		Guguak VIII Koto															
344	IYUN	1307020107620036		Guguak VIII Koto															
345	NILWAN	1307022107490003		Guguak VIII Koto															
346	ZAINIDAR	1307024107540003		Guguak VIII Koto															
347	NURSEHAN	1307024604420001		Guguak VIII Koto															
348	DJAWANIS	1307026512450002		Guguak VIII Koto															
349	MUJINAH	1305166504640001		Guguak VIII Koto															
350	NIRMAL	1307026703560001		Guguak VIII Koto															
351	MASRI	1307020703400001		Guguak VIII Koto															
352	ERMAYULIS	1307024105520002		Guguak VIII Koto															
353	ASRIL	1307021404560001		Guguak VIII Koto															
354	ERMIWATI	1307024107590037		Guguak VIII Koto															
355	ASRIL	1307051206540005		Batu Balang															
356	ASRUL	1307050107600059		Batu Balang															
357	BURMADI	1307051301540001		Batu Balang															
358	HARMAINI	1307050406580003		Batu Balang															
359	NOF ERIADI	1307051511630002		Batu Balang															
360	JON ASRIL	1307050107620077		Batu Balang															
361	JUSMANIAR	1307057011540001		Batu Balang															
362	HERMIATI	1307054107610026		Batu Balang															
363	NARUMA	1307054107490028		Batu Balang															
364	MARNI	1307054106530001		Batu Balang															
365	NURHAYATI	1307054909540002		Batu Balang															
366	NUR ASNI	1307055510620001		Batu Balang															
367	JALIASNA	1307055312400001		Batu Balang															
368	SYAFRI	1307050305500001		Batu Balang															
369	YUHANIS	1307051706570002		Batu Balang															
370	RUSTAM	1307050107500052		Batu Balang															
371	YUSNIATI	1307055212530003		Batu Balang															

372	SUMIATI	1307055206600002		Batu Balang															
373	NASTATI	1307055508550002		Batu Balang															
374	JAFRIL	1307052603570002		Batu Balang															
375	HAILIS	1307054101610005		Batu Balang															
376	HERMAN	1307050502540001		Batu Balang															
377	YUSNIAR	1307054107520094		Batu Balang															
378	TANDO	1307056005590001		Batu Balang															
379	ASMANIAR	1307057112340003		Batu Balang															
380	ERIZAL	1307052002650001		Batu Balang															
381	YULINAR	1307054605600002		Batu Balang															
382	HASAN	1307050712560001		Batu Balang															
383	RADIAH	1307054510540001		Batu Balang															
384	ABAS DT. SATI	1307051605560001		Batu Balang															
385	YUSNIAR	1307054507600005		Batu Balang															
386	ZULBAMAN	1307052012560001		Batu Balang															
387	ASMANIDAR	1307055507470001		Batu Balang															
388	ZAINUL	1307050712650001		Batu Balang															
389	MULIAR	1307054107600060		Batu Balang															
390	NURMIYATI	1307055711630001		Batu Balang															
391	FARIDA	1307055704520001		Batu Balang															
392	ROSMANIAR	1307057112500005		Batu Balang															
393	SUPARDI	1307053112450003		Batu Balang															
394	SYAHRUL	1307050105500005		Batu Balang															
395	DAMAINI	1307051808450001		Batu Balang															
396	SYAHRIAL	1307050809600002		Batu Balang															
397	RAMINAN	1307055907590001		Batu Balang															
398	INDUN	1307055204410001		Batu Balang															
399	NAJAR	1307051004540001		Batu Balang															
400	MURTIANIS	1307054904560002		Batu Balang															
401	MARTINI	1307056104630002		Batu Balang															

402	YUNARNI	1307055704580001		Batu Balang																
403	IDRUS SARDI	1307050101640004		Batu Balang																
404	YUNARTI	1401035012550001		Batu Balang																
405	ERMA MARUHUN	1307055305640001		Batu Balang																
406	EDI MUNANDAR	1307052409630001		Batu Balang																
407	ASTENI	1307055106620001		Batu Balang																
408	LAINAR	1307054102340001		Batu Balang																
409	ERNI	1307055803530001		Batu Balang																
410	DAHLIAR	1307056608550002		Batu Balang																
411	ZAINIDAR	1307054101560008		Batu Balang																
412	RISNAWILIS	1307055106450001		Batu Balang																
413	DIANI	1307054107400041		Batu Balang																
414	KAHAR	1307052408570001		Batu Balang																
415	NURSIAN	1307054203540002		Batu Balang																
416	SUPIAK TONGAH	1307054602480002		Batu Balang																
417	YASMARNI	1307054808460001		Batu Balang																
418	HALIMAH	1307056807420001		Batu Balang																
419	MISNAR	1307055504640002		Batu Balang																
420	ERNI	1307054810570002		Batu Balang																
421	JANA	1307055101590001		Batu Balang																
422	NURSIMA	1307055810360001		Batu Balang																
423	DASRIL	1307050910600001		Batu Balang																
424	HIINDUN	1307054107560016		Batu Balang																
425	GADIS	1307054505610001		Batu Balang																
426	TARMIZI	1307050403630001		Batu Balang																
427	TIMA	1307054107530031		Batu Balang																
428	HAYATUN	1307054107490046		Batu Balang																
429	SYAMSUAR	1307050107520023		Batu Balang																
430	SYAMSINAR	1307055211560002		Batu Balang																
431	ROHANI	1307056102630002		Batu Balang																

432	NURHAYATI	3175065009620012		Batu Balang															
433	SYAMSINUR	1307056709470001		Batu Balang															
434	KHAIDIR	1307051404460001		Batu Balang															
435	SAMSIDAR	1307065501600001		Tanjung Pauh															
436	RADIATUN	1307064107500014		Tanjung Pauh															
437	SUPIAK AMANG	1307066407430001		Tanjung Pauh															
438	SUNIATI	1307065207520001		Tanjung Pauh															
439	JAMINAR	1307064107510008		Tanjung Pauh															
440	NIMAR	1307064407440001		Tanjung Pauh															
441	AZIZUL	1307064910630002		Tanjung Pauh															
442	YULISMAWATI	1307066012520001		Tanjung Pauh															
443	DARLIS	1307064107550038		Tanjung Pauh															
444	ERMAWATI	1307075512590001		Muaro Paiti															
445	RITNA	1307074807630001		Muaro Paiti															
446	AJRIMAL	1307070107600036		Muaro Paiti															
447	AMRIZAL	1307072307550002		Muaro Paiti															
448	ARIYAN	1307070107520023		Muaro Paiti															
449	SISWANTO	1307071107640001		Muaro Paiti															
450	NUSRI	1307071712610001		Muaro Paiti															
451	ERNI	1307074204560002		Muaro Paiti															
452	ASDIMAL	1307070906650004		Muaro Paiti															
453	UDIN	1307070107420017		Muaro Paiti															
454	ARISMANTO	1307070606610001		Muaro Paiti															
455	MISMA	1307074107620017		Muaro Paiti															
456	MU'IN	1307070107310001		Muaro Paiti															
457	RESMITA	1307074505680002		Muaro Paiti															
458	ANI	1307076612480001		Muaro Paiti															
459	KASIANIS	1307074112530001		Muaro Paiti															
460	IMSRI MULIADI	1307073112670002		Muaro Paiti															
461	INTIA	1307072402660001		Muaro Paiti															

462	M. ALIM	1307073112600012		Muaro Paiti																
463	IJASNI	1307074107540020		Muaro Paiti																
464	RAHMAYUS	1307075212580001		Muaro Paiti																
465	ERNA	1307074605400001		Muaro Paiti																
466	BAKHTIAR	1307070107570028		Muaro Paiti																
467	SUNA	1307074107390003		Muaro Paiti																
468	ZULPON	1307070807510002		Muaro Paiti																
469	ARNI	1307076812660001		Muaro Paiti																
470	INAR	1307074107470043		Muaro Paiti																
471	RATNA JUITA	1307075206650002		Muaro Paiti																
472	DASWINARLIS	1307076007550001		Muaro Paiti																
473	ANIDA	1307075704560001		Muaro Paiti																
474	ZETNA WILIS	1307076412600001		Muaro Paiti																
475	ASNADA WATI	1307074107610010		Muaro Paiti																
476	SARIYAS	1307074107570031		Muaro Paiti																
477	ILIS	1307074107500023		Muaro Paiti																
478	SUHAIRI	1307075202600004		Muaro Paiti																
479	SYAFRINA	1307075306480001		Muaro Paiti																
480	EDI. C	1307071203590001		Muaro Paiti																
481	BASRIL	1307072904690001		Muaro Paiti																
482	MARIANIS	1307077009560001		Muaro Paiti																
483	ZUKIMAN	1307073112590007		Muaro Paiti																
484	SAMSIANIR	1307074107450015		Muaro Paiti																
485	NALIUS	1307070107640026		Muaro Paiti																
486	SARIBANUN	1307074101380001		Muaro Paiti																
487	PASMAWATI	1307075007550002		Muaro Paiti																
488	ULIL AMRIZAL	1307070206660001		Muaro Paiti																
489	BETRI RAYU	1307075407610002		Muaro Paiti																
490	SISWANTO	1307071107640001		Muaro Paiti																
491	YUNIS	1307070107600028		Muaro Paiti																

492	PUNAT	1307074710320001		Koto Bangun															
493	NURJANI	1307074107420040		Koto Bangun															
494	BARISAN	1307071707500001		Koto Bangun															
495	BAHARIS	1307071404510001		Koto Bangun															
496	YUSNI	1307074107650045		Koto Bangun															
497	IYAM	1307077112520006		Koto Bangun															
498	SAMSUMIR	1307070107530028		Koto Bangun															
499	SUJARNIS	1307074107530014		Koto Bangun															
500	NIZARCAN	1307071708550002		Koto Bangun															
501	NURMIN	1307073012550001		Koto Bangun															
502	ALI YASMIN	1307070408560002		Koto Bangun															
503	OSIK	1307070308560002		Koto Bangun															
504	YULIANIS	1307074707570001		Koto Bangun															
505	SIYARIS	1307077112560009		Koto Bangun															
506	PAISAL	1307071507580002		Koto Bangun															
507	ARLI WATI			Koto Bangun															
508	MIYARNIS			Koto Bangun															
509	YUSAKRI	1307072702610001		Koto Bangun															
510	JAHARNIS	1307072305620001		Koto Bangun															
511	RAINIS	1307074508650002		Koto Bangun															
512	NURANI	1307074107590036		Koto Bangun															
513	BASRI	1307071405620001		Koto Bangun															
514	DARMIZON	1307071912640001		Koto Bangun															
515	SYAMSURI	1307070208580001		Koto Bangun															
516	ROSNA	1307075605500001		Koto Bangun															
517	DAWASIR	1307070303520001		Koto Bangun															
518	MUCHLIS	1307072309520001		Koto Bangun															
519	ASMAINI	1307074902600002		Koto Bangun															
520	NUSRIZAL	1307070407600003		Koto Bangun															
521	AGUSRI	1307071708600002		Koto Bangun															

522	PINALDI	1307071307630001		Koto Bangun															
523	JANIZAR	1307072008430001		Koto Bangun															
524	SUMA. S	1307074510370001		Koto Bangun															
525	INUR	1307074201580001		Koto Bangun															
526	SASMAN	1307072303590001		Koto Bangun															
527	MINAR	1307075007550003		Koto Bangun															
528	YUSMINAR	1307076102530001		Koto Bangun															
529	ZAMRI	1307101803510001		Situjuh Banda Dalam															
530	ZURAIDA	1307104108480003		Situjuh Banda Dalam															
531	YURNI	1307104101550001		Situjuh Banda Dalam															
532	SUNARTI	1307104602520001		Situjuh Banda Dalam															
533	MHD. YATIM	1307102702370001		Situjuh Banda Dalam															
534	YENI CORTIS	1307106808580001		Situjuh Banda Dalam															
535	THOMAS ALFA EDISON	1307102107640001		Situjuh Banda Dalam															
536	JUSNA	1307104107510038		Situjuh Banda Dalam															
537	ROSNA	1307104107380004		Situjuh Banda Dalam															
538	DAHNIAR	1307104504480001		Situjuh Banda Dalam															
539	ZULHAIMIS	1307101605550001		Situjuh Banda Dalam															
540	WIRDAWATI	1307105212530001		Situjuh Banda Dalam															
541	DANAS	1307101004450001		Situjuh Banda Dalam															
542	ALIMURDI	1307101003650003		Situjuh Banda Dalam															
543	USMAN RUSLAN	1307102012580003		Situjuh Banda Dalam															
544	WIRDA	1307106008650001		Situjuh Banda Dalam															
545	SUPAHAN	1307100107400011		Situjuh Banda Dalam															
546	ROSTIAM	1307104602570001		Situjuh Banda Dalam															
547	ASNI	1307104503480001		Situjuh Banda Dalam															
548	NURHAYATI	1307104206510001		Situjuh Banda Dalam															
549	MISMAR RAIS	1307100107410006		Situjuh Banda Dalam															
550	WASNI	1307105007590001		Situjuh Banda Dalam															
551	ASMAWATI	1307105812550001		Situjuh Banda Dalam															

552	NURTIALIS	1307106407630001			Situjuah Gadang											
553	SALMI	1307104107640021			Situjuah Gadang											
554	ASRIDA	1307105007540001			Situjuah Gadang											
555	MUSNATI	1307104107600001			Situjuah Gadang											
556	SYAHRIAL	1307101007590002			Tungka											
557	NURLELA	1307104606540001			Tungka											
Dst					Tungka											
JUMLAH TOTAL																
Gelandangan Pengemis																
1	ASRI		Perempuan		Tj. Haro Sikabu-Kabu							Gepeng	ü			
2	IJAL		Laki-laki		Lubuak Alai							Gepeng	ü			
3	ALI USMAN	1307131011650002	L		DURIAN GADANG											
4	RINTO SYAHPUTRA	1307131509990001	L		DURIAN GADANG											
Dst																
JUMLAH TOTAL																

Tabel 2.81. FORM 6.A.3 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI LUAR PANTI DAN/ATAU LEMBAGA (BERBASIS KELUARGA/MASYARAKAT/KOMUNITAS)

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (FISIK)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (INTELEKTUAL)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (MENTAL)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (SENSORIK)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (GANDA)	ANAK TERLANTAR	LANJUT USIA TERLANTAR	GELANDANGAN PENGEMIS	KET
1	LIMA PULUH KOTA	GUNUANG OMEH	KOTO TINGGI	15					1	30		
2	LIMA PULUH KOTA	GUNUANG OMEH	PANDAM GADANG	3								
3	LIMA PULUH KOTA	KAPUR IX	SIALANG							16		
4	LIMA PULUH KOTA	KAPUR IX	KOTO LAMO							18		
5	LIMA PULUH KOTA	KAPUR IX	DURIAN TINGGI							1		
6	LIMA PULUH KOTA	KAPUR IX	MUARO PAITI							56		
		KAPUR IX	LUBUAK ALAAI								1	
7	LIMA PULUH KOTA	KAPUR IX	KOTO BANGUN							37		
8	LIMA PULUH KOTA	PANGKALAN	KOTO ALAM							5		
9	LIMA PULUH KOTA	PANGKALAN	GUNUANG MALINTANG							9		
10	LIMA PULUH KOTA	PANGKALAN	PANGKALAN							26		
11		PANGKALAN	TANJUNG BALIK						1			
12	LIMA PULUH KOTA	PANGKALAN	TANJUNG PAUH							10		
13	LIMA PULUH KOTA	HARAU	TARANTANG							1		
14	LIMA PULUH KOTA	HARAU	SARILAMAK							28		
15	LIMA PULUH KOTA	HARAU	HARAU							4		
		HARAU	TARAM						1			
16	LIMA PULUH KOTA	HARAU	BATU BALANG						1	80		
17	LIMA PULUH KOTA	PAYAKUMBUH	KOTO TANGAH SIMALANGGANG							2		
18	LIMA PULUH KOTA	PAYAKUMBUH	KOTO BARU SIMALANGGANG							48		
19	LIMA PULUH KOTA	PAYAKUMBUH	SIMALANGGANG							1		
20	LIMA PULUH KOTA	GUGUAK	VII KOTO TALAGO							2		

21	LIMA PULUH KOTA	GUGUAK	GUUGAK VIII KOTO								1	46			
22	LIMA PULUH KOTA	MUNGKA	TALANG MAUR									4			
23	LIMA PULUH KOTA	MUNGKA	SUNGAI ANTUAN									59			
24	LIMA PULUH KOTA	MUNGKA	SIMPANG KAPUAK									1			
25	LIMA PULUH KOTA	MUNGKA	MUNGKA								1	52			
26	LIMA PULUH KOTA	MUNGKA	JOPANG									1			
27	LIMA PULUH KOTA	SITUJUAH LIMO NAGARI	S. BANDA DALAM									23			
28	LIMA PULUH KOTA	SITUJUAH LIMO NAGARI	S. GADANG									4			
29	LIMA PULUH KOTA	SITUJUAH LIMO NAGARI	S. TUNGKA									2			
30	LIMA PULUH KOTA	AKABILURU	DURIAN GADANG	1							2			2	
31		AKABILURU	SUAYAN								1				
32	LIMA PULUH KOTA	SULIKI	SUNGAI RIMBANG	1											
33	LIMA PULUH KOTA	SULIKI	KURAI	1											
34	LIMA PULUH KOTA	SULIKI	ANDIANG								1				
		LUAK	TJ. HARO												1
	Total			21	0	0	0	0	0	0	10	566		4	

Tabel 2.82. FORM 6.A.5 REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	KABUPATEN/ KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	BANJIR	TANAH LONGSOR	LETUSAN GUNUNG API	GELOMBANG LAUT EKSTRIM	ANGIN KENCANG	KEKERINGAN	KONFLIK SOSIAL	AKSI TEROR	KEBAKARAN	WABAH/ EPIDEMI	GAGAL TEKNOLOGI	KEBAKARAN HUTAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	LIMA PULUH KOTA			6	1			5				6				
	Total			6	1			5				6				

Tabel 2.83. FORM 6.A.8 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PADA SPM BIDANG SOSIAL

NO	JUMLAH PENERIMA PELAYANAN DASAR YANG MEMBUTHKAN SARANA PRASARANA	JUMLAH SARANA PRASARANA											KONDISI SARANA PRASARANA			TINGKAT KERUSAKAN			
		SHELTER/RUMAH SINGGAH	PUSKESOS	CALL CENTER	KENDARAAN KHUSUS KEDARURATAN	TRC KETELANTARAN	DAPUR UMUM	LDP	MANAJEMEN LOGISTIK	MANAJEMEN SHELTER	KEPOSKOAN	KSB	TRC BENCANA	SANGAT BAIK	BAIK	KURANG BAIK	RENDAH	SEDANG	BERAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sosial																			
1	Jumlah total penyandang disabilitas terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga (23 Orang)	0	2	1	3	4													
2	Jumlah total anak terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga (24 Orang)	0	2	1	3	4													
3	Jumlah total lanjut usia terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga (641 Orang)	0	2	1	3	4													
4	Jumlah total gelandangan pengemis yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga (6 Orang)	0	2	1	3	4													
	Total sarana prasarana yang ada	0	2	1	3	4													
	Jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan	1	77	1	3	6													
Perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota																			
1	Estimasi jumlah korban bencana kabupaten/kota (157 jiwa)	0	2	1	3	4	2	0	2	0	0	1	13	V			V		
	Total sarpras yang ada (157 Paket)	0	2	1	3	4	2	0	2	0	0	1	13	V			V		
	Jumlah sarpras yang dibutuhkan (157 Paket)	1	77	1	3	6	2	1	2	1	1	79	26	V			V		

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Dinas Sosial menghitung selisih antara jumlah barang dan/ atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.

Mengukur persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti . cara mengukur sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar/putus sekolah, lanjut usia terlantar dan tidak potensial dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100$$

Mengukur persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.

$$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota}} \times 100$$

Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Sosial

1. Form 6.B.6 Perhitungan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Sera Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
2. Form 6.B.7 Perhitungan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

Tabel 2.84. FORM 6.B.6 PENGHITUNGAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luarpanti		RUMUS: X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantrar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasisosial dasar di luar panti. Indikator
			A. Standar biaya pribadi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan gelandangan dan pengemis	a. Layanan data dan pengaduan	694 Orang	(a) Honor petugas; - (b) Jumlah petugas; 2 Orang (c) Alat pengelolaan data (ocial a 2 unit , printer 1 Unit); (d) Alat tulis kantor; Rp 4.062.000,- © Sewa jaringan internet.Rp 0	RUMUS = (a x b) + c + d + e
			B. Standar sarana dan prasarana LKS/ rumah singgah	b. Layanan kedaruratan	-		Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi ocial dasar di luar panti. RUMUS = c + d
			1.Standar SDM			(a) Transport petugas; (b) Pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi ocial dasar di luar panti; (c) Pemeliharaan kendaraan; (d) Honor petugas tim reaksi cepat.	Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi ocial dasar di luar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan. RUMUS = b + c + d
			2.Standar sarana dan prasarana				Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi ocial dasar di luar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru. RUMUS = a + d
				c. Penyediaan permakanaan	605 Orang	(a) Penerima layanan per tahun; (b) Jumlah hari pemberian layanan permakanaan dalam 1 (satu) tahun; (c) Indeks permakanaan per orang per hari; (d) Transport petugas.	RUMUS = (a x b x c) + d
				d. Penyediaan sandang	8 Orang	(a) Pembelian pakaian; (b) Pembelian perlengkapan mandi; (c) Pembelian kebutuhan khusus untuk: perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden; (d) Pembelian alas kaki; © Transport petugas.	RUMUS = a + b + c + d + e
				e. Penyediaan alat bantu	41 Orang	(a) kursi roda; (b) Kaca mata; (c) Jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu; (d) Alat bantu dengar; © Kruk; (f) Tripod; (g) Tongkat putih;	RUMUS = a + b + c + d + e + f + g + h + © + j

					(h) Reglet (alat tulis untuk tuna sosial); (i) Transport petugas; (j) Transport penerima layanan.	
			f. Penyediaan perbekalan kesehatan	605 Orang	(a) Obat umum; (b) Timbangan; (c) Pengukur tinggi badan; (d) Termometer; (e) Transport petugas; (f) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b + c + d + f
			g. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	18 Orang	(a) Honor pekerja sosial; (b) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (c) Pembelian alat peraga; (d) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c + d
			h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan	37 Orang	(a) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (b) Pembelian alat peraga; (c) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c
			i. Pengemis dan			
			j. Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	-	(a) Transport petugas; (b) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b
			k. Akses ke layanan sosial dan sosial dasar	25 Orang	(a) Transport petugas; (b) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b
			l. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	-	Biaya perjalanan pekerja sosial sosial.	Sesuai dengan standar biaya
			m. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	25 Orang	(a) Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial sosial; (b) Biaya transport penerima layanan; (c) Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga.	Sesuai dengan standar biaya
			n. Layanan rujukan	25 Orang	(a) Transport petugas; (b) Transport penerima manfaat.	RUMUS = a + b

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

- 1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan oleh Pemerintahan Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan;
- 2) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pemerintahan Daerah social a rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan menuangkannya kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- 4) Dinas social daerah kabupaten/kota social a rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan menuangkannya kedalam dokuman rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja);
- 5) Dinas Sosial kabupaten/kota melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar melalui penyelenggaraan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan kondisi riil daerah.

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Sosial

1. Form 6.C.1 Rencana Pemenuhan Penyandang Disabilitas Terlantar Luar Panti
2. Form 6.C.2 Rencana Pemenuhan Penyandang Anak Terlantar Luar Panti
3. Form 6.C.3 Rencana Pemenuhan lansia Terlantar Luar Panti.
4. Form 6.C.4 Rencana Pemenuhan
5. Gelandangan dan Pengemis Luar Panti

Tabel 2.85 FORM 6.C.1 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR LUAR PANTI

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SOSIAL	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakaman sesuai dengan gizi maksimal kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	1,500,000	DAU UMUM	2	750,000	1,500,000	7	750,000	5,250,000	12	750,000	9,000,000	17	750,000	12,750,000	23	750,000	17,250,000	17,250,000
2		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang terjadi dalam 1 tahun kewenangan patroli	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	2,000,000	PBH	2	100,000	200,000	7	1,000,000	7,000,000	12	1,000,000	12,000,000	17	1,000,000	17,000,000	23	1,000,000	23,000,000	23,000,000
3		Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Jumlah orang yang terakses asrama yang layak huni kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	20,000,000		10	2,000,000	20,000,000	15	2,000,000	30,000,000	20	2,000,000	40,000,000	25	2,000,000	50,000,000	30	2,000,000	60,000,000	60,000,000
4		Penyediaan alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat peraga sesuai kebutuhan kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	12,000,000	DAU UMUM	3	4,000,000	12,000,000	8	4,000,000	32,000,000	13	4,000,000	52,000,000	18	4,000,000	72,000,000	23	4,000,000	92,000,000	92,000,000
5		Penyediaan Perbekalan sosial dan dalam panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan sosial dan dalam panti kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	3,800,000		10	380,000	3,800,000	15	380,000	5,700,000	20	380,000	7,600,000	25	380,000	9,500,000	30	380,000	11,400,000	11,400,000

Tabel 2.86. FORM 6.C.2 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG ANAK TERLANTAR LUAR PANTI

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR LUAR PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5	
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5				
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	SOSIAL	Pengasuhan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan pengasuhan kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0																		
		Penyediaan makanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan kewenangan Kab/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	6	DAU	6	750,000	4,500,000	11	750,000	8,250,000	16	750,000	12,000,000	21	750,000	15,750,000	26	750,000	19,500,000	19,500,000	
		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kab/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	2	PBH	2	1,000,000	2,000,000	7	1,000,000	7,000,000	12	1,000,000	12,000,000	17	1,000,000	17,000,000	22	1,000,000	22,000,000	22,000,000	
		Penyediaan asrama yang mudah diakses	Jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0																		
		Penyediaan perbekalan sosial di dalam panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan sosial di dalam panti kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0																		
		Pemberian bimbingan	Jumlah pesertabimbin	Rehabilitasi sosial dasar	Program rehabilitasi	Orang	0																		

	fisik, mental dan sosial	n fisik, mental dan sosial an kewenangan Kab/Kota	penyanggandisabilitas terlantar di luar panti	asi sosial																			
	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Jumlah peserta bimbingan aktifitas hidup sehari-hari kewenangan Kab/Kota	Rehabilitasi ocial dasar penyanggandisabilitas terlantar di luar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0																	
	Aktifitas ke layanan ocial an dan ocial an dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses kelayanan ocial an dan ocial an dasar kewenangan kab/ kota	Rehabilitasi ocial dasar penyanggandisabilitas terlantar di luar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	15	DAU	15	380,000	5,700,000	15	380,000	5,700,000	15	380,000	5,700,000	20	380,000	7,600,000	20	380,000	7,600,000	7,600,000
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kab/ Kota	Rehabilitasi ocial dasar penyanggandisabilitas terlantar di luar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0																	
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan provinsi	Rehabilitasi ocial dasar penyanggandisabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0																	
	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Jumlah orang yang mendapatkan pengasuhan keluarga pengganti kewenangan provinsi	Rehabilitasi ocial dasar penyanggandisabilitas terlantar di luar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0																	
	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi ocial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pembinaan rehabilitasi ocial anak terlantar di dalam panti	Rehabilitasi ocial dasar penyanggandisabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0																	

Tabel 2.87. FORM 6.C.3 RENCANA PEMENUHAN LANSIA TERLANTAR LUAR PANTI

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Permakanan	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan permakanaan	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandang pengemis di luar panti	rehabilitasi sosial	Orang	446,250,000	DAU	600	750,000	450,000,000	605	750,000	453,750,000	610	750,000	457,500,000	615	750,000	461,250,000	620	750,000	465,000,000	465,000,000
	Sandang	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan sandang	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandang pengemis di luar panti	rehabilitasi sosial	Orang	2,000,000	PBH	7	1,000,000	7,000,000	12	1,000,000	12,000,000	17	1,000,000	17,000,000	22	1,000,000	22,000,000	27	1,000,000	27,000,000	27,000,000
	Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan alat bantu	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandang pengemis di luar panti	rehabilitasi sosial	Orang	60,000,000	DAU	35	2,000,000	70,000,000	40	2,000,000	80,000,000	45	2,000,000	90,000,000	50	2,000,000	100,000,000	55	2,000,000	110,000,000	110,000,000
	UEP Lansia	Pemberian bimbingan fisik mental, spiritual dan sosial	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan usaha ekonomi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar,	rehabilitasi sosial	Orang	48,000,000	DBH	17	4,000,000	68,000,000	22	4,000,000	88,000,000	27	4,000,000	108,000,000	32	4,000,000	128,000,000	37	4,000,000	148,000,000	148,000,000

			produktif	anak terlantar, lansia terlantar dan gelandang pengemis di luar panti																					
Rujukan	Pemberian layanan rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandang pengemis di luar panti	rehabilitasi sosial	Orang	1,900,000	DAU	3	380,000	1,140,000	5	380,000	1,900,000	5	380,000	1,900,000	5	380,000	1,900,000	5	380,000	1,900,000	5	380,000	1,900,000

Tabel 2.88. FORM 6.C.4 RENCANA PEMENUHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS LANSIA LUAR PANTI

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	SOSIAL	Penyediaan permakanan	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	rehabilitasi sosial	Orang	1,500,000	DAU	2	750,000	1,500,000	7	750,000	5,250,000	12	750,000	9,000,000	17	750,000	12,750,000	22	750,000	16,500,000	16,500,000
		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	rehabilitasi sosial	Orang	2,000,000	DAU	2	1,000,000	2,000,000	7	1,000,000	7,000,000	12	1,000,000	12,000,000	17	1,000,000	17,000,000	22	1,000,000	22,000,000	22,000,000
		Penyediaan asrama yang mudah diakses	Jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan provinsi	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	rehabilitasi sosial																			
		Penyediaan alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan	Rehabilitasi social dasar	rehabilitasi sosial																			

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

- a. Dinas Sosial melaksanakan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar terhadap penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial dan korban bencana alam atau bencana sosial .
- b. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan/ atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial dan korban bencana alam atau bencana sosial dan atau melakukan kerjasama daerah.

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Sosial

1. Form 6.D.5 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng diluar Panti

Tabel 2.90. FORM 6.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR, GEPENG DILUAR PANTI

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%				
							FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	7,500,000	10	7,500,000	100%	100%	APBD		
2	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	8,000,000	8	8,000,000	100%	100%	APBD		
3	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuaikebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	41	31,600,000	41	31,600,000	100%	100%	APBD		
4	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemberian Bimbingan , Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	12	48,000,000	12	48,000,000	100%	100%	APBD		
5	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan KesehatanDasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	595	446,250,000	595	446,250,000	100%	100%	APBD		
+6	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	25,000,000	25	25,000,000	100%	100%	APBD		

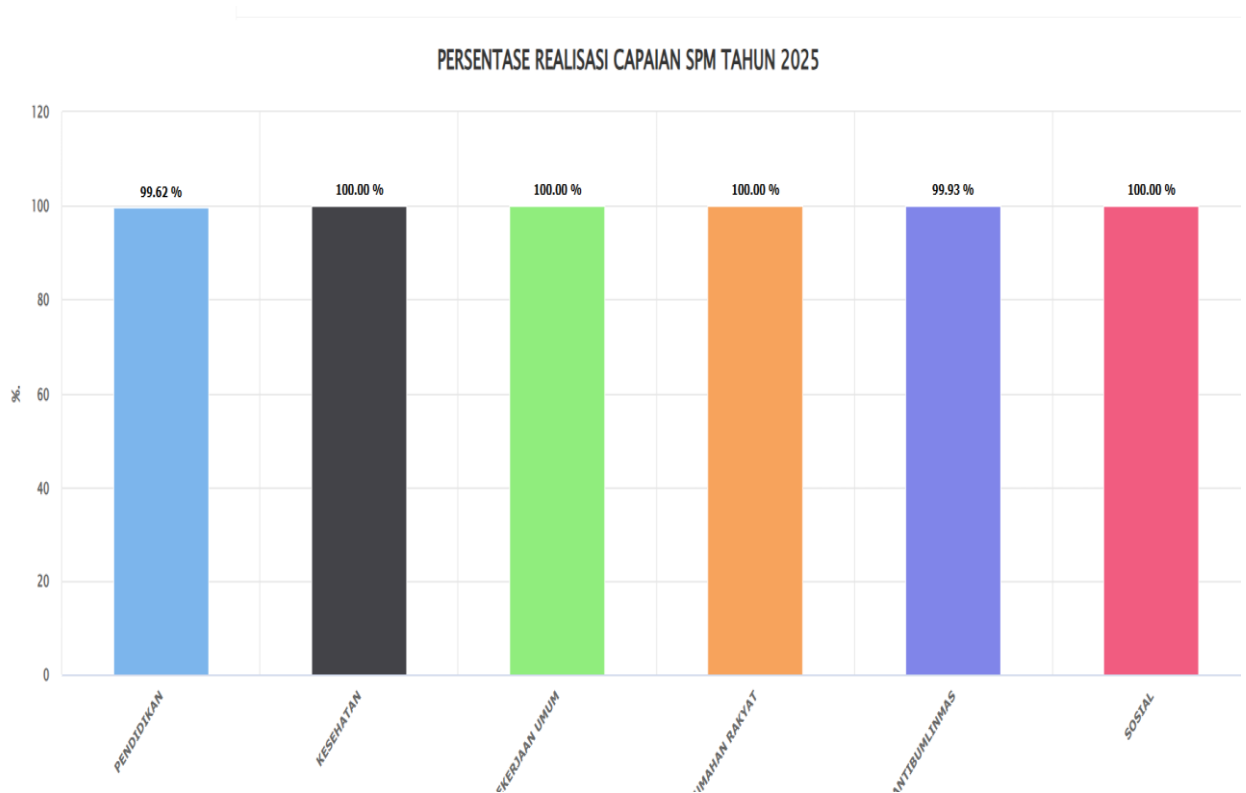
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya pemenuhan SPM dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas perangkat daerah, dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, serta pemerataan pelayanan publik. Secara umum, capaian SPM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 menunjukkan tren yang positif. Pemerintah Daerah terus melakukan penguatan kebijakan, peningkatan kualitas perencanaan, serta optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada enam urusan wajib pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.


Pada urusan pendidikan, pemerintah daerah berfokus pada pemenuhan akses dan mutu layanan pendidikan dasar bagi seluruh warga usia sekolah. Berbagai upaya dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan tenaga pendidik, serta dukungan terhadap peserta didik agar memperoleh layanan pendidikan yang layak dan berkualitas. Dalam bidang kesehatan, pelaksanaan SPM diarahkan pada peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi kelompok rentan. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan cakupan layanan kesehatan melalui penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta optimalisasi pelayanan promotif dan preventif.

Urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap infrastruktur dan hunian yang layak. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan akses air minum, sanitasi layak, serta penanganan kawasan permukiman untuk mendukung kualitas hidup masyarakat.

Pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemerintah daerah berupaya menciptakan kondisi yang aman dan tertib melalui peningkatan kesiapsiagaan, penegakan peraturan daerah, serta penguatan kapasitas aparaturnya dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan.

Sementara itu, pada urusan sosial, pelaksanaan SPM diarahkan pada perlindungan dan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan sosial melalui pendataan yang akurat, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, serta pendampingan berkelanjutan bagi kelompok rentan, berikut realisasi Capaian SPM Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2025 dengan persentase capaian SPM sebesar 99,93%:



GRAFIK PENERAPAN SPM		TABEL PENERAPAN SPM	4 TAHAPAN SPM
 STATUS DOKUMEN KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025 Hari Ini Tanggal 15-January-2026			
NO	NAMA	CAPAIAN SPM	KETERISIAN
1	KAB. LIMA PULUH KOTA	99,93 %	
1	PENDIDIKAN	99.62	Sudah Melakukan Input (100.00 %)
2	KESEHATAN	100.00	Sudah Melakukan Input (100.00 %)
3	PEKERJAAN UMUM	100.00	Sudah Melakukan Input (100.00 %)
4	PERUMAHAN RAKYAT	100.00	Sudah Melakukan Input (100.00 %)
5	TRANSTIBUMLINMAS	99.93	Sudah Melakukan Input (100.00 %)
6	SOSIAL	100.00	Sudah Melakukan Input (100.00 %)

Meskipun capaian SPM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 menunjukkan hasil yang menggembirakan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain keterbatasan sumber daya, kondisi geografis, serta kebutuhan akan penguatan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan dasar agar pemenuhan SPM dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Ke depannya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akan terus memperkuat perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Berikut Capaian SPM pada masing-masing Bidang Penerapan SPM:

3.1. URUSAN PENDIDIKAN

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan pada tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta

potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM yang merupakan standar pelayanan minimal publik yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

1. Pendidikan Anak Usia Dini dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.
2. Pendidikan Dasar, dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).
3. Pendidikan Kesetaraan, dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

3.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Dearah

Target pencapaian SPM tahun 2025 urusan pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	7.685	1 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	52.085	1 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	1.167	1 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3.1.3. Anggaran

Alokasi anggaran SPM urusan pendidikan tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2. Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan

No	Program	Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023)	Sub Kegiatan (Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025		Satuan	Rencana Pencapaian SPM 2025		
			Kode	Sub Kegiatan		Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	7	8	9	
1	PROGRAM PENGELOLA AN PENDIDIKAN	1 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	1	1.01.02.2.0 3.0002	1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	4	109.650.000
			2	1.01.02.2.0 3.0011	2 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta Didik		
			3	1.01.02.2.0 3.0015	3 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang		
			4	1.01.02.2.0 3.0016	4 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	90	130.809.000
			5	1.01.02.2.0 3.0017	5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidika n	90	55.432.000
			6	1.01.02.2.0 3.0023	6 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	2	9.890.000
			7	1.01.02.2.0 3.0024	7 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang		
			8	1.01.02.2.0 3.0025	8 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	21.724.500
			9	1.01.02.2.0 3.0026	9 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1	10.000.000
			10	1.01.02.2.0 3.0029	10 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunita s		

No	Program	Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023)	Sub Kegiatan (Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025		Satuan	Rencana Pencapaian SPM 2025	
			Kode	Sub Kegiatan		Target	Anggaran
1	2	3	4	5	7	8	9
			11 1.01.02.2.0 3.0030	11 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	4	601.800.000
			12 1.01.02.2.0 3.0039	12 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang		
			13 1.01.02.2.0 3.0040	13 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit		
			14 1.01.02.2.0 3.0041	14 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1	121.228.500
			15 1.01.02.2.0 3.0042	15 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit		
			16 1.01.02.2.0 3.0045	16 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit		
			17 1.01.02.2.0 3.0046	17 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	2	1.588.465.6 00
			18 1.01.02.2.0 3.0051	18 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	6	465.000.000
		2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	19 1.01.02.2.0 1.0001	1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit		
			20 1.01.02.2.0 1.0006	2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	39	3.570.168.0 00
			21 1.01.02.2.0 1.0019	3 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit		
			22 1.01.02.2.0 1.0025	4 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	373	336.504.000
			23 1.01.02.2.0 1.0026	5 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1	221.706.600

No	Program	Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023)	Sub Kegiatan (Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025		Satuan	Rencana Pencapaian SPM 2025	
			Kode	Sub Kegiatan		Target	Anggaran
1	2	3	4	5	7	8	9
			24 1.01.02.2.0 1.0027	6 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	450	758.585.200
			25 1.01.02.2.0 1.0028	7 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	373	393.947.000
			26 1.01.02.2.0 1.0035	8 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	373	54.900.000
			27 1.01.02.2.0 1.0036	9 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	2	10.000.000
			28 1.01.02.2.0 1.0037	10 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang		
			29 1.01.02.2.0 1.0038	11 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	263.540.000
			30 1.01.02.2.0 1.0039	12 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1	10.000.000
			31 1.01.02.2.0 1.0041	13 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas		
			32 1.01.02.2.0 1.0043	14 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	3	54.990.000
			33 1.01.02.2.0 1.0045	15 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku		

No	Program	Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023)	Sub Kegiatan (Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025		Satuan	Rencana Pencapaian SPM 2025		
			Kode	Sub Kegiatan		Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	7	8	9	
			34	1.01.02.2.0 1.0046	16 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1	98.400.000
			35	1.01.02.2.0 1.0047	17 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	8	2.331.643.4 00
			36	1.01.02.2.0 1.0048	18 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit		
			37	1.01.02.2.0 1.0049	19 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang		
			38	1.01.02.2.0 1.0050	20 Penyelenggaraa n Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidika n		
			39	1.01.02.2.0 1.0051	21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	35	5.675.455.0 00
			40	1.01.02.2.0 1.0054	22 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik	100	12.355.000
			41	1.01.02.2.0 1.0055	23 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	25	2.068.441.0 00
		3	42	1.01.02.2.0 2.0001	1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit		
			43	1.01.02.2.0 2.0012	2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	14	813.487.500
			44	1.01.02.2.0 2.0014	3 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SekolahRehabil itasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	14	1.429.903.5 00
			45	1.01.02.2.0 2.0024	4 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	7	868.923.800

No	Program	Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023)	Sub Kegiatan (Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025)		Satuan	Rencana Pencapaian SPM 2025		
			Kode	Sub Kegiatan		Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	7	8	9	
			46	1.01.02.2.0 2.0030	5 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit		
			47	1.01.02.2.0 2.0032	6 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik	500	60.000.000
			48	1.01.02.2.0 2.0038	7 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	100	453.316.900
			49	1.01.02.2.0 2.0039	8 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	10	25.237.000
			50	1.01.02.2.0 2.0040	9 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	250	232.723.000
			51	1.01.02.2.0 2.0041	10 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidika n	61	200.375.400
			52	1.01.02.2.0 2.0048	11 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	51	35.981.500
			53	1.01.02.2.0 2.0049	12 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	2	10.000.000
			54	1.01.02.2.0 2.0050	13 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang		
			55	1.01.02.2.0 2.0051	14 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	179.921.000

No	Program	Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023)	Sub Kegiatan (Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025		Satuan	Rencana Pencapaian SPM 2025		
			Kode	Sub Kegiatan		Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	7	8	9	
			56	1.01.02.2.0 2.0052	15 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen		
			57	1.01.02.2.0 2.0054	16 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas		
			58	1.01.02.2.0 2.0055	17 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	3	36.000.000
			59	1.01.02.2.0 2.0058	18 Penyelenggaraa n Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidika n		
			60	1.01.02.2.0 2.0059	19 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang		
			61	1.01.02.2.0 2.0060	20 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang		
			62	1.01.02.2.0 2.0061	21 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku		
			63	1.01.02.2.0 2.0062	22 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket		
			64	1.01.02.2.0 2.0067	23 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket		
		4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	65	1.01.02.2.0 4.0010	1 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kes etaraan	Peserta Didik	900	15.300.000
			66	1.01.02.2.0 4.0014	2 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kes	Orang		

No	Program	Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023)	Sub Kegiatan (Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025		Satuan	Rencana Pencapaian SPM 2025	
			Kode	Sub Kegiatan		Target	Anggaran
1	2	3	4	5	7	8	9
				etaraan			
			67 1.01.02.2.0 4.0016	3 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kes etaraan	Satuan Pendidika n	38	165.363.200
			68 1.01.02.2.0 4.0025	4 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital		
			69 1.01.02.2.0 4.0026	5 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang		
			70 1.01.02.2.0 4.0027	6 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	41.850.000
			71 1.01.02.2.0 4.0028	7 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1	10.000.000
			72 1.01.02.2.0 4.0030	8 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunita s		
			73 1.01.02.2.0 4.0031	9 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan		
			74 1.01.02.2.0 4.0036	10 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket		
			75 1.01.02.2.0 4.0037	11 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku		
			76 1.01.02.2.0 4.0039	12 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang		
			77 1.01.02.2.0 4.0041	13 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas	Unit		

No	Program	Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023)	Sub Kegiatan (Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025		Satuan	Rencana Pencapaian SPM 2025	
			Kode	Sub Kegiatan		Target	Anggaran
1	2	3	4	5	7	8	9
				Sekolah			
			78 1.01.02.2.0 4.0042	14 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	120	112.200.000
			79 1.01.02.2.0 4.0044	15 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit		
			80 1.01.02.2.0 4.0046	16 Penyelenggaraa n Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidika n		
			81 1.01.02.2.0 4.0049	17 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit		
			82 1.01.02.2.0 4.0052	18 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit		
			83 1.01.02.2.0 4.0055	19 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Paket	2	241.500.000
			84 1.01.02.2.0 4.0061	20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang		
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIK AN	1 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidik an bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	85 1.01.04.2.0 1.0001	1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kes etaraan	Dokumen	1	29.782.000
			86 1.01.04.2.0 1.0002	2 Penataan Pendistribusia n Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kes etaraan	Laporan		

3.1.4. Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian SPM, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Dukungan Personil SPM Urusan Pendidikan

NO	NAMA	NIP	GOL/ RUANG
A. TENAGA ADMINISTRATIF			
A. 1. SEKRETARIAT			
Plt. KEPALA DINAS			
1	Alfian, S.STP.,M.Si	197612201995111001	IV/c
SEKRETARIS			
2	Drs. Aimel Nazra, M.Si	197205211992031003	IV/b
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
3	Resfi Harmi, S.Sos	198108072009012003	III/d
4	Veni Raffles, S.Pd.	198202182010012012	III/d
5	Alfenia, S.Psi	199405162023212043	IX
6	Dwi Putri Ananda, S.Psi	199605172023212030	IX
7	Fadiah Humairoh Purba, S.A.P	200003272025062003	III/a
8	Fernando, S.A.P	199703032025061002	III/a
SUB SUBSTANSI PERENCANAAN DAN PELAPORAN			
9	Mulyanis, ST	197412312002122007	III/d
10	Riri Maiyuliani, S.Kom	198605262009012003	III/d
11	Mukhlis Winnanda, S.Kom	199708152020121003	III/a
12	Aulia Asyathul Hafizah, S.T	200101292025062002	III/a
13	Aldri	197305012005011006	II/d
SUB SUBSTANSI KEUANGAN DAN BMD			
14	Erlin Mahdalena, SE	198203102003122003	III/b
15	Mira Putri, S.E	198410282009012004	III/d
16	Salmalidar	196807061990032004	III/b
17	Tien Ariani	196809031999032001	III/b
18	Ridho Ilahi, S.Pd	198211032014081002	III/a
19	Helminis, S.Sos	198412102023212041	IX
20	Vitri Intan Sari, S.Pd	199702092020122002	III/a
21	Hanif Fuady, S.E	199909252025061001	III/a
22	Annisa Elsy Salfadila, S.E	200005172025062000	III/a
23	Jaki Harmawan, A.Md.Kom	199607232025061002	II/c
A.2 BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF			
24	Yollanda Ferry, S.Kom.,M.M	198409302009012004	IV/a
SEKSI KURIKULUM, PENILAIAN & PESERTA DIDIK			
25	Devy Yas Irman, S.Pd.	197405202010011007	III/d
26	Retno Triaryanti, S.Pd	197908152010012009	III/d
27	Novrita Aslina Roza, S.Pd	199311062025062004	III/a
SUB SUBSTANSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA			
28	Widya Handayani, SE	197711152009012001	III/c
29	Dani Septiadi, S.A.P.	199209192025061003	III/a

NO	NAMA	NIP	GOL/ RUANG
SEKSI PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)			
30	Muhammad Hanafi, S.Pd	197602142010011007	III/c
31	Hendra Inaldi	198404102007011001	II/b
32	Safanissa Alifia Aderizal, S.AP.	200105012025062003	III/a
A.3. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR			
33	Endri Mulyadi, S.T.,M.T	197608152003121005	IV/a
SEKSI KURIKULUM & PENILAIAN			
34	Dedi Kurniawan, S.Pd	198307182011011001	III/c
35	Erlinda Hastuti,S.Sos	197002131990032001	III/d
36	Yuni Wulandari, S.AP	198406102010012005	III/a
37	Bunga Santika, A.Md	200005302025062002	II/c
SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER			
38	Emrizal, S.Pd.SD	197108031993031004	IV/a
39	Yuliana	197006271992032002	III/b
40	Batar, S.Sos	197011302000031003	III/d
41	Mahendra	197308232000121002	III/b
42	Resti Gustya Azhari, S.AP.	199908112025062001	III/a
SUB SUBSTANSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA			
43	Wilda Susanti, S.Pd	198309282014082002	III/b
44	Wawan Indra Utama, S.Kom	199405212025061001	III/a
45	Yugo Asra Prasetio, S.AP	199106092025061002	III/a
A.4.BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN			
46	Harnieti, S.Pd.,M.Pd	197308061998022001	IV/c
SUB SUBSTANSI PTK PAUD DAN PNF			
47	Afrinanijar, S.Pd	198104292008012011	III/d
48	Yusdarini, S.Kom	197712192010012003	III/d
49	Melliana. S.AP	200009142025062003	III/a
SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD			
50	Zulfikar Ayatulloh, S.Pd	197903242009011002	III/c
51	Yeni Fitriani, S.Kom	197902032009012002	III/d
52	Dwi Febria Rina, S.Pd	198602142009012004	II/c
53	Puja Arifti Hanifah, S.AP	200004142025062007	III/a
54	Nilam Wahdiaz Azani, S.Kom	200202182025062002	III/a
SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP			
55	Putra Illah Khair,S.Pd	197209242006041007	III/c
56	Husni Hayati,S.Pd	197708212007012005	III/d
57	Riva Andra Yuni, S.T	199806292025062006	III/a
A.5.BIDANG KEBUDAYAAN			
58	Ali Hasan, S.Sos	197010291998031001	IV/a
SUB SUBSTANSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN			
59	Dedi Iswandi, S.Sn	197410202003121003	III/d
60	Novyandri, S.Pd	197311092006041005	III/b
61	Adinda Olivia, S.A.P	199909062025062003	III/a
SUB SUBSTANSI KESENIAN			
62	Zarni Jamila, S.Sn	198105242006042006	III/d
63	Novia Erlinda, S.AP	198511172014082001	III/a
64	Nurmala, S.Sn	199612232023212034	IX
SUB SUBSTANSI SEJARAH DAN NILAI TRADISI			

NO	NAMA	NIP	GOL/ RUANG
65	Rahayu Efendi, S.Pd	197408232009011002	III/d
66	Robby Ivan Razaq, S.Hum	199312182023211017	IX
B. TENAGA FUNGSIONAL			
B.1 ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR			
67	Meria Susanti, S.A.P	198208082005012006	III/a

3.1.5. Hasil Capaian

Hasil capaian SPM tahun 2025 urusan pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4. Hasil Capaian SPM Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
			(4)	(5)	(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			99.62 %	
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini					99.72 %	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	72.46	69.27	3.19	95.60 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	7685	7685	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	19.72 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					98.61 %	
	1 .Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal	Persentase	77.2	76.79	0.4100	99.47 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	akreditasi B						
	2 .Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	74.84	73.15	16.900	97.74 %	
2 .	Pendidikan Dasar					99.70 %	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun) SD *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	99.49	99.4	0.09	99.91 %	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	99.39	99.28	0.11	99.89 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	52085	52085	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)						-20%	19.70 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					98.49 %	
	SD (2025)					98.54 %	
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	65.63	78.03	-124.000	100.00 %	
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	58.46	75.9	-174.400	100.00 %	
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	77.15	76.25	0.9000	98.83 %	
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73	72	10.000	98.63 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60.89	58	28.900	95.25 %	
	SMP (2025)					98.44 %	
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	71.14	76.32	-51.800	100.00 %	
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	63.38	73.87	-104.900	100.00 %	
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	70.24	68.73	15.100	97.85 %	
	4 . Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	70.11	69.1	10.100	98.56 %	
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57.55	55.14	24.100	95.81 %	
3 .	Pendidikan Kesetaraan					99.45 %	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-18 tahun) KESETARAAN *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	37.89	36.85	1.04	97.26 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	1167	1167	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)						-20%	19.45 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					97.26 %	
	1 .Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	37.89	36.85	10.400	97.26 %	

3.1.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target SPM urusan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah antara lain:

1. Masih kurangnya serapan anggaran Sub Kegiatan pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga menghambat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ini sesuai dengan amanah peraturan.
2. Adanya ketidaksesuaian antara target SPM Pendidikan yang ditetapkan dengan kondisi, potensi, dan kapasitas riil di lapangan serta masih kurangnya pemahaman tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang diwajibkan dalam SPM.
3. Belum Optimalnya ketersediaan basis data internal dan eksternal yang bersifat lintas sektoral sebagai dasar penghitungan dalam penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan.

b. Solusi

Adapun rekomendasi dalam pencapaian target SPM urusan pendidikan ini adalah:

1. Lebih memaksimalkan realisasi anggaran pendidikan untuk pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan pada Tahun 2026 dan seterusnya.
2. Perlunya dilaksanakan sosialisasi pencapaian target Standar Pelayanan Minimal di tingkat Perangkat Daerah dan satuan pendidikan.
3. Mengoptimalkan koordinasi dalam pengumpulan data internal dan eksternal lintas sektor melalui Tim Pokja SPM Kabupaten dengan melibatkan berbagai instansi/unsur yang terkait dalam proses verifikasi dan validasi data.

3.2. URUSAN KESEHATAN

Penerapan SPM urusan kesehatan pada tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

3.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis;
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

3.2.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, target SPM urusan bidang kesehatan pada Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

Tabel 3.5. Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

NO	INDIKATOR SPM	SASARAN (ORANG)	TARGET (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	615	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	612	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	573	100

NO	INDIKATOR SPM	SASARAN (ORANG)	TARGET (%)
4	Pelayanan kesehatan balita	2694	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	7883	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	20978	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	2016	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	3121	100
9	Pelayanan kesehatan penderita DM	418	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan ODGJ berat (psikotik)	68	100
11	pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB)	1149	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	730	100

3.2.3. Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2025 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Kesehatan dianggarkan pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sumber dana berasal dari BOK Kabupaten, BOK Puskesmas dan Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan Tahun 2025. Total dana penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025 sebesar Rp3.826.823.150 (Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.6. Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Layanan Dasar	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,264,431,000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	79,574,000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	30,150,000
4	Pelayanan Kesehatan pada Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	112,175,900
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	1,075,841,000

No	Jenis Layanan Dasar	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
		pada Usia Pendidikan Dasar	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	174,802,000
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	60,260,000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	36,275,000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	122,658,000
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	280,265,000
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	485,420,000
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	104,971,250
	Jumlah		3.826.823.150

3.2.4. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan kesehatan, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) kesehatan yang tersebar di 22 puskesmas dan RSUD dr. Achmad Darwis keadaan akhir Desember 2025 sesuai data SDM Kesehatan yang di inputkan kedalam aplikasi e SPM Kemendagri, SDM Kesehatan inilah yang akan melaksanakan pelayanan SPM mulai Januari s/d Desember 2025. Dukungan personil yang dijabarkan sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas dimana didalamnya dijabarkan ada 9 jenis tenaga kesehatan yang harus ada di puskesmas. Rincian dukungan personil yang ada di puskesmas dan RSUD dr. Achmad Darwis sebagai fasilitas kesehatan rujukan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7. Data Personil pada Puskesmas dan RSUD dr. Achmad Darwis

N O	PUSKESMAS	dr	drg	Pe- ra- wat	Bidan	Kes Ling	Gizi	Lab- or	Kes Mas	Far Masi
1	Koto Baru Simalanggang	5	2	6	25	2	2	2	2	2
2	Batu Hampar	2	1	7	13	1	2	1	3	1
3	Piladang	2	1	5	14	1	1	1	1	2
4	Mungo	4	3	7	23	1	1	2	1	3
5	Halaban	1	1	8	14	0	1	1	1	2
6	Pakan Rabaa	4	2	8	21	1	3	1	3	3
7	Situjuah	3	2	7	24	1	5	1	2	1
8	Taram	2	2	6	19	1	1	1	2	2
9	Tanjung Pati	3	2	13	28	2	1	2	1	2
10	Dangung- dangung	4	2	6	24	1	2	2	3	3
11	Padang Kandis	3	1	3	9	1	1	2	3	3
12	Mungka	3	2	6	24	1	1	4	3	3
13	Suliki	1	1	6	15	1	1	1	2	2
14	Maek	1	1	18	19	3	3	1	1	3
15	Baruah Gunuang	2	1	9	7	1	1	1	1	3
16	Banja Laweh	2	2	9	14	1	1	1	2	1
17	Koto Tinggi	1	2	2	22	1	2	1	0	4
18	Muaro Paiti	2	1	10	21	2	2	2	1	3
19	Sialang	1	1	4	15	0	1	1	0	2
20	Pangkalan	4	1	9	14	2	2	2	2	3
21	Rimbo Data	2	1	6	6	0	0	1	0	2
22	Gunung Malintang	2	1	5	5	1	1	1	0	1
23	RSUD Suliki	14	1	129	26	3	3	10	5	32
JUMLAH		68	34	289	402	30	38	42	52	83

3.2.5. Hasil Capaian

Hasil capaian SPM urusan kesehatan tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8. Hasil Capaian SPM Urusan Kesehatan

NO	INDIKATOR SPM	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan k4 difaskes pemerintah atau swasta	615	615	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar di faskes	612	612	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapat pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	573	573	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan balita sesuai standar	2694	2694	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	7883	7883	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	20978	20978	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Pengunjung Usia 60 Tahun Keatas Yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar Minimal 1 Kali Dalam Kurun Waktu Satu Tahun	2016	2016	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	3121	3121	100
9	Pelayanan kesehatan penderita DM	Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	418	418	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan ODGJ berat (psikotik)	Jumlah ODGJ berat (psikotik) diwilayah kerja kab yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	68	68	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TBC)	Jumlah orang yang mendapat pelayanan TBC sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	1149	1149	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi hiv yang mendapat pemeriksaan hiv sesuai standar difasyankes dalam kurun waktu satu tahun	730	730	100

3.2.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Berikut disampaikan permasalahan dan solusi untuk indikator SPM Urusan Kesehatan tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.9. Permasalahan SPM Urusan Kesehatan

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidental yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%.
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidental yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%.
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidental yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidental yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidental yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%.
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidental yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidental yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%.
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidental yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%.
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidental yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN
		selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidental yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberculosi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidental yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidental yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%

Solusi atas permasalahan yang ada untuk semua indikator adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan melalui Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Program menyampaikan hasil validasi terhadap laporan bulanan capaian realisasi SPM melalui media komunikasi daring (*whatsapp group*) bersama pengelola program dinas kesehatan dan puskesmas.
2. Dinas Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi berupa pertemuan setiap triwulan untuk mengevaluasi capaian puskesmas dan merencanakan metode penyasaran target penduduk P3KE desil 1 dan tambahannya di desil 2,3,4.
3. Kepala Puskesmas melakukan evaluasi dalam Lokakarya Mini bulanan terhadap realisasi capaian bulanan dengan link validasi bulanan yang dibagikan di grup.

3.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Penerapan SPM urusan pekerjaan umum pada tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar urusan pekerjaan umum pada Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

3.3.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Tareget SPM urusan pekerjaan umum tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10. Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	640	2025	Dinas PUPR
1.	Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari melalui jaringan perpipaan	640	1 Tahun	
2.	Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	-	-	-	
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	340	2025	Dinas PUPR
1.	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	Jumlah Warga Negara yang memperoleh akses sanitasi yang layak	340	1 Tahun	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
2.	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	-	-	-	
3.	Pelayanan Penyediaan prasarandan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima: masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	-	-	-	

3.3.3. Anggaran

Alokasi anggaran SPM urusan pekerjaan umum tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersumber dari APBD dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11. Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan untuk Pemenuhan SPM	Pagu Dana (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan + penunjang.	1.553.000.000	102.352.986
		Pemasangan Sambungan Baru PDAM	208.000.000	208.000.000
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (Termasuk Penunjang dan Pengadaan Tanah untuk IPLT)	906.000.000	600.000.000
		Intervensi Kualitas Kesehatan Lingkungan	300.000.000	300.000.000
Jumlah			2.967.000.000	1.210.352.986

Alokasi anggaran SPM urusan pekerjaan umum tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersumber dari APBD dan Non APBD yaitu dari PDAM untuk pemasangan Sambungan Rumah (SR) untuk pelanggan PDAM.

3.3.4. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada urusan pekerjaan umum Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12. Personil Pendukung SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Personil yang terlibat	Jumlah Personil (org)
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1. Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	1. Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5

3.3.5. Hasil Capaian

Hasil capaian SPM urusan pekerjaan umum tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.13. Hasil Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Hrus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	640	640	0	100
	1. Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari melalui jaringan perpipaan	640	640	0	100
	2. Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	-	-	-	-	-
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	340	340	0	100
	1. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25	Jumlah Warga Negara yang memperoleh akses sanitasi yang layak	340	340	0	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Hrus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
	jiwa/ha					
2.	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besardari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	-	-	-		
3.	Pelayanan Penyediaan prasarandan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima: masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	-	-	-		

3.3.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada urusan pekerjaan umum dan langkah-langkah penyelesaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.14. Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	Masih rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah baik dari APBN, APBDP dan APBD.	<p>a. Peningkatan alokasi anggaran dari APBD dan APBN untuk mendukung program AMPL di Kabupaten Lima Puluh Kota.</p> <p>b. Anggaran AMPL alokasi APBD difokuskan ke perdesaan dan alokasi APBN/ APBD Prov. Untuk SPAM IKK (Ibu Kota Kecamatan).</p> <p>c. Pemanfaatan Alokasi Dana</p>

			Desa / Nagari untuk kebutuhan Air Minum Perdesaan.
		Tidak terlaksananya kegiatan Pembangunan SPAM Nagari Sungai Kamuyang pada tahun 2025, karena anggaran untuk kegiatan tersebut tersedia pada saat APBDP tahun 2025, sehingga kegiatan yang dapat dilaksanakan hanya perencanaannya saja. sedangkan dalam time schedule perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan Adalah 90 Hari Kalender, sehingga pembangunan Jaringan Perpipaan belum dapat direalisasikan.	Menyediakan kembali anggaran untuk melaksanakan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Nagari Sungai Kamuyang di tahun 2026.
		Isu air minum belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran.	Menyusun Rencana Aksi Daerah terkait Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
		Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi.	Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi AMPL di perkotaan.
		Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat.	Membutuhkan kerjasama dengan masyarakat terkait sumber air baru untuk dapat memenuhi kebutuhan air minum.
		Masih kurangnya Idle Capacity sesuai kebutuhan layanan Air Minum di Kabupaten Lima Puluh Kota, atau masih diperlukannya sumber air baru.	Membantu percepatan Pembangunan SPAM Regional yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi (BMCKTR) untuk Regional Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh.
		Belum adanya data kondisi eksisting data BNBA (By Name By Address) per Nagari masyarakat terlayani SPAM sebagai data dasar.	Menyediakan dana untuk melakukan pendataan kondisi Eksisting data BNBA (By Name By Address) per Nagari masyarakat terlayani SPAM bersama pihak ketiga.
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.	Masih rendahnya alokasi anggaran baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan Air Limbah Domestik.	a. Meningkatkan Alokasi APBD dan APBN untuk program pengolahan air limbah domestik serta mensinkronkannya dengan kegiatan antar SKPD terkait. b. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa / Nagari untuk pengolahan limbah domestik dan pemeliharaan rutinnya.
		Pengelolaan air limbah belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan	Menyusun Rencana Aksi Daerah terkait Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).

		kebijakan anggaran.	
		Masih rendahnya sistem pengolahan limbah cair domestik yang berbentuk cairan yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga seperti Air sabun mandi, deterjen cuci, minyak dsb, dan juga industri/industri kecil lainnya.	Meningkatkan kerjasama gotong-royong antar warga dalam rangka menjaga kebersihan sehingga terhindar dari pencemaran limbah tersebut.
		Masih rendahnya SDM terkait dengan pengolahan limbah cair domestik tersebut.	Menyediakan anggaran Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).
		Belum tersedianya anggaran pengadaan lahan untuk IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) sebagai tempat pembuangan akhir limbah.	Menyediakan anggaran untuk pengadaan lahan dalam rencana pembangunan IPLT.
		Belum adanya data kondisi eksisting data BNBA (By Name By Address) per Nagari masyarakat terlayani SPAM sebagai data dasar.	Menyediakan dana untuk melakukan pendataan kondisi Eksisting data BNBA (By Name By Address) per Nagari masyarakat terlayani SPALD bersama pihak ketiga.

3.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat pada tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman.

3.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pasal 10 ayat (2) bahwa Jenis Pelayanan Dasar yang mencakup SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota;
2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Sesuai dengan Permendagri No 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan K/L terkait Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal masing-masing urusan, target, capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan

mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM adalah 100% (seratus persen). didalam target mencantumkan bagaimana daerah menentukan *baseline* data terkait warga negara yang harus dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Bidang SPM pada masing-masing urusan. Di dalam capaian SPM Pemerintah Daerah wajib mencantumkan jumlah warga negara yang harus dilayani. Data disajikan dalam bentuk tabel dan diberi uraian yang menggambarkan prosetahapan pengumpulan data.

Target SPM urusan perumahan rakyat tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.15. Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)
I	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi korban Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni		
	1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana		-	-
	2. Pembagunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana		2	1 tahun
	3. Bantuan Akses Rumah Sewa layak Huni Bagi Korban bencana		-	-
II	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni		
	1 Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan /atau Bangunan		-	-
	2 Subsidi Uang Sewa		-	-
	3 Penyediaan Rumah Layak Huni		-	-

3.4.3. Anggaran

Pada awal tahun anggaran 2025 telah dialokasi anggaran sebesar Rp185.690.700 (Seratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan SPM urusan perumahan rakyat yang tertuang dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun 2025 pada dua sub kegiatan yaitu Pembangunan Rumah

Layak Huni bagi Korban Bencana sebesar Rp185.690.700 (Seratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.16. Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Program: Pengembangan Perumahan		
		Kegiatan: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Realokasi Program Kabupaten/Kota	185.690.700	158.101.192
		Sub Kegiatan: Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	185.690.700	158.101.192
		Sub Kegiatan: Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0	0
		Jumlah	185.690.700	158.690.700

3.4.4. Dukungan Personil

Secara kedinasan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman penyelenggaraan SPM urusan perumahan rakyat terletak pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dimana jumlah personil yang tersedia adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17. Dukungan Personil Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Uraian Personil	Jumlah Personil
1	Kepala Bidang (setingkat Eselon III-b)	1 Orang
2	Sub Koordinator (setingkat eselon IV-a)	2 Orang
3	Staf Jabatan Pengelolaan Perumahan dan Pemukiman (PNS)	1 Orang
4	Staf Jabatan Fungsional Terampil Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (PPPK)	4 Orang
5	Non PNS (Tenaga Harian Lepas)	3 Orang

3.4.5. Hasil Capaian

Hasil capaian SPM urusan perumahan rakyat tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.18. Hasil Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
I	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	Jumlah Rumah Korban Bencana yang				

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
	Layak Huni Bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni				
1.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana		-	-	-	-
2.	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana		2	2	-	100
3.	Bantuan Akses Rumah Sewa layak Huni Bagi Korban bencana		-	-	-	-
II	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintahan Daerah Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni				
1	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan /atau Bangunan		-	-	-	-
2	Subsidi Uang Sewa		-	-	-	-
3	Penyediaan Rumah Layak Huni		-	-	-	-

Pada Tahun 2025 Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat adalah Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dengan Target 2 (dua) Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan teresalisasi 2 (dua) Rumah Layak Huni dengan persentase 100% (seratus persen), yang dialokasikan bagi masyarakat yang terdampak korban Bencana Alam yang terjadi pada tahun sebelumnya yang belum tertangani yaitu dampak dari bencana gempa bumi Pasaman Barat pada Tahun 2022, yang ditetapkan dengan SK Bencana oleh Bupati Lima Puluh Kota dengan Surat Keputusan Nomor: 368/71/BUP-LK/III/2022.

Selain melaksanakan kegiatan fisik berupa pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana, sub kegiatan ini juga diarahkan untuk melaksanakan penunjang kegiatan SPM dalam bentuk kegiatan pendataan yaitu

Identifikasi Masyarakat yang Bermukim di Daerah Rawan Bencana dan Output kegiatan pendataan ini adalah Dokumen Pendataan Identifikasi Masyarakat yang Bermukim di Daerah Rawan Bencana, dimana Dokumen ini dapat dijadikan sebagai acuan perencanaan kegiatan SPM Bidang Perumahan Rakyat.

3.4.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota baik secara teknis maupun secara Anggaran, tahapan kegiatan dapat dilaksanakan secara baik dan tuntas.

Upaya untuk keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat tidak terlepas dari suatu komitmen yang tegas dari semua *stake holder*, bahwa SPM adalah urusan wajib sebagai salah satu barometer/tolak ukur keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara termasuk dalam Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Layak Huni bagi Masyarakat korban Bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

3.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

3.5.1.1. Satuan Polisi Pamong Praja

Jenis pelayanan dasar SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

3.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.19. Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	SKPD Penanggung Jawab
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah yang harus dilayani	45 Jiwa	Satpol PP
		Standar sarana dan prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa: a. gedung kantor, b. kendaraan unit operasional, c. perlengkapan operasional)	2 (unit)	Satpol PP
		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakkan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patrol)	1 dokumen	Satpol PP
		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personal SDM)	20 orang	Satpol PP
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkara (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1 Dokumen	Satpol PP
		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	-	Satpol PP
		Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakkan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	-	Satpol PP
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	36.080 jiwa	BPBD
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan & kesiapsiagaan terhadap bencana	1.353 jiwa	BPBD
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	36.080 jiwa	BPBD

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	SKPD Penanggung Jawab
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran		Dinas Pemadam Kebakaran
		Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	365 kasus	Dinas Pemadam Kebakaran
		Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	28 kali	Dinas Pemadam Kebakaran

3.5.3. Anggaran

Dalam rangka pencapaian SPM urusan Trantibumlinmas tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka dialokasikan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.20. Alokasi Anggaran SPM Urusan Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP		
		Program: Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
		Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan: Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	21.680.000	19.257.208
		Sub Kegiatan: Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	3.935.000	3.908.192
		Sub Kegiatan: Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	27.452.258	23.605.000
		Sub Kegiatan: Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	106.625.400	106.625.000
		Sub Kegiatan: Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.	28.902.800	28.900.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	13.985.100	11.675.400
		Sub Kegiatan: Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.000.000	15.000.000
		Kegiatan: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota		
		Sub Kegiatan: Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19.831.300	16.640.000
		Sub Kegiatan: Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	37.071.300	25.060.000
		Sub Kegiatan: Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000	4.390.000
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD		
		Program: Penanggulangan Bencana	350.000.000	341.591.400
		Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
		Sub Kegiatan: Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	4.840.000	4.785.000
		Sub Kegiatan: Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	222.764.900	202.267.534
		Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota	300.000.000	248.151.299
		Sub Kegiatan: Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	870.044.824	841.389.433
		Kegiatan: Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana		
		Sub Kegiatan: Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	14.395.000	13.450.000
		Kegiatan: Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
		Sub Kegiatan: Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	19.065.000	19.030.000
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Dinas Pemadam Kebakaran		
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.614.783.925	2.575.411.291

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kebakaran	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	834.626.058	833,761.983
		Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	274.173.994	274.100.000
		Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1.500.000	1.460.000
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Kota/Kab	500.000	445.000
		Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	521.502.864	521.144.483
		Sub Kegiatan pembinaan aparatur pemadam kebakaran	36.949.200	36.612.500
		Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	28.814.900	28.265.000
		Sub Kegiatan Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	28.814.900	28.265.000
		Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	4.700.000	4.685.000
		Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	4.700.000	4.685.000
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.744.917.967	1.707.154.308
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	1.728.472.467	1.690.754.308
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Kebakaran	16.445.500	16.400.000
		Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	1.725.000	1.545.000
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Pada Peristiwa Yang Menimpa, Membahayakan, Dan/Atau Mengancam Keselamatan Manusia	1.725.000	1.545.000

3.5.4. Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan trantibumlinmas tahun 2025 di Kab. Lima Puluh Kota sebagai berikut:

Tabel 3.21. Dukungan Personil pada Satpol PP dalam Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No	Uraian Personil	Jumlah (Orang)
1	Kepala Satuan	1
2	Kepala Sekretariat	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Seksi	11
5	Jabatan Fungsional	24
6	Staf	14
7	PPPK	20
8	PPPK Paruh Waktu	53
Jumlah		128

Tabel 3.22. Dukungan Personil BPBD dalam Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No	Uraian Personil	Jumlah (Orang)
1	ASN	37
2	PPPK	31
3	THL	24
Jumlah		92

Tabel 3.23. Dukungan Personil Dinas Pemadam Kabakaran dalam Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No	Uraian Personil	Jumlah (Orang)
1	Pejabat Struktural	15
2	Staf Fungsional Umum PNS	69
3	Staf THL/ PTT/Non PNS	72
Jumlah		165

3.5.5. Hasil Capaian

Hasil capaian SPM urusan trantibumlinmas tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.24. Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Trantibumlinmas

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah yang harus dilayani	45 jiwa	45 jiwa	0	100
		Standar sarana dan prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa: a. gedung kantor, b. kendaraan unit operasional, c. perlengkapan operasional	2 (unit)	2 (unit)	0	100
		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakkan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patrol)	1 dokumen	1 dokumen	0	100
		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personal SDM)	20 orang	20 orang	0	100
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkara (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1 dokumen	1 dokumen	0	100
		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	-	-	-	-
		Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakkan Perda dan	-	-	-	-

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
		Perkade dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat				
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	36.080	36.080	0	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.353	1.353	0	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	36..080	36.080	0	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran				
		Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	365 kasus	365 kasusa	0	100
		Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	28 kali	16 Kali	0	100

3.5.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pencapaian SPM urusan trantibumlinmas tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

Tabel 3.25. Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No	Kendala	Permasalahan	Solusi
Satpol PP			
1	Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Trantibumlinmas urusan	1. Standar Prosedur Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja yang masih kurang.	Untuk meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota perlu

No	Kendala	Permasalahan	Solusi
	<p>Ketenteraman dan Ketertiban umum adalah mengenai data dan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana Trantibum. Data yang dibutuhkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 adalah data perkiraan rekapitulasi jumlah warga negara yang berada dalam radius 0 – 50 meter dilokasi penegakan Perda dan Perkada sesuai dengan identitas personal yaitu data by name, Adress serta NIK dan KK. Hal ini menjadi kendala karena data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tidak bisa diperoleh, menurut aturan dari Dinas Dukcapil harus memiliki MoU dengan Satuan Polisi Pamong Praja.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani pelayanan dasar dalam penyusunan target SPM Satuan Polisi Pamong Praja. 3. Dukungan anggaran yang masih belum optimal terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. 4. Identifikasi warga yang berpotensi terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada. 	<p>diberikan dukungan anggaran yang memadai sehingga, sarana dan prasarana Satpol PP yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan tersedia secara representatif.</p> <p>Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum perlu diberikan kegiatan pendataan pemetaan terhadap potensi pelanggaran Perda dan Perkada sehingga data dan identifikasi pelanggaran Perda dan Perkada sudah ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dan upaya penurunan dan dampak resiko penegakkan Perda dan Perkada dapat ditingkatkan.</p>
BPBD			
1		<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya data berupa daftar warga negara yang berada dikawasan rawan bencana, yang tersedia saat ini adalah jumlah warga yang berada pada lokasi rawan bencana 2. Belum terpenuhinya capaian SPM bencana berdasarkan target SPM yang harus di capai 100%, hal ini disebabkan oleh dokumen KRB BPBD Lima Puluh Kota belum dapat di Perbub kan karena dokumen tersebut selesai di Bulan Desember 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya peningkatan kerjasama dengan Kemendagri melalui Dinas Dukcapil Kab. Lima Puluh Kota untuk dapat mengakses data kependudukan berdasarkan alamat/ nagari/ jorong, karena kerjasama yang telah dilakukan saat ini baru sampai pada akses untuk melihat data penduduk berdasarkan NIK yang sudah ada. 2. Perlunya peningkatan kompetensi Aparatur yang ada melalui berbagai pendidikan dan latihan teknis kebencanaan serta peningkatan kerjasama antar daerah dan bantuan dukungan pemerintah pusat terkait pengalokasian anggaran SPM di daerah

No	Kendala	Permasalahan	Solusi
Pemadam Kebakaran (DAMKAR)			
1		<p>1. Permasalahan Yang Timbul Dalam Tahap Pengumpulan data Yaitu Kurang nya Tenaga Ahli Dalam Analisis dan Verifikasi Penghitungan Kerugian Akibat Kebakaran maupun non Kebakaran.</p> <p>2. Permasalahan Dalam Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Karena Luas Daerah dan Geografis yang terdiri dari perbukitan Kabupaten Lima Puluh Kota Terdiri Dari 13 Kecamatan, Sedangkan Dinas Pemadam Kebakaran Baru Mempunyai 8 Posko di 7 Kecamatan Yang Ada di Kabupaten Lima puluh Kota, Untuk Pelayanan di 6 kecamatan Lainnya yang Masih Belum Maksimal di karenakan belum tersedianya sarana dan prasarana di 6 kecamatan tersebut</p> <p>3. Permasalahan dalam penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran karena belum tersedianya Rencana Sistim Pemadam Kebakaran (RISPK) sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.</p> <p>4. Permasalahan dalam dalam pelaksanaan tugas pelayanana dasar penyelamatan dan evakuasi kebakaran .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jarak tempuh • Armada mobil damkar • Infrastruktur Jalan • Kominukasi • Koordinasi 	<p>1. Perlu nya Diklat untuk Tenaga Ahli Analisis dan Verifikasi Untuk mendapatkan Data yang Akurat dalam Penghitungan Kerugian Kebakaran Maupun Non Kebakaran</p> <p>2. Perlunya penambahan posko-posko pemadam kebakaran dan sarana prasarana pelayanan di 6 kecamatan.</p> <p>3. Perlunya penganggaran untuk pembuatan rencana induk sistim pemadam kebakaran (RISPK).</p> <ul style="list-style-type: none"> • perlunya penambahan posko pembantu sarana dan prasarana penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran • perlunya penambahan armada damkar disetiap kecamatan, sekurangnya satu armada terdapat satu kecamatan • Perlunya peningkatan kualitas jalan (mutu, luas, lebar jalan) • perlunya penyediaan Repiter tersendiri untuk kemudahan dalam berkomunikasi baik antar anggota maupun menerima kejadian kebakaran

3.6. URUSAN SOSIAL

Penerapan SPM urusan sosial pada tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

3.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar urusan sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota, Jenis pelayanan dasar pada SPM urusan sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

3.6.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 3.26. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %

Target pencapaian SPM urusan sosial tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini ;

Tabel 3.27. Target SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	23 Orang	2025	Dinas Sosial
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	23 Orang	2025	Dinas Sosial
	2.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /Layanan reaksi cepat	Jumlah Penyediaan Layanan Kedaruratan /Layanan reaksi cepat	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	4.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	5.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Penyediaan Alat bantu bagi Penyandang Disabilitas	10 Orang	2025	Dinas Sosial
	6.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	
	7.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	3 Orang	2025	Dinas Sosial
	8.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial	14 Orang	2025	Dinas Sosial
	9.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Jumlah Fasilitasi pembuatan Nomor induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	-	-	
	10.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	6 Orang	2025	Dinas Sosial
	11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
		keluarga/ Bukti keberadaan keluarga				
	12.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga	6 Orang	2025	Dinas Sosial
	13.	Layanan Rujukan	Jumlah layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya	6 Orang	2025	Dinas Sosial
II	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak di Luar Panti Sosial		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	24 Orang	2025	Dinas Sosial
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	24 Orang	2025	Dinas Sosial
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	Jumlah Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	3.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Makanan bagi Anak	6 Orang	2025	Dinas Sosial
	4.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	-	-	-
	7.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Anak Terlantar	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Anak Terlantar	9 Orang	2025	Dinas Sosial
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ bukti kepemilikan NIK	Jumlah Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ bukti kepemilikan NIK -			
	9.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan	Jumlah Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	15 Orang	2025	Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
		Dasar				
	10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga			
	11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Advokasi dan Pendampingan anak berhadapan dengan hukum	15 Orang	2025	Dinas Sosial
	12.	Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan	15 Orang	2025	Dinas Sosial
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	640 Orang	2025	Dinas Sosial
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumah Layanan Data dan Pengaduan	640 Orang	2025	Dinas Sosial
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	Jumah Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	-	-	-
	3.	Penyediaan Permakanan	Jumlah bantuan permakanan bagi lansia terlantar dan lansia tidak potensial.	595 Orang	2025	Dinas Sosial
	4.	Penyediaan Sandang	Jumah Penyediaan Sandang	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	5.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah pemberian Alat Bantu Lansia	29 Orang	2025	Dinas Sosial
	6.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumah Penyediaan Perbekalan Kesehatan	29 Orang	2025	Dinas Sosial
	7.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	Jumah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	12 Orang	2025	Dinas Sosial
	8.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar	Jumah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar	12 Orang	2025	Dinas Sosial
	9.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk/ Bukti kepemilikan NIK	Jumah Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk/ Bukti kepemilikan NIK	-	-	

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
	10.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	595 Orang	2025	Dinas Sosial
	11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga	-	-	-
	12.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	13.	Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan	2 Orang	2025	Dinas Sosial
IV	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti	6 orang	2025	Dinas Sosial
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	6	2025	Dinas Sosial
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	Jumlah Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	-	-	-
	3.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Bantuan Permakanan	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	4.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	2 orang	2025	Dinas Sosial
	7.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Gelandangan dan Pengemis	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,	Jumlah Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta	-	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
		Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan			
	9.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusurankeluarga	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	12.	Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan	2 Orang	2025	Dinas Sosial
V	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	297 Orang	2025	Dinas Sosial
	1.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Makanan bagi korban bencana	204 Orang	2025	Dinas Sosial
	2.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang bagi korban bencana	41 Orang	2025	Dinas Sosial
	3.	Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi bagi korban bencana	-	-	-
	4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Pelayanan Dukungan Psikososial	50 Orang	2025	Dinas Sosial

3.6.3. Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja operasi dan belanja modal yang ditetapkan dalam APBD jumlah anggaran Dinas Sosial Tahun 2025 adalah:

- a. Alokasi anggaran DPA awal sebesar Rp7.195.335.832 dengan rincian:
 - Belanja Operasi Rp7.108.257.592
 - Belanja Modal Rp87.078.240
- b. Alokasi anggaran perubahan sebesar Rp6.958.325.001 dengan rincian:
 - Belanja Operasi Rp6.834.433.081
 - Belanja Modal Rp123.891.920

Tabel 3.28. Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Program: Rehabilitasi Sosial		
		Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial		
		Sub Kegiatan: Penyediaan Makanan	Rp11.422.067	Rp11.221.200
		Sub Kegiatan: Penyediaan Sandang	Rp10.570.000	Rp10.300.516
		Sub Kegiatan: Penyediaan Alat Bantu	Rp50.201.000	Rp44.606.988
		Sub Kegiatan: Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp71.000.000	Rp68.075.443
		Sub Kegiatan: Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp553.692.432	Rp544.236.602
		Sub Kegiatan: Pemberian Layanan Rujukan	Rp7.269.000	Rp7.052.000
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten	Program: Penanganan Bencana		
		Kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan: Penyediaan Makanan	Rp221.427.221	Rp213.731.769
		Sub Kegiatan: Penyediaan Sandang	Rp75.289.700	Rp73.870.259
		Sub Kegiatan: Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Rp13.500.000	Rp4.825.000
		Sub Kegiatan: Dukungan Spikosial	Rp1.014.371.420	Rp977.919.777

3.6.4. Dukungan Personil

Jumlah pegawai/ sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 adalah sebanyak 55 orang, terdiri 36 orang ASN dan 19 PPPK Paruh Waktu. Pejabat struktural sebanyak 6 Orang, Fungsional Ahli Muda sebanyak 6 orang, Pelaksanan 11 Orang, PPPK 1 Orang dan PPPK Paruh Waktu 19 Orang.

Tabel 3.29. Jumlah Pegawai Dinas Sosial tahun 2025 menurut golongan

Golongan (Pegawai Negeri/Kontrak)	Jumlah
IV	6 orang
III	27 orang
II	2 orang
IX	1 Orang
PPPK Paruh Waktu	19 orang
Jumlah	55 orang

Tabel 3.30. Jumlah Pegawai Dinas Sosial tahun 2025 menurut tingkat pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S2	4 orang
S1	28 orang
D IV	2 orang
D III	5 orang
SLTA	15 orang
SLTP	1 Orang
Jumlah	55 orang

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- Jumlah Pegawai Dinas Sosial sebanyak 36 Orang ASN dan 19 PPPTK Paruh Waktu.
- Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 80 Orang
- Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 13 Orang
- Pendamping Rehabilitasi Sosial 4 orang.
- Tagana 27 orang.

3.6.5. Hasil Capaian

Hasil pencapaian SPM urusan social tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.31. Hasil Capaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	23 Orang	23 Orang	0	100 %
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	23 Orang	23 Orang	0	100%
	2.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	2 Orang	2 Orang	0	100%
	3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /Layanan reaksi cepat	Jumlah Penyediaan Layanan Kedaruratan /Layanan reaksi cepat	-	-	-	-
	4.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	2 Orang	2 Orang	0	100%
	5.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Penyediaan Alat bantu bagi Penyandang Disabilitas	10 Orang	10 Orang	0	100%
	6.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	-
	7.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	3 Orang	3 Orang	0	100%
	8.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial	14 Orang	14 Orang	0	100%
	9.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Jumlah Fasilitas pembuatan Nomor indukKependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	-	-	-	-
	10.	Akses ke	Jumlah Akses ke	6 Orang	6 Orang	0	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
		Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar				
	11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-	-
	12.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga	6 Orang	6 Orang	0	100%
	13.	Layanan Rujukan	Jumlah layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya	6 Orang	6 Orang	0	100%
II	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak di Luar Panti Sosial		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	24 Orang	24 Orang	0	100 %
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	24 Orang	24 Orang	0	100%
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	Jumlah Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	-	-	-	-
	3.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Makanan bagi Anak	6 Orang	6 Orang	0	100%
	4.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	2 Orang	2 Orang	0	100%
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	-
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	-	-	-	-
	7.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Anak Terlantar	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Anak Terlantar	9 Orang	9 Orang	0	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ bukti kepemilikan NIK	Jumlah Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ bukti kepemilikan NIK	-	-	-	-
	9.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	15 Orang	15 Orang	0	100%
	10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-	-
	11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Advokasi dan Pendampingan anak berhadapan dengan hukum	15 Orang	15 Orang	0	100%
	12.	Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan	15 Orang	15 Orang	0	100%
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	640 Orang	640 Orang	0 Orang	100 %
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumah Layanan Data dan Pengaduan	640 Orang	640 Orang	0	100%
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	Jumah Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	-	-	-	-
	3.	Penyediaan Permakanan	Jumlah bantuan permakanan bagi lansia terlantar dan lansia tidak potensial.	595 Orang	595 Orang	0	100%
	4.	Penyediaan Sandang	Jumah Penyediaan Sandang	2 Orang	2 Orang	0	100%
	5.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah pemberian Alat Bantu Lansia	29 Orang	29 Orang	0	100%
	6.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumah Penyediaan Perbekalan Kesehatan	29 Orang	29 Orang	0	100%
	7.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	Jumah Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	12 Orang	12 Orang	0	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
	8.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar	Jumah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar	12 Orang	12 Orang	0	100%
	9.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk/ Bukti kepemilikan NIK	Jumah Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk/ Bukti kepemilikan NIK	-	-	-	-
	10.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumah Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	595 Orang	595 Orang	0	100%
	11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga	Jumah Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga	-	-	-	-
	12.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2 Orang	2 Orang	0	100%
	13.	Layanan Rujukan	Jumah Layanan Rujukan	2 Orang	2 Orang	0	100%
IV	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial di Luar Panti	6 Orang	6 Orang	0 orang	100%
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	6 Orang	6 Orang	0	100%
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	Jumlah Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	-	-	-	-
	3.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Bantuan Permakanan	2 Orang	2 Orang	0	100%
	4.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	2 Orang	2 Orang	0	100%
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Perbekalan	-	-	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
			Kesehatan				
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	2 orang	2 orang	0	100%
	7.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Gelandangan dan Pengemis	2 Orang	2 Orang	0	100%
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	Jumlah Fasilitas Pembuatan Nomor IndukKependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	-	-	-	-
	9.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Akses ke Layanan Pendidikan &Kesehatan Dasar	2 Orang	2 Orang	0	100%
	10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	2 Orang	2 Orang	0	100%
	11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan ReunifikasiKeluarga	2 Orang	2 Orang	0	100%
	12.	Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan	2 Orang	2 Orang	0	100%
V	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kota		Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah tanggap darurat Bencana bagi korban bencana Kabupaten/ Kota	297 Jiwa	297 Jiwa	0 Jiwa	100 %

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
1.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Makanan bagi korban bencana	204 Orang	204 Orang	0	100%	
2.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang bagi korban bencana	41 Orang	41 Orang	0	100%	
3.	Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi bagi korban bencana	-	-	-	-	
4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	2 Orang	2 Orang	0	100%	
5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Pelayanan Dukungan Psikososial	50 Orang	50 Orang	0	100%	

3.6.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pencapaian SPM urusan sosial tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

Tabel 3.32. Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Sosial

No	Permasalahan	Solusi
1	Minimnya anggaran untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS)	Mengusulkan/memaksimalkan anggaran untuk di tambahkan pada program dan kegiatan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2	Kurangnya sumber daya aparatur (SDM) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan PPKS.	Mengusulkan tenaga tambahan yang mempunyai keahlian sosial.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan OPD utama pelaksana urusan pendidikan. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta alokasi dana pada APBD 2025 penerapan SPM urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	23.906.717.600	22.325.959.789
		Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	-	-
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	109.650.000	102.920.879
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	130.809.000	124.803.339
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	55.432.000	52.778.939
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	9.890.000	9.785.000
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	21.724.500	21.102.705
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	10.000.000	9.765.000
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	601.800.000	381.576.515
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	121.228.500	116.184.934
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.588.465.600	1.567.020.140
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	465.000.000	464.133.311
2.	Pendidikan Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.570.168.000	3.558.607.400
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	336.504.000	243.689.949
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	221.706.600	180.003.403

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	758.585.200	721.694.910
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	393.947.000	355.840.200
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	54.900.000	53.485.000
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	10.000.000	9.836.000
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	263.540.000	213.930.800
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	10.000.000	8.178.000
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	54.990.000	47.356.000
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	98.400.000	61.982.400
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.331.643.400	2.208.632.995
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.675.455.000	5.295.247.741
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	12.355.000	9.325.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.068.441.000	1.991.704.817
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	813.487.500	809.941.948
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.429.903.500	1.386.440.122
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	868.923.800	866.886.360
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	60.000.000	43.145.000
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	453.316.900	347.163.813
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25.237.000	9.900.000
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	232.723.000	222.259.480
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	200.375.400	128.878.000
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	35.981.500	21.342.000
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	10.000.000	9.916.000
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	179.921.000	118.468.932
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	36.000.000	26.615.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		pengecahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		
3.	Pendidikan Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	15.300.000	15.300.000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	165.363.200	115.233.757
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	41.850.000	40.369.000
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	10.000.000	9.330.000
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	112.200.000	107.201.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	241.500.000	237.984.000
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	29.782.000	18.097.000
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	29.782.000	18.097.000
		Jumlah	23.936.499.600	22.344.056.789

4.2. URUSAN KESEHATAN

Dinas Kesehatan merupakan OPD Utama Pelaksana Urusan Kesehatan. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta alokasi dana pada APBD 2023 penerapan SPM bidang urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		DINAS KESEHATAN		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,264,431,000	1.184.771.850
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	79,574,000	73.267.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	30,150,000	12.335.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	112,175,900	81.215.300
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1,075,841,000	924.100.730

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
	Dasar			
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	174.802.000	123.913.200
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	60.260.000	50.360.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	36,275,000	35.900.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	122,658,000	120.653.818
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	280,265,000	231.505.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis (TB)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	485,420,000	412.406.000
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	104,971,250	84.034.000
Jumlah			3.826.823.150	3.334.461.898

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan OPD utama pelaksana urusan pekerjaan umum. Rincian program, kegiatan, sub kegiatan serta alokasi dana pada APBD 2025 penerapan SPM urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan untuk Pemenuhan SPM	Pagu Dana (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan + penunjang.	1.553.000.000	102.352.986
		Pemasangan Sambungan Baru PDAM	208.000.000	208.000.000
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Pembangunan/Penyediaan Sistem	906.000.000	600.000.000

	domestik	Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (Termasuk Penunjang dan Pengadaan Tanah untuk IPLT)		
		Intervensi Kualitas Kesehatan Lingkungan	300.000.000	300.000.000
Jumlah			2.967.000.000	1.210.352.986

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman merupakan OPD utama pelaksana urusan perumahan rakyat. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta alokasi dana pada APBD 2025 penerapan SPM urusan perumahan rakyat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Serta Alokasi Anggaran SPM
Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN		
		Program Pengembangan Perumahan		
		Kegiatan: Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	185.690.700	158.101.192
		Sub Kegiatan: Pembangunan Rumah Korban Bencana	185.690.700	158.101.192
		Sub Kegiatan: Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0	0
Jumlah			185.690.700	158.101.192

4.5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran merupakan OPD utama/pendukung pelaksana urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Rincian program, kegiatan, sub kegiatan serta alokasi dana pada APBD 2025 penerapan SPM urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Alokasi Anggaran SPM
Urusan Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP		
		Program: Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
		Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan: Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	21.680.000	19.257.208
		Sub Kegiatan: Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	3.935.000	3.908.192
		Sub Kegiatan: Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	27.452.258	23.605.000
		Sub Kegiatan: Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	106.625.400	106.625.000
		Sub Kegiatan: Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.	28.902.800	28.900.000
		Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	13.985.100	11.675.400
				Sub Kegiatan: Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Kegiatan:Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota		
		Sub Kegiatan: Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19.831.300	16.640.000
		Sub Kegiatan: Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	37.071.300	25.060.000
		Sub Kegiatan: Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000	4.390.000
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD		
		Program: Penanggulangan Bencana	350.000.000	341.591.400
		Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
		Sub Kegiatan: Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	4.840.000	4.785.000
		Sub Kegiatan: Pengendalian Operasi	222.764.900	202.267.534

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	300.000.000	248.151.299
		Sub Kegiatan: Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	870.044.824	841.389.433
		Kegiatan: Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana		
		Sub Kegiatan: Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	14.395.000	13.450.000
		Kegiatan: Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
		Sub Kegiatan: Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	19.065.000	19.030.000
		Dinas Pemadam Kebakaran		
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.614.783.925	2.575.411.291
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	834.626.058	833.761.983
		Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	274.173.994	274.100.000
		Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1.500.000	1.460.000
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Kota/Kab	500.000	445.000
		Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	521.502.864	521.144.483
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Sub Kegiatan pembinaan aparatur pemadam kebakaran	36.949.200	36.612.500
		Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	28.814.900	28.265.000
		Sub Kegiatan Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	28.814.900	28.265.000
		Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	4.700.000	4.685.000
		Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	4.700.000	4.685.000
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.744.917.967	1.707.154.308
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	1.728.472.467	1.690.754.308
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Kebakaran	16.445.500	16.400.000
		Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	1.725.000	1.545.000
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Pada	1.725.000	1.545.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Peristriwa Yang Menimpa, Membahayakan, Dan/Atau Mengancam Keselamatan Manusia		

4.6. URUSAN SOSIAL

Dinas Sosial merupakan OPD utama pelaksana urusan sosial. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan dan alokasi dana pada APBD 2025 penerapan SPM urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Program: Rehabilitasi Sosial		
		Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial		
		Sub Kegiatan: Penyediaan Makanan	Rp. 11.422.067	Rp. 11.221.200
		Sub Kegiatan: Penyediaan Sandang	Rp. 10.570.000	Rp. 10.300.516
		Sub Kegiatan: Penyediaan Alat Bantu	Rp. 50.201.000	Rp. 44.606.988
		Sub Kegiatan: Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp.71.000.000	Rp. 68.075.443
		Sub Kegiatan: Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp. 553.692.432	Rp. 544.236.602
		Sub Kegiatan: Pemberian Layanan Rujukan	Rp. 7.269.000	Rp. 7.052.000
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten	Program: Penanganan Bencana		
		Kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan: Penyediaan Makanan	Rp. 221.427.221	Rp. 213.731.769
		Sub Kegiatan: Penyediaan Sandang	Rp. 75.289.700	Rp. 73.870.259
		Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Rp. 13.500.000	Rp. 4.825.000
		Sub Kegiatan Dukungan Spikososial	Rp. 1.014.371.420	Rp. 977.919.777

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sebagaimana amanat Undang-undang 23 Tahun 2014 dimana Pemerintah wajib menyelenggarakan urusan Wajib Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota telah menerjemahkannya dan menjadikannya prioritas pembangunan dalam RPJMD, Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2029.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal, hal ini termaktub dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Kementerian Teknis lainnya.

Selama Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerapkan SPM secara maksimal namun masih belum optimal, hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya dikarenakan keterbatasan anggaran pada program dan kegiatan yang mendukung penerapan SPM dan kekurangan personil yang memiliki kompetensi di bidangnya. Berikut capaian terhadap target SPM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 :

Tabel 5.1. Capaian Terhadap Target SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Hasil (%)
1	Pendidikan Dasar Usia dini	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	7.685	7.685	100
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	52.085	52.085	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	1.167	1.167	100

Tabel 5.2. Capaian Terhadap Target SPM Urusan Kesehatan

NO	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	TARGET	REALISASI	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan k4 difaskes pemerintah atau swasta	615	615	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar di faskes	612	612	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapat pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	573	573	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan balita sesuai standar	2694	2694	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	7883	7883	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	20978	20978	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Pengunjung Usia 60 Tahun Keatas Yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar Minimal 1 Kali Dalam Kurun Waktu Satu Tahun	2016	2016	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	3121	3121	100
9	Pelayanan kesehatan penderita DM	Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	418	418	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan ODGJ berat (psikotik)	Jumlah ODGJ berat (psikotik) diwilayah kerja kab yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun satu tahun	68	68	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TBC)	Jumlah orang yang mendapat pelayanan TBC sesuai standar dalam kurun satu tahun	1149	1149	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi hiv yang mendapat pemeriksaan hiv sesuai standar difasyankes dalam kurun waktu satu tahun	730	730	100

Tabel 5.3. Capaian Terhadap Target SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Hasil (%)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	640	640	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	340	340	100

Tabel 5.4. Capaian Terhadap Target SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Hasil (%)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	2	2	100
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	-	-	-

Tabel 5.5. Capaian Terhadap Target SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Hasil (%)	OPD
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah yang harus dilayani	45 jiwa	45 jiwa	100	Satpol PP
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	36.080 jiwa	36.080 jiwa	100	BPBD
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	1.353 jiwa	1.353 jiwa	100	BPBD
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	36.080 jiwa	36.080 jiwa	100	BPBD
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	365 kasus	365 kasus	100	Dinas Damkar

Tabel 5.6. Capaian Terhadap Target SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Hasil (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	23	23	100
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	24	24	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	640	640	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	6	6	100
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten	Jumlah Perlindungan dan Jaminan korban Sosial Pada Saat Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten	297	297	100

5.2 Saran

Untuk mencapai keberhasilan dalam pencapaian target SPM ini dibutuhkan dukungan penuh semua *Stake Holder* di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan dukungan dari semua pihak inilah nantinya diharapkan target-target tersebut bisa direalisasikan pada batas waktu yang telah ditetapkan secara nasional.

Sebagai bagian dari *continuous improvement*, SPM akan selalu dilakukan evaluasi oleh Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah pengampu SPM, unsur Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, dan perangkat daerah yang membidangi keuangan, untuk mengetahui hambatan-hambatan dan kekurangan-kekurangan yang harus segera diatasi dan dicari penyebabnya, untuk mencapai target yang ditentukan, yang bertujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikianlah Penyusunan Laporan Penerapan SPM Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami berharap laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan selanjutnya pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.